SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan

yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
   a. LRA;
   b. LPSAL;
   c. Neraca;
   d. LO;
   e. LAK;
   f. LPE; dan
   g. CaLK.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.672.891.835.275,00
b. Belanja	Rp	2.110.170.318.735,00
c. Transfer	Rp	733.585.177.063,00
Defisit	Rp	170.863.660.523,00
d. Pembiayaan :		
– Penerimaan	Rp	529.593.676.302,00
– Pengeluaran	Rp	39.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	490.293.676.302,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	319.430.015.779,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp21.353.093.078,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.651.538.742.197,00
2. Realisasi	Rp	2.672.891.835.275,00
Selisih (lebih)	Rp	21.353.093.078,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp292.328.045.185,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.402.498.363.920,00
2. Realisasi	Rp	2.110.170.318.735,00
Selisih (kurang)	Rp	(292.328.045.185,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp5.748.877.516,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp	739.334.054.579,00

2. Realisasi	Rp	733.585.177.063,00
Selisih (kurang)	Rp	(5.748.877.516,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp319.430.015.779,00 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran surplus/defisit		
Setelah perubahan	Rp	(490.293.676.302,00)
2. Realisasi	Rp	(170.863.660.523,00)
Selisih (kurang)	Rp	(319.430.015.779,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp	529.593.676.302,00
2. Realisasi	Rp	529.593.676.302,00
Selisih (lebih)	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp00,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp	39.300.000.000,00
2. Realisasi	Rp	39.300.000.000,00
Selisih	Rp	0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto		
Setelah perubahan	Rp	490.293.676.302,00
2. Realisasi	Rp	490.293.676.302,00
Selisih (lebih)	Rp	0,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	529.593.676.302,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	529.593.676.302,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan		

	Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	319.430.015.779,00
d.	Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih	Rp	319.430.015.779,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	3.450.983.954.998,21
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	14.045.774.843,00
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	3.436.938.180.155,21

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp	2.340.677.515.718,92
b.	Beban	Rp	2.426.888.360.975,11
	Surplus /Defisit sebelum Pos Luar		
c.	Biasa	Rp	(86.210.845.256,19)
d.	Kegiatan Non Operasional	Rp	(309.137.918,88)
e.	Pos Luar Biasa	Rp	(943.774.800,00)
Surplus/Defisit Laporan Operasional		Rp	(87.463.757.975,07)

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp	529.645.076.302,00
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	124.181.580.234,00
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(334.345.240.757,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(51.400.000,00)
f.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	Rp	319.430.015.779,00

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.524.401.938.130,28
b.	Surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	(87.463.757.975,07)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar		
	– Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
	– Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
	– Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	0,00
d.	Ekuitas Akhir	Rp	3.436.938.180.155,21

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
   Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II : LPSAL;

c. Lampiran III : LO;
d. Lampiran IV : LPE;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : LAK;
g. Lampiran VII : CaLK;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-191/2024)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

PETUNJUK HALAMAN

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
1	2	3	4
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023		
	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BUPATI		
	PETUNJUK HALAMAN		
A.	FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD		
	DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN APBD		
Lampiran I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TERDIRI ATAS:		
Lampiran I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN	1	11
	DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran I.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS	12	13
	PENDAPATAN ,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran I.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	14	127
	KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
	TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,	128	246
	ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2023	247	247
Lampiran III	LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023	248	248
Lampiran IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2023	249	249
Lampiran V	NERACA TAHUN ANGGARAN 2023	250	250
Lampiran VI	LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2023	251	252
Lampiran VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023	253	445
Lampiran VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	446	446
Lampiran IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2023	447	447
Lampiran X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	448	448
	TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	449	449
	TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP	450	451
	DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023	452	452
Lampiran XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	453	453
	TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023	454	456
Lampiran XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	457	457

PETUNJUK HALAMAN

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
1	2	3	4
Lampiran XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2023	458	458
Lampiran XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023	459	459
Lampiran XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN	460	460
	2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA		
Lampiran XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH		
	TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI ATAS :		
Lampiran XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN	461	461
	DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		
Lampiran XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK	462	462
	DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		
B.	FORMAT INFORMASI LAINNYA		
LAMPIRAN B.1	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN	463	465
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN		
	KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.2	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB	466	468
	YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	(*MANDATORY SPENDING*) TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.3	REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN	469	471
	MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.4	RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,	472	497
	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA,		
	DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.5	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK	498	498
	DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.6	REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	499	509
	DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.7	REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	510	512
	DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.8	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN	513	514
	PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.9	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA	515	520
	PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.10	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA	521	521
	(PBJ) MELALUI *E-PURCHASING* TAHUN ANGGARAN 2023		
LAMPIRAN B.11	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT	522	522
	PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2023		

Lampiran I.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
Nomor 10 Tahun 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	21.353.093.078,00	100,81
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	129.576.965.607,00	303.280.772.149,00	173.703.806.542,00	234,05
4.1.01	**PENDIDIKAN**	0,00	150.755.877.649,00	150.755.877.649,00	0
4.1.01.1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	150.755.877.649,00	150.755.877.649,00	0
4.1.02	**KESEHATAN**	127.452.980.607,00	149.805.057.234,00	22.352.076.627,00	117,54
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	127.452.980.607,00	149.805.057.234,00	22.352.076.627,00	117,54
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.511.500.000,00	1.877.861.345,00	366.361.345,00	124,24
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.511.500.000,00	1.877.861.345,00	366.361.345,00	124,24
4.1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	612.485.000,00	841.975.921,00	229.490.921,00	137,47
4.1.04.1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	612.485.000,00	841.975.921,00	229.490.921,00	137,47
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	13.487.492.071,00	15.188.331.620,00	1.700.839.549,00	112,61
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	342.960.000,00	766.969.398,00	424.009.398,00	223,63
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	342.960.000,00	766.969.398,00	424.009.398,00	223,63
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	2.914.292.000,00	2.960.249.500,00	45.957.500,00	101,58
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.914.292.000,00	2.960.249.500,00	45.957.500,00	101,58
4.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	1.074.400.000,00	1.208.721.500,00	134.321.500,00	112,50
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.074.400.000,00	1.208.721.500,00	134.321.500,00	112,50
4.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	6.921.294.864,00	7.797.185.944,00	875.891.080,00	112,66
4.2.17.2-17.3-30.0-00.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6.921.294.864,00	7.797.185.944,00	875.891.080,00	112,66
4.2.22	**KEBUDAYAAN**	2.234.545.207,00	2.455.205.278,00	220.660.071,00	109,87
4.2.22.2-22.2-19.3-26.01	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	2.234.545.207,00	2.455.205.278,00	220.660.071,00	109,87
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	210.956.000,00	230.686.500,00	19.730.500,00	109,35
4.3.27	**PERTANIAN**	210.956.000,00	230.686.500,00	19.730.500,00	109,35
4.3.27.3-27.2-09.0-00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	210.956.000,00	230.686.500,00	19.730.500,00	109,35
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	2.508.263.328.519,00	2.354.192.045.006,00	(154.071.283.513,00)	93,86
4.5.02	**KEUANGAN**	2.508.263.328.519,00	2.354.192.045.006,00	(154.071.283.513,00)	93,86
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.508.263.328.519,00	2.354.192.045.006,00	(154.071.283.513,00)	93,86
5	**BELANJA DAERAH**	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	(298.076.922.701,00)	90,51
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.730.399.689.951,00	1.528.920.932.609,00	(201.478.757.342,00)	88,36
5.1.01	**PENDIDIKAN**	913.821.251.086,00	825.248.384.791,00	(88.572.866.295,00)	90,31
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	**DINAS PENDIDIKAN**	913.821.251.086,00	825.248.384.791,00	(88.572.866.295,00)	90,31

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	866.397.059.198,00	779.975.522.751,00	(86.421.536.447,00)	90,03
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	671.229.324.491,00	596.437.244.398,00	(74.792.080.093,00)	88,86
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.316.034.707,00	136.277.292.689,00	(10.038.742.018,00)	93,14
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	48.851.700.000,00	47.260.985.664,00	(1.590.714.336,00)	96,74
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	47.424.191.888,00	45.272.862.040,00	(2.151.329.848,00)	95,46
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.072.929.802,00	20.183.575.856,00	(889.353.946,00)	95,78
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.201.884.500,00	14.364.078.599,00	(837.805.901,00)	94,49
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.149.377.586,00	10.725.207.585,00	(424.170.001,00)	96,20
5.1.02	**KESEHATAN**	464.394.309.613,00	396.379.378.155,00	(68.014.931.458,00)	85,35
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**DINAS KESEHATAN**	464.394.309.613,00	396.379.378.155,00	(68.014.931.458,00)	85,35
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	402.343.843.594,00	340.947.858.599,00	(61.395.984.995,00)	84,74
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	151.454.137.980,00	135.669.308.132,00	(15.784.829.848,00)	89,58
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.889.705.614,00	204.279.378.267,00	(45.610.327.347,00)	81,75
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	999.172.200,00	(827.800,00)	99,92
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	62.050.466.019,00	55.431.519.556,00	(6.618.946.463,00)	89,33
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.807.002.527,00	48.401.411.756,00	(6.405.590.771,00)	88,31
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.234.236.000,00	7.022.542.800,00	(211.693.200,00)	97,07
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.727.492,00	1.700.000,00	(27.492,00)	98,41
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	5.865.000,00	(1.635.000,00)	78,20
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	252.393.606.655,00	221.194.392.360,00	(31.199.214.295,00)	87,64
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	252.393.606.655,00	221.194.392.360,00	(31.199.214.295,00)	87,64
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	95.583.231.184,00	87.384.464.017,00	(8.198.767.167,00)	91,42
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	18.728.503.587,00	16.815.012.118,00	(1.913.491.469,00)	89,78
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.606.727.597,00	67.321.451.899,00	(6.285.275.698,00)	91,46
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.248.000.000,00	3.248.000.000,00	0,00	100,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	156.810.375.471,00	133.809.928.343,00	(23.000.447.128,00)	85,33
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.178.676.563,00	4.525.981.240,00	(652.695.323,00)	87,40
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.648.903.908,00	43.222.586.077,00	(17.426.317.831,00)	71,27
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.982.795.000,00	86.061.361.026,00	(4.921.433.974,00)	94,59
5.1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	32.572.634.186,00	27.856.831.096,00	(4.715.803.090,00)	85,52
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	32.572.634.186,00	27.856.831.096,00	(4.715.803.090,00)	85,52
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	23.286.575.336,00	19.354.949.473,00	(3.931.625.863,00)	83,12
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.264.025.706,00	3.520.142.230,00	(743.883.476,00)	82,55
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.894.549.630,00	6.678.807.243,00	(2.215.742.387,00)	75,09
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.128.000.000,00	9.156.000.000,00	(972.000.000,00)	90,40
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	9.286.058.850,00	8.501.881.623,00	(784.177.227,00)	91,56
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.301.428.850,00	1.122.681.770,00	(178.747.080,00)	86,27
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	969.765.400,00	(30.234.600,00)	96,98
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.410.400.000,00	1.388.107.083,00	(22.292.917,00)	98,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.230.000,00	12.140.000,00	(90.000,00)	99,26
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	28.506.136.806,00	24.225.553.567,00	(4.280.583.239,00)	84,98
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	19.133.605.936,00	16.552.071.410,00	(2.581.534.526,00)	86,51
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.177.689.496,00	14.656.973.160,00	(2.520.716.336,00)	85,33
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.086.806.702,00	4.028.673.561,00	(2.058.133.141,00)	66,19
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.090.882.794,00	10.628.299.599,00	(462.583.195,00)	95,83
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.955.916.440,00	1.895.098.250,00	(60.818.190,00)	96,89
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.747.916.440,00	1.701.557.250,00	(46.359.190,00)	97,35
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	193.541.000,00	(4.459.000,00)	97,75
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	9.372.530.870,00	7.673.482.157,00	(1.699.048.713,00)	81,87
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	9.092.032.921,00	7.458.357.157,00	(1.633.675.764,00)	82,03
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.782.438.559,00	2.771.375.135,00	(1.011.063.424,00)	73,27
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.509.444.362,00	3.974.332.022,00	(535.112.340,00)	88,13
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	800.150.000,00	712.650.000,00	(87.500.000,00)	89,06
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	280.497.949,00	215.125.000,00	(65.372.949,00)	76,69
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.497.949,00	215.125.000,00	(65.372.949,00)	76,69
5.1.06	**SOSIAL**	38.711.751.605,00	34.016.392.640,00	(4.695.358.965,00)	87,87
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	38.711.751.605,00	34.016.392.640,00	(4.695.358.965,00)	87,87
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.1	BELANJA OPERASI	37.261.057.105,00	32.658.656.890,00	(4.602.400.215,00)	87,65
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.1.01	Belanja Pegawai	5.404.100.418,00	4.214.134.323,00	(1.189.966.095,00)	77,98
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.025.156.687,00	26.882.222.567,00	(3.142.934.120,00)	89,53
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.1.05	Belanja Hibah	895.000.000,00	895.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	936.800.000,00	667.300.000,00	(269.500.000,00)	71,23
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.2	BELANJA MODAL	1.450.694.500,00	1.357.735.750,00	(92.958.750,00)	93,59
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.788.300,00	989.983.750,00	(54.804.550,00)	94,75
5.1.06.1-06.2-08.2-14.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.906.200,00	367.752.000,00	(38.154.200,00)	90,60
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	226.304.276.186,00	208.757.221.965,00	(17.547.054.221,00)	92,25
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	42.022.417.862,00	38.244.820.865,00	(3.777.596.997,00)	91,01
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	42.022.417.862,00	38.244.820.865,00	(3.777.596.997,00)	91,01
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	31.131.302.837,00	28.854.957.910,00	(2.276.344.927,00)	92,69
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.709.425.778,00	9.838.874.775,00	(870.551.003,00)	91,87
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.421.877.059,00	19.016.083.135,00	(1.405.793.924,00)	93,12
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.891.115.025,00	9.389.862.955,00	(1.501.252.070,00)	86,22
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.256.982.025,00	7.802.273.500,00	(1.454.708.525,00)	84,29
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.293.633.000,00	1.253.201.175,00	(40.431.825,00)	96,87
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.000.000,00	194.025.780,00	(3.974.220,00)	97,99
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.500.000,00	140.362.500,00	(2.137.500,00)	98,50
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	10.784.263.836,00	9.436.744.608,00	(1.347.519.228,00)	87,50

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	10.784.263.836,00	9.436.744.608,00	(1.347.519.228,00)	87,50
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.483.513.816,00	8.267.284.658,00	(1.216.229.158,00)	87,18
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.259.217.251,00	4.449.030.358,00	(810.186.893,00)	84,59
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.224.296.565,00	3.818.254.300,00	(406.042.265,00)	90,39
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.300.750.020,00	1.169.459.950,00	(131.290.070,00)	89,91
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.750.020,00	1.169.459.950,00	(131.290.070,00)	89,91
5.2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	11.546.953.826,00	10.597.331.096,00	(949.622.730,00)	91,78
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	11.546.953.826,00	10.597.331.096,00	(949.622.730,00)	91,78
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.436.953.826,00	10.492.623.096,00	(944.330.730,00)	91,74
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.734.274.933,00	3.072.387.786,00	(661.887.147,00)	82,28
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.702.678.893,00	7.420.235.310,00	(282.443.583,00)	96,33
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	110.000.000,00	104.708.000,00	(5.292.000,00)	95,19
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	104.708.000,00	(5.292.000,00)	95,19
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	54.795.245.081,00	52.880.462.369,00	(1.914.782.712,00)	96,51
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	54.795.245.081,00	52.880.462.369,00	(1.914.782.712,00)	96,51
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	45.826.556.231,00	44.397.178.720,00	(1.429.377.511,00)	96,88
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.305.135.081,00	4.807.288.084,00	(497.846.997,00)	90,62
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.521.421.150,00	39.589.890.636,00	(931.530.514,00)	97,70
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	8.968.688.850,00	8.483.283.649,00	(485.405.201,00)	94,59
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.910.676.080,00	4.482.437.249,00	(428.238.831,00)	91,28
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.058.012.770,00	4.000.846.400,00	(57.166.370,00)	98,59
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	21.698.376.255,00	20.164.667.252,00	(1.533.709.003,00)	92,93
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	21.698.376.255,00	20.164.667.252,00	(1.533.709.003,00)	92,93
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	20.771.008.841,00	19.255.517.252,00	(1.515.491.589,00)	92,70
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	3.875.151.835,00	3.004.377.529,00	(870.774.306,00)	77,53
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.695.857.006,00	16.051.139.723,00	(644.717.283,00)	96,14
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	927.367.414,00	909.150.000,00	(18.217.414,00)	98,04
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	927.367.414,00	909.150.000,00	(18.217.414,00)	98,04
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	26.723.513.049,00	23.799.833.852,00	(2.923.679.197,00)	89,06
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	26.723.513.049,00	23.799.833.852,00	(2.923.679.197,00)	89,06
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	23.628.790.049,00	20.812.450.102,00	(2.816.339.947,00)	88,08
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.930.003.049,00	10.357.433.217,00	(1.572.569.832,00)	86,82
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.698.787.000,00	10.455.016.885,00	(1.243.770.115,00)	89,37
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.094.723.000,00	2.987.383.750,00	(107.339.250,00)	96,53
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.123.000,00	395.783.750,00	(107.339.250,00)	78,67
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.591.600.000,00	2.591.600.000,00	0,00	100,00
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	6.793.848.058,00	5.718.410.424,00	(1.075.437.634,00)	84,17
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	6.793.848.058,00	5.718.410.424,00	(1.075.437.634,00)	84,17
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.242.214.953,00	5.203.019.484,00	(1.039.195.469,00)	83,35

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.892.146.360,00	2.117.263.373,00	(774.882.987,00)	73,21
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.350.068.593,00	3.085.756.111,00	(264.312.482,00)	92,11
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	551.633.105,00	515.390.940,00	(36.242.165,00)	93,43
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	551.633.105,00	515.390.940,00	(36.242.165,00)	93,43
5.2.22	**KEBUDAYAAN**	46.260.519.295,00	42.899.017.517,00	(3.361.501.778,00)	92,73
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01	**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**	46.260.519.295,00	42.899.017.517,00	(3.361.501.778,00)	92,73
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.1	BELANJA OPERASI	33.001.063.590,00	30.556.156.835,00	(2.444.906.755,00)	92,59
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.1.01	Belanja Pegawai	5.040.444.503,00	4.222.741.302,00	(817.703.201,00)	83,78
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.704.169.087,00	20.076.965.533,00	(1.627.203.554,00)	92,50
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.1.05	Belanja Hibah	6.256.450.000,00	6.256.450.000,00	0,00	100,00
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.2	BELANJA MODAL	13.259.455.705,00	12.342.860.682,00	(916.595.023,00)	93,09
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378.095.000,00	366.841.500,00	(11.253.500,00)	97,02
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.505.506.000,00	10.660.202.182,00	(845.303.818,00)	92,65
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	608.000.000,00	560.798.000,00	(47.202.000,00)	92,24
5.2.22.2-22.2-19.3-26.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	767.854.705,00	755.019.000,00	(12.835.705,00)	98,33
5.2.23	**PERPUSTAKAAN**	5.679.138.924,00	5.015.933.982,00	(663.204.942,00)	88,32
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	5.679.138.924,00	5.015.933.982,00	(663.204.942,00)	88,32
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.256.642.624,00	4.619.552.980,00	(637.089.644,00)	87,88
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.780.543.813,00	3.210.044.777,00	(570.499.036,00)	84,91
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.098.811,00	1.409.508.203,00	(66.590.608,00)	95,49
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	422.496.300,00	396.381.002,00	(26.115.298,00)	93,82
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.531.100,00	339.427.500,00	(26.103.600,00)	92,86
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.965.200,00	56.953.502,00	(11.698,00)	99,98
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	82.702.983.523,00	69.518.907.950,00	(13.184.075.573,00)	84,06
5.3.27	**PERTANIAN**	51.014.862.638,00	46.000.297.742,00	(5.014.564.896,00)	90,17
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN**	51.014.862.638,00	46.000.297.742,00	(5.014.564.896,00)	90,17
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	49.913.905.138,00	44.956.014.742,00	(4.957.890.396,00)	90,07
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	29.696.549.739,00	26.245.054.335,00	(3.451.495.404,00)	88,38
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.803.455.399,00	17.363.250.707,00	(1.440.204.692,00)	92,34
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.413.900.000,00	1.347.709.700,00	(66.190.300,00)	95,32
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.100.957.500,00	1.044.283.000,00	(56.674.500,00)	94,85
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.457.500,00	172.450.000,00	(2.007.500,00)	98,85
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	924.000.000,00	869.333.000,00	(54.667.000,00)	94,08
5.3.27.3-27.2-09.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.3.31	**PERINDUSTRIAN**	31.688.120.885,00	23.518.610.208,00	(8.169.510.677,00)	74,22
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	31.688.120.885,00	23.518.610.208,00	(8.169.510.677,00)	74,22
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01.1	BELANJA OPERASI	30.720.042.885,00	22.727.210.208,00	(7.992.832.677,00)	73,98
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01.1.01	Belanja Pegawai	4.258.248.393,00	3.691.706.353,00	(566.542.040,00)	86,70
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.461.794.492,00	19.035.503.855,00	(7.426.290.637,00)	71,94
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01.2	BELANJA MODAL	968.078.000,00	791.400.000,00	(176.678.000,00)	81,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.31.3-31.2-07.3-32.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.078.000,00	791.400.000,00	(176.678.000,00)	81,75
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	134.550.578.050,00	119.355.131.086,00	(15.195.446.964,00)	88,71
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	65.818.524.006,00	56.034.533.984,00	(9.783.990.022,00)	85,13
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	65.818.524.006,00	56.034.533.984,00	(9.783.990.022,00)	85,13
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	63.666.213.286,00	54.161.748.455,00	(9.504.464.831,00)	85,07
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	20.909.544.656,00	17.496.689.304,00	(3.412.855.352,00)	83,68
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.111.668.630,00	33.262.984.819,00	(5.848.683.811,00)	85,05
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.645.000.000,00	1.495.000.000,00	(150.000.000,00)	90,88
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.152.310.720,00	1.872.785.529,00	(279.525.191,00)	87,01
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.120.090.720,00	1.841.003.529,00	(279.087.191,00)	86,84
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.220.000,00	31.782.000,00	(438.000,00)	98,64
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	68.732.054.044,00	63.320.597.102,00	(5.411.456.942,00)	92,13
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DPRD**	68.732.054.044,00	63.320.597.102,00	(5.411.456.942,00)	92,13
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	67.446.376.044,00	62.181.859.642,00	(5.264.516.402,00)	92,19
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	35.045.479.892,00	34.176.632.711,00	(868.847.181,00)	97,52
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.896.152,00	28.005.226.931,00	(4.395.669.221,00)	86,43
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.285.678.000,00	1.138.737.460,00	(146.940.540,00)	88,57
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.285.678.000,00	1.138.737.460,00	(146.940.540,00)	88,57
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	824.894.842.702,00	791.150.303.253,00	(33.744.539.449,00)	95,91
5.5.01	**PERENCANAAN**	10.782.236.696,00	9.147.993.380,00	(1.634.243.316,00)	84,84
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	10.782.236.696,00	9.147.993.380,00	(1.634.243.316,00)	84,84
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.719.501.696,00	9.107.068.580,00	(1.612.433.116,00)	84,96
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.005.389.631,00	3.878.728.629,00	(1.126.661.002,00)	77,49
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.714.112.065,00	5.228.339.951,00	(485.772.114,00)	91,50
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	62.735.000,00	40.924.800,00	(21.810.200,00)	65,23
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.835.000,00	40.924.800,00	(5.910.200,00)	87,38
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	0
5.5.02	**KEUANGAN**	801.532.956.856,00	770.422.509.961,00	(31.110.446.895,00)	96,12
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	801.532.956.856,00	770.422.509.961,00	(31.110.446.895,00)	96,12
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	37.348.270.147,00	32.945.682.693,00	(4.402.587.454,00)	88,21
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	20.239.552.520,00	17.734.833.977,00	(2.504.718.543,00)	87,62
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.108.717.627,00	15.210.848.716,00	(1.897.868.911,00)	88,91
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.468.095.450,00	3.234.519.405,00	(233.576.045,00)	93,27
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.278.095.250,00	3.045.879.505,00	(232.215.745,00)	92,92
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	(5.748.877.516,00)	99,22
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	(3.275.894.556,00)	84,64

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	(2.472.982.960,00)	99,66
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	12.579.649.150,00	11.579.799.912,00	(999.849.238,00)	92,05
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	12.579.649.150,00	11.579.799.912,00	(999.849.238,00)	92,05
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.480.849.150,00	11.488.009.912,00	(992.839.238,00)	92,05
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.370.360.300,00	4.882.417.109,00	(487.943.191,00)	90,91
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.488.850,00	6.605.592.803,00	(504.896.047,00)	92,90
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	98.800.000,00	91.790.000,00	(7.010.000,00)	92,90
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.800.000,00	91.790.000,00	(7.010.000,00)	92,90
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	15.873.801.826,00	12.745.128.825,00	(3.128.673.001,00)	80,29
5.6.01	**INSPEKTORAT**	15.873.801.826,00	12.745.128.825,00	(3.128.673.001,00)	80,29
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**INSPEKTORAT**	15.873.801.826,00	12.745.128.825,00	(3.128.673.001,00)	80,29
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	15.353.323.518,00	12.316.338.825,00	(3.036.984.693,00)	80,22
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.013.763.665,00	7.606.258.696,00	(1.407.504.969,00)	84,38
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.339.559.853,00	4.710.080.129,00	(1.629.479.724,00)	74,30
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	520.478.308,00	428.790.000,00	(91.688.308,00)	82,38
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.478.308,00	428.790.000,00	(91.688.308,00)	82,38
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	91.126.932.135,00	78.356.556.318,00	(12.770.375.817,00)	85,99
5.7.01	**KECAMATAN**	91.126.932.135,00	78.356.556.318,00	(12.770.375.817,00)	85,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**KECAMATAN PRAMBANAN**	3.397.557.227,00	2.974.110.278,00	(423.446.949,00)	87,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.225.144.255,00	2.805.526.278,00	(419.617.977,00)	86,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.331.232.227,00	1.974.619.769,00	(356.612.458,00)	84,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.912.028,00	830.906.509,00	(63.005.519,00)	92,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	172.412.972,00	168.584.000,00	(3.828.972,00)	97,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.412.972,00	139.348.000,00	(3.064.972,00)	97,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	17.371.000,00	(629.000,00)	96,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000,00	11.865.000,00	(135.000,00)	98,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**KECAMATAN GANTIWARNO**	2.749.303.411,00	2.310.038.663,00	(439.264.748,00)	84,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.695.135.411,00	2.255.940.663,00	(439.194.748,00)	83,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.855.112.763,00	1.454.272.834,00	(400.839.929,00)	78,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.022.648,00	801.667.829,00	(38.354.819,00)	95,43
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	54.168.000,00	54.098.000,00	(70.000,00)	99,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.168.000,00	54.098.000,00	(70.000,00)	99,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**KECAMATAN WEDI**	3.350.973.390,00	3.031.842.069,00	(319.131.321,00)	90,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	3.244.245.390,00	2.927.177.069,00	(317.068.321,00)	90,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.207.726.029,00	1.932.396.109,00	(275.329.920,00)	87,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.519.361,00	994.780.960,00	(41.738.401,00)	95,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	106.728.000,00	104.665.000,00	(2.063.000,00)	98,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.728.000,00	104.665.000,00	(2.063.000,00)	98,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**KECAMATAN BAYAT**	2.832.013.847,00	2.223.134.402,00	(608.879.445,00)	78,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.759.013.847,00	2.150.849.402,00	(608.164.445,00)	77,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.982.059.184,00	1.546.305.280,00	(435.753.904,00)	78,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.954.663,00	604.544.122,00	(172.410.541,00)	77,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	73.000.000,00	72.285.000,00	(715.000,00)	99,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.000.000,00	72.285.000,00	(715.000,00)	99,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	**KECAMATAN CAWAS**	2.882.302.837,00	2.373.342.397,00	(508.960.440,00)	82,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	2.786.902.837,00	2.278.642.397,00	(508.260.440,00)	81,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.936.911.703,00	1.494.239.526,00	(442.672.177,00)	77,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.991.134,00	784.402.871,00	(65.588.263,00)	92,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	95.400.000,00	94.700.000,00	(700.000,00)	99,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.400.000,00	94.700.000,00	(700.000,00)	99,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	**KECAMATAN TRUCUK**	2.910.821.928,00	2.475.301.104,00	(435.520.824,00)	85,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	2.643.276.428,00	2.210.751.104,00	(432.525.324,00)	83,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.751.901.481,00	1.406.786.246,00	(345.115.235,00)	80,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.374.947,00	803.964.858,00	(87.410.089,00)	90,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	267.545.500,00	264.550.000,00	(2.995.500,00)	98,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.545.500,00	264.550.000,00	(2.995.500,00)	98,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	**KECAMATAN KEBONARUM**	2.989.623.720,00	2.671.799.812,00	(317.823.908,00)	89,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	2.979.623.720,00	2.661.900.812,00	(317.722.908,00)	89,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	1.891.632.472,00	1.605.153.489,00	(286.478.983,00)	84,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.991.248,00	1.056.747.323,00	(31.243.925,00)	97,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.899.000,00	(101.000,00)	98,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.899.000,00	(101.000,00)	98,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	**KECAMATAN JOGONALAN**	2.850.931.448,00	2.399.958.932,00	(450.972.516,00)	84,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	2.774.788.448,00	2.324.183.932,00	(450.604.516,00)	83,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	1.819.334.513,00	1.443.694.287,00	(375.640.226,00)	79,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.453.935,00	880.489.645,00	(74.964.290,00)	92,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	76.143.000,00	75.775.000,00	(368.000,00)	99,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.293.000,00	70.975.000,00	(318.000,00)	99,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.850.000,00	4.800.000,00	(50.000,00)	98,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	**KECAMATAN MANISRENGGO**	3.169.215.896,00	2.687.851.512,00	(481.364.384,00)	84,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	3.059.514.896,00	2.598.381.512,00	(461.133.384,00)	84,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2.062.475.936,00	1.647.796.432,00	(414.679.504,00)	79,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.038.960,00	950.585.080,00	(46.453.880,00)	95,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	109.701.000,00	89.470.000,00	(20.231.000,00)	81,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.701.000,00	89.470.000,00	(20.231.000,00)	81,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	**KECAMATAN KARANGNONGKO**	2.995.437.886,00	2.533.640.959,00	(461.796.927,00)	84,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	2.986.087.886,00	2.524.340.959,00	(461.746.927,00)	84,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.082.880.273,00	1.680.711.049,00	(402.169.224,00)	80,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.207.613,00	843.629.910,00	(59.577.703,00)	93,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	9.350.000,00	9.300.000,00	(50.000,00)	99,47

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.350.000,00	9.300.000,00	(50.000,00)	99,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	**KECAMATAN CEPER**	3.487.672.278,00	2.956.734.146,00	(530.938.132,00)	84,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	3.451.304.778,00	2.925.534.146,00	(525.770.632,00)	84,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	2.471.959.911,00	2.111.550.351,00	(360.409.560,00)	85,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.344.867,00	813.983.795,00	(165.361.072,00)	83,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	36.367.500,00	31.200.000,00	(5.167.500,00)	85,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.367.500,00	31.200.000,00	(5.167.500,00)	85,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	**KECAMATAN PEDAN**	2.705.353.019,00	2.377.398.010,00	(327.955.009,00)	87,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	2.645.453.019,00	2.317.709.010,00	(327.744.009,00)	87,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	1.746.462.345,00	1.447.842.346,00	(298.619.999,00)	82,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.990.674,00	869.866.664,00	(29.124.010,00)	96,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	BELANJA MODAL	59.900.000,00	59.689.000,00	(211.000,00)	99,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.900.000,00	59.689.000,00	(211.000,00)	99,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13	**KECAMATAN KARANGDOWO**	3.218.832.934,00	2.818.998.357,00	(399.834.577,00)	87,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1	BELANJA OPERASI	3.120.090.434,00	2.725.792.357,00	(394.298.077,00)	87,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01	Belanja Pegawai	2.247.301.934,00	1.893.345.290,00	(353.956.644,00)	84,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.788.500,00	832.447.067,00	(40.341.433,00)	95,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2	BELANJA MODAL	98.742.500,00	93.206.000,00	(5.536.500,00)	94,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.742.500,00	93.206.000,00	(5.536.500,00)	94,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14	**KECAMATAN JUWIRING**	2.806.694.141,00	2.106.204.365,00	(700.489.776,00)	75,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1	BELANJA OPERASI	2.806.694.141,00	2.106.204.365,00	(700.489.776,00)	75,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.01	Belanja Pegawai	2.022.854.580,00	1.446.336.410,00	(576.518.170,00)	71,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.839.561,00	659.867.955,00	(123.971.606,00)	84,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15	**KECAMATAN WONOSARI**	3.439.943.368,00	2.920.448.165,00	(519.495.203,00)	84,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1	BELANJA OPERASI	3.393.491.948,00	2.876.298.165,00	(517.193.783,00)	84,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.01	Belanja Pegawai	2.400.647.008,00	1.952.279.842,00	(448.367.166,00)	81,32
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.844.940,00	924.018.323,00	(68.826.617,00)	93,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2	BELANJA MODAL	46.451.420,00	44.150.000,00	(2.301.420,00)	95,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.451.420,00	44.150.000,00	(2.301.420,00)	95,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16	**KECAMATAN DELANGGU**	3.076.657.702,00	2.698.680.658,00	(377.977.044,00)	87,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1	BELANJA OPERASI	2.982.512.102,00	2.605.295.221,00	(377.216.881,00)	87,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.01	Belanja Pegawai	2.075.014.072,00	1.711.449.547,00	(363.564.525,00)	82,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.498.030,00	893.845.674,00	(13.652.356,00)	98,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2	BELANJA MODAL	94.145.600,00	93.385.437,00	(760.163,00)	99,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.145.600,00	93.385.437,00	(760.163,00)	99,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17	**KECAMATAN POLANHARJO**	3.028.647.982,00	2.663.980.616,00	(364.667.366,00)	87,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1	BELANJA OPERASI	2.946.205.482,00	2.583.630.616,00	(362.574.866,00)	87,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.01	Belanja Pegawai	2.016.339.921,00	1.661.954.652,00	(354.385.269,00)	82,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.865.561,00	921.675.964,00	(8.189.597,00)	99,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2	BELANJA MODAL	82.442.500,00	80.350.000,00	(2.092.500,00)	97,46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.442.500,00	80.350.000,00	(2.092.500,00)	97,46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18	**KECAMATAN KARANGANOM**	2.778.658.573,00	2.194.979.838,00	(583.678.735,00)	78,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1	BELANJA OPERASI	2.673.821.073,00	2.091.809.838,00	(582.011.235,00)	78,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.01	Belanja Pegawai	1.649.962.226,00	1.187.463.821,00	(462.498.405,00)	71,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.023.858.847,00	904.346.017,00	(119.512.830,00)	88,33
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2	BELANJA MODAL	104.837.500,00	103.170.000,00	(1.667.500,00)	98,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.837.500,00	103.170.000,00	(1.667.500,00)	98,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19	**KECAMATAN TULUNG**	3.026.752.387,00	2.465.634.451,00	(561.117.936,00)	81,46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1	BELANJA OPERASI	2.959.802.387,00	2.407.209.451,00	(552.592.936,00)	81,33
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.01	Belanja Pegawai	2.132.663.487,00	1.689.767.294,00	(442.896.193,00)	79,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.138.900,00	717.442.157,00	(109.696.743,00)	86,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2	BELANJA MODAL	66.950.000,00	58.425.000,00	(8.525.000,00)	87,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.950.000,00	58.425.000,00	(8.525.000,00)	87,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20	**KECAMATAN JATINOM**	4.151.779.905,00	3.522.409.103,00	(629.370.802,00)	84,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1	BELANJA OPERASI	4.010.619.905,00	3.383.359.103,00	(627.260.802,00)	84,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.01	Belanja Pegawai	2.405.388.206,00	1.833.741.358,00	(571.646.848,00)	76,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.231.699,00	1.549.617.745,00	(55.613.954,00)	96,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2	BELANJA MODAL	141.160.000,00	139.050.000,00	(2.110.000,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.160.000,00	139.050.000,00	(2.110.000,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21	**KECAMATAN KEMALANG**	2.734.117.589,00	2.248.347.214,00	(485.770.375,00)	82,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1	BELANJA OPERASI	2.683.459.789,00	2.199.147.214,00	(484.312.575,00)	81,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.01	Belanja Pegawai	1.868.910.315,00	1.417.888.494,00	(451.021.821,00)	75,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.549.474,00	781.258.720,00	(33.290.754,00)	95,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2	BELANJA MODAL	50.657.800,00	49.200.000,00	(1.457.800,00)	97,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.657.800,00	49.200.000,00	(1.457.800,00)	97,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22	**KECAMATAN NGAWEN**	2.917.278.101,00	2.569.504.692,00	(347.773.409,00)	88,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1	BELANJA OPERASI	2.884.778.101,00	2.539.624.692,00	(345.153.409,00)	88,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.01	Belanja Pegawai	1.894.130.001,00	1.584.041.399,00	(310.088.602,00)	83,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.648.100,00	955.583.293,00	(35.064.807,00)	96,46
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2	BELANJA MODAL	32.500.000,00	29.880.000,00	(2.620.000,00)	91,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.22.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	29.880.000,00	(2.620.000,00)	91,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23	**KECAMATAN KALIKOTES**	3.054.096.808,00	2.577.483.083,00	(476.613.725,00)	84,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1	BELANJA OPERASI	2.982.719.808,00	2.508.938.083,00	(473.781.725,00)	84,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.01	Belanja Pegawai	2.304.519.422,00	1.869.844.382,00	(434.675.040,00)	81,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.200.386,00	639.093.701,00	(39.106.685,00)	94,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2	BELANJA MODAL	71.377.000,00	68.545.000,00	(2.832.000,00)	96,03
5.7.01.7-01.0-00.0-00.23.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.377.000,00	68.545.000,00	(2.832.000,00)	96,03
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24	**KECAMATAN KLATEN UTARA**	5.741.595.727,00	5.218.529.575,00	(523.066.152,00)	90,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1	BELANJA OPERASI	5.164.019.727,00	4.654.111.275,00	(509.908.452,00)	90,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.01	Belanja Pegawai	3.150.509.550,00	2.673.590.921,00	(476.918.629,00)	84,86

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.013.510.177,00	1.980.520.354,00	(32.989.823,00)	98,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.2	BELANJA MODAL	577.576.000,00	564.418.300,00	(13.157.700,00)	97,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.576.000,00	196.823.000,00	(5.753.000,00)	97,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.24.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	375.000.000,00	367.595.300,00	(7.404.700,00)	98,03
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25	**KECAMATAN KLATEN TENGAH**	10.837.252.558,00	9.728.596.965,00	(1.108.655.593,00)	89,77
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1	BELANJA OPERASI	9.161.212.933,00	8.105.495.367,00	(1.055.717.566,00)	88,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.01	Belanja Pegawai	5.649.861.679,00	4.734.715.907,00	(915.145.772,00)	83,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.511.351.254,00	3.370.779.460,00	(140.571.794,00)	96,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2	BELANJA MODAL	1.676.039.625,00	1.623.101.598,00	(52.938.027,00)	96,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	796.239.625,00	769.153.000,00	(27.086.625,00)	96,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	96.208.000,00	(3.792.000,00)	96,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.25.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	779.800.000,00	757.740.598,00	(22.059.402,00)	97,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26	**KECAMATAN KLATEN SELATAN**	3.993.417.473,00	3.607.606.952,00	(385.810.521,00)	90,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1	BELANJA OPERASI	3.801.489.973,00	3.419.688.452,00	(381.801.521,00)	89,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.01	Belanja Pegawai	2.370.206.193,00	2.019.768.315,00	(350.437.878,00)	85,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.431.283.780,00	1.399.920.137,00	(31.363.643,00)	97,81
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.2	BELANJA MODAL	191.927.500,00	187.918.500,00	(4.009.000,00)	97,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.26.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.927.500,00	187.918.500,00	(4.009.000,00)	97,91
5.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	35.979.314.126,00	34.951.313.792,00	(1.028.000.334,00)	97,14
5.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	35.979.314.126,00	34.951.313.792,00	(1.028.000.334,00)	97,14
5.8.01.8-01.8-01.0-00.01	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	35.979.314.126,00	34.951.313.792,00	(1.028.000.334,00)	97,14
5.8.01.8-01.8-01.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	35.979.314.126,00	34.951.313.792,00	(1.028.000.334,00)	97,14
5.8.01.8-01.8-01.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.006.134.314,00	2.549.581.316,00	(456.552.998,00)	84,81
5.8.01.8-01.8-01.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.222.312,00	1.590.504.576,00	(290.717.736,00)	84,55
5.8.01.8-01.8-01.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	31.091.957.500,00	30.811.227.900,00	(280.729.600,00)	99,10
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	568.893.676.302,00	568.893.676.302,00	0,00	100,00
6.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.02	**KESEHATAN**	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**DINAS KESEHATAN**	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	529.871.162.845,00	529.871.162.845,00	0,00	100,00
6.5.02	**KEUANGAN**	529.871.162.845,00	529.871.162.845,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	529.871.162.845,00	529.871.162.845,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	490.571.162.845,00	490.571.162.845,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	490.571.162.845,00	490.571.162.845,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

Lampiran I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
Nomor 10 Tahun 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	103,87	358.048.103.989,00
4.1.01	**Pajak Daerah**	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	107,00	146.179.152.569,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	117,01	17.152.918.048,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	100,00	18.641.433.357,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	99,30	176.074.600.015,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	100,37	2.214.576.328.946,00
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	101,03	1.982.237.746.675,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.671.963.836.567,00	1.693.276.010.174,00	101,27	1.591.689.816.675,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	11.209.129.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	100,00	379.338.801.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	100,00	0,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	94,78	232.338.582.271,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	94,78	218.303.369.271,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	94,92	14.035.213.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83	15.069.000.000,00
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83	15.069.000.000,00
5	**BELANJA DAERAH**	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	90,51	2.527.619.332.474,28
5.1	**BELANJA OPERASI**	2.048.368.740.309,00	1.813.918.311.416,00	88,55	1.619.377.441.227,28
5.1.01	**Belanja Pegawai**	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	88,22	965.541.425.166,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	835.553.082.222,00	734.742.952.742,00	87,93	583.404.693.292,28
5.1.04	**Belanja Subsidi**	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	95,35	1.795.750.000,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	97,64	57.905.772.769,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33	10.729.800.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	332.747.086.931,00	295.594.876.519,00	88,83	246.670.020.742,00
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	90,06	1.853.240.700,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	89,97	63.015.807.876,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76	65.909.190.529,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84	107.441.269.466,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	96,17	8.450.512.171,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07	7.794.077.100,00

Printed By SIMDA-NG | 1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07	7.794.077.100,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64	16.621.066.005,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66	637.156.727.400,00
	SURPLUS / DEFISIT	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	0	60.074.100.460,72
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00
6.2.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	100,00	9.201.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**319.430.015.779,00**	**0**	**529.593.676.302,00**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	21.353.093.078,00	100,81		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	12.648.474.370,00	103,87		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	10.852.621.120,00	107,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	2.730.288.069,00	117,01		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	(346,00)	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	(934.434.473,00)	99,30		
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	8.444.618.708,00	100,37		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	21.312.173.607,00	101,03		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	(12.867.554.899,00)	94,78		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	260.000.000,00	101,83		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	260.000.000,00	101,83		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	(298.076.922.701,00)	90,51		
00	**Non Program**	0,00	214.122.579.600,00	214.122.579.600,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	214.122.579.600,00	214.122.579.600,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	214.122.579.600,00	214.122.579.600,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	214.122.579.600,00	214.122.579.600,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	214.122.579.600,00	214.122.579.600,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.425.085.063.591,00	1.242.298.117.548,00	(182.786.946.043,00)	87,17		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.535.692.955,00	2.269.860.087,00	(265.832.868,00)	89,52		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.285.371.532,00	1.165.310.608,00	(120.060.924,00)	90,66		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.263.524.032,00	1.143.495.608,00	(120.028.424,00)	90,50		
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	2.620.000,00	(1.010.000,00)	72,18		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.894.032,00	1.140.875.608,00	(119.018.424,00)	90,55		
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	21.847.500,00	21.815.000,00	(32.500,00)	99,85		
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.847.500,00	21.815.000,00	(32.500,00)	99,85		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	195.700.000,00	175.916.804,00	(19.783.196,00)	89,89		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	195.700.000,00	175.916.804,00	(19.783.196,00)	89,89		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.700.000,00	175.916.804,00	(19.783.196,00)	89,89		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.060.000,00	600.000,00	(5.460.000,00)	9,90		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.060.000,00	600.000,00	(5.460.000,00)	9,90		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	600.000,00	(5.460.000,00)	9,90		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	74.000.000,00	54.694.000,00	(19.306.000,00)	73,91		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	54.694.000,00	(19.306.000,00)	73,91		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	54.694.000,00	(19.306.000,00)	73,91		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	452.839.507,00	397.360.615,00	(55.478.892,00)	87,75		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	452.839.507,00	397.360.615,00	(55.478.892,00)	87,75		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.839.507,00	397.360.615,00	(55.478.892,00)	87,75		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	521.721.916,00	475.978.060,00	(45.743.856,00)	91,23		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	513.321.916,00	467.578.060,00	(45.743.856,00)	91,09		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.321.916,00	467.578.060,00	(45.743.856,00)	91,09		
01.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.069.780.466.416,00	941.075.392.527,00	(128.705.073.889,00)	87,97		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.067.105.664.936,00	938.670.421.704,00	(128.435.243.232,00)	87,96		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.067.105.664.936,00	938.670.421.704,00	(128.435.243.232,00)	87,96		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.066.544.674.702,00	938.109.431.470,00	(128.435.243.232,00)	87,96		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.990.234,00	560.990.234,00	0,00	100,00		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.235.812.288,00	1.135.736.524,00	(100.075.764,00)	91,90		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.235.812.288,00	1.135.736.524,00	(100.075.764,00)	91,90		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	717.924.000,00	702.500.000,00	(15.424.000,00)	97,85		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.888.288,00	433.236.524,00	(84.651.764,00)	83,65		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	731.507.200,00	696.764.399,00	(34.742.801,00)	95,25		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	729.842.200,00	695.114.399,00	(34.727.801,00)	95,24		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.842.200,00	695.114.399,00	(34.727.801,00)	95,24		
01.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	1.665.000,00	1.650.000,00	(15.000,00)	99,10		
01.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	1.650.000,00	(15.000,00)	99,10		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.000.000,00	52.704.150,00	(18.295.850,00)	74,23		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	52.704.150,00	(18.295.850,00)	74,23		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	52.704.150,00	(18.295.850,00)	74,23		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	187.816.000,00	162.619.650,00	(25.196.350,00)	86,58		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	187.816.000,00	162.619.650,00	(25.196.350,00)	86,58		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.816.000,00	162.619.650,00	(25.196.350,00)	86,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.000.000,00	9.318.000,00	(3.682.000,00)	71,68		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	9.318.000,00	(3.682.000,00)	71,68		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	9.318.000,00	(3.682.000,00)	71,68		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	393.259.379,00	311.325.800,00	(81.933.579,00)	79,17		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	393.259.379,00	311.325.800,00	(81.933.579,00)	79,17		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	154.560.000,00	148.720.000,00	(5.840.000,00)	96,22		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.699.379,00	162.605.800,00	(76.093.579,00)	68,12		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	42.406.613,00	36.502.300,00	(5.904.313,00)	86,08		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	42.406.613,00	36.502.300,00	(5.904.313,00)	86,08		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.406.613,00	36.502.300,00	(5.904.313,00)	86,08		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.059.636.000,00	913.206.958,00	(146.429.042,00)	86,18		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	4.843.250,00	(156.750,00)	96,87		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.843.250,00	(156.750,00)	96,87		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.843.250,00	(156.750,00)	96,87		
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	585.636.000,00	479.716.043,00	(105.919.957,00)	81,91		
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	563.436.000,00	459.571.043,00	(103.864.957,00)	81,57		
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.436.000,00	459.571.043,00	(103.864.957,00)	81,57		
01.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	22.200.000,00	20.145.000,00	(2.055.000,00)	90,74		
01.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	20.145.000,00	(2.055.000,00)	90,74		
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	7.856.000,00	(2.144.000,00)	78,56		
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.856.000,00	(2.144.000,00)	78,56		
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.856.000,00	(2.144.000,00)	78,56		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	449.000.000,00	414.770.665,00	(34.229.335,00)	92,38		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	449.000.000,00	414.770.665,00	(34.229.335,00)	92,38		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.000.000,00	414.770.665,00	(34.229.335,00)	92,38		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	6.021.000,00	(3.979.000,00)	60,21		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.021.000,00	(3.979.000,00)	60,21		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.021.000,00	(3.979.000,00)	60,21		
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	47.506.750,00	(2.493.250,00)	95,01		
01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42		
01.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42		
01.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.642.000,00	(358.000,00)	96,42		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	25.000.000,00	24.576.050,00	(423.950,00)	98,30		
01.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.576.050,00	(423.950,00)	98,30		
01.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.576.050,00	(423.950,00)	98,30		
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	13.288.700,00	(1.711.300,00)	88,59		
01.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.288.700,00	(1.711.300,00)	88,59		
01.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.288.700,00	(1.711.300,00)	88,59		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.807.073.668,00	4.382.045.901,00	(425.027.767,00)	91,16		
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	244.642.000,00	210.047.800,00	(34.594.200,00)	85,86		
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.642.000,00	210.047.800,00	(34.594.200,00)	85,86		
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.642.000,00	210.047.800,00	(34.594.200,00)	85,86		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	770.690.733,00	732.847.601,00	(37.843.132,00)	95,09		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	766.340.733,00	732.847.601,00	(33.493.132,00)	95,63		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.340.733,00	732.847.601,00	(33.493.132,00)	95,63		
01.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	0		
01.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	0		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.878.000,00	56.376.000,00	(14.502.000,00)	79,54		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.878.000,00	56.376.000,00	(14.502.000,00)	79,54		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.878.000,00	56.376.000,00	(14.502.000,00)	79,54		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	147.000.000,00	134.980.100,00	(12.019.900,00)	91,82		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	147.000.000,00	134.980.100,00	(12.019.900,00)	91,82		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	134.980.100,00	(12.019.900,00)	91,82		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	82.250.000,00	69.839.550,00	(12.410.450,00)	84,91		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	82.250.000,00	69.839.550,00	(12.410.450,00)	84,91		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	69.839.550,00	(12.410.450,00)	84,91		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	12.236.000,00	(22.764.000,00)	34,96		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	12.236.000,00	(22.764.000,00)	34,96		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	12.236.000,00	(22.764.000,00)	34,96		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.912.932.935,00	2.711.051.850,00	(201.881.085,00)	93,07		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.912.932.935,00	2.711.051.850,00	(201.881.085,00)	93,07		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.912.932.935,00	2.711.051.850,00	(201.881.085,00)	93,07		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	543.680.000,00	454.667.000,00	(89.013.000,00)	83,63		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	543.680.000,00	454.667.000,00	(89.013.000,00)	83,63		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.680.000,00	454.667.000,00	(89.013.000,00)	83,63		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.326.539.881,00	21.752.392.796,00	(2.574.147.085,00)	89,42		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	916.722.390,00	796.912.509,00	(119.809.881,00)	86,93		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	902.097.140,00	783.056.472,00	(119.040.668,00)	86,80		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.097.140,00	783.056.472,00	(119.040.668,00)	86,80		
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	14.625.250,00	13.856.037,00	(769.213,00)	94,74		
01.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.625.250,00	13.856.037,00	(769.213,00)	94,74		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.597.375.885,00	4.221.639.460,00	(375.736.425,00)	91,83		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.858.888.385,00	3.549.305.460,00	(309.582.925,00)	91,98		
01.2.06.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.855.658.385,00	3.546.075.460,00	(309.582.925,00)	91,97		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	738.487.500,00	672.334.000,00	(66.153.500,00)	91,04		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.487.500,00	672.334.000,00	(66.153.500,00)	91,04		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	427.141.600,00	379.041.805,00	(48.099.795,00)	88,74		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	261.215.800,00	215.386.805,00	(45.828.995,00)	82,46		
01.2.06.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.805.800,00	213.976.805,00	(45.828.995,00)	82,36		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	165.925.800,00	163.655.000,00	(2.270.800,00)	98,63		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.925.800,00	163.655.000,00	(2.270.800,00)	98,63		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.750.800,00	204.466.600,00	(78.284.200,00)	72,31		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	282.750.800,00	204.466.600,00	(78.284.200,00)	72,31		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.750.800,00	204.466.600,00	(78.284.200,00)	72,31		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.642.111.804,00	1.488.216.590,00	(153.895.214,00)	90,63		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.642.111.804,00	1.488.216.590,00	(153.895.214,00)	90,63		
01.2.06.05.5.1.01	Belanja Pegawai	38.860.000,00	38.775.000,00	(85.000,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.603.251.804,00	1.449.441.590,00	(153.810.214,00)	90,41		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	326.262.300,00	287.669.845,00	(38.592.455,00)	88,17		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	326.262.300,00	287.669.845,00	(38.592.455,00)	88,17		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.262.300,00	287.669.845,00	(38.592.455,00)	88,17		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.579.432.000,00	5.053.918.332,00	(525.513.668,00)	90,58		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.579.432.000,00	5.053.918.332,00	(525.513.668,00)	90,58		
01.2.06.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.576.812.000,00	5.051.298.332,00	(525.513.668,00)	90,58		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.217.564.991,00	9.035.361.835,00	(1.182.203.156,00)	88,43		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.217.564.991,00	9.035.361.835,00	(1.182.203.156,00)	88,43		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.217.564.991,00	9.035.361.835,00	(1.182.203.156,00)	88,43		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	137.778.111,00	117.602.420,00	(20.175.691,00)	85,36		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	135.474.111,00	115.422.420,00	(20.051.691,00)	85,20		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.474.111,00	115.422.420,00	(20.051.691,00)	85,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.10.5.2	BELANJA MODAL	2.304.000,00	2.180.000,00	(124.000,00)	94,62		
01.2.06.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.304.000,00	2.180.000,00	(124.000,00)	94,62		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	199.400.000,00	167.563.400,00	(31.836.600,00)	84,03		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	199.400.000,00	167.563.400,00	(31.836.600,00)	84,03		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.400.000,00	167.563.400,00	(31.836.600,00)	84,03		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.297.587.183,00	18.483.416.773,00	(1.814.170.410,00)	91,06		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	18.200.000,00	(6.800.000,00)	72,80		
01.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	18.200.000,00	(6.800.000,00)	72,80		
01.2.07.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	18.200.000,00	(4.720.000,00)	79,41		
01.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	0		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.377.033.750,00	4.822.661.254,00	(554.372.496,00)	89,69		
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.228.000,00	31.406.500,00	(1.821.500,00)	94,52		
01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.228.000,00	31.406.500,00	(1.821.500,00)	94,52		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	5.343.805.750,00	4.791.254.754,00	(552.550.996,00)	89,66		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.343.805.750,00	4.791.254.754,00	(552.550.996,00)	89,66		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.015.258.800,00	2.776.004.789,00	(239.254.011,00)	92,07		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	39.110.750,00	27.065.900,00	(12.044.850,00)	69,20		
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.000,00	0,00	(6.270.000,00)	0		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.840.750,00	27.065.900,00	(5.774.850,00)	82,42		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	2.976.148.050,00	2.748.938.889,00	(227.209.161,00)	92,37		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.976.148.050,00	2.748.938.889,00	(227.209.161,00)	92,37		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.636.346.500,00	1.446.344.708,00	(190.001.792,00)	88,39		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.473.000,00	3.355.500,00	(1.117.500,00)	75,02		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.473.000,00	3.355.500,00	(1.117.500,00)	75,02		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	1.631.873.500,00	1.442.989.208,00	(188.884.292,00)	88,43		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.631.873.500,00	1.442.989.208,00	(188.884.292,00)	88,43		
01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,47		
01.2.07.07.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,47		
01.2.07.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,47		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.799.038.888,00	2.638.498.950,00	(160.539.938,00)	94,26		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	111.583.130,00	108.882.950,00	(2.700.180,00)	97,58		
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.373.130,00	107.672.950,00	(2.700.180,00)	97,55		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	2.687.455.758,00	2.529.616.000,00	(157.839.758,00)	94,13		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.687.455.758,00	2.529.616.000,00	(157.839.758,00)	94,13		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.443.409.245,00	6.780.245.072,00	(663.164.173,00)	91,09		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	493.362.746,00	370.290.982,00	(123.071.764,00)	75,05		
01.2.07.11.5.1.01	Belanja Pegawai	4.440.000,00	1.010.000,00	(3.430.000,00)	22,75		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.922.746,00	369.280.982,00	(119.641.764,00)	75,53		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	6.950.046.499,00	6.409.954.090,00	(540.092.409,00)	92,23		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.647.196.499,00	6.113.604.090,00	(533.592.409,00)	91,97		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.850.000,00	198.341.000,00	(4.509.000,00)	97,78		
01.2.07.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	98.009.000,00	(1.991.000,00)	98,01		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.179.827.359,00	60.941.463.912,00	(5.238.363.447,00)	92,08		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	388.833.213,00	316.547.419,00	(72.285.794,00)	81,41		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	388.833.213,00	316.547.419,00	(72.285.794,00)	81,41		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.833.213,00	316.547.419,00	(72.285.794,00)	81,41		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.714.137.195,00	32.987.381.421,00	(2.726.755.774,00)	92,37		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.700.137.195,00	32.973.502.421,00	(2.726.634.774,00)	92,36		
01.2.08.02.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.680.817.195,00	32.954.182.421,00	(2.726.634.774,00)	92,36		
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	13.879.000,00	(121.000,00)	99,14		
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	13.879.000,00	(121.000,00)	99,14		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.288.644.500,00	2.080.048.704,00	(208.595.796,00)	90,89		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.258.939.500,00	2.051.508.704,00	(207.430.796,00)	90,82		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.258.939.500,00	2.051.508.704,00	(207.430.796,00)	90,82		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	29.705.000,00	28.540.000,00	(1.165.000,00)	96,08		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.705.000,00	28.540.000,00	(1.165.000,00)	96,08		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.788.212.451,00	25.557.486.368,00	(2.230.726.083,00)	91,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.712.324.479,00	25.484.635.368,00	(2.227.689.111,00)	91,96		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	68.608.720,00	68.608.720,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.643.715.759,00	25.416.026.648,00	(2.227.689.111,00)	91,94		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	75.887.972,00	72.851.000,00	(3.036.972,00)	96,00		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.887.972,00	43.615.000,00	(2.272.972,00)	95,05		
01.2.08.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	17.371.000,00	(629.000,00)	96,51		
01.2.08.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000,00	11.865.000,00	(135.000,00)	98,88		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.572.952.065,00	22.103.387.390,00	(3.469.564.675,00)	86,43		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.440.285.000,00	1.259.489.479,00	(180.795.521,00)	87,45		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.440.285.000,00	1.259.489.479,00	(180.795.521,00)	87,45		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.285.000,00	1.259.489.479,00	(180.795.521,00)	87,45		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.253.843.024,00	7.976.689.102,00	(1.277.153.922,00)	86,20		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.253.843.024,00	7.976.689.102,00	(1.277.153.922,00)	86,20		
01.2.09.02.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.251.823.024,00	7.974.669.102,00	(1.277.153.922,00)	86,20		
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	332.069.000,00	315.445.475,00	(16.623.525,00)	94,99		
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	332.069.000,00	315.445.475,00	(16.623.525,00)	94,99		
01.2.09.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	0		
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.659.000,00	315.445.475,00	(15.213.525,00)	95,40		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406.745.880,00	279.919.847,00	(126.826.033,00)	68,82		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	406.745.880,00	279.919.847,00	(126.826.033,00)	68,82		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.745.880,00	279.919.847,00	(126.826.033,00)	68,82		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.077.591.110,00	9.692.501.316,00	(1.385.089.794,00)	87,50		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.077.591.110,00	9.692.501.316,00	(1.385.089.794,00)	87,50		
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	53.540.000,00	52.180.000,00	(1.360.000,00)	97,46		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.024.051.110,00	9.640.321.316,00	(1.383.729.794,00)	87,45		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	768.128.450,00	745.153.153,00	(22.975.297,00)	97,01		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	768.128.450,00	745.153.153,00	(22.975.297,00)	97,01		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.128.450,00	745.153.153,00	(22.975.297,00)	97,01		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.294.289.601,00	1.834.189.018,00	(460.100.583,00)	79,95		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.959.018.101,00	1.554.786.518,00	(404.231.583,00)	79,37		
01.2.09.11.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.598.101,00	1.552.366.518,00	(404.231.583,00)	79,34		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	335.271.500,00	279.402.500,00	(55.869.000,00)	83,34		
01.2.09.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.271.500,00	279.402.500,00	(55.869.000,00)	83,34		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	166.591.014.064,00	128.477.195.103,00	(38.113.818.961,00)	77,12		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	166.591.014.064,00	128.477.195.103,00	(38.113.818.961,00)	77,12		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	151.619.284.553,00	117.857.848.608,00	(33.761.435.945,00)	77,73		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	(220.760.897,00)	83,65		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.268.863.388,00	116.728.188.340,00	(33.540.675.048,00)	77,68		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	14.971.729.511,00	10.619.346.495,00	(4.352.383.016,00)	70,93		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.491.066.019,00	10.298.547.695,00	(4.192.518.324,00)	71,07		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	471.436.000,00	313.233.800,00	(158.202.200,00)	66,44		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.727.492,00	1.700.000,00	(27.492,00)	98,41		
01.2.10.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	5.865.000,00	(1.635.000,00)	78,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.794.747.000,00	2.167.163.590,00	(627.583.410,00)	77,54		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.747.000,00	168.402.604,00	(6.344.396,00)	96,37		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	174.747.000,00	168.402.604,00	(6.344.396,00)	96,37		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	174.747.000,00	168.402.604,00	(6.344.396,00)	96,37		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00	142.775.000,00	(7.225.000,00)	95,18		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	142.775.000,00	(7.225.000,00)	95,18		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	142.775.000,00	(7.225.000,00)	95,18		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.000.000,00	165.070.533,00	(9.929.467,00)	94,33		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	165.070.533,00	(9.929.467,00)	94,33		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	165.070.533,00	(9.929.467,00)	94,33		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.295.000.000,00	1.690.915.453,00	(604.084.547,00)	73,68		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.295.000.000,00	1.690.915.453,00	(604.084.547,00)	73,68		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	595.164.400,00	(4.835.600,00)	99,19		
01.2.11.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.695.000.000,00	1.095.751.053,00	(599.248.947,00)	64,65		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.550.000.000,00	3.427.565.475,00	(122.434.525,00)	96,55		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.260.000.000,00	2.207.477.584,00	(52.522.416,00)	97,68		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.260.000.000,00	2.207.477.584,00	(52.522.416,00)	97,68		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000.000,00	2.207.477.584,00	(52.522.416,00)	97,68		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.290.000.000,00	1.220.087.891,00	(69.912.109,00)	94,58		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.290.000.000,00	1.220.087.891,00	(69.912.109,00)	94,58		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000.000,00	1.220.087.891,00	(69.912.109,00)	94,58		
01.2.13	Penataan Organisasi	488.500.000,00	470.118.474,00	(18.381.526,00)	96,24		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	136.900.209,00	131.366.378,00	(5.533.831,00)	95,96		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.900.209,00	131.366.378,00	(5.533.831,00)	95,96		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.900.209,00	131.366.378,00	(5.533.831,00)	95,96		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.335.148,00	120.894.513,00	(4.440.635,00)	96,46		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	125.335.148,00	120.894.513,00	(4.440.635,00)	96,46		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.335.148,00	120.894.513,00	(4.440.635,00)	96,46		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.399.943,00	202.153.583,00	(8.246.360,00)	96,08		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	210.399.943,00	202.153.583,00	(8.246.360,00)	96,08		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.399.943,00	202.153.583,00	(8.246.360,00)	96,08		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.864.700,00	15.704.000,00	(160.700,00)	98,99		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.864.700,00	15.704.000,00	(160.700,00)	98,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.864.700,00	15.704.000,00	(160.700,00)	98,99		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.804.340.000,00	3.505.146.356,00	(299.193.644,00)	92,14		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	478.580.000,00	451.195.918,00	(27.384.082,00)	94,28		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	478.580.000,00	451.195.918,00	(27.384.082,00)	94,28		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.580.000,00	451.195.918,00	(27.384.082,00)	94,28		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.414.260.000,00	2.173.251.055,00	(241.008.945,00)	90,02		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.797.500,00	2.157.570.555,00	(236.226.945,00)	90,13		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.797.500,00	2.157.570.555,00	(236.226.945,00)	90,13		
01.2.14.02.5.2	BELANJA MODAL	20.462.500,00	15.680.500,00	(4.782.000,00)	76,63		
01.2.14.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.462.500,00	15.680.500,00	(4.782.000,00)	76,63		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	911.500.000,00	880.699.383,00	(30.800.617,00)	96,62		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	739.641.500,00	724.380.783,00	(15.260.717,00)	97,94		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.641.500,00	724.380.783,00	(15.260.717,00)	97,94		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	171.858.500,00	156.318.600,00	(15.539.900,00)	90,96		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.658.500,00	150.118.600,00	(15.539.900,00)	90,62		
01.2.14.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.568.654.000,00	31.182.445.050,00	(386.208.950,00)	98,78		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.194.430.000,00	30.865.846.750,00	(328.583.250,00)	98,95		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.194.430.000,00	30.865.846.750,00	(328.583.250,00)	98,95		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	31.194.430.000,00	30.865.846.750,00	(328.583.250,00)	98,95		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	320.364.000,00	290.880.000,00	(29.484.000,00)	90,80		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	320.364.000,00	290.880.000,00	(29.484.000,00)	90,80		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.364.000,00	290.880.000,00	(29.484.000,00)	90,80		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	53.860.000,00	25.718.300,00	(28.141.700,00)	47,75		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	53.860.000,00	25.718.300,00	(28.141.700,00)	47,75		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.860.000,00	25.718.300,00	(28.141.700,00)	47,75		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.678.033.000,00	1.099.810.406,00	(578.222.594,00)	65,54		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	66.320.000,00	24.576.200,00	(41.743.800,00)	37,06		
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.320.000,00	24.576.200,00	(41.743.800,00)	37,06		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.320.000,00	24.576.200,00	(41.743.800,00)	37,06		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.114.567.000,00	808.389.992,00	(306.177.008,00)	72,53		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.114.567.000,00	808.389.992,00	(306.177.008,00)	72,53		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.567.000,00	808.389.992,00	(306.177.008,00)	72,53		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	497.146.000,00	266.844.214,00	(230.301.786,00)	53,68		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	497.146.000,00	266.844.214,00	(230.301.786,00)	53,68		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.146.000,00	266.844.214,00	(230.301.786,00)	53,68		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	210.314.531.595,00	202.440.472.417,00	(7.874.059.178,00)	96,26		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.436.058.001,00	100.717.622.290,00	(3.718.435.711,00)	96,44		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.419.230.000,00	1.232.462.492,00	(186.767.508,00)	86,84		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.316.250,00	45.379.500,00	(49.936.750,00)	47,61		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	0		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.136.250,00	45.379.500,00	(46.756.750,00)	49,25		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.323.913.750,00	1.187.082.992,00	(136.830.758,00)	89,66		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.063.750,00	77.725.000,00	(1.338.750,00)	98,31		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.244.850.000,00	1.109.357.992,00	(135.492.008,00)	89,12		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	742.339.750,00	715.113.290,00	(27.226.460,00)	96,33		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	84.323.100,00	73.750.575,00	(10.572.525,00)	87,46		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.313.100,00	73.750.575,00	(9.562.525,00)	88,52		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	658.016.650,00	641.362.715,00	(16.653.935,00)	97,47		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.384.400,00	26.170.000,00	(214.400,00)	99,19		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	631.632.250,00	615.192.715,00	(16.439.535,00)	97,40		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	228.739.150,00	225.697.500,00	(3.041.650,00)	98,67		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.737.150,00	21.969.500,00	(1.767.650,00)	92,55		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.737.150,00	21.969.500,00	(1.767.650,00)	92,55		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	205.002.000,00	203.728.000,00	(1.274.000,00)	99,38		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.270.000,00	10.000.000,00	(270.000,00)	97,37		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.732.000,00	193.728.000,00	(1.004.000,00)	99,48		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.035.732.700,00	1.015.054.172,00	(20.678.528,00)	98,00		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.838.700,00	64.653.780,00	(5.184.920,00)	92,58		
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.628.700,00	64.653.780,00	(3.974.920,00)	94,21		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	965.894.000,00	950.400.392,00	(15.493.608,00)	98,40		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	965.894.000,00	950.400.392,00	(15.493.608,00)	98,40		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.932.000.000,00	5.517.918.593,00	(414.081.407,00)	93,02		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.932.000.000,00	5.517.918.593,00	(414.081.407,00)	93,02		
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.210.000,00	0,00	(2.210.000,00)	0		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.929.790.000,00	5.517.918.593,00	(411.871.407,00)	93,05		
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	88.000.000,00	83.759.800,00	(4.240.200,00)	95,18		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	83.759.800,00	(4.240.200,00)	95,18		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	83.759.800,00	(4.240.200,00)	95,18		
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.650.000.000,00	1.574.980.250,00	(75.019.750,00)	95,45		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	65.185.000,00	24.591.750,00	(40.593.250,00)	37,73		
02.2.01.16.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.435.000,00	21.841.750,00	(40.593.250,00)	34,98		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	1.584.815.000,00	1.550.388.500,00	(34.426.500,00)	97,83		
02.2.01.16.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.584.815.000,00	1.550.388.500,00	(34.426.500,00)	97,83		
02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	900.000.000,00	878.732.000,00	(21.268.000,00)	97,64		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	878.732.000,00	(21.268.000,00)	97,64		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	878.732.000,00	(21.268.000,00)	97,64		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	98.200.000,00	77.767.000,00	(20.433.000,00)	79,19		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	98.200.000,00	77.767.000,00	(20.433.000,00)	79,19		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.200.000,00	77.767.000,00	(20.433.000,00)	79,19		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.094.635.591,00	3.686.169.350,00	(408.466.241,00)	90,02		
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	67.819.591,00	40.125.350,00	(27.694.241,00)	59,16		
02.2.01.22.5.1.01	Belanja Pegawai	8.010.000,00	3.050.000,00	(4.960.000,00)	38,08		
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.809.591,00	37.075.350,00	(22.734.241,00)	61,99		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	4.026.816.000,00	3.646.044.000,00	(380.772.000,00)	90,54		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.026.816.000,00	3.646.044.000,00	(380.772.000,00)	90,54		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	169.000.000,00	127.232.800,00	(41.767.200,00)	75,29		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	169.000.000,00	127.232.800,00	(41.767.200,00)	75,29		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000,00	127.232.800,00	(41.767.200,00)	75,29		
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	166.500.000,00	148.489.900,00	(18.010.100,00)	89,18		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	166.500.000,00	148.489.900,00	(18.010.100,00)	89,18		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.500.000,00	148.489.900,00	(18.010.100,00)	89,18		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	997.700.000,00	747.540.000,00	(250.160.000,00)	74,93		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	997.700.000,00	747.540.000,00	(250.160.000,00)	74,93		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.700.000,00	747.540.000,00	(250.160.000,00)	74,93		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.493.800.000,00	3.216.469.000,00	(277.331.000,00)	92,06		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	3.493.800.000,00	3.216.469.000,00	(277.331.000,00)	92,06		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.493.800.000,00	3.216.469.000,00	(277.331.000,00)	92,06		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	590.000.000,00	501.699.900,00	(88.300.100,00)	85,03		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	554.300.000,00	468.099.900,00	(86.200.100,00)	84,45		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.300.000,00	468.099.900,00	(86.200.100,00)	84,45		
02.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	35.700.000,00	33.600.000,00	(2.100.000,00)	94,12		
02.2.01.28.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.200.000,00	30.100.000,00	(2.100.000,00)	93,48		
02.2.01.28.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	80.142.451.810,00	78.375.495.043,00	(1.766.956.767,00)	97,80		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	67.612.238.572,00	66.033.091.175,00	(1.579.147.397,00)	97,66		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.719.438.572,00	47.277.541.917,00	(1.441.896.655,00)	97,04		
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	18.892.800.000,00	18.755.549.258,00	(137.250.742,00)	99,27		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	12.530.213.238,00	12.342.403.868,00	(187.809.370,00)	98,50		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.175.843.395,00	8.859.286.207,00	(316.557.188,00)	96,55		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.354.369.843,00	3.483.117.661,00	128.747.818,00	103,84		
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	855.000.000,00	804.266.300,00	(50.733.700,00)	94,07		
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	855.000.000,00	804.266.300,00	(50.733.700,00)	94,07		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.000.000,00	804.266.300,00	(50.733.700,00)	94,07		
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.832.729.000,00	1.788.774.900,00	(43.954.100,00)	97,60		
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	92.295.000,00	91.023.500,00	(1.271.500,00)	98,62		
02.2.01.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.295.000,00	91.023.500,00	(1.271.500,00)	98,62		
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	1.740.434.000,00	1.697.751.400,00	(42.682.600,00)	97,55		
02.2.01.31.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.394.050,00	246.130.400,00	(21.263.650,00)	92,05		
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.473.039.950,00	1.451.621.000,00	(21.418.950,00)	98,55		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81.785.427.594,00	79.528.664.817,00	(2.256.762.777,00)	97,24		
02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000,00	244.285.440,00	(5.714.560,00)	97,71		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	9.759.440,00	(440.560,00)	95,68		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	9.759.440,00	(440.560,00)	95,68		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	239.800.000,00	234.526.000,00	(5.274.000,00)	97,80		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.800.000,00	234.526.000,00	(5.274.000,00)	97,80		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	954.938.000,00	742.314.420,00	(212.623.580,00)	77,73		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	47.658.000,00	45.379.420,00	(2.278.580,00)	95,22		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.658.000,00	45.379.420,00	(2.278.580,00)	95,22		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	907.280.000,00	696.935.000,00	(210.345.000,00)	76,82		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	907.280.000,00	696.935.000,00	(210.345.000,00)	76,82		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	889.112.000,00	856.512.700,00	(32.599.300,00)	96,33		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.784.600,00	41.416.700,00	(1.367.900,00)	96,80		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.784.600,00	41.416.700,00	(1.367.900,00)	96,80		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	846.327.400,00	815.096.000,00	(31.231.400,00)	96,31		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.327.400,00	815.096.000,00	(31.231.400,00)	96,31		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.563.381.000,00	1.455.054.850,00	(108.326.150,00)	93,07		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	73.881.700,00	70.682.850,00	(3.198.850,00)	95,67		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.881.700,00	70.682.850,00	(3.198.850,00)	95,67		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	1.489.499.300,00	1.384.372.000,00	(105.127.300,00)	92,94		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.489.499.300,00	1.384.372.000,00	(105.127.300,00)	92,94		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.135.595.000,00	6.731.878.050,00	(403.716.950,00)	94,34		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	351.675.000,00	236.896.550,00	(114.778.450,00)	67,36		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.675.000,00	236.896.550,00	(114.778.450,00)	67,36		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	6.783.920.000,00	6.494.981.500,00	(288.938.500,00)	95,74		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.783.920.000,00	6.494.981.500,00	(288.938.500,00)	95,74		
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.136.980.000,00	6.921.484.732,00	(215.495.268,00)	96,98		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	7.136.980.000,00	6.921.484.732,00	(215.495.268,00)	96,98		
02.2.02.14.5.1.01	Belanja Pegawai	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.119.460.000,00	6.903.964.732,00	(215.495.268,00)	96,97		
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	125.000.000,00	122.888.622,00	(2.111.378,00)	98,31		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	122.888.622,00	(2.111.378,00)	98,31		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	122.888.622,00	(2.111.378,00)	98,31		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.015.000,00	87.598.700,00	(2.416.300,00)	97,32		
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	90.015.000,00	87.598.700,00	(2.416.300,00)	97,32		
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.015.000,00	87.598.700,00	(2.416.300,00)	97,32		
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	397.968.000,00	396.741.300,00	(1.226.700,00)	99,69		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	13.699.200,00	13.125.300,00	(573.900,00)	95,81		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.699.200,00	13.125.300,00	(573.900,00)	95,81		
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	384.268.800,00	383.616.000,00	(652.800,00)	99,83		
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.268.800,00	383.616.000,00	(652.800,00)	99,83		
02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.671.157.000,00	1.648.003.150,00	(23.153.850,00)	98,61		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	1.671.157.000,00	1.648.003.150,00	(23.153.850,00)	98,61		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.671.157.000,00	1.648.003.150,00	(23.153.850,00)	98,61		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	146.635.000,00	64.906.300,00	(81.728.700,00)	44,26		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	146.635.000,00	64.906.300,00	(81.728.700,00)	44,26		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.635.000,00	64.906.300,00	(81.728.700,00)	44,26		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.960.000.000,00	1.938.970.900,00	(21.029.100,00)	98,93		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.470.900,00	(1.529.100,00)	84,71		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.470.900,00	(1.529.100,00)	84,71		
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	1.950.000.000,00	1.930.500.000,00	(19.500.000,00)	99,00		
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.950.000.000,00	1.930.500.000,00	(19.500.000,00)	99,00		
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	156.392.000,00	151.206.000,00	(5.186.000,00)	96,68		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	156.392.000,00	151.206.000,00	(5.186.000,00)	96,68		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.392.000,00	151.206.000,00	(5.186.000,00)	96,68		
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	218.595.000,00	191.083.400,00	(27.511.600,00)	87,41		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	218.595.000,00	191.083.400,00	(27.511.600,00)	87,41		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.595.000,00	191.083.400,00	(27.511.600,00)	87,41		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	819.557.000,00	709.964.000,00	(109.593.000,00)	86,63		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	819.557.000,00	709.964.000,00	(109.593.000,00)	86,63		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.557.000,00	709.964.000,00	(109.593.000,00)	86,63		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	970.000.000,00	829.021.050,00	(140.978.950,00)	85,47		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	970.000.000,00	829.021.050,00	(140.978.950,00)	85,47		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.000.000,00	829.021.050,00	(140.978.950,00)	85,47		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.741.000.000,00	1.687.535.600,00	(53.464.400,00)	96,93		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	1.442.000.000,00	1.396.335.600,00	(45.664.400,00)	96,83		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.000.000,00	796.335.600,00	(45.664.400,00)	94,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.41.5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.41.5.2	BELANJA MODAL	299.000.000,00	291.200.000,00	(7.800.000,00)	97,39		
02.2.02.41.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.000.000,00	291.200.000,00	(7.800.000,00)	97,39		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	55.320.591.594,00	54.521.154.103,00	(799.437.491,00)	98,55		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	46.997.633.779,00	46.361.010.265,00	(636.623.514,00)	98,65		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.172.433.779,00	37.639.999.659,00	(532.434.120,00)	98,61		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	8.825.200.000,00	8.721.010.606,00	(104.189.394,00)	98,82		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	8.322.957.815,00	8.160.143.838,00	(162.813.977,00)	98,04		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.295.564.072,00	4.191.911.914,00	(103.652.158,00)	97,59		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.027.393.743,00	3.968.231.924,00	(59.161.819,00)	98,53		
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	238.511.000,00	228.061.500,00	(10.449.500,00)	95,62		
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	238.511.000,00	228.061.500,00	(10.449.500,00)	95,62		
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.511.000,00	228.061.500,00	(10.449.500,00)	95,62		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.480.725.000,00	19.671.796.360,00	(1.808.928.640,00)	91,58		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	182.599.000,00	175.578.600,00	(7.020.400,00)	96,16		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	182.599.000,00	175.578.600,00	(7.020.400,00)	96,16		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.599.000,00	175.578.600,00	(7.020.400,00)	96,16		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	118.314.000,00	114.678.500,00	(3.635.500,00)	96,93		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	118.314.000,00	114.678.500,00	(3.635.500,00)	96,93		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.314.000,00	114.678.500,00	(3.635.500,00)	96,93		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	99.655.000,00	97.746.900,00	(1.908.100,00)	98,09		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.655.000,00	97.746.900,00	(1.908.100,00)	98,09		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.655.000,00	97.746.900,00	(1.908.100,00)	98,09		
02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	99.755.000,00	97.243.900,00	(2.511.100,00)	97,48		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	99.755.000,00	97.243.900,00	(2.511.100,00)	97,48		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.755.000,00	97.243.900,00	(2.511.100,00)	97,48		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	49.455.000,00	45.907.800,00	(3.547.200,00)	92,83		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.055.000,00	3.955.800,00	(99.200,00)	97,55		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	3.955.800,00	(99.200,00)	97,55		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	45.400.000,00	41.952.000,00	(3.448.000,00)	92,41		
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.400.000,00	41.952.000,00	(3.448.000,00)	92,41		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	325.000.000,00	320.235.800,00	(4.764.200,00)	98,53		
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000,00	320.235.800,00	(4.764.200,00)	98,53		
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	320.235.800,00	(4.764.200,00)	98,53		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	187.729.000,00	137.532.900,00	(50.196.100,00)	73,26		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	187.729.000,00	137.532.900,00	(50.196.100,00)	73,26		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.729.000,00	137.532.900,00	(50.196.100,00)	73,26		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	74.000.000,00	59.666.400,00	(14.333.600,00)	80,63		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	59.666.400,00	(14.333.600,00)	80,63		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	59.666.400,00	(14.333.600,00)	80,63		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	769.952.000,00	489.199.200,00	(280.752.800,00)	63,54		
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	769.952.000,00	489.199.200,00	(280.752.800,00)	63,54		
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.952.000,00	489.199.200,00	(280.752.800,00)	63,54		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	278.000.000,00	211.920.900,00	(66.079.100,00)	76,23		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	278.000.000,00	211.920.900,00	(66.079.100,00)	76,23		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.000.000,00	211.920.900,00	(66.079.100,00)	76,23		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.178.400.000,00	17.811.311.760,00	(1.367.088.240,00)	92,87		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	19.156.049.665,00	17.788.961.425,00	(1.367.088.240,00)	92,86		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.849.665,00	44.849.425,00	(240,00)	100,00		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	19.111.200.000,00	17.744.112.000,00	(1.367.088.000,00)	92,85		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	22.350.335,00	22.350.335,00	0,00	100,00		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.650.335,00	18.650.335,00	0,00	100,00		
02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	117.866.000,00	110.773.700,00	(7.092.300,00)	93,98		
02.2.03.19.5.1	BELANJA OPERASI	117.866.000,00	110.773.700,00	(7.092.300,00)	93,98		
02.2.03.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.866.000,00	110.773.700,00	(7.092.300,00)	93,98		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.612.321.000,00	2.522.388.950,00	(89.932.050,00)	96,56		
02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	445.000.000,00	436.623.500,00	(8.376.500,00)	98,12		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.590.400,00	22.255.500,00	(1.334.900,00)	94,34		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.590.400,00	22.255.500,00	(1.334.900,00)	94,34		
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	421.409.600,00	414.368.000,00	(7.041.600,00)	98,33		
02.2.04.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	421.409.600,00	414.368.000,00	(7.041.600,00)	98,33		
02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	99.700.000,00	97.609.800,00	(2.090.200,00)	97,90		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	99.700.000,00	97.609.800,00	(2.090.200,00)	97,90		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.700.000,00	97.609.800,00	(2.090.200,00)	97,90		
02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	49.900.000,00	48.554.400,00	(1.345.600,00)	97,30		
02.2.04.11.5.1	BELANJA OPERASI	49.900.000,00	48.554.400,00	(1.345.600,00)	97,30		
02.2.04.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	48.554.400,00	(1.345.600,00)	97,30		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	110.421.000,00	109.629.650,00	(791.350,00)	99,28		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	110.421.000,00	109.629.650,00	(791.350,00)	99,28		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.421.000,00	109.629.650,00	(791.350,00)	99,28		
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	45.000.000,00	32.895.500,00	(12.104.500,00)	73,10		
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	32.895.500,00	(12.104.500,00)	73,10		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	32.895.500,00	(12.104.500,00)	73,10		
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	86.000.000,00	67.762.300,00	(18.237.700,00)	78,79		
02.2.04.16.5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	67.762.300,00	(18.237.700,00)	78,79		
02.2.04.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	67.762.300,00	(18.237.700,00)	78,79		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1.776.300.000,00	1.729.313.800,00	(46.986.200,00)	97,35		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.732.100.000,00	1.685.113.800,00	(46.986.200,00)	97,29		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.600.000,00	244.800.000,00	(64.800.000,00)	79,07		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	1.422.500.000,00	1.440.313.800,00	17.813.800,00	101,25		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	137.066.594.569,00	122.906.755.776,00	(14.159.838.793,00)	89,67		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.300.684.197,00	32.240.906.973,00	(5.059.777.224,00)	86,44		
02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	3.059.571.200,00	3.051.541.200,00	(8.030.000,00)	99,74		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	203.971.200,00	196.188.200,00	(7.783.000,00)	96,18		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.971.200,00	196.188.200,00	(7.783.000,00)	96,18		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.855.600.000,00	2.855.353.000,00	(247.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.855.600.000,00	2.855.353.000,00	(247.000,00)	99,99		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.742.090.500,00	5.657.993.400,00	(84.097.100,00)	98,54		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.834.890.500,00	1.804.037.400,00	(30.853.100,00)	98,32		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.890.500,00	1.804.037.400,00	(30.853.100,00)	98,32		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	3.907.200.000,00	3.853.956.000,00	(53.244.000,00)	98,64		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.907.200.000,00	3.853.956.000,00	(53.244.000,00)	98,64		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.136.241.000,00	1.107.580.000,00	(28.661.000,00)	97,48		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	50.170.000,00	47.430.000,00	(2.740.000,00)	94,54		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.170.000,00	47.430.000,00	(2.740.000,00)	94,54		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	1.086.071.000,00	1.060.150.000,00	(25.921.000,00)	97,61		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.086.071.000,00	1.060.150.000,00	(25.921.000,00)	97,61		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.396.298.658,00	15.498.695.223,00	(1.897.603.435,00)	89,09		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	46.103.000,00	38.799.600,00	(7.303.400,00)	84,16		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.103.000,00	38.799.600,00	(7.303.400,00)	84,16		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	17.350.195.658,00	15.459.895.623,00	(1.890.300.035,00)	89,11		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.350.195.658,00	15.459.895.623,00	(1.890.300.035,00)	89,11		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.347.981.539,00	3.052.648.282,00	(1.295.333.257,00)	70,21		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	4.347.981.539,00	3.052.648.282,00	(1.295.333.257,00)	70,21		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.347.981.539,00	3.052.648.282,00	(1.295.333.257,00)	70,21		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.411.791.300,00	3.710.400.428,00	(1.701.390.872,00)	68,56		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.411.791.300,00	3.710.400.428,00	(1.701.390.872,00)	68,56		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.411.791.300,00	3.710.400.428,00	(1.701.390.872,00)	68,56		
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	173.710.000,00	131.680.340,00	(42.029.660,00)	75,80		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	173.710.000,00	131.680.340,00	(42.029.660,00)	75,80		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.710.000,00	131.680.340,00	(42.029.660,00)	75,80		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33.000.000,00	30.368.100,00	(2.631.900,00)	92,02		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	30.368.100,00	(2.631.900,00)	92,02		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	30.368.100,00	(2.631.900,00)	92,02		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.563.337.372,00	89.967.455.025,00	(7.595.882.347,00)	92,21		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.328.398.472,00	2.186.118.260,00	(142.280.212,00)	93,89		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.328.398.472,00	2.186.118.260,00	(142.280.212,00)	93,89		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.328.398.472,00	2.186.118.260,00	(142.280.212,00)	93,89		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	122.366.000,00	106.492.000,00	(15.874.000,00)	87,03		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.366.000,00	106.492.000,00	(15.874.000,00)	87,03		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.366.000,00	106.492.000,00	(15.874.000,00)	87,03		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	195.112.460,00	172.176.200,00	(22.936.260,00)	88,24		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	195.112.460,00	172.176.200,00	(22.936.260,00)	88,24		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.112.460,00	172.176.200,00	(22.936.260,00)	88,24		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	920.299.407,00	857.043.440,00	(63.255.967,00)	93,13		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	920.299.407,00	857.043.440,00	(63.255.967,00)	93,13		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.299.407,00	857.043.440,00	(63.255.967,00)	93,13		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	752.810.000,00	683.441.500,00	(69.368.500,00)	90,79		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	752.810.000,00	683.441.500,00	(69.368.500,00)	90,79		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.810.000,00	683.441.500,00	(69.368.500,00)	90,79		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	563.619.450,00	508.836.100,00	(54.783.350,00)	90,28		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	558.819.450,00	504.941.100,00	(53.878.350,00)	90,36		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.819.450,00	504.941.100,00	(53.878.350,00)	90,36		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	4.800.000,00	3.895.000,00	(905.000,00)	81,15		
02.2.02.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	3.895.000,00	(905.000,00)	81,15		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	119.489.000,00	113.150.550,00	(6.338.450,00)	94,70		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	119.489.000,00	113.150.550,00	(6.338.450,00)	94,70		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.489.000,00	113.150.550,00	(6.338.450,00)	94,70		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	461.350.750,00	418.946.000,00	(42.404.750,00)	90,81		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	461.350.750,00	418.946.000,00	(42.404.750,00)	90,81		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.350.750,00	418.946.000,00	(42.404.750,00)	90,81		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.248.867.000,00	1.026.745.800,00	(222.121.200,00)	82,21		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.240.267.000,00	1.021.705.800,00	(218.561.200,00)	82,38		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.267.000,00	1.021.705.800,00	(218.561.200,00)	82,38		
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	8.600.000,00	5.040.000,00	(3.560.000,00)	58,60		
02.2.02.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	5.040.000,00	(3.560.000,00)	58,60		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	179.743.000,00	162.676.300,00	(17.066.700,00)	90,50		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	179.743.000,00	162.676.300,00	(17.066.700,00)	90,50		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.743.000,00	162.676.300,00	(17.066.700,00)	90,50		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	519.209.032,00	445.707.100,00	(73.501.932,00)	85,84		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	519.209.032,00	445.707.100,00	(73.501.932,00)	85,84		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.209.032,00	445.707.100,00	(73.501.932,00)	85,84		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.029.501.000,00	982.727.700,00	(46.773.300,00)	95,46		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.029.501.000,00	982.727.700,00	(46.773.300,00)	95,46		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.501.000,00	483.555.500,00	(45.945.500,00)	91,32		
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	499.172.200,00	(827.800,00)	99,83		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	173.595.000,00	151.277.200,00	(22.317.800,00)	87,14		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	173.595.000,00	151.277.200,00	(22.317.800,00)	87,14		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.595.000,00	151.277.200,00	(22.317.800,00)	87,14		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	76.260.000,00	74.059.580,00	(2.200.420,00)	97,11		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	76.260.000,00	74.059.580,00	(2.200.420,00)	97,11		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.260.000,00	74.059.580,00	(2.200.420,00)	97,11		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.040.446.000,00	30.384.570.145,00	(1.655.875.855,00)	94,83		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	11.867.190.000,00	10.430.650.145,00	(1.436.539.855,00)	87,89		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.867.190.000,00	10.430.650.145,00	(1.436.539.855,00)	87,89		
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	20.173.256.000,00	19.953.920.000,00	(219.336.000,00)	98,91		
02.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.173.256.000,00	19.953.920.000,00	(219.336.000,00)	98,91		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	555.270.000,00	502.249.900,00	(53.020.100,00)	90,45		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	555.270.000,00	502.249.900,00	(53.020.100,00)	90,45		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.270.000,00	502.249.900,00	(53.020.100,00)	90,45		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.174.185.000,00	1.081.308.700,00	(92.876.300,00)	92,09		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.174.185.000,00	1.081.308.700,00	(92.876.300,00)	92,09		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.185.000,00	1.081.308.700,00	(92.876.300,00)	92,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.665.018.572,00	2.299.777.020,00	(365.241.552,00)	86,29		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.665.018.572,00	2.299.777.020,00	(365.241.552,00)	86,29		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.665.018.572,00	2.299.777.020,00	(365.241.552,00)	86,29		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	132.605.000,00	116.934.900,00	(15.670.100,00)	88,18		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	132.605.000,00	116.934.900,00	(15.670.100,00)	88,18		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.605.000,00	116.934.900,00	(15.670.100,00)	88,18		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	355.278.100,00	287.627.800,00	(67.650.300,00)	80,96		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	355.278.100,00	287.627.800,00	(67.650.300,00)	80,96		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.278.100,00	287.627.800,00	(67.650.300,00)	80,96		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.630.000,00	15.230.000,00	(3.400.000,00)	81,75		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	18.630.000,00	15.230.000,00	(3.400.000,00)	81,75		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.630.000,00	15.230.000,00	(3.400.000,00)	81,75		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.612.000,00	47.915.000,00	(15.697.000,00)	75,32		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	63.612.000,00	47.915.000,00	(15.697.000,00)	75,32		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.612.000,00	47.915.000,00	(15.697.000,00)	75,32		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	916.000.000,00	898.785.200,00	(17.214.800,00)	98,12		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	916.000.000,00	898.785.200,00	(17.214.800,00)	98,12		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.000.000,00	398.785.200,00	(17.214.800,00)	95,86		
02.2.02.23.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.888.847.429,00	2.434.217.686,00	(454.629.743,00)	84,26		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	2.888.847.429,00	2.434.217.686,00	(454.629.743,00)	84,26		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.847.429,00	2.434.217.686,00	(454.629.743,00)	84,26		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.610.729.200,00	37.990.569.600,00	(1.620.159.600,00)	95,91		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	39.610.729.200,00	37.990.569.600,00	(1.620.159.600,00)	95,91		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.610.729.200,00	37.990.569.600,00	(1.620.159.600,00)	95,91		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	60.227.000,00	42.989.400,00	(17.237.600,00)	71,38		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	60.227.000,00	42.989.400,00	(17.237.600,00)	71,38		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.227.000,00	42.989.400,00	(17.237.600,00)	71,38		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.436.316.000,00	3.239.214.890,00	(2.197.101.110,00)	59,58		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	5.436.316.000,00	3.239.214.890,00	(2.197.101.110,00)	59,58		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.919.465.000,00	972.699.666,00	(946.765.334,00)	50,68		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.516.851.000,00	2.266.515.224,00	(1.250.335.776,00)	64,45		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	816.100.000,00	738.149.327,00	(77.950.673,00)	90,45		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	784.100.000,00	709.049.327,00	(75.050.673,00)	90,43		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.100.000,00	709.049.327,00	(75.050.673,00)	90,43		
02.2.02.34.5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	29.100.000,00	(2.900.000,00)	90,94		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.34.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	29.100.000,00	(2.900.000,00)	90,94		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	880.492.500,00	810.288.500,00	(70.204.000,00)	92,03		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	880.492.500,00	810.288.500,00	(70.204.000,00)	92,03		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.492.500,00	810.288.500,00	(70.204.000,00)	92,03		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.190.000,00	5.310.000,00	(11.880.000,00)	30,89		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	17.190.000,00	5.310.000,00	(11.880.000,00)	30,89		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.190.000,00	5.310.000,00	(11.880.000,00)	30,89		
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	99.990.000,00	92.974.500,00	(7.015.500,00)	92,98		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	99.990.000,00	92.974.500,00	(7.015.500,00)	92,98		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.990.000,00	92.974.500,00	(7.015.500,00)	92,98		
02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.052.600.000,00	1.022.048.327,00	(30.551.673,00)	97,10		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.600.000,00	1.022.048.327,00	(30.551.673,00)	97,10		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.600.000,00	1.022.048.327,00	(30.551.673,00)	97,10		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.080.000,00	8.730.000,00	(1.350.000,00)	86,61		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	10.080.000,00	8.730.000,00	(1.350.000,00)	86,61		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	8.730.000,00	(1.350.000,00)	86,61		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	79.100.000,00	59.166.400,00	(19.933.600,00)	74,80		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	79.100.000,00	59.166.400,00	(19.933.600,00)	74,80		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000,00	59.166.400,00	(19.933.600,00)	74,80		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	268.198.000,00	242.339.250,00	(25.858.750,00)	90,36		
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	118.300.000,00	113.835.500,00	(4.464.500,00)	96,23		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	118.300.000,00	113.835.500,00	(4.464.500,00)	96,23		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.300.000,00	113.835.500,00	(4.464.500,00)	96,23		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45.000.000,00	35.589.000,00	(9.411.000,00)	79,09		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	35.589.000,00	(9.411.000,00)	79,09		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	35.589.000,00	(9.411.000,00)	79,09		
02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	104.898.000,00	92.914.750,00	(11.983.250,00)	88,58		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	66.384.250,00	60.714.750,00	(5.669.500,00)	91,46		
02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.174.250,00	60.714.750,00	(4.459.500,00)	93,16		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	38.513.750,00	32.200.000,00	(6.313.750,00)	83,61		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.513.750,00	32.200.000,00	(6.313.750,00)	83,61		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.934.375.000,00	456.054.528,00	(1.478.320.472,00)	23,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.000.000,00	19.743.000,00	(257.000,00)	98,72		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.743.000,00	(257.000,00)	98,72		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.743.000,00	(257.000,00)	98,72		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.914.375.000,00	436.311.528,00	(1.478.063.472,00)	22,79		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.914.375.000,00	436.311.528,00	(1.478.063.472,00)	22,79		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.914.375.000,00	436.311.528,00	(1.478.063.472,00)	22,79		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	20.873.000.000,00	19.172.559.613,00	(1.700.440.387,00)	91,85		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.475.000.000,00	3.187.682.700,00	(287.317.300,00)	91,73		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	75.000.000,00	68.950.000,00	(6.050.000,00)	91,93		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	68.950.000,00	(6.050.000,00)	91,93		
02.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	68.950.000,00	(6.050.000,00)	91,93		
02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.099.500,00	(2.900.500,00)	94,20		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.099.500,00	(2.900.500,00)	94,20		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.099.500,00	(2.900.500,00)	94,20		
02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	300.000.000,00	283.396.000,00	(16.604.000,00)	94,47		
02.2.01.49.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	283.396.000,00	(16.604.000,00)	94,47		
02.2.01.49.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	283.396.000,00	(16.604.000,00)	94,47		
02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2.990.000.000,00	2.737.300.300,00	(252.699.700,00)	91,55		
02.2.01.53.5.1	BELANJA OPERASI	426.954.000,00	350.041.000,00	(76.913.000,00)	81,99		
02.2.01.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.954.000,00	350.041.000,00	(76.913.000,00)	81,99		
02.2.01.53.5.2	BELANJA MODAL	2.563.046.000,00	2.387.259.300,00	(175.786.700,00)	93,14		
02.2.01.53.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.563.046.000,00	2.387.259.300,00	(175.786.700,00)	93,14		
02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	50.936.900,00	(9.063.100,00)	84,89		
02.2.01.61.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	50.936.900,00	(9.063.100,00)	84,89		
02.2.01.61.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.936.900,00	(9.063.100,00)	84,89		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.398.000.000,00	15.984.876.913,00	(1.413.123.087,00)	91,88		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.000.000,00	1.196.913.000,00	(28.087.000,00)	97,71		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	525.000.000,00	504.859.500,00	(20.140.500,00)	96,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	504.859.500,00	(20.140.500,00)	96,16		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	700.000.000,00	692.053.500,00	(7.946.500,00)	98,86		
02.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.000.000,00	692.053.500,00	(7.946.500,00)	98,86		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	275.000.000,00	255.647.600,00	(19.352.400,00)	92,96		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	275.000.000,00	255.647.600,00	(19.352.400,00)	92,96		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275.000.000,00	255.647.600,00	(19.352.400,00)	92,96		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.143.000.000,00	6.719.914.900,00	(423.085.100,00)	94,08		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	7.143.000.000,00	6.719.914.900,00	(423.085.100,00)	94,08		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.143.000.000,00	6.719.914.900,00	(423.085.100,00)	94,08		
02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.850.000.000,00	1.773.413.200,00	(76.586.800,00)	95,86		
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	1.850.000.000,00	1.773.413.200,00	(76.586.800,00)	95,86		
02.2.02.15.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.850.000.000,00	1.773.413.200,00	(76.586.800,00)	95,86		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.905.000.000,00	6.038.988.213,00	(866.011.787,00)	87,46		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	5.221.360.087,00	4.616.607.973,00	(604.752.114,00)	88,42		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.221.360.087,00	4.616.607.973,00	(604.752.114,00)	88,42		
02.2.02.21.5.2	BELANJA MODAL	1.683.639.913,00	1.422.380.240,00	(261.259.673,00)	84,48		
02.2.02.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.683.639.913,00	1.422.380.240,00	(261.259.673,00)	84,48		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	1.171.175.900,00	724.607.978,00	(446.567.922,00)	61,87		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	344.831.000,00	296.634.280,00	(48.196.720,00)	86,02		
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	112.121.000,00	104.156.580,00	(7.964.420,00)	92,90		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	112.121.000,00	104.156.580,00	(7.964.420,00)	92,90		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.121.000,00	104.156.580,00	(7.964.420,00)	92,90		
02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	113.418.000,00	105.007.200,00	(8.410.800,00)	92,58		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.418.000,00	105.007.200,00	(8.410.800,00)	92,58		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.418.000,00	105.007.200,00	(8.410.800,00)	92,58		
02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	6.538.000,00	0,00	(6.538.000,00)	0		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.538.000,00	0,00	(6.538.000,00)	0		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.538.000,00	0,00	(6.538.000,00)	0		
02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	12.754.000,00	0,00	(12.754.000,00)	0		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.754.000,00	0,00	(12.754.000,00)	0		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.754.000,00	0,00	(12.754.000,00)	0		
02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00	87.470.500,00	(12.529.500,00)	87,47		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	87.470.500,00	(12.529.500,00)	87,47		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	87.470.500,00	(12.529.500,00)	87,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.794.900,00	76.273.200,00	(22.521.700,00)	77,20		
02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	64.240.500,00	55.186.200,00	(9.054.300,00)	85,91		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.240.500,00	55.186.200,00	(9.054.300,00)	85,91		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.240.500,00	55.186.200,00	(9.054.300,00)	85,91		
02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	22.478.400,00	21.087.000,00	(1.391.400,00)	93,81		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.478.400,00	21.087.000,00	(1.391.400,00)	93,81		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.478.400,00	21.087.000,00	(1.391.400,00)	93,81		
02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	3.709.500,00	0,00	(3.709.500,00)	0		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.709.500,00	0,00	(3.709.500,00)	0		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.709.500,00	0,00	(3.709.500,00)	0		
02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	8.366.500,00	0,00	(8.366.500,00)	0		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.366.500,00	0,00	(8.366.500,00)	0		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.366.500,00	0,00	(8.366.500,00)	0		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	381.350.000,00	58.550.100,00	(322.799.900,00)	15,35		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000,00	58.550.100,00	(141.449.900,00)	29,28		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	58.550.100,00	(141.449.900,00)	29,28		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	58.550.100,00	(141.449.900,00)	29,28		
02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	0		
02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0		
02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	271.200.000,00	253.449.478,00	(17.750.522,00)	93,45		
02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	221.200.000,00	205.741.650,00	(15.458.350,00)	93,01		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	221.200.000,00	205.741.650,00	(15.458.350,00)	93,01		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.200.000,00	205.741.650,00	(15.458.350,00)	93,01		
02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000,00	47.707.828,00	(2.292.172,00)	95,42		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.707.828,00	(2.292.172,00)	95,42		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.707.828,00	(2.292.172,00)	95,42		
02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000,00	39.700.920,00	(30.299.080,00)	56,72		
02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000,00	39.700.920,00	(30.299.080,00)	56,72		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	39.700.920,00	(30.299.080,00)	56,72		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	39.700.920,00	(30.299.080,00)	56,72		
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	5.933.655.393,00	5.630.776.466,00	(302.878.927,00)	94,90		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.844.355.393,00	4.651.343.566,00	(193.011.827,00)	96,02		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.792.855.393,00	3.650.561.416,00	(142.293.977,00)	96,25		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.792.855.393,00	3.650.561.416,00	(142.293.977,00)	96,25		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.792.855.393,00	3.650.561.416,00	(142.293.977,00)	96,25		
02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	44.865.000,00	(5.135.000,00)	89,73		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.865.000,00	(5.135.000,00)	89,73		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.865.000,00	(5.135.000,00)	89,73		
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.500.000,00	9.748.000,00	(1.752.000,00)	84,77		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	9.748.000,00	(1.752.000,00)	84,77		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	9.748.000,00	(1.752.000,00)	84,77		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	206.500.000,00	196.021.400,00	(10.478.600,00)	94,93		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	206.500.000,00	196.021.400,00	(10.478.600,00)	94,93		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.500.000,00	196.021.400,00	(10.478.600,00)	94,93		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	749.500.000,00	722.434.750,00	(27.065.250,00)	96,39		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	739.500.000,00	722.434.750,00	(17.065.250,00)	97,69		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.500.000,00	722.434.750,00	(17.065.250,00)	97,69		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
02.2.01.05.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.500.000,00	21.329.000,00	(4.171.000,00)	83,64		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	21.329.000,00	(4.171.000,00)	83,64		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	21.329.000,00	(4.171.000,00)	83,64		
02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.500.000,00	6.384.000,00	(2.116.000,00)	75,11		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	6.384.000,00	(2.116.000,00)	75,11		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	6.384.000,00	(2.116.000,00)	75,11		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.086.300.000,00	976.472.900,00	(109.827.100,00)	89,89		
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	55.000.000,00	50.996.000,00	(4.004.000,00)	92,72		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	50.996.000,00	(4.004.000,00)	92,72		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	50.996.000,00	(4.004.000,00)	92,72		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	451.000.000,00	415.042.400,00	(35.957.600,00)	92,03		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	451.000.000,00	415.042.400,00	(35.957.600,00)	92,03		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.000.000,00	415.042.400,00	(35.957.600,00)	92,03		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	580.300.000,00	510.434.500,00	(69.865.500,00)	87,96		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	580.300.000,00	510.434.500,00	(69.865.500,00)	87,96		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.300.000,00	510.434.500,00	(69.865.500,00)	87,96		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,67		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,67		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,67		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,67		
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	2.238.350.000,00	2.145.432.592,00	(92.917.408,00)	95,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.238.350.000,00	2.145.432.592,00	(92.917.408,00)	95,85		
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	647.000.000,00	641.340.852,00	(5.659.148,00)	99,13		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	647.000.000,00	641.340.852,00	(5.659.148,00)	99,13		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.990.000,00	640.330.852,00	(5.659.148,00)	99,12		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.570.350.000,00	1.487.044.840,00	(83.305.160,00)	94,70		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.570.350.000,00	1.487.044.840,00	(83.305.160,00)	94,70		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.740.000,00	735.434.840,00	(83.305.160,00)	89,83		
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	21.000.000,00	17.046.900,00	(3.953.100,00)	81,18		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	17.046.900,00	(3.953.100,00)	81,18		
02.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000,00	17.046.900,00	(2.943.100,00)	85,28		
02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	5.000.000,00	2.743.200,00	(2.256.800,00)	54,86		
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.000.000,00	2.743.200,00	(2.256.800,00)	54,86		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000,00	2.743.200,00	(2.256.800,00)	54,86		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.743.200,00	(2.256.800,00)	54,86		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.743.200,00	(2.256.800,00)	54,86		
02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	77.450.000,00	73.107.817,00	(4.342.183,00)	94,39		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	47.700.000,00	44.982.467,00	(2.717.533,00)	94,30		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	25.000.000,00	22.820.567,00	(2.179.433,00)	91,28		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.820.567,00	(2.179.433,00)	91,28		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.820.567,00	(2.179.433,00)	91,28		
02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	22.700.000,00	22.161.900,00	(538.100,00)	97,63		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.700.000,00	22.161.900,00	(538.100,00)	97,63		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	22.161.900,00	(538.100,00)	97,63		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.750.000,00	23.125.350,00	(1.624.650,00)	93,44		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.750.000,00	23.125.350,00	(1.624.650,00)	93,44		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	23.125.350,00	(1.624.650,00)	93,44		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	23.125.350,00	(1.624.650,00)	93,44		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	(32.317.250,00)	98,04		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	(32.317.250,00)	98,04		
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	(32.317.250,00)	98,04		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	(32.317.250,00)	98,04		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	(32.317.250,00)	98,04		
02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	724.322.000,00	648.895.779,00	(75.426.221,00)	89,59		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	324.322.000,00	279.558.815,00	(44.763.185,00)	86,20		
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000,00	104.350.500,00	(20.649.500,00)	83,48		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	104.350.500,00	(20.649.500,00)	83,48		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	104.350.500,00	(20.649.500,00)	83,48		
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.322.000,00	175.208.315,00	(24.113.685,00)	87,90		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	199.322.000,00	175.208.315,00	(24.113.685,00)	87,90		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.322.000,00	175.208.315,00	(24.113.685,00)	87,90		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	400.000.000,00	369.336.964,00	(30.663.036,00)	92,33		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	400.000.000,00	369.336.964,00	(30.663.036,00)	92,33		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	369.336.964,00	(30.663.036,00)	92,33		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	369.336.964,00	(30.663.036,00)	92,33		
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	647.910.000,00	628.310.068,00	(19.599.932,00)	96,97		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	634.980.000,00	617.274.768,00	(17.705.232,00)	97,21		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	607.856.000,00	591.240.568,00	(16.615.432,00)	97,27		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	607.856.000,00	591.240.568,00	(16.615.432,00)	97,27		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.856.000,00	591.240.568,00	(16.615.432,00)	97,27		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.124.000,00	16.455.200,00	(668.800,00)	96,09		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.124.000,00	16.455.200,00	(668.800,00)	96,09		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.124.000,00	16.455.200,00	(668.800,00)	96,09		
02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.000.000,00	9.579.000,00	(421.000,00)	95,79		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.579.000,00	(421.000,00)	95,79		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.579.000,00	(421.000,00)	95,79		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12.930.000,00	11.035.300,00	(1.894.700,00)	85,35		
02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.930.000,00	5.765.300,00	(1.164.700,00)	83,19		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.930.000,00	5.765.300,00	(1.164.700,00)	83,19		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	5.765.300,00	(1.164.700,00)	83,19		
02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	6.000.000,00	5.270.000,00	(730.000,00)	87,83		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.270.000,00	(730.000,00)	87,83		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.270.000,00	(730.000,00)	87,83		
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	1.022.470.000,00	963.479.616,00	(58.990.384,00)	94,23		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.017.470.000,00	958.479.816,00	(58.990.184,00)	94,20		
02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	63.100.200,00	(1.099.800,00)	98,29		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	63.100.200,00	(1.099.800,00)	98,29		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	63.100.200,00	(1.099.800,00)	98,29		
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	474.970.000,00	468.199.168,00	(6.770.832,00)	98,57		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	474.970.000,00	468.199.168,00	(6.770.832,00)	98,57		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.970.000,00	468.199.168,00	(6.770.832,00)	98,57		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	349.800.000,00	336.043.000,00	(13.757.000,00)	96,07		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	349.800.000,00	336.043.000,00	(13.757.000,00)	96,07		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800.000,00	336.043.000,00	(13.757.000,00)	96,07		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000,00	88.637.448,00	(37.362.552,00)	70,35		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	126.000.000,00	88.637.448,00	(37.362.552,00)	70,35		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	88.637.448,00	(37.362.552,00)	70,35		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	17.768.702.000,00	16.809.564.992,00	(959.137.008,00)	94,60		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.261.627.900,00	10.541.942.630,00	(719.685.270,00)	93,61		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.062.127.900,00	6.663.373.700,00	(398.754.200,00)	94,35		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.051.050,00	38.820.300,00	(3.230.750,00)	92,32		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.051.050,00	38.820.300,00	(3.230.750,00)	92,32		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	7.020.076.850,00	6.624.553.400,00	(395.523.450,00)	94,37		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.962.064.080,00	2.623.707.000,00	(338.357.080,00)	88,58		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.058.012.770,00	4.000.846.400,00	(57.166.370,00)	98,59		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.199.500.000,00	3.878.568.930,00	(320.931.070,00)	92,36		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.199.500.000,00	3.878.568.930,00	(320.931.070,00)	92,36		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.199.500.000,00	3.878.568.930,00	(320.931.070,00)	92,36		
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000,00	190.766.479,00	(9.233.521,00)	95,38		
02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	200.000.000,00	190.766.479,00	(9.233.521,00)	95,38		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	190.766.479,00	(9.233.521,00)	95,38		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	190.766.479,00	(9.233.521,00)	95,38		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.200.000.000,00	1.177.818.700,00	(22.181.300,00)	98,15		
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	1.177.818.700,00	(22.181.300,00)	98,15		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.177.818.700,00	(22.181.300,00)	98,15		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.177.818.700,00	(22.181.300,00)	98,15		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.437.891.000,00	1.382.113.950,00	(55.777.050,00)	96,12		
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	807.891.000,00	783.050.400,00	(24.840.600,00)	96,93		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.476.000,00	1.403.400,00	(72.600,00)	95,08		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	1.403.400,00	(72.600,00)	95,08		
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	806.415.000,00	781.647.000,00	(24.768.000,00)	96,93		
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	806.415.000,00	781.647.000,00	(24.768.000,00)	96,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	151.470.200,00	(23.529.800,00)	86,55		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	151.470.200,00	(23.529.800,00)	86,55		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	151.470.200,00	(23.529.800,00)	86,55		
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	255.000.000,00	254.837.800,00	(162.200,00)	99,94		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	255.000.000,00	254.837.800,00	(162.200,00)	99,94		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	254.837.800,00	(162.200,00)	99,94		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	192.755.550,00	(7.244.450,00)	96,38		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	192.755.550,00	(7.244.450,00)	96,38		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	192.755.550,00	(7.244.450,00)	96,38		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.011.583.100,00	2.936.389.660,00	(75.193.440,00)	97,50		
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	646.119.000,00	619.581.720,00	(26.537.280,00)	95,89		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	646.119.000,00	619.581.720,00	(26.537.280,00)	95,89		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.119.000,00	619.581.720,00	(26.537.280,00)	95,89		
02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	157.206.300,00	(2.793.700,00)	98,25		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	157.206.300,00	(2.793.700,00)	98,25		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	157.206.300,00	(2.793.700,00)	98,25		
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.055.464.100,00	2.013.888.290,00	(41.575.810,00)	97,98		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.055.464.100,00	2.013.888.290,00	(41.575.810,00)	97,98		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.055.464.100,00	2.013.888.290,00	(41.575.810,00)	97,98		
02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	145.713.350,00	(4.286.650,00)	97,14		
02.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.713.350,00	(4.286.650,00)	97,14		
02.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.713.350,00	(4.286.650,00)	97,14		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	38.888.800,00	(6.111.200,00)	86,42		
02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30.000.000,00	24.584.000,00	(5.416.000,00)	81,95		
02.2.07.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	24.584.000,00	(5.416.000,00)	81,95		
02.2.07.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	24.584.000,00	(5.416.000,00)	81,95		
02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15.000.000,00	14.304.800,00	(695.200,00)	95,37		
02.2.07.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.304.800,00	(695.200,00)	95,37		
02.2.07.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.304.800,00	(695.200,00)	95,37		
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	346.000.000,00	304.466.273,00	(41.533.727,00)	88,00		
02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	206.000.000,00	193.533.423,00	(12.466.577,00)	93,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.000.000,00	193.533.423,00	(12.466.577,00)	93,95		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000,00	193.533.423,00	(12.466.577,00)	93,95		
02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	48.751.000,00	(1.249.000,00)	97,50		
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.751.000,00	(1.249.000,00)	97,50		
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.751.000,00	(1.249.000,00)	97,50		
02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10.000.000,00	9.597.450,00	(402.550,00)	95,97		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.597.450,00	(402.550,00)	95,97		
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.597.450,00	(402.550,00)	95,97		
02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	60.000.000,00	33.129.800,00	(26.870.200,00)	55,22		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	33.129.800,00	(26.870.200,00)	55,22		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	33.129.800,00	(26.870.200,00)	55,22		
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000,00	19.454.600,00	(545.400,00)	97,27		
02.2.08.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.454.600,00	(545.400,00)	97,27		
02.2.08.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.454.600,00	(545.400,00)	97,27		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	246.600.000,00	218.152.300,00	(28.447.700,00)	88,46		
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	246.600.000,00	218.152.300,00	(28.447.700,00)	88,46		
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	246.600.000,00	218.152.300,00	(28.447.700,00)	88,46		
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.600.000,00	218.152.300,00	(28.447.700,00)	88,46		
02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.330.000,00	(670.000,00)	93,30		
02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.330.000,00	(670.000,00)	93,30		
02.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.330.000,00	(670.000,00)	93,30		
02.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.330.000,00	(670.000,00)	93,30		
02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.696.200,00	(303.800,00)	96,96		
02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.696.200,00	(303.800,00)	96,96		
02.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.696.200,00	(303.800,00)	96,96		
02.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.696.200,00	(303.800,00)	96,96		
02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	6.291.116.075,00	5.979.964.264,00	(311.151.811,00)	95,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.291.116.075,00	5.979.964.264,00	(311.151.811,00)	95,05		
02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4.865.000,00	3.366.300,00	(1.498.700,00)	69,19		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.865.000,00	3.366.300,00	(1.498.700,00)	69,19		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.865.000,00	3.366.300,00	(1.498.700,00)	69,19		
02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.305.000,00	17.561.550,00	(2.743.450,00)	86,49		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.305.000,00	17.561.550,00	(2.743.450,00)	86,49		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.305.000,00	17.561.550,00	(2.743.450,00)	86,49		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	585.165.200,00	505.632.100,00	(79.533.100,00)	86,41		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	585.165.200,00	505.632.100,00	(79.533.100,00)	86,41		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.165.200,00	505.632.100,00	(79.533.100,00)	86,41		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.172.870.000,00	1.128.907.700,00	(43.962.300,00)	96,25		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	583.291.586,00	547.857.700,00	(35.433.886,00)	93,93		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.291.586,00	547.857.700,00	(35.433.886,00)	93,93		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	589.578.414,00	581.050.000,00	(8.528.414,00)	98,55		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.578.414,00	581.050.000,00	(8.528.414,00)	98,55		
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	24.250.000,00	22.263.800,00	(1.986.200,00)	91,81		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	24.250.000,00	22.263.800,00	(1.986.200,00)	91,81		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	22.263.800,00	(1.986.200,00)	91,81		
02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	350.000.000,00	345.000.000,00	(5.000.000,00)	98,57		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	345.000.000,00	(5.000.000,00)	98,57		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	96,67		
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	189.312.875,00	184.187.640,00	(5.125.235,00)	97,29		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	189.312.875,00	184.187.640,00	(5.125.235,00)	97,29		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.312.875,00	184.187.640,00	(5.125.235,00)	97,29		
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3.944.348.000,00	3.773.045.174,00	(171.302.826,00)	95,66		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.944.348.000,00	3.773.045.174,00	(171.302.826,00)	95,66		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.944.348.000,00	3.773.045.174,00	(171.302.826,00)	95,66		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	288.990.450,00	277.769.685,00	(11.220.765,00)	96,12		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	217.345.450,00	208.673.935,00	(8.671.515,00)	96,01		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	157.345.450,00	151.532.735,00	(5.812.715,00)	96,31		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.345.450,00	151.532.735,00	(5.812.715,00)	96,31		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.345.450,00	151.532.735,00	(5.812.715,00)	96,31		
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	60.000.000,00	57.141.200,00	(2.858.800,00)	95,24		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	57.141.200,00	(2.858.800,00)	95,24		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.141.200,00	(2.858.800,00)	95,24		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	71.645.000,00	69.095.750,00	(2.549.250,00)	96,44		
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	71.645.000,00	69.095.750,00	(2.549.250,00)	96,44		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.645.000,00	69.095.750,00	(2.549.250,00)	96,44		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.645.000,00	69.095.750,00	(2.549.250,00)	96,44		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	697.710.036,00	681.909.285,00	(15.800.751,00)	97,74		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	630.225.036,00	614.499.285,00	(15.725.751,00)	97,50		
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	12.371.000,00	12.371.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.371.000,00	12.371.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.371.000,00	12.371.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	66.982.036,00	65.175.660,00	(1.806.376,00)	97,30		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.982.036,00	65.175.660,00	(1.806.376,00)	97,30		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.982.036,00	65.175.660,00	(1.806.376,00)	97,30		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	42.495.500,00	41.681.125,00	(814.375,00)	98,08		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.495.500,00	41.681.125,00	(814.375,00)	98,08		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.495.500,00	41.681.125,00	(814.375,00)	98,08		
02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	90.129.250,00	86.487.250,00	(3.642.000,00)	95,96		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	90.129.250,00	86.487.250,00	(3.642.000,00)	95,96		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.129.250,00	86.487.250,00	(3.642.000,00)	95,96		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	50.642.750,00	48.942.750,00	(1.700.000,00)	96,64		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.642.750,00	48.942.750,00	(1.700.000,00)	96,64		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.642.750,00	48.942.750,00	(1.700.000,00)	96,64		
02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	18.285.000,00	14.785.000,00	(3.500.000,00)	80,86		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.285.000,00	14.785.000,00	(3.500.000,00)	80,86		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.285.000,00	14.785.000,00	(3.500.000,00)	80,86		
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	28.539.000,00	26.539.000,00	(2.000.000,00)	92,99		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.539.000,00	26.539.000,00	(2.000.000,00)	92,99		
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.119.000,00	24.119.000,00	(2.000.000,00)	92,34		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	320.780.500,00	318.517.500,00	(2.263.000,00)	99,29		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	320.780.500,00	318.517.500,00	(2.263.000,00)	99,29		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.780.500,00	318.517.500,00	(2.263.000,00)	99,29		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.485.000,00	67.410.000,00	(75.000,00)	99,89		
02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	17.485.000,00	17.410.000,00	(75.000,00)	99,57		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.485.000,00	17.410.000,00	(75.000,00)	99,57		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.465.000,00	15.390.000,00	(75.000,00)	99,52		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	152.105.000,00	130.389.322,00	(21.715.678,00)	85,72		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	152.105.000,00	130.389.322,00	(21.715.678,00)	85,72		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	52.105.000,00	46.797.520,00	(5.307.480,00)	89,81		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.105.000,00	46.797.520,00	(5.307.480,00)	89,81		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.105.000,00	46.797.520,00	(5.307.480,00)	89,81		
02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000,00	83.591.802,00	(16.408.198,00)	83,59		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.591.802,00	(16.408.198,00)	83,59		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.591.802,00	(16.408.198,00)	83,59		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	388.642.000,00	368.003.216,00	(20.638.784,00)	94,69		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	388.642.000,00	368.003.216,00	(20.638.784,00)	94,69		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	199.842.000,00	186.689.416,00	(13.152.584,00)	93,42		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	199.842.000,00	186.689.416,00	(13.152.584,00)	93,42		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.842.000,00	186.689.416,00	(13.152.584,00)	93,42		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.800.000,00	181.313.800,00	(7.486.200,00)	96,03		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	188.800.000,00	181.313.800,00	(7.486.200,00)	96,03		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.800.000,00	181.313.800,00	(7.486.200,00)	96,03		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	5.462.851.722,00	4.838.121.257,00	(624.730.465,00)	88,56		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.151.521.472,00	1.037.334.075,00	(114.187.397,00)	90,08		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.055.845.000,00	968.018.455,00	(87.826.545,00)	91,68		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.055.845.000,00	968.018.455,00	(87.826.545,00)	91,68		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	0		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.435.000,00	968.018.455,00	(86.416.545,00)	91,80		
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	95.676.472,00	69.315.620,00	(26.360.852,00)	72,45		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.676.472,00	69.315.620,00	(26.360.852,00)	72,45		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.676.472,00	69.315.620,00	(26.360.852,00)	72,45		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.311.330.250,00	3.800.787.182,00	(510.543.068,00)	88,16		
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.916.559.950,00	3.436.190.182,00	(480.369.768,00)	87,73		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.804.701.025,00	3.334.190.182,00	(470.510.843,00)	87,63		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	0		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.802.791.025,00	3.334.190.182,00	(468.600.843,00)	87,68		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	111.858.925,00	102.000.000,00	(9.858.925,00)	91,19		
02.2.02.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.858.925,00	102.000.000,00	(9.858.925,00)	91,19		
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	44.770.300,00	14.597.000,00	(30.173.300,00)	32,60		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.770.300,00	14.597.000,00	(30.173.300,00)	32,60		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.770.300,00	14.597.000,00	(30.173.300,00)	32,60		
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	365.863.000,00	334.314.959,00	(31.548.041,00)	91,38		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.667.000,00	110.483.602,00	(3.183.398,00)	97,20		
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	5.000.000,00	4.629.500,00	(370.500,00)	92,59		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.335.000,00	3.229.500,00	(105.500,00)	96,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	3.229.500,00	(105.500,00)	96,84		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.665.000,00	1.400.000,00	(265.000,00)	84,08		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	1.400.000,00	(265.000,00)	84,08		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	27.875.000,00	25.714.750,00	(2.160.250,00)	92,25		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.625.000,00	17.464.750,00	(2.160.250,00)	88,99		
02.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.205.000,00	15.044.750,00	(2.160.250,00)	87,44		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.770.550,00	(229.450,00)	97,71		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.770.550,00	(229.450,00)	97,71		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	8.760.550,00	(229.450,00)	97,45		
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.981.850,00	(18.150,00)	99,64		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.981.850,00	(18.150,00)	99,64		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.981.850,00	(18.150,00)	99,64		
02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	62.792.000,00	62.397.952,00	(394.048,00)	99,37		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	11.826.800,00	11.444.450,00	(382.350,00)	96,77		
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.406.800,00	9.024.450,00	(382.350,00)	95,94		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	50.965.200,00	50.953.502,00	(11.698,00)	99,98		
02.2.01.08.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.965.200,00	50.953.502,00	(11.698,00)	99,98		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	3.000.000,00	2.989.000,00	(11.000,00)	99,63		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.989.000,00	(11.000,00)	99,63		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.989.000,00	(11.000,00)	99,63		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	252.196.000,00	223.831.357,00	(28.364.643,00)	88,75		
02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	198.336.000,00	177.508.657,00	(20.827.343,00)	89,50		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	166.684.800,00	155.858.657,00	(10.826.143,00)	93,51		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.264.800,00	153.438.657,00	(10.826.143,00)	93,41		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	31.651.200,00	21.650.000,00	(10.001.200,00)	68,40		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.651.200,00	21.650.000,00	(10.001.200,00)	68,40		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	53.860.000,00	46.322.700,00	(7.537.300,00)	86,01		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.860.000,00	46.322.700,00	(7.537.300,00)	86,01		
02.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.450.000,00	44.912.700,00	(7.537.300,00)	85,63		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	212.209.000,00	203.843.696,00	(8.365.304,00)	96,06		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	185.359.000,00	177.295.456,00	(8.063.544,00)	95,65		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	85.583.000,00	83.779.416,00	(1.803.584,00)	97,89		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	85.583.000,00	83.779.416,00	(1.803.584,00)	97,89		
02.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.573.000,00	82.769.416,00	(1.803.584,00)	97,87		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	99.776.000,00	93.516.040,00	(6.259.960,00)	93,73		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.776.000,00	87.516.040,00	(6.259.960,00)	93,32		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.536.000,00	82.276.040,00	(6.259.960,00)	92,93		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	16.850.000,00	16.679.840,00	(170.160,00)	98,99		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	16.850.000,00	16.679.840,00	(170.160,00)	98,99		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.850.000,00	16.679.840,00	(170.160,00)	98,99		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	16.679.840,00	(170.160,00)	98,99		
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.868.400,00	(131.600,00)	98,68		
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10.000.000,00	9.868.400,00	(131.600,00)	98,68		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.868.400,00	(131.600,00)	98,68		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.868.400,00	(131.600,00)	98,68		
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	8.449.540.883,00	7.712.881.737,00	(736.659.146,00)	91,28		
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.854.700,00	(2.145.300,00)	98,57		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.981.200,00	(2.018.800,00)	93,27		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.981.200,00	(2.018.800,00)	93,27		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.981.200,00	(2.018.800,00)	93,27		
02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	90.000.000,00	89.891.500,00	(108.500,00)	99,88		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.891.500,00	(108.500,00)	99,88		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.891.500,00	(108.500,00)	99,88		
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.982.000,00	(18.000,00)	99,91		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.982.000,00	(18.000,00)	99,91		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.982.000,00	(18.000,00)	99,91		
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	205.000.000,00	193.489.000,00	(11.511.000,00)	94,38		
02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.992.300,00	(7.700,00)	99,92		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.992.300,00	(7.700,00)	99,92		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.992.300,00	(7.700,00)	99,92		
02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	195.000.000,00	183.496.700,00	(11.503.300,00)	94,10		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	195.000.000,00	183.496.700,00	(11.503.300,00)	94,10		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	183.496.700,00	(11.503.300,00)	94,10		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.024.540.883,00	7.306.002.337,00	(718.538.546,00)	91,05		
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	295.254.355,00	(4.745.645,00)	98,42		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	295.254.355,00	(4.745.645,00)	98,42		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	295.254.355,00	(4.745.645,00)	98,42		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000,00	16.916.500,00	(3.083.500,00)	84,58		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.916.500,00	(3.083.500,00)	84,58		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.916.500,00	(3.083.500,00)	84,58		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.438.308.883,00	6.744.060.982,00	(694.247.901,00)	90,67		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.229.802.883,00	1.181.179.800,00	(48.623.083,00)	96,05		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.982.883,00	1.177.359.800,00	(48.623.083,00)	96,03		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	6.208.506.000,00	5.562.881.182,00	(645.624.818,00)	89,60		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)	99,67		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.585.506.000,00	4.987.133.182,00	(598.372.818,00)	89,29		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	608.000.000,00	560.798.000,00	(47.202.000,00)	92,24		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	241.232.000,00	234.592.000,00	(6.640.000,00)	97,25		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	241.232.000,00	234.592.000,00	(6.640.000,00)	97,25		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.232.000,00	234.592.000,00	(6.640.000,00)	97,25		
02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	25.000.000,00	15.178.500,00	(9.821.500,00)	60,71		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	15.178.500,00	(9.821.500,00)	60,71		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.178.500,00	(9.821.500,00)	60,71		
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	65.535.700,00	(4.464.300,00)	93,62		
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.000.000,00	43.386.400,00	(1.613.600,00)	96,41		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.386.400,00	(1.613.600,00)	96,41		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.386.400,00	(1.613.600,00)	96,41		
02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	25.000.000,00	22.149.300,00	(2.850.700,00)	88,60		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.149.300,00	(2.850.700,00)	88,60		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.149.300,00	(2.850.700,00)	88,60		
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	7.181.575.600,00	6.139.399.621,00	(1.042.175.979,00)	85,49		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.419.975.600,00	5.460.758.051,00	(959.217.549,00)	85,06		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.950.729.600,00	3.192.321.150,00	(758.408.450,00)	80,80		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.950.729.600,00	3.192.321.150,00	(758.408.450,00)	80,80		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.729.600,00	3.192.321.150,00	(758.408.450,00)	80,80		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.469.246.000,00	2.268.436.901,00	(200.809.099,00)	91,87		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.469.246.000,00	2.268.436.901,00	(200.809.099,00)	91,87		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.341.746.000,00	2.140.936.901,00	(200.809.099,00)	91,42		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	761.600.000,00	678.641.570,00	(82.958.430,00)	89,11		
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	500.000.000,00	448.117.750,00	(51.882.250,00)	89,62		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	451.000.000,00	400.867.750,00	(50.132.250,00)	88,88		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.000.000,00	400.867.750,00	(50.132.250,00)	88,88		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
02.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	47.250.000,00	(1.750.000,00)	96,43		
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	261.600.000,00	230.523.820,00	(31.076.180,00)	88,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	261.600.000,00	230.523.820,00	(31.076.180,00)	88,12		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000,00	230.523.820,00	(31.076.180,00)	88,12		
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	10.648.678.000,00	7.755.603.900,00	(2.893.074.100,00)	72,83		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	10.648.678.000,00	7.755.603.900,00	(2.893.074.100,00)	72,83		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.896.000.000,00	406.512.350,00	(2.489.487.650,00)	14,04		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.896.000.000,00	406.512.350,00	(2.489.487.650,00)	14,04		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.896.000.000,00	406.512.350,00	(2.489.487.650,00)	14,04		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.195.178.000,00	1.085.500.000,00	(109.678.000,00)	90,82		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.195.178.000,00	1.085.500.000,00	(109.678.000,00)	90,82		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.178.000,00	1.085.500.000,00	(109.678.000,00)	90,82		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.486.500.000,00	6.208.367.050,00	(278.132.950,00)	95,71		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.486.500.000,00	6.208.367.050,00	(278.132.950,00)	95,71		
02.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.450.000,00	6.208.367.050,00	(272.082.950,00)	95,80		
02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	71.000.000,00	55.224.500,00	(15.775.500,00)	77,78		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	55.224.500,00	(15.775.500,00)	77,78		
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.990.000,00	55.224.500,00	(14.765.500,00)	78,90		
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	11.455.097.000,00	9.397.999.479,00	(2.057.097.521,00)	82,04		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	451.143.000,00	432.170.865,00	(18.972.135,00)	95,79		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	15.000.000,00	14.788.500,00	(211.500,00)	98,59		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.788.500,00	(211.500,00)	98,59		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.788.500,00	(211.500,00)	98,59		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	200.700.000,00	191.395.365,00	(9.304.635,00)	95,36		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.700.000,00	191.395.365,00	(9.304.635,00)	95,36		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.700.000,00	191.395.365,00	(9.304.635,00)	95,36		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	235.443.000,00	225.987.000,00	(9.456.000,00)	95,98		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.443.000,00	225.987.000,00	(9.456.000,00)	95,98		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.443.000,00	225.987.000,00	(9.456.000,00)	95,98		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.323.034.000,00	7.364.339.172,00	(1.958.694.828,00)	78,99		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.425.000.000,00	5.658.041.672,00	(1.766.958.328,00)	76,20		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.915.224.032,00	5.229.658.672,00	(1.685.565.360,00)	75,63		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.915.224.032,00	5.229.658.672,00	(1.685.565.360,00)	75,63		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	509.775.968,00	428.383.000,00	(81.392.968,00)	84,03		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.255.968,00	404.263.000,00	(80.992.968,00)	83,31		
02.2.02.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.520.000,00	24.120.000,00	(400.000,00)	98,37		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.819.250.000,00	1.642.420.000,00	(176.830.000,00)	90,28		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.819.250.000,00	1.642.420.000,00	(176.830.000,00)	90,28		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.250.000,00	147.420.000,00	(26.830.000,00)	84,60		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.645.000.000,00	1.495.000.000,00	(150.000.000,00)	90,88		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	78.784.000,00	63.877.500,00	(14.906.500,00)	81,08		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.784.000,00	63.877.500,00	(14.906.500,00)	81,08		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.784.000,00	63.877.500,00	(14.906.500,00)	81,08		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.583.920.000,00	1.516.410.642,00	(67.509.358,00)	95,74		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	615.000.000,00	598.621.378,00	(16.378.622,00)	97,34		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	615.000.000,00	598.621.378,00	(16.378.622,00)	97,34		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	598.621.378,00	(16.378.622,00)	97,34		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	583.920.000,00	558.247.446,00	(25.672.554,00)	95,60		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	583.920.000,00	558.247.446,00	(25.672.554,00)	95,60		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.920.000,00	558.247.446,00	(25.672.554,00)	95,60		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	385.000.000,00	359.541.818,00	(25.458.182,00)	93,39		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	385.000.000,00	359.541.818,00	(25.458.182,00)	93,39		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	359.541.818,00	(25.458.182,00)	93,39		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	97.000.000,00	85.078.800,00	(11.921.200,00)	87,71		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	75.000.000,00	69.408.300,00	(5.591.700,00)	92,54		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	69.408.300,00	(5.591.700,00)	92,54		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	69.408.300,00	(5.591.700,00)	92,54		
02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	10.000.000,00	5.300.500,00	(4.699.500,00)	53,01		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.300.500,00	(4.699.500,00)	53,01		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.300.500,00	(4.699.500,00)	53,01		
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12.000.000,00	10.370.000,00	(1.630.000,00)	86,42		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	10.370.000,00	(1.630.000,00)	86,42		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.370.000,00	(1.630.000,00)	86,42		
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	26.057.245.021,00	23.129.886.737,00	(2.927.358.284,00)	88,77		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.977.438.000,00	5.596.607.948,00	(380.830.052,00)	93,63		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	692.710.000,00	655.129.800,00	(37.580.200,00)	94,57		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	692.710.000,00	655.129.800,00	(37.580.200,00)	94,57		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.710.000,00	655.129.800,00	(37.580.200,00)	94,57		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	5.204.728.000,00	4.871.228.148,00	(333.499.852,00)	93,59		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.204.728.000,00	4.871.228.148,00	(333.499.852,00)	93,59		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.204.728.000,00	4.871.228.148,00	(333.499.852,00)	93,59		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	80.000.000,00	70.250.000,00	(9.750.000,00)	87,81		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	70.250.000,00	(9.750.000,00)	87,81		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	70.250.000,00	(9.750.000,00)	87,81		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.464.688.000,00	1.303.122.765,00	(161.565.235,00)	88,97		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.464.688.000,00	1.303.122.765,00	(161.565.235,00)	88,97		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.464.688.000,00	1.303.122.765,00	(161.565.235,00)	88,97		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.464.688.000,00	1.303.122.765,00	(161.565.235,00)	88,97		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.547.300.000,00	6.110.234.056,00	(437.065.944,00)	93,32		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.876.924.000,00	1.728.177.358,00	(148.746.642,00)	92,07		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.876.924.000,00	1.728.177.358,00	(148.746.642,00)	92,07		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.876.924.000,00	1.728.177.358,00	(148.746.642,00)	92,07		
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.570.769.000,00	1.479.351.030,00	(91.417.970,00)	94,18		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.570.769.000,00	1.479.351.030,00	(91.417.970,00)	94,18		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.769.000,00	1.479.351.030,00	(91.417.970,00)	94,18		
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.513.590.000,00	1.360.375.600,00	(153.214.400,00)	89,88		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.513.590.000,00	1.360.375.600,00	(153.214.400,00)	89,88		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.513.590.000,00	1.360.375.600,00	(153.214.400,00)	89,88		
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.586.017.000,00	1.542.330.068,00	(43.686.932,00)	97,25		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.586.017.000,00	1.542.330.068,00	(43.686.932,00)	97,25		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.586.017.000,00	1.542.330.068,00	(43.686.932,00)	97,25		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.797.294.000,00	2.898.019.119,00	(899.274.881,00)	76,32		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.999.916.000,00	2.185.950.371,00	(813.965.629,00)	72,87		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.999.916.000,00	2.185.950.371,00	(813.965.629,00)	72,87		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.916.000,00	2.185.950.371,00	(813.965.629,00)	72,87		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	498.378.000,00	417.565.748,00	(80.812.252,00)	83,78		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	498.378.000,00	417.565.748,00	(80.812.252,00)	83,78		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.378.000,00	417.565.748,00	(80.812.252,00)	83,78		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.000.000,00	294.503.000,00	(4.497.000,00)	98,50		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	299.000.000,00	294.503.000,00	(4.497.000,00)	98,50		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.000.000,00	294.503.000,00	(4.497.000,00)	98,50		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.852.475.800,00	4.195.607.451,00	(656.868.349,00)	86,46		
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000,00	2.247.500,00	(27.752.500,00)	7,49		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	2.247.500,00	(27.752.500,00)	7,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	2.247.500,00	(27.752.500,00)	7,49		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.822.475.800,00	4.193.359.951,00	(629.115.849,00)	86,95		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.822.475.800,00	4.193.359.951,00	(629.115.849,00)	86,95		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.822.475.800,00	4.193.359.951,00	(629.115.849,00)	86,95		
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	348.645.000,00	181.857.900,00	(166.787.100,00)	52,16		
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	348.645.000,00	181.857.900,00	(166.787.100,00)	52,16		
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	348.645.000,00	181.857.900,00	(166.787.100,00)	52,16		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.645.000,00	181.857.900,00	(166.787.100,00)	52,16		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.069.404.221,00	2.844.437.498,00	(224.966.723,00)	92,67		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	189.389.021,00	133.876.312,00	(55.512.709,00)	70,69		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	189.389.021,00	133.876.312,00	(55.512.709,00)	70,69		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.389.021,00	133.876.312,00	(55.512.709,00)	70,69		
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.112.818.200,00	1.001.415.376,00	(111.402.824,00)	89,99		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.112.818.200,00	1.001.415.376,00	(111.402.824,00)	89,99		
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.818.200,00	1.001.415.376,00	(111.402.824,00)	89,99		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.767.197.000,00	1.709.145.810,00	(58.051.190,00)	96,72		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.767.197.000,00	1.709.145.810,00	(58.051.190,00)	96,72		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.767.197.000,00	1.709.145.810,00	(58.051.190,00)	96,72		
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	1.655.044.065,00	1.423.393.266,00	(231.650.799,00)	86,00		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.090.044.065,00	921.618.350,00	(168.425.715,00)	84,55		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	117.600.000,00	105.548.000,00	(12.052.000,00)	89,75		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.600.000,00	105.548.000,00	(12.052.000,00)	89,75		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.600.000,00	105.548.000,00	(12.052.000,00)	89,75		
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000,00	45.474.500,00	(4.525.500,00)	90,95		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.474.500,00	(4.525.500,00)	90,95		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.474.500,00	(4.525.500,00)	90,95		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	91.684.000,00	34.949.800,00	(56.734.200,00)	38,12		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	91.684.000,00	34.949.800,00	(56.734.200,00)	38,12		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.684.000,00	34.949.800,00	(56.734.200,00)	38,12		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	24.069.360,00	9.600.900,00	(14.468.460,00)	39,89		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.069.360,00	9.600.900,00	(14.468.460,00)	39,89		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.069.360,00	9.600.900,00	(14.468.460,00)	39,89		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.000.000,00	88.065.300,00	(11.934.700,00)	88,07		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	88.065.300,00	(11.934.700,00)	88,07		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	88.065.300,00	(11.934.700,00)	88,07		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.000.000,00	8.276.900,00	(6.723.100,00)	55,18		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.276.900,00	(6.723.100,00)	55,18		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.276.900,00	(6.723.100,00)	55,18		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	691.690.705,00	629.702.950,00	(61.987.755,00)	91,04		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	691.690.705,00	629.702.950,00	(61.987.755,00)	91,04		
02.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	24.080.000,00	12.690.000,00	(11.390.000,00)	52,70		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.610.705,00	617.012.950,00	(50.597.755,00)	92,42		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	180.495.900,00	(19.504.100,00)	90,25		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	180.495.900,00	(19.504.100,00)	90,25		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	180.495.900,00	(19.504.100,00)	90,25		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	180.495.900,00	(19.504.100,00)	90,25		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	365.000.000,00	321.279.016,00	(43.720.984,00)	88,02		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	250.000.000,00	212.777.436,00	(37.222.564,00)	85,11		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	212.777.436,00	(37.222.564,00)	85,11		
02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	0,00	(16.920.000,00)	0		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.080.000,00	212.777.436,00	(20.302.564,00)	91,29		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	115.000.000,00	108.501.580,00	(6.498.420,00)	94,35		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	108.501.580,00	(6.498.420,00)	94,35		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	108.501.580,00	(6.498.420,00)	94,35		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	765.714.530.507,00	524.650.124.263,00	(241.064.406.244,00)	68,52		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.591.204.000,00	2.381.806.541,00	(209.397.459,00)	91,92		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	192.812.000,00	186.672.600,00	(6.139.400,00)	96,82		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	192.812.000,00	186.672.600,00	(6.139.400,00)	96,82		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.812.000,00	186.672.600,00	(6.139.400,00)	96,82		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	192.812.000,00	181.784.100,00	(11.027.900,00)	94,28		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	192.812.000,00	181.784.100,00	(11.027.900,00)	94,28		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.812.000,00	181.784.100,00	(11.027.900,00)	94,28		
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	30.740.000,00	26.175.300,00	(4.564.700,00)	85,15		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	26.175.300,00	(4.564.700,00)	85,15		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	26.175.300,00	(4.564.700,00)	85,15		
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	35.316.000,00	32.502.350,00	(2.813.650,00)	92,03		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.316.000,00	32.502.350,00	(2.813.650,00)	92,03		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.316.000,00	32.502.350,00	(2.813.650,00)	92,03		
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	7.085.000,00	6.855.500,00	(229.500,00)	96,76		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.085.000,00	6.855.500,00	(229.500,00)	96,76		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	6.855.500,00	(229.500,00)	96,76		
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	11.025.000,00	10.271.250,00	(753.750,00)	93,16		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.025.000,00	10.271.250,00	(753.750,00)	93,16		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	10.271.250,00	(753.750,00)	93,16		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	637.474.000,00	553.743.600,00	(83.730.400,00)	86,87		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	637.474.000,00	553.743.600,00	(83.730.400,00)	86,87		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.474.000,00	553.743.600,00	(83.730.400,00)	86,87		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	738.940.000,00	656.531.841,00	(82.408.159,00)	88,85		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	738.940.000,00	656.531.841,00	(82.408.159,00)	88,85		
02.2.01.08.5.1.01	Belanja Pegawai	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.390.000,00	646.981.841,00	(82.408.159,00)	88,70		
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	745.000.000,00	727.270.000,00	(17.730.000,00)	97,62		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	745.000.000,00	727.270.000,00	(17.730.000,00)	97,62		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.000.000,00	727.270.000,00	(17.730.000,00)	97,62		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	877.306.000,00	694.669.746,00	(182.636.254,00)	79,18		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	55.000.000,00	42.905.720,00	(12.094.280,00)	78,01		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	42.905.720,00	(12.094.280,00)	78,01		
02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.340.000,00	33.245.720,00	(12.094.280,00)	73,33		
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	19.000.000,00	13.243.600,00	(5.756.400,00)	69,70		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	13.243.600,00	(5.756.400,00)	69,70		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	13.243.600,00	(5.756.400,00)	69,70		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.500.000,00	44.488.859,00	(28.011.141,00)	61,36		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	72.500.000,00	44.488.859,00	(28.011.141,00)	61,36		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	44.488.859,00	(28.011.141,00)	61,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.306.000,00	63.764.800,00	(3.541.200,00)	94,74		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	67.306.000,00	63.764.800,00	(3.541.200,00)	94,74		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.306.000,00	63.764.800,00	(3.541.200,00)	94,74		
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	75.000.000,00	66.901.550,00	(8.098.450,00)	89,20		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	66.901.550,00	(8.098.450,00)	89,20		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	66.901.550,00	(8.098.450,00)	89,20		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100.000.000,00	92.793.031,00	(7.206.969,00)	92,79		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	92.793.031,00	(7.206.969,00)	92,79		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.793.031,00	(7.206.969,00)	92,79		
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	22.000.000,00	15.133.700,00	(6.866.300,00)	68,79		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	15.133.700,00	(6.866.300,00)	68,79		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	15.133.700,00	(6.866.300,00)	68,79		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	466.500.000,00	355.438.486,00	(111.061.514,00)	76,19		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	466.500.000,00	355.438.486,00	(111.061.514,00)	76,19		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.500.000,00	355.438.486,00	(111.061.514,00)	76,19		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.455.668.000,00	1.438.277.213,00	(17.390.787,00)	98,81		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	65.577.000,00	64.702.600,00	(874.400,00)	98,67		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.577.000,00	64.702.600,00	(874.400,00)	98,67		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.577.000,00	64.702.600,00	(874.400,00)	98,67		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.090.000,00	(910.000,00)	99,09		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.090.000,00	(910.000,00)	99,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.090.000,00	(910.000,00)	99,09		
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.440.000,00	52.761.105,00	(678.895,00)	98,73		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	53.440.000,00	52.761.105,00	(678.895,00)	98,73		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.440.000,00	52.761.105,00	(678.895,00)	98,73		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	551.651.000,00	538.853.508,00	(12.797.492,00)	97,68		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	492.543.500,00	482.633.508,00	(9.909.992,00)	97,99		
02.2.03.10.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.223.500,00	463.313.508,00	(9.909.992,00)	97,91		
02.2.03.10.5.2	BELANJA MODAL	59.107.500,00	56.220.000,00	(2.887.500,00)	95,11		
02.2.03.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.107.500,00	56.220.000,00	(2.887.500,00)	95,11		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	685.000.000,00	682.870.000,00	(2.130.000,00)	99,69		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	685.000.000,00	682.870.000,00	(2.130.000,00)	99,69		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.000.000,00	682.870.000,00	(2.130.000,00)	99,69		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	760.790.352.507,00	520.135.370.763,00	(240.654.981.744,00)	68,37		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	718.074.784.808,00	501.421.103.500,00	(216.653.681.308,00)	69,83		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	73.761.248,00	15.642.500,00	(58.118.748,00)	21,21		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.761.248,00	15.642.500,00	(58.118.748,00)	21,21		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	718.001.023.560,00	501.405.461.000,00	(216.595.562.560,00)	69,83		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560,00	501.405.461.000,00	(216.595.562.560,00)	69,83		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	(3.275.894.556,00)	84,64		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	(3.275.894.556,00)	84,64		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	(3.275.894.556,00)	84,64		
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	2.420.118.500,00	2.026.232.639,00	(393.885.861,00)	83,72		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	843.817.100,00	700.744.193,00	(143.072.907,00)	83,04		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	542.026.550,00	404.836.531,00	(137.190.019,00)	74,69		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	542.026.550,00	404.836.531,00	(137.190.019,00)	74,69		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.026.550,00	404.836.531,00	(137.190.019,00)	74,69		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	57.456.650,00	54.919.000,00	(2.537.650,00)	95,58		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.456.650,00	54.919.000,00	(2.537.650,00)	95,58		
02.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.336.650,00	42.799.000,00	(2.537.650,00)	94,40		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	7.724.500,00	7.300.000,00	(424.500,00)	94,50		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.724.500,00	7.300.000,00	(424.500,00)	94,50		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.724.500,00	7.300.000,00	(424.500,00)	94,50		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	47.757.200,00	46.349.312,00	(1.407.888,00)	97,05		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	47.757.200,00	46.349.312,00	(1.407.888,00)	97,05		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.757.200,00	46.349.312,00	(1.407.888,00)	97,05		
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	188.852.200,00	187.339.350,00	(1.512.850,00)	99,20		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	188.852.200,00	187.339.350,00	(1.512.850,00)	99,20		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.852.200,00	187.339.350,00	(1.512.850,00)	99,20		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	480.980.079,00	388.371.043,00	(92.609.036,00)	80,75		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	280.000.000,00	223.261.253,00	(56.738.747,00)	79,74		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	223.261.253,00	(56.738.747,00)	79,74		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	223.261.253,00	(56.738.747,00)	79,74		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.980.079,00	165.109.790,00	(35.870.289,00)	82,15		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.980.079,00	165.109.790,00	(35.870.289,00)	82,15		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.980.079,00	165.109.790,00	(35.870.289,00)	82,15		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	779.868.321,00	649.870.088,00	(129.998.233,00)	83,33		
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	691.509.600,00	569.378.758,00	(122.130.842,00)	82,34		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	691.509.600,00	569.378.758,00	(122.130.842,00)	82,34		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.509.600,00	569.378.758,00	(122.130.842,00)	82,34		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	41.057.179,00	37.487.290,00	(3.569.889,00)	91,31		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.057.179,00	37.487.290,00	(3.569.889,00)	91,31		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.057.179,00	37.487.290,00	(3.569.889,00)	91,31		
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	47.301.542,00	43.004.040,00	(4.297.502,00)	90,91		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	47.301.542,00	43.004.040,00	(4.297.502,00)	90,91		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.301.542,00	43.004.040,00	(4.297.502,00)	90,91		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	315.453.000,00	287.247.315,00	(28.205.685,00)	91,06		
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.752.500,00	38.710.275,00	(1.042.225,00)	97,38		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.752.500,00	38.710.275,00	(1.042.225,00)	97,38		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.752.500,00	38.710.275,00	(1.042.225,00)	97,38		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	28.073.500,00	21.541.250,00	(6.532.250,00)	76,73		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.073.500,00	21.541.250,00	(6.532.250,00)	76,73		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.073.500,00	21.541.250,00	(6.532.250,00)	76,73		
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	210.000.000,00	194.472.790,00	(15.527.210,00)	92,61		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	194.472.790,00	(15.527.210,00)	92,61		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	194.472.790,00	(15.527.210,00)	92,61		
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	16.370.000,00	13.286.000,00	(3.084.000,00)	81,16		
02.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.370.000,00	13.286.000,00	(3.084.000,00)	81,16		
02.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.370.000,00	13.286.000,00	(3.084.000,00)	81,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	21.257.000,00	19.237.000,00	(2.020.000,00)	90,50		
02.2.04.10.5.1	BELANJA OPERASI	21.257.000,00	19.237.000,00	(2.020.000,00)	90,50		
02.2.04.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	19.237.000,00	(2.020.000,00)	90,50		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	4.094.671.100,00	3.994.352.650,00	(100.318.450,00)	97,55		
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.562.012.650,00	1.522.894.600,00	(39.118.050,00)	97,50		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.562.012.650,00	1.522.894.600,00	(39.118.050,00)	97,50		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.562.012.650,00	1.522.894.600,00	(39.118.050,00)	97,50		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.562.012.650,00	1.522.894.600,00	(39.118.050,00)	97,50		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.532.658.450,00	2.471.458.050,00	(61.200.400,00)	97,58		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.532.658.450,00	2.471.458.050,00	(61.200.400,00)	97,58		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.532.658.450,00	2.471.458.050,00	(61.200.400,00)	97,58		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.532.658.450,00	2.471.458.050,00	(61.200.400,00)	97,58		
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	1.410.000.000,00	1.276.154.751,00	(133.845.249,00)	90,51		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	510.000.000,00	459.435.671,00	(50.564.329,00)	90,09		
02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	440.000.000,00	390.814.329,00	(49.185.671,00)	88,82		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	440.000.000,00	390.814.329,00	(49.185.671,00)	88,82		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	390.814.329,00	(49.185.671,00)	88,82		
02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	38.000.000,00	36.829.500,00	(1.170.500,00)	96,92		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	36.829.500,00	(1.170.500,00)	96,92		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	36.829.500,00	(1.170.500,00)	96,92		
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	32.000.000,00	31.791.842,00	(208.158,00)	99,35		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.791.842,00	(208.158,00)	99,35		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.791.842,00	(208.158,00)	99,35		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	380.000.000,00	351.391.060,00	(28.608.940,00)	92,47		
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	40.000.000,00	39.389.000,00	(611.000,00)	98,47		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.389.000,00	(611.000,00)	98,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.389.000,00	(611.000,00)	98,47		
02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	300.000.000,00	287.201.460,00	(12.798.540,00)	95,73		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	287.201.460,00	(12.798.540,00)	95,73		
02.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.790.000,00	287.201.460,00	(11.588.540,00)	96,12		
02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	40.000.000,00	24.800.600,00	(15.199.400,00)	62,00		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	24.800.600,00	(15.199.400,00)	62,00		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.800.600,00	(15.199.400,00)	62,00		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	170.000.000,00	156.738.620,00	(13.261.380,00)	92,20		
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	130.000.000,00	117.468.620,00	(12.531.380,00)	90,36		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	117.468.620,00	(12.531.380,00)	90,36		
02.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.990.000,00	117.468.620,00	(11.521.380,00)	91,07		
02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	40.000.000,00	39.270.000,00	(730.000,00)	98,18		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.270.000,00	(730.000,00)	98,18		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.270.000,00	(730.000,00)	98,18		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	350.000.000,00	308.589.400,00	(41.410.600,00)	88,17		
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	280.000.000,00	266.431.500,00	(13.568.500,00)	95,15		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	266.431.500,00	(13.568.500,00)	95,15		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	266.431.500,00	(13.568.500,00)	95,15		
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000,00	36.897.900,00	(13.102.100,00)	73,80		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.897.900,00	(13.102.100,00)	73,80		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.897.900,00	(13.102.100,00)	73,80		
02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000,00	5.260.000,00	(14.740.000,00)	26,30		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.260.000,00	(40.000,00)	99,25		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.260.000,00	(40.000,00)	99,25		
02.2.04.05.5.2	BELANJA MODAL	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	0		
02.2.04.05.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	0		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	931.606.972,00	653.632.850,00	(277.974.122,00)	70,16		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	660.816.868,00	467.716.950,00	(193.099.918,00)	70,78		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	56.100.000,00	44.923.100,00	(11.176.900,00)	80,08		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.100.000,00	44.923.100,00	(11.176.900,00)	80,08		
02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	16.100.000,00	(3.220.000,00)	83,33		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.780.000,00	28.823.100,00	(7.956.900,00)	78,37		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66.372.000,00	40.708.500,00	(25.663.500,00)	61,33		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.372.000,00	40.708.500,00	(25.663.500,00)	61,33		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.372.000,00	40.708.500,00	(25.663.500,00)	61,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	84.028.000,00	64.131.500,00	(19.896.500,00)	76,32		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	84.028.000,00	64.131.500,00	(19.896.500,00)	76,32		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.028.000,00	64.131.500,00	(19.896.500,00)	76,32		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	199.316.868,00	146.738.500,00	(52.578.368,00)	73,62		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	199.316.868,00	146.738.500,00	(52.578.368,00)	73,62		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.316.868,00	146.738.500,00	(52.578.368,00)	73,62		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	135.000.000,00	93.694.800,00	(41.305.200,00)	69,40		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	93.694.800,00	(41.305.200,00)	69,40		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	93.694.800,00	(41.305.200,00)	69,40		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.000.000,00	11.860.000,00	(8.140.000,00)	59,30		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	11.860.000,00	(8.140.000,00)	59,30		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.860.000,00	(8.140.000,00)	59,30		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000,00	65.660.550,00	(34.339.450,00)	65,66		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	65.660.550,00	(34.339.450,00)	65,66		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	65.660.550,00	(34.339.450,00)	65,66		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	270.790.104,00	185.915.900,00	(84.874.204,00)	68,66		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	36.458.604,00	16.665.800,00	(19.792.804,00)	45,71		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.458.604,00	16.665.800,00	(19.792.804,00)	45,71		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.458.604,00	16.665.800,00	(19.792.804,00)	45,71		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	234.331.500,00	169.250.100,00	(65.081.400,00)	72,23		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	234.331.500,00	169.250.100,00	(65.081.400,00)	72,23		
02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	12.100.000,00	(2.420.000,00)	83,33		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.811.500,00	157.150.100,00	(62.661.400,00)	71,49		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	186.468.900,00	176.046.850,00	(10.422.050,00)	94,41		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	99,94		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	99,94		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	99,94		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	99,94		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	175.968.900,00	165.552.850,00	(10.416.050,00)	94,08		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	175.968.900,00	165.552.850,00	(10.416.050,00)	94,08		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	175.968.900,00	165.552.850,00	(10.416.050,00)	94,08		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.968.900,00	165.552.850,00	(10.416.050,00)	94,08		
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	196.400.000,00	141.715.100,00	(54.684.900,00)	72,16		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	196.400.000,00	141.715.100,00	(54.684.900,00)	72,16		
02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000,00	1.900.000,00	(3.100.000,00)	38,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.900.000,00	(3.100.000,00)	38,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.900.000,00	(3.100.000,00)	38,00		
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	191.400.000,00	139.815.100,00	(51.584.900,00)	73,05		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	191.400.000,00	139.815.100,00	(51.584.900,00)	73,05		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.390.000,00	138.805.100,00	(51.584.900,00)	72,91		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	4.074.464.000,00	3.488.374.300,00	(586.089.700,00)	85,62		
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.820.464.000,00	3.268.402.300,00	(552.061.700,00)	85,55		
03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.191.820.000,00	1.728.840.500,00	(462.979.500,00)	78,88		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.721.000,00	9.071.000,00	(3.650.000,00)	71,31		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.671.000,00	6.021.000,00	(3.650.000,00)	62,26		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.179.099.000,00	1.719.769.500,00	(459.329.500,00)	78,92		
03.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.179.099.000,00	1.719.769.500,00	(459.329.500,00)	78,92		
03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.628.644.000,00	1.539.561.800,00	(89.082.200,00)	94,53		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.628.644.000,00	1.539.561.800,00	(89.082.200,00)	94,53		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.628.644.000,00	1.539.561.800,00	(89.082.200,00)	94,53		
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	254.000.000,00	219.972.000,00	(34.028.000,00)	86,60		
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	154.000.000,00	125.851.500,00	(28.148.500,00)	81,72		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	154.000.000,00	125.851.500,00	(28.148.500,00)	81,72		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	125.851.500,00	(28.148.500,00)	81,72		
03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	100.000.000,00	94.120.500,00	(5.879.500,00)	94,12		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.120.500,00	(5.879.500,00)	94,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.120.500,00	(5.879.500,00)	94,12		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.565.021.000,00	1.426.533.285,00	(138.487.715,00)	91,15		
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	53.000.000,00	51.636.700,00	(1.363.300,00)	97,43		
03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	19.692.200,00	(307.800,00)	98,46		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.692.200,00	(307.800,00)	98,46		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.692.200,00	(307.800,00)	98,46		
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	33.000.000,00	31.944.500,00	(1.055.500,00)	96,80		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	31.944.500,00	(1.055.500,00)	96,80		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	31.944.500,00	(1.055.500,00)	96,80		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	158.175.000,00	152.781.000,00	(5.394.000,00)	96,59		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	28.590.000,00	27.595.000,00	(995.000,00)	96,52		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.590.000,00	27.595.000,00	(995.000,00)	96,52		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.590.000,00	27.595.000,00	(995.000,00)	96,52		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	89.585.000,00	85.520.000,00	(4.065.000,00)	95,46		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	89.585.000,00	85.520.000,00	(4.065.000,00)	95,46		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.585.000,00	85.520.000,00	(4.065.000,00)	95,46		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.353.846.000,00	1.222.115.585,00	(131.730.415,00)	90,27		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.353.846.000,00	1.222.115.585,00	(131.730.415,00)	90,27		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.353.846.000,00	1.222.115.585,00	(131.730.415,00)	90,27		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.846.000,00	1.222.115.585,00	(131.730.415,00)	90,27		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	3.544.149.000,00	3.147.150.680,00	(396.998.320,00)	88,80		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.544.149.000,00	3.147.150.680,00	(396.998.320,00)	88,80		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000,00	83.941.825,00	(16.058.175,00)	83,94		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.941.825,00	(16.058.175,00)	83,94		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.941.825,00	(16.058.175,00)	83,94		
03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	100.000.000,00	96.413.188,00	(3.586.812,00)	96,41		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.413.188,00	(3.586.812,00)	96,41		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.413.188,00	(3.586.812,00)	96,41		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.100.000.000,00	1.833.859.125,00	(266.140.875,00)	87,33		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000.000,00	1.833.859.125,00	(266.140.875,00)	87,33		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000.000,00	1.833.859.125,00	(266.140.875,00)	87,33		
03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	181.049.550,00	(18.950.450,00)	90,52		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	181.049.550,00	(18.950.450,00)	90,52		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	181.049.550,00	(18.950.450,00)	90,52		
03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	100.000.000,00	52.644.992,00	(47.355.008,00)	52,64		
03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	52.644.992,00	(47.355.008,00)	52,64		
03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	52.644.992,00	(47.355.008,00)	52,64		
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	944.149.000,00	899.242.000,00	(44.907.000,00)	95,24		
03.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	944.149.000,00	899.242.000,00	(44.907.000,00)	95,24		
03.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.149.000,00	899.242.000,00	(44.907.000,00)	95,24		
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	1.485.000.000,00	1.232.740.552,00	(252.259.448,00)	83,01		
03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	25.000.000,00	10.733.350,00	(14.266.650,00)	42,93		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	25.000.000,00	10.733.350,00	(14.266.650,00)	42,93		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	10.733.350,00	(14.266.650,00)	42,93		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	10.733.350,00	(14.266.650,00)	42,93		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	310.000.000,00	164.546.200,00	(145.453.800,00)	53,08		
03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	10.000.000,00	3.292.000,00	(6.708.000,00)	32,92		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	3.292.000,00	(6.708.000,00)	32,92		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	3.292.000,00	(6.708.000,00)	32,92		
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	44.494.250,00	(5.505.750,00)	88,99		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.494.250,00	(5.505.750,00)	88,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.494.250,00	(5.505.750,00)	88,99		
03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	6.728.800,00	(43.271.200,00)	13,46		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	6.728.800,00	(43.271.200,00)	13,46		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	6.728.800,00	(43.271.200,00)	13,46		
03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000,00	110.031.150,00	(39.968.850,00)	73,35		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	110.031.150,00	(39.968.850,00)	73,35		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	110.031.150,00	(39.968.850,00)	73,35		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.150.000.000,00	1.057.461.002,00	(92.538.998,00)	91,95		
03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000,00	94.075.175,00	(5.924.825,00)	94,08		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.075.175,00	(5.924.825,00)	94,08		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.075.175,00	(5.924.825,00)	94,08		
03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	200.000.000,00	180.130.900,00	(19.869.100,00)	90,07		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	16.976.900,00	(18.023.100,00)	48,51		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	16.976.900,00	(18.023.100,00)	48,51		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	165.000.000,00	163.154.000,00	(1.846.000,00)	98,88		
03.2.03.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.000.000,00	163.154.000,00	(1.846.000,00)	98,88		
03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	800.000.000,00	775.147.927,00	(24.852.073,00)	96,89		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	10.216.500,00	(9.783.500,00)	51,08		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.216.500,00	(9.783.500,00)	51,08		
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	780.000.000,00	764.931.427,00	(15.068.573,00)	98,07		
03.2.03.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	780.000.000,00	764.931.427,00	(15.068.573,00)	98,07		
03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	50.000.000,00	8.107.000,00	(41.893.000,00)	16,21		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	8.107.000,00	(41.893.000,00)	16,21		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	8.107.000,00	(41.893.000,00)	16,21		
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	3.612.074.950,00	3.128.920.952,00	(483.153.998,00)	86,62		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	146.134.000,00	104.237.270,00	(41.896.730,00)	71,33		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	146.134.000,00	104.237.270,00	(41.896.730,00)	71,33		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	146.134.000,00	104.237.270,00	(41.896.730,00)	71,33		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.134.000,00	104.237.270,00	(41.896.730,00)	71,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.407.108.300,00	1.226.771.567,00	(180.336.733,00)	87,18		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	175.000.000,00	118.172.228,00	(56.827.772,00)	67,53		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	118.172.228,00	(56.827.772,00)	67,53		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	118.172.228,00	(56.827.772,00)	67,53		
03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	192.312.500,00	188.846.100,00	(3.466.400,00)	98,20		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	170.577.551,00	167.506.100,00	(3.071.451,00)	98,20		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.577.551,00	167.506.100,00	(3.071.451,00)	98,20		
03.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	21.734.949,00	21.340.000,00	(394.949,00)	98,18		
03.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.734.949,00	21.340.000,00	(394.949,00)	98,18		
03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	262.000.000,00	253.253.200,00	(8.746.800,00)	96,66		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	262.000.000,00	253.253.200,00	(8.746.800,00)	96,66		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.000.000,00	253.253.200,00	(8.746.800,00)	96,66		
03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	183.250.600,00	133.215.100,00	(50.035.500,00)	72,70		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	183.250.600,00	133.215.100,00	(50.035.500,00)	72,70		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.250.600,00	133.215.100,00	(50.035.500,00)	72,70		
03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	92.128.000,00	67.977.182,00	(24.150.818,00)	73,79		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	92.128.000,00	67.977.182,00	(24.150.818,00)	73,79		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.128.000,00	67.977.182,00	(24.150.818,00)	73,79		
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	355.417.200,00	341.075.257,00	(14.341.943,00)	95,96		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	355.417.200,00	341.075.257,00	(14.341.943,00)	95,96		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.417.200,00	341.075.257,00	(14.341.943,00)	95,96		
03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	97.000.000,00	83.877.500,00	(13.122.500,00)	86,47		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	83.877.500,00	(13.122.500,00)	86,47		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	83.877.500,00	(13.122.500,00)	86,47		
03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000,00	40.355.000,00	(9.645.000,00)	80,71		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	40.355.000,00	(9.645.000,00)	80,71		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.355.000,00	(9.645.000,00)	80,71		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.902.698.650,00	1.703.043.315,00	(199.655.335,00)	89,51		
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	389.569.100,00	345.956.506,00	(43.612.594,00)	88,80		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	389.569.100,00	345.956.506,00	(43.612.594,00)	88,80		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.569.100,00	345.956.506,00	(43.612.594,00)	88,80		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	947.394.000,00	834.920.293,00	(112.473.707,00)	88,13		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	947.394.000,00	834.920.293,00	(112.473.707,00)	88,13		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.244.000,00	122.270.293,00	(24.973.707,00)	83,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	800.150.000,00	712.650.000,00	(87.500.000,00)	89,06		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	499.863.550,00	472.525.216,00	(27.338.334,00)	94,53		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	453.063.550,00	426.125.216,00	(26.938.334,00)	94,05		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.063.550,00	426.125.216,00	(26.938.334,00)	94,05		
03.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	46.800.000,00	46.400.000,00	(400.000,00)	99,15		
03.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.800.000,00	46.400.000,00	(400.000,00)	99,15		
03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	65.872.000,00	49.641.300,00	(16.230.700,00)	75,36		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	65.872.000,00	49.641.300,00	(16.230.700,00)	75,36		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.872.000,00	49.641.300,00	(16.230.700,00)	75,36		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	156.134.000,00	94.868.800,00	(61.265.200,00)	60,76		
03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	18.610.000,00	17.025.800,00	(1.584.200,00)	91,49		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.610.000,00	17.025.800,00	(1.584.200,00)	91,49		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.610.000,00	17.025.800,00	(1.584.200,00)	91,49		
03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.674.000,00	31.072.000,00	(5.602.000,00)	84,72		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.674.000,00	31.072.000,00	(5.602.000,00)	84,72		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.674.000,00	31.072.000,00	(5.602.000,00)	84,72		
03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.850.000,00	46.771.000,00	(54.079.000,00)	46,38		
03.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	9.136.000,00	(964.000,00)	90,46		
03.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	9.136.000,00	(964.000,00)	90,46		
03.2.04.04.5.2	BELANJA MODAL	90.750.000,00	37.635.000,00	(53.115.000,00)	41,47		
03.2.04.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.750.000,00	37.635.000,00	(53.115.000,00)	41,47		
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	10.367.336.270,00	6.659.207.673,00	(3.708.128.597,00)	64,23		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	10.297.336.270,00	6.600.654.673,00	(3.696.681.597,00)	64,10		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10.297.336.270,00	6.600.654.673,00	(3.696.681.597,00)	64,10		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.297.336.270,00	6.600.654.673,00	(3.696.681.597,00)	64,10		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.297.336.270,00	6.600.654.673,00	(3.696.681.597,00)	64,10		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	16.508.500,00	(8.491.500,00)	66,03		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	16.508.500,00	(8.491.500,00)	66,03		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	16.508.500,00	(8.491.500,00)	66,03		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.990.000,00	16.508.500,00	(7.481.500,00)	68,81		
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	42.044.500,00	(2.955.500,00)	93,43		
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	45.000.000,00	42.044.500,00	(2.955.500,00)	93,43		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	42.044.500,00	(2.955.500,00)	93,43		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.044.500,00	(2.955.500,00)	93,43		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	10.000.000,00	3.720.000,00	(6.280.000,00)	37,20		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	3.720.000,00	(6.280.000,00)	37,20		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	3.720.000,00	(6.280.000,00)	37,20		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	3.720.000,00	(6.280.000,00)	37,20		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	3.720.000,00	(6.280.000,00)	37,20		
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	314.000.000,00	296.447.395,00	(17.552.605,00)	94,41		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	264.000.000,00	255.301.800,00	(8.698.200,00)	96,71		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	124.000.000,00	120.742.400,00	(3.257.600,00)	97,37		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	124.000.000,00	120.742.400,00	(3.257.600,00)	97,37		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	120.742.400,00	(3.257.600,00)	97,37		
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	32.500.000,00	30.309.900,00	(2.190.100,00)	93,26		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	30.309.900,00	(2.190.100,00)	93,26		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	30.309.900,00	(2.190.100,00)	93,26		
03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	75.000.000,00	71.749.500,00	(3.250.500,00)	95,67		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	71.749.500,00	(3.250.500,00)	95,67		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.749.500,00	(3.250.500,00)	95,67		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00		
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	40.000.000,00	31.645.595,00	(8.354.405,00)	79,11		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.000.000,00	31.645.595,00	(8.354.405,00)	79,11		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	31.645.595,00	(8.354.405,00)	79,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	31.645.595,00	(8.354.405,00)	79,11		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	321.843.920,00	269.425.197,00	(52.418.723,00)	83,71		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	239.768.000,00	213.945.079,00	(25.822.921,00)	89,23		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	169.768.000,00	152.191.604,00	(17.576.396,00)	89,65		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	169.768.000,00	152.191.604,00	(17.576.396,00)	89,65		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.768.000,00	152.191.604,00	(17.576.396,00)	89,65		
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.000.000,00	61.753.475,00	(8.246.525,00)	88,22		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	61.753.475,00	(8.246.525,00)	88,22		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	61.753.475,00	(8.246.525,00)	88,22		
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	82.075.920,00	55.480.118,00	(26.595.802,00)	67,60		
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	82.075.920,00	55.480.118,00	(26.595.802,00)	67,60		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.075.920,00	55.480.118,00	(26.595.802,00)	67,60		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.075.920,00	55.480.118,00	(26.595.802,00)	67,60		
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	432.810.000,00	412.120.230,00	(20.689.770,00)	95,22		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	427.860.000,00	407.980.230,00	(19.879.770,00)	95,35		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	427.860.000,00	407.980.230,00	(19.879.770,00)	95,35		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	427.860.000,00	407.980.230,00	(19.879.770,00)	95,35		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.860.000,00	407.980.230,00	(19.879.770,00)	95,35		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	4.950.000,00	4.140.000,00	(810.000,00)	83,64		
03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	4.950.000,00	4.140.000,00	(810.000,00)	83,64		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.950.000,00	4.140.000,00	(810.000,00)	83,64		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.140.000,00	(810.000,00)	83,64		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	36.529.300,00	36.175.556,00	(353.744,00)	99,03		
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	36.529.300,00	36.175.556,00	(353.744,00)	99,03		
03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	36.529.300,00	36.175.556,00	(353.744,00)	99,03		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.529.300,00	36.175.556,00	(353.744,00)	99,03		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.529.300,00	36.175.556,00	(353.744,00)	99,03		
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	7.708.145.000,00	6.272.314.113,00	(1.435.830.887,00)	81,37		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.331.918.000,00	1.269.806.379,00	(62.111.621,00)	95,34		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	206.368.000,00	190.576.499,00	(15.791.501,00)	92,35		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.368.000,00	190.576.499,00	(15.791.501,00)	92,35		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.368.000,00	190.576.499,00	(15.791.501,00)	92,35		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	140.594.700,00	(9.405.300,00)	93,73		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	140.594.700,00	(9.405.300,00)	93,73		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	140.594.700,00	(9.405.300,00)	93,73		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	338.000.000,00	337.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	338.000.000,00	337.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.000.000,00	337.995.000,00	(5.000,00)	100,00		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	557.550.000,00	521.840.180,00	(35.709.820,00)	93,60		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	557.550.000,00	521.840.180,00	(35.709.820,00)	93,60		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.550.000,00	521.840.180,00	(35.709.820,00)	93,60		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	78.800.000,00	(1.200.000,00)	98,50		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.800.000,00	(1.200.000,00)	98,50		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.800.000,00	(1.200.000,00)	98,50		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.112.000.000,00	1.094.636.800,00	(17.363.200,00)	98,44		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	310.000.000,00	307.545.500,00	(2.454.500,00)	99,21		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000,00	307.545.500,00	(2.454.500,00)	99,21		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	307.545.500,00	(2.454.500,00)	99,21		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	802.000.000,00	787.091.300,00	(14.908.700,00)	98,14		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	802.000.000,00	787.091.300,00	(14.908.700,00)	98,14		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.000.000,00	787.091.300,00	(14.908.700,00)	98,14		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.201.227.000,00	2.924.279.034,00	(1.276.947.966,00)	69,61		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	99.600.000,00	46.340.900,00	(53.259.100,00)	46,53		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.100.000,00	44.855.900,00	(53.244.100,00)	45,72		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.100.000,00	44.855.900,00	(53.244.100,00)	45,72		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.787.204.000,00	1.649.876.300,00	(1.137.327.700,00)	59,19		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.787.204.000,00	1.649.876.300,00	(1.137.327.700,00)	59,19		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.204.000,00	1.649.876.300,00	(1.137.327.700,00)	59,19		
03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10.000.000,00	2.800.000,00	(7.200.000,00)	28,00		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.800.000,00	(7.200.000,00)	28,00		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.800.000,00	(7.200.000,00)	28,00		
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.215.923.000,00	1.147.213.750,00	(68.709.250,00)	94,35		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	196.623.000,00	194.460.000,00	(2.163.000,00)	98,90		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.623.000,00	194.460.000,00	(2.163.000,00)	98,90		
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	1.019.300.000,00	952.753.750,00	(66.546.250,00)	93,47		
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.393.800,00	585.001.750,00	(28.392.050,00)	95,37		
03.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.906.200,00	367.752.000,00	(38.154.200,00)	90,60		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.500.000,00	34.926.000,00	(8.574.000,00)	80,29		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	43.500.000,00	34.926.000,00	(8.574.000,00)	80,29		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	34.926.000,00	(8.574.000,00)	80,29		
03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	25.000.000,00	24.995.000,00	(5.000,00)	99,98		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.995.000,00	(5.000,00)	99,98		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.995.000,00	(5.000,00)	99,98		
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.000.000,00	18.127.084,00	(1.872.916,00)	90,64		
03.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.127.084,00	(1.872.916,00)	90,64		
03.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.127.084,00	(1.872.916,00)	90,64		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.063.000.000,00	983.591.900,00	(79.408.100,00)	92,53		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.999.900,00	(100,00)	100,00		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.999.900,00	(100,00)	100,00		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.999.900,00	(100,00)	100,00		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.054.000.000,00	974.592.000,00	(79.408.000,00)	92,47		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.054.000.000,00	974.592.000,00	(79.408.000,00)	92,47		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.000.000,00	974.592.000,00	(79.408.000,00)	92,47		
03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	7.722.144.000,00	7.571.251.351,00	(150.892.649,00)	98,05		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.612.374.000,00	6.505.158.860,00	(107.215.140,00)	98,38		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.612.374.000,00	6.505.158.860,00	(107.215.140,00)	98,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.551.363.000,00	6.445.858.860,00	(105.504.140,00)	98,39		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.551.363.000,00	6.445.858.860,00	(105.504.140,00)	98,39		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	61.011.000,00	59.300.000,00	(1.711.000,00)	97,20		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.011.000,00	59.300.000,00	(1.711.000,00)	97,20		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.109.770.000,00	1.066.092.491,00	(43.677.509,00)	96,06		
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	188.225.000,00	186.788.623,00	(1.436.377,00)	99,24		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	127.297.000,00	126.188.623,00	(1.108.377,00)	99,13		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.297.000,00	126.188.623,00	(1.108.377,00)	99,13		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	60.928.000,00	60.600.000,00	(328.000,00)	99,46		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.928.000,00	60.600.000,00	(328.000,00)	99,46		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	464.230.000,00	453.049.235,00	(11.180.765,00)	97,59		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	464.230.000,00	453.049.235,00	(11.180.765,00)	97,59		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.230.000,00	453.049.235,00	(11.180.765,00)	97,59		
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	237.400.000,00	224.350.063,00	(13.049.937,00)	94,50		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	237.400.000,00	224.350.063,00	(13.049.937,00)	94,50		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.400.000,00	224.350.063,00	(13.049.937,00)	94,50		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	219.915.000,00	201.904.570,00	(18.010.430,00)	91,81		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	219.915.000,00	201.904.570,00	(18.010.430,00)	91,81		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.915.000,00	201.904.570,00	(18.010.430,00)	91,81		
03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	70.000.000,00	66.765.055,00	(3.234.945,00)	95,38		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	66.765.055,00	(3.234.945,00)	95,38		
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	66.765.055,00	(3.234.945,00)	95,38		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	66.765.055,00	(3.234.945,00)	95,38		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	66.765.055,00	(3.234.945,00)	95,38		
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	156.599.070,00	153.299.820,00	(3.299.250,00)	97,89		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	156.599.070,00	153.299.820,00	(3.299.250,00)	97,89		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	156.599.070,00	153.299.820,00	(3.299.250,00)	97,89		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.599.070,00	153.299.820,00	(3.299.250,00)	97,89		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.599.070,00	153.299.820,00	(3.299.250,00)	97,89		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	19.358.213.993,00	18.560.367.955,00	(797.846.038,00)	95,88		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.284.021.107,00	6.246.669.715,00	(37.351.392,00)	99,41		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	8.587.500,00	8.334.500,00	(253.000,00)	97,05		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.587.500,00	8.334.500,00	(253.000,00)	97,05		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.587.500,00	8.334.500,00	(253.000,00)	97,05		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5.856.450.000,00	5.856.450.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.856.450.000,00	5.856.450.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	5.856.450.000,00	5.856.450.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	418.983.607,00	381.885.215,00	(37.098.392,00)	91,15		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	418.983.607,00	381.885.215,00	(37.098.392,00)	91,15		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.753.607,00	377.655.215,00	(37.098.392,00)	91,06		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.146.925.386,00	996.785.510,00	(150.139.876,00)	86,91		
03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000,00	715.238.750,00	(134.761.250,00)	84,15		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	715.238.750,00	(134.761.250,00)	84,15		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.950.000,00	707.188.750,00	(134.761.250,00)	83,99		
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	145.370.386,00	131.214.760,00	(14.155.626,00)	90,26		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.370.386,00	131.214.760,00	(14.155.626,00)	90,26		
03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.530.386,00	126.374.760,00	(14.155.626,00)	89,93		
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	151.555.000,00	150.332.000,00	(1.223.000,00)	99,19		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	151.555.000,00	150.332.000,00	(1.223.000,00)	99,19		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.555.000,00	150.332.000,00	(1.223.000,00)	99,19		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5.300.552.500,00	4.967.393.500,00	(333.159.000,00)	93,71		
03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	8.493.000,00	6.668.000,00	(1.825.000,00)	78,51		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.493.000,00	6.668.000,00	(1.825.000,00)	78,51		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.493.000,00	6.668.000,00	(1.825.000,00)	78,51		
03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7.878.000,00	7.303.000,00	(575.000,00)	92,70		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.878.000,00	7.303.000,00	(575.000,00)	92,70		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.878.000,00	7.303.000,00	(575.000,00)	92,70		
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	7.878.000,00	5.069.000,00	(2.809.000,00)	64,34		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.878.000,00	5.069.000,00	(2.809.000,00)	64,34		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.878.000,00	5.069.000,00	(2.809.000,00)	64,34		
03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	5.269.000.000,00	4.941.050.000,00	(327.950.000,00)	93,78		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.269.000.000,00	4.941.050.000,00	(327.950.000,00)	93,78		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.269.000.000,00	4.941.050.000,00	(327.950.000,00)	93,78		
03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	7.303.500,00	7.303.500,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.303.500,00	7.303.500,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.303.500,00	7.303.500,00	0,00	100,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	6.626.715.000,00	6.349.519.230,00	(277.195.770,00)	95,82		
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	118.410.000,00	110.580.000,00	(7.830.000,00)	93,39		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	118.410.000,00	110.580.000,00	(7.830.000,00)	93,39		
03.2.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.380.000,00	107.550.000,00	(7.830.000,00)	93,21		
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	6.500.000.000,00	6.230.968.730,00	(269.031.270,00)	95,86		
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	218.004.220,00	191.815.730,00	(26.188.490,00)	87,99		
03.2.05.03.5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.404.220,00	179.215.730,00	(26.188.490,00)	87,25		
03.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	6.281.995.780,00	6.039.153.000,00	(242.842.780,00)	96,13		
03.2.05.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.740.000.000,00	5.497.409.000,00	(242.591.000,00)	95,77		
03.2.05.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	541.995.780,00	541.744.000,00	(251.780,00)	99,95		
03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	8.305.000,00	7.970.500,00	(334.500,00)	95,97		
03.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.305.000,00	7.970.500,00	(334.500,00)	95,97		
03.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00	7.970.500,00	(334.500,00)	95,97		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	500.980.200,00	408.398.480,00	(92.581.720,00)	81,52		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.980.200,00	408.398.480,00	(92.581.720,00)	81,52		
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	64.728.100,00	33.316.000,00	(31.412.100,00)	51,47		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.728.100,00	33.316.000,00	(31.412.100,00)	51,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.728.100,00	33.316.000,00	(31.412.100,00)	51,47		
03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	43.430.600,00	0,00	(43.430.600,00)	0		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.430.600,00	0,00	(43.430.600,00)	0		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.430.600,00	0,00	(43.430.600,00)	0		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	392.821.500,00	375.082.480,00	(17.739.020,00)	95,48		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	392.821.500,00	375.082.480,00	(17.739.020,00)	95,48		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.611.500,00	375.082.480,00	(16.529.020,00)	95,78		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	147.415.000,00	144.109.742,00	(3.305.258,00)	97,76		
03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.125.000,00	39.432.500,00	(692.500,00)	98,27		
03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	24.175.000,00	23.543.000,00	(632.000,00)	97,39		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.175.000,00	23.543.000,00	(632.000,00)	97,39		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.165.000,00	22.533.000,00	(632.000,00)	97,27		
03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	15.950.000,00	15.889.500,00	(60.500,00)	99,62		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.950.000,00	15.889.500,00	(60.500,00)	99,62		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	15.889.500,00	(60.500,00)	99,62		
03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	35.540.000,00	34.892.000,00	(648.000,00)	98,18		
03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	35.540.000,00	34.892.000,00	(648.000,00)	98,18		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.540.000,00	34.892.000,00	(648.000,00)	98,18		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.540.000,00	34.892.000,00	(648.000,00)	98,18		
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7.100.000,00	7.088.500,00	(11.500,00)	99,84		
03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000,00	4.096.000,00	(4.000,00)	99,90		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.096.000,00	(4.000,00)	99,90		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.096.000,00	(4.000,00)	99,90		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	2.992.500,00	(7.500,00)	99,75		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.992.500,00	(7.500,00)	99,75		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.992.500,00	(7.500,00)	99,75		
03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	50.380.000,00	49.222.492,00	(1.157.508,00)	97,70		
03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50.380.000,00	49.222.492,00	(1.157.508,00)	97,70		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.380.000,00	49.222.492,00	(1.157.508,00)	97,70		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.380.000,00	49.222.492,00	(1.157.508,00)	97,70		
03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	14.270.000,00	13.474.250,00	(795.750,00)	94,42		
03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	14.270.000,00	13.474.250,00	(795.750,00)	94,42		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.270.000,00	13.474.250,00	(795.750,00)	94,42		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.270.000,00	13.474.250,00	(795.750,00)	94,42		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	25.000.000,00	22.520.180,00	(2.479.820,00)	90,08		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.520.180,00	(2.479.820,00)	90,08		
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	25.000.000,00	22.520.180,00	(2.479.820,00)	90,08		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.520.180,00	(2.479.820,00)	90,08		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.520.180,00	(2.479.820,00)	90,08		
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	2.354.742.000,00	2.261.185.120,00	(93.556.880,00)	96,03		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.354.742.000,00	2.261.185.120,00	(93.556.880,00)	96,03		
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	307.200.000,00	306.477.520,00	(722.480,00)	99,76		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	190.200.000,00	189.702.520,00	(497.480,00)	99,74		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.200.000,00	189.702.520,00	(497.480,00)	99,74		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	117.000.000,00	116.775.000,00	(225.000,00)	99,81		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.000.000,00	104.775.000,00	(225.000,00)	99,79		
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.959.027.000,00	1.876.247.600,00	(82.779.400,00)	95,77		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.958.027.000,00	1.876.247.600,00	(81.779.400,00)	95,82		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.958.027.000,00	1.876.247.600,00	(81.779.400,00)	95,82		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	28.515.000,00	23.460.000,00	(5.055.000,00)	82,27		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.515.000,00	23.460.000,00	(5.055.000,00)	82,27		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.515.000,00	23.460.000,00	(5.055.000,00)	82,27		
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	91,67		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	91,67		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	91,67		
03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	5.898.100.000,00	5.807.823.278,00	(90.276.722,00)	98,47		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	116.000.000,00	112.904.000,00	(3.096.000,00)	97,33		
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	75.000.000,00	73.291.500,00	(1.708.500,00)	97,72		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.291.500,00	(1.708.500,00)	97,72		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.291.500,00	(1.708.500,00)	97,72		
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20.000.000,00	18.612.500,00	(1.387.500,00)	93,06		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.612.500,00	(1.387.500,00)	93,06		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.612.500,00	(1.387.500,00)	93,06		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.232.000.000,00	5.149.440.420,00	(82.559.580,00)	98,42		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.232.000.000,00	4.205.009.920,00	(26.990.080,00)	99,36		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.198.920.000,00	4.172.559.920,00	(26.360.080,00)	99,37		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.198.920.000,00	4.172.559.920,00	(26.360.080,00)	99,37		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	33.080.000,00	32.450.000,00	(630.000,00)	98,10		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.080.000,00	32.450.000,00	(630.000,00)	98,10		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.000.000.000,00	944.430.500,00	(55.569.500,00)	94,44		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	86.530.000,00	83.877.500,00	(2.652.500,00)	96,93		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.530.000,00	83.877.500,00	(2.652.500,00)	96,93		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	913.470.000,00	860.553.000,00	(52.917.000,00)	94,21		
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.470.000,00	38.470.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	875.000.000,00	822.083.000,00	(52.917.000,00)	93,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	550.100.000,00	545.478.858,00	(4.621.142,00)	99,16		
03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	550.100.000,00	545.478.858,00	(4.621.142,00)	99,16		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	550.100.000,00	545.478.858,00	(4.621.142,00)	99,16		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.100.000,00	545.478.858,00	(4.621.142,00)	99,16		
03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	4.475.000.000,00	4.392.016.692,00	(82.983.308,00)	98,15		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.930.000.000,00	3.888.714.492,00	(41.285.508,00)	98,95		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.420.000.000,00	3.383.223.742,00	(36.776.258,00)	98,92		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	828.400.000,00	791.623.742,00	(36.776.258,00)	95,56		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.400.000,00	791.623.742,00	(36.776.258,00)	95,56		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.591.600.000,00	2.591.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.591.600.000,00	2.591.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	510.000.000,00	505.490.750,00	(4.509.250,00)	99,12		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000,00	505.490.750,00	(4.509.250,00)	99,12		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	505.490.750,00	(4.509.250,00)	99,12		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	545.000.000,00	503.302.200,00	(41.697.800,00)	92,35		
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	230.000.000,00	211.869.350,00	(18.130.650,00)	92,12		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	211.869.350,00	(18.130.650,00)	92,12		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	211.869.350,00	(18.130.650,00)	92,12		
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	315.000.000,00	291.432.850,00	(23.567.150,00)	92,52		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	291.432.850,00	(23.567.150,00)	92,52		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	291.432.850,00	(23.567.150,00)	92,52		
03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	56.000.000,00	32.074.850,00	(23.925.150,00)	57,28		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000,00	32.074.850,00	(23.925.150,00)	57,28		
03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000,00	7.418.850,00	(3.581.150,00)	67,44		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	7.418.850,00	(3.581.150,00)	67,44		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.418.850,00	(3.581.150,00)	67,44		
03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	45.000.000,00	24.656.000,00	(20.344.000,00)	54,79		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	24.656.000,00	(20.344.000,00)	54,79		
03.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	0		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.370.000,00	24.656.000,00	(16.714.000,00)	59,60		
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	4.554.993.550,00	3.656.961.602,00	(898.031.948,00)	80,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.377.000.000,00	2.242.189.608,00	(134.810.392,00)	94,33		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	90.000.000,00	80.278.054,00	(9.721.946,00)	89,20		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	80.278.054,00	(9.721.946,00)	89,20		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	80.278.054,00	(9.721.946,00)	89,20		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	197.000.000,00	171.316.000,00	(25.684.000,00)	86,96		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	197.000.000,00	171.316.000,00	(25.684.000,00)	86,96		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000,00	171.316.000,00	(25.684.000,00)	86,96		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2.090.000.000,00	1.990.595.554,00	(99.404.446,00)	95,24		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.090.000.000,00	1.990.595.554,00	(99.404.446,00)	95,24		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	83.521.222,00	(6.478.778,00)	92,80		
03.2.01.03.5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	708.626.550,00	568.768.290,00	(139.858.260,00)	80,26		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	19.788.800,00	13.726.750,00	(6.062.050,00)	69,37		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.788.800,00	13.726.750,00	(6.062.050,00)	69,37		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.788.800,00	13.726.750,00	(6.062.050,00)	69,37		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	285.513.200,00	253.628.540,00	(31.884.660,00)	88,83		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	285.513.200,00	253.628.540,00	(31.884.660,00)	88,83		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.513.200,00	253.628.540,00	(31.884.660,00)	88,83		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	403.324.550,00	301.413.000,00	(101.911.550,00)	74,73		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	403.324.550,00	301.413.000,00	(101.911.550,00)	74,73		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.324.550,00	301.413.000,00	(101.911.550,00)	74,73		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	924.367.000,00	563.591.453,00	(360.775.547,00)	60,97		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	678.680.000,00	411.022.437,00	(267.657.563,00)	60,56		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	678.680.000,00	411.022.437,00	(267.657.563,00)	60,56		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	228.660.000,00	198.420.000,00	(30.240.000,00)	86,78		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.020.000,00	212.602.437,00	(237.417.563,00)	47,24		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.730.000,00	73.666.236,00	(27.063.764,00)	73,13		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.730.000,00	73.666.236,00	(27.063.764,00)	73,13		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.730.000,00	73.666.236,00	(27.063.764,00)	73,13		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	144.957.000,00	78.902.780,00	(66.054.220,00)	54,43		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	144.957.000,00	78.902.780,00	(66.054.220,00)	54,43		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.957.000,00	78.902.780,00	(66.054.220,00)	54,43		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	545.000.000,00	282.412.251,00	(262.587.749,00)	51,82		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	485.000.000,00	248.663.251,00	(236.336.749,00)	51,27		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	485.000.000,00	248.663.251,00	(236.336.749,00)	51,27		
03.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.080.000,00	231.743.251,00	(236.336.749,00)	49,51		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60.000.000,00	33.749.000,00	(26.251.000,00)	56,25		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	33.749.000,00	(26.251.000,00)	56,25		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	33.749.000,00	(26.251.000,00)	56,25		
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1.412.500.000,00	1.338.300.416,00	(74.199.584,00)	94,75		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	650.000.000,00	621.338.476,00	(28.661.524,00)	95,59		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	48.501.250,00	(1.498.750,00)	97,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.501.250,00	(1.498.750,00)	97,00		
03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.640.000,00	4.230.000,00	(1.410.000,00)	75,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.360.000,00	44.271.250,00	(88.750,00)	99,80		
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000,00	48.267.851,00	(1.732.149,00)	96,54		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.267.851,00	(1.732.149,00)	96,54		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.267.851,00	(1.732.149,00)	96,54		
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000,00	23.970.994,00	(1.029.006,00)	95,88		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.970.994,00	(1.029.006,00)	95,88		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.970.994,00	(1.029.006,00)	95,88		
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	150.000.000,00	143.873.400,00	(6.126.600,00)	95,92		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	143.873.400,00	(6.126.600,00)	95,92		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	143.873.400,00	(6.126.600,00)	95,92		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	47.056.500,00	(2.943.500,00)	94,11		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.056.500,00	(2.943.500,00)	94,11		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.056.500,00	(2.943.500,00)	94,11		
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000,00	48.641.081,00	(1.358.919,00)	97,28		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.641.081,00	(1.358.919,00)	97,28		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.641.081,00	(1.358.919,00)	97,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000,00	24.144.300,00	(855.700,00)	96,58		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.144.300,00	(855.700,00)	96,58		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.144.300,00	(855.700,00)	96,58		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	250.000.000,00	236.883.100,00	(13.116.900,00)	94,75		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	248.800.000,00	236.883.100,00	(11.916.900,00)	95,21		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.800.000,00	236.883.100,00	(11.916.900,00)	95,21		
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
03.2.01.08.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	428.000.000,00	399.600.390,00	(28.399.610,00)	93,36		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.000.000,00	102.506.594,00	(9.493.406,00)	91,52		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	102.506.594,00	(9.493.406,00)	91,52		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.360.000,00	96.866.594,00	(9.493.406,00)	91,07		
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000,00	18.283.800,00	(1.716.200,00)	91,42		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.283.800,00	(1.716.200,00)	91,42		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.283.800,00	(1.716.200,00)	91,42		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.000.000,00	34.455.200,00	(544.800,00)	98,44		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.455.200,00	(544.800,00)	98,44		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.455.200,00	(544.800,00)	98,44		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	180.000.000,00	177.757.044,00	(2.242.956,00)	98,75		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	177.757.044,00	(2.242.956,00)	98,75		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	177.757.044,00	(2.242.956,00)	98,75		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	40.719.272,00	(9.280.728,00)	81,44		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	40.719.272,00	(9.280.728,00)	81,44		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.719.272,00	(9.280.728,00)	81,44		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.000.000,00	4.739.450,00	(260.550,00)	94,79		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.739.450,00	(260.550,00)	94,79		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.739.450,00	(260.550,00)	94,79		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.000.000,00	11.442.130,00	(557.870,00)	95,35		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.442.130,00	(557.870,00)	95,35		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.442.130,00	(557.870,00)	95,35		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	14.000.000,00	9.696.900,00	(4.303.100,00)	69,26		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.696.900,00	(303.100,00)	96,97		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.696.900,00	(303.100,00)	96,97		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0		
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	334.500.000,00	317.361.550,00	(17.138.450,00)	94,88		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.000.000,00	62.858.090,00	(3.141.910,00)	95,24		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	62.858.090,00	(3.141.910,00)	95,24		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.160.000,00	58.018.090,00	(3.141.910,00)	94,86		
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.000.000,00	19.787.750,00	(212.250,00)	98,94		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.787.750,00	(212.250,00)	98,94		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.787.750,00	(212.250,00)	98,94		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.000.000,00	14.591.514,00	(408.486,00)	97,28		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.591.514,00	(408.486,00)	97,28		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.591.514,00	(408.486,00)	97,28		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000,00	6.847.200,00	(3.152.800,00)	68,47		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.847.200,00	(3.152.800,00)	68,47		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.847.200,00	(3.152.800,00)	68,47		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.500.000,00	83.883.436,00	(4.616.564,00)	94,78		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	88.500.000,00	83.883.436,00	(4.616.564,00)	94,78		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	83.883.436,00	(4.616.564,00)	94,78		
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000,00	19.675.200,00	(324.800,00)	98,38		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.675.200,00	(324.800,00)	98,38		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.675.200,00	(324.800,00)	98,38		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000,00	13.372.360,00	(1.627.640,00)	89,15		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.372.360,00	(1.627.640,00)	89,15		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.372.360,00	(1.627.640,00)	89,15		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000,00	96.346.000,00	(3.654.000,00)	96,35		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.346.000,00	(3.654.000,00)	96,35		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.346.000,00	(3.654.000,00)	96,35		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	3.450.656.645,00	3.075.552.741,00	(375.103.904,00)	89,13		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.450.656.645,00	3.075.552.741,00	(375.103.904,00)	89,13		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	322.344.000,00	189.692.300,00	(132.651.700,00)	58,85		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	322.344.000,00	189.692.300,00	(132.651.700,00)	58,85		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.344.000,00	189.692.300,00	(132.651.700,00)	58,85		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.570.000,00	97.023.400,00	(5.546.600,00)	94,59		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	102.570.000,00	97.023.400,00	(5.546.600,00)	94,59		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.570.000,00	97.023.400,00	(5.546.600,00)	94,59		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	650.000.000,00	511.643.936,00	(138.356.064,00)	78,71		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	459.999.800,00	323.004.036,00	(136.995.764,00)	70,22		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.999.800,00	323.004.036,00	(136.995.764,00)	70,22		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28		
03.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28		
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	11.616.000,00	(18.384.000,00)	38,72		
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	11.616.000,00	(18.384.000,00)	38,72		
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	11.616.000,00	(18.384.000,00)	38,72		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.566.261.345,00	1.500.522.600,00	(65.738.745,00)	95,80		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.566.261.345,00	1.500.522.600,00	(65.738.745,00)	95,80		
03.2.01.10.5.1.01	Belanja Pegawai	849.820.000,00	840.510.000,00	(9.310.000,00)	98,90		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.441.345,00	660.012.600,00	(56.428.745,00)	92,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	79.900.000,00	78.167.000,00	(1.733.000,00)	97,83		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	79.900.000,00	78.167.000,00	(1.733.000,00)	97,83		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.900.000,00	78.167.000,00	(1.733.000,00)	97,83		
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	699.581.300,00	686.887.505,00	(12.693.795,00)	98,19		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	699.581.300,00	686.887.505,00	(12.693.795,00)	98,19		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.581.300,00	686.887.505,00	(12.693.795,00)	98,19		
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	3.140.321.034,00	2.470.556.462,00	(669.764.572,00)	78,67		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.491.260.639,00	1.268.962.783,00	(222.297.856,00)	85,09		
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	764.030.639,00	699.866.600,00	(64.164.039,00)	91,60		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	764.030.639,00	699.866.600,00	(64.164.039,00)	91,60		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.030.639,00	699.866.600,00	(64.164.039,00)	91,60		
03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	727.230.000,00	569.096.183,00	(158.133.817,00)	78,26		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	727.230.000,00	569.096.183,00	(158.133.817,00)	78,26		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.230.000,00	569.096.183,00	(158.133.817,00)	78,26		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.649.060.395,00	1.201.593.679,00	(447.466.716,00)	72,87		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	384.450.000,00	188.365.000,00	(196.085.000,00)	49,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	384.450.000,00	188.365.000,00	(196.085.000,00)	49,00		
03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.530.000,00	165.445.000,00	(196.085.000,00)	45,76		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	374.340.000,00	278.086.000,00	(96.254.000,00)	74,29		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	374.340.000,00	278.086.000,00	(96.254.000,00)	74,29		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.340.000,00	278.086.000,00	(96.254.000,00)	74,29		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	586.626.000,00	474.493.336,00	(112.132.664,00)	80,89		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	586.626.000,00	474.493.336,00	(112.132.664,00)	80,89		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.626.000,00	474.493.336,00	(112.132.664,00)	80,89		
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	303.644.395,00	260.649.343,00	(42.995.052,00)	85,84		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	303.644.395,00	260.649.343,00	(42.995.052,00)	85,84		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.644.395,00	260.649.343,00	(42.995.052,00)	85,84		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	9.154.182.499,00	8.807.027.744,00	(347.154.755,00)	96,21		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.657.769.715,00	3.488.820.714,00	(168.949.001,00)	95,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	756.700.590,00	707.458.319,00	(49.242.271,00)	93,49		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	756.700.590,00	707.458.319,00	(49.242.271,00)	93,49		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.700.590,00	707.458.319,00	(49.242.271,00)	93,49		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.901.069.125,00	2.781.362.395,00	(119.706.730,00)	95,87		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.888.469.125,00	2.776.022.395,00	(112.446.730,00)	96,11		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.469.125,00	2.776.022.395,00	(112.446.730,00)	96,11		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	12.600.000,00	5.340.000,00	(7.260.000,00)	42,38		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	5.340.000,00	(7.260.000,00)	42,38		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.496.412.784,00	5.318.207.030,00	(178.205.754,00)	96,76		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	110.814.163,00	109.456.400,00	(1.357.763,00)	98,77		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.814.163,00	109.456.400,00	(1.357.763,00)	98,77		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.814.163,00	109.456.400,00	(1.357.763,00)	98,77		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.709.477.800,00	2.633.313.398,00	(76.164.402,00)	97,19		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	854.477.800,00	835.169.500,00	(19.308.300,00)	97,74		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	854.477.800,00	835.169.500,00	(19.308.300,00)	97,74		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.855.000.000,00	1.798.143.898,00	(56.856.102,00)	96,93		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.200.000,00	576.600.000,00	(23.600.000,00)	96,07		
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	96.208.000,00	(3.792.000,00)	96,21		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.154.800.000,00	1.125.335.898,00	(29.464.102,00)	97,45		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.676.120.821,00	2.575.437.232,00	(100.683.589,00)	96,24		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.649.152.196,00	2.550.974.232,00	(98.177.964,00)	96,29		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.649.152.196,00	2.550.974.232,00	(98.177.964,00)	96,29		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	26.968.625,00	24.463.000,00	(2.505.625,00)	90,71		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.968.625,00	24.463.000,00	(2.505.625,00)	90,71		
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	28.697.779.500,00	28.463.386.200,00	(234.393.300,00)	99,18		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	28.697.779.500,00	28.463.386.200,00	(234.393.300,00)	99,18		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	28.697.779.500,00	28.463.386.200,00	(234.393.300,00)	99,18		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.697.779.500,00	28.463.386.200,00	(234.393.300,00)	99,18		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.790.000,00	165.656.700,00	(23.133.300,00)	87,75		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	28.507.779.500,00	28.296.519.500,00	(211.260.000,00)	99,26		
04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	(4.939.649.500,00)	79,86		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	(4.939.649.500,00)	79,86		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	(4.939.649.500,00)	79,86		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	(4.939.649.500,00)	79,86		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	(4.939.649.500,00)	79,86		
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	664.146.000,00	566.962.850,00	(97.183.150,00)	85,37		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	159.730.000,00	140.112.450,00	(19.617.550,00)	87,72		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.000.000,00	56.555.450,00	(9.444.550,00)	85,69		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	56.555.450,00	(9.444.550,00)	85,69		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	56.555.450,00	(9.444.550,00)	85,69		
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	93.730.000,00	83.557.000,00	(10.173.000,00)	89,15		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.730.000,00	83.557.000,00	(10.173.000,00)	89,15		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.730.000,00	83.557.000,00	(10.173.000,00)	89,15		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	280.450.000,00	240.673.500,00	(39.776.500,00)	85,82		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	280.450.000,00	240.673.500,00	(39.776.500,00)	85,82		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.450.000,00	240.673.500,00	(39.776.500,00)	85,82		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.450.000,00	240.673.500,00	(39.776.500,00)	85,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68		
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68		
04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000,00	31.880.000,00	(3.120.000,00)	91,09		
04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000,00	31.880.000,00	(3.120.000,00)	91,09		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.880.000,00	(3.120.000,00)	91,09		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.880.000,00	(3.120.000,00)	91,09		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	158.966.000,00	132.791.900,00	(26.174.100,00)	83,53		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	158.966.000,00	132.791.900,00	(26.174.100,00)	83,53		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.966.000,00	132.791.900,00	(26.174.100,00)	83,53		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.966.000,00	132.791.900,00	(26.174.100,00)	83,53		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	2.703.820.000,00	2.662.249.715,00	(41.570.285,00)	98,46		
04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.703.820.000,00	2.662.249.715,00	(41.570.285,00)	98,46		
04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.400.000.000,00	2.387.758.200,00	(12.241.800,00)	99,49		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000.000,00	2.387.758.200,00	(12.241.800,00)	99,49		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000.000,00	2.387.758.200,00	(12.241.800,00)	99,49		
04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	303.820.000,00	274.491.515,00	(29.328.485,00)	90,35		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	303.820.000,00	274.491.515,00	(29.328.485,00)	90,35		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.820.000,00	274.491.515,00	(29.328.485,00)	90,35		
04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	11.659.000.000,00	10.434.398.406,00	(1.224.601.594,00)	89,50		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.659.000.000,00	10.434.398.406,00	(1.224.601.594,00)	89,50		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.434.000.000,00	10.225.547.925,00	(1.208.452.075,00)	89,43		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.434.000.000,00	10.225.547.925,00	(1.208.452.075,00)	89,43		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.000.000,00	1.069.547.925,00	(236.452.075,00)	81,89		
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.128.000.000,00	9.156.000.000,00	(972.000.000,00)	90,40		
04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	225.000.000,00	208.850.481,00	(16.149.519,00)	92,82		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	14.228.825,00	(10.771.175,00)	56,92		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.228.825,00	(10.771.175,00)	56,92		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	194.621.656,00	(5.378.344,00)	97,31		
04.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	194.621.656,00	(5.378.344,00)	97,31		
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	4.988.433.783,00	4.863.333.496,00	(125.100.287,00)	97,49		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.363.724.927,00	4.250.709.446,00	(113.015.481,00)	97,41		
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.011.000,00	68.678.500,00	(70.332.500,00)	49,41		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.011.000,00	68.678.500,00	(70.332.500,00)	49,41		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.011.000,00	68.678.500,00	(70.332.500,00)	49,41		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.167.141.927,00	4.125.424.946,00	(41.716.981,00)	99,00		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.230.184.027,00	3.208.854.946,00	(21.329.081,00)	99,34		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.230.184.027,00	3.208.854.946,00	(21.329.081,00)	99,34		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	936.957.900,00	916.570.000,00	(20.387.900,00)	97,82		
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	936.957.900,00	916.570.000,00	(20.387.900,00)	97,82		
04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	43.919.000,00	42.953.000,00	(966.000,00)	97,80		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.508.000,00	33.607.000,00	(901.000,00)	97,39		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.508.000,00	33.607.000,00	(901.000,00)	97,39		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	9.411.000,00	9.346.000,00	(65.000,00)	99,31		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.411.000,00	9.346.000,00	(65.000,00)	99,31		
04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	13.653.000,00	13.653.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.653.000,00	13.653.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.653.000,00	13.653.000,00	0,00	100,00		
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	24.829.000,00	24.829.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	7.108.000,00	7.108.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.108.000,00	7.108.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.108.000,00	7.108.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	17.721.000,00	17.721.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.721.000,00	17.721.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.721.000,00	17.721.000,00	0,00	100,00		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.060.000,00	53.060.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	21.635.000,00	21.635.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.635.000,00	21.635.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.635.000,00	21.635.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	31.425.000,00	31.425.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.425.000,00	31.425.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.425.000,00	31.425.000,00	0,00	100,00		
04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	546.819.856,00	534.735.050,00	(12.084.806,00)	97,79		
04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	15.600.000,00	14.681.000,00	(919.000,00)	94,11		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	14.681.000,00	(919.000,00)	94,11		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	14.681.000,00	(919.000,00)	94,11		
04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	525.478.656,00	518.228.050,00	(7.250.606,00)	98,62		
04.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.676.116,00	571.800,00	(4.104.316,00)	12,23		
04.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.676.116,00	571.800,00	(4.104.316,00)	12,23		
04.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	520.802.540,00	517.656.250,00	(3.146.290,00)	99,40		
04.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.802.540,00	517.656.250,00	(3.146.290,00)	99,40		
04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.741.200,00	1.826.000,00	(3.915.200,00)	31,81		
04.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.741.200,00	1.826.000,00	(3.915.200,00)	31,81		
04.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.741.200,00	1.826.000,00	(3.915.200,00)	31,81		
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	2.024.517.000,00	1.618.649.789,00	(405.867.211,00)	79,95		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.688.511.000,00	1.301.635.687,00	(386.875.313,00)	77,09		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000,00	520.709.428,00	(271.677.572,00)	65,71		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	792.387.000,00	520.709.428,00	(271.677.572,00)	65,71		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.587.000,00	48.909.428,00	(6.677.572,00)	87,99		
04.2.01.06.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	736.800.000,00	471.800.000,00	(265.000.000,00)	64,03		
04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	875.204.000,00	764.069.009,00	(111.134.991,00)	87,30		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	776.844.000,00	667.304.009,00	(109.539.991,00)	85,90		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.844.000,00	371.804.009,00	(105.039.991,00)	77,97		
04.2.01.09.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.09.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	195.500.000,00	(4.500.000,00)	97,75		
04.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	98.360.000,00	96.765.000,00	(1.595.000,00)	98,38		
04.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.360.000,00	96.765.000,00	(1.595.000,00)	98,38		
04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	10.937.250,00	(4.062.750,00)	72,92		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.937.250,00	(4.062.750,00)	72,92		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.937.250,00	(4.062.750,00)	72,92		
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	336.006.000,00	317.014.102,00	(18.991.898,00)	94,35		
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	17.500.000,00	15.648.100,00	(1.851.900,00)	89,42		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	15.648.100,00	(1.851.900,00)	89,42		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	15.648.100,00	(1.851.900,00)	89,42		
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	312.586.000,00	295.446.002,00	(17.139.998,00)	94,52		
04.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	312.586.000,00	295.446.002,00	(17.139.998,00)	94,52		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.586.000,00	295.446.002,00	(17.139.998,00)	94,52		
04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	3.520.000.000,00	3.309.251.730,00	(210.748.270,00)	94,01		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.980.000.000,00	2.814.919.490,00	(165.080.510,00)	94,46		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	80.000.000,00	24.978.000,00	(55.022.000,00)	31,22		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	24.978.000,00	(55.022.000,00)	31,22		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	24.978.000,00	(55.022.000,00)	31,22		
04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000,00	67.874.800,00	(32.125.200,00)	67,87		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	67.874.800,00	(32.125.200,00)	67,87		
04.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	67.874.800,00	(31.115.200,00)	68,57		
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	2.800.000.000,00	2.722.066.690,00	(77.933.310,00)	97,22		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000.000,00	2.722.066.690,00	(77.933.310,00)	97,22		
04.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	0,00	(6.440.000,00)	0		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.793.560.000,00	2.722.066.690,00	(71.493.310,00)	97,44		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	425.000.000,00	393.842.500,00	(31.157.500,00)	92,67		
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.000.000,00	23.603.000,00	(1.397.000,00)	94,41		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.603.000,00	(1.397.000,00)	94,41		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.603.000,00	(1.397.000,00)	94,41		
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	400.000.000,00	370.239.500,00	(29.760.500,00)	92,56		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	370.239.500,00	(29.760.500,00)	92,56		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	370.239.500,00	(29.760.500,00)	92,56		
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	89.741.740,00	(10.258.260,00)	89,74		
04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100.000.000,00	89.741.740,00	(10.258.260,00)	89,74		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	89.741.740,00	(10.258.260,00)	89,74		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	89.741.740,00	(9.248.260,00)	90,66		
04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	10.748.000,00	(4.252.000,00)	71,65		
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	10.748.000,00	(4.252.000,00)	71,65		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.748.000,00	(4.252.000,00)	71,65		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.748.000,00	(4.252.000,00)	71,65		
04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	1.061.000.000,00	1.042.421.056,00	(18.578.944,00)	98,25		
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.061.000.000,00	1.042.421.056,00	(18.578.944,00)	98,25		
04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	276.000.000,00	274.728.628,00	(1.271.372,00)	99,54		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	276.000.000,00	274.728.628,00	(1.271.372,00)	99,54		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.000.000,00	274.728.628,00	(1.271.372,00)	99,54		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	785.000.000,00	767.692.428,00	(17.307.572,00)	97,80		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	785.000.000,00	767.692.428,00	(17.307.572,00)	97,80		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.000.000,00	767.692.428,00	(17.307.572,00)	97,80		
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	50.000.000,00	41.690.600,00	(8.309.400,00)	83,38		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	41.690.600,00	(8.309.400,00)	83,38		
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.890.800,00	(2.109.200,00)	92,97		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.890.800,00	(2.109.200,00)	92,97		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.890.800,00	(2.109.200,00)	92,97		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	13.799.800,00	(6.200.200,00)	69,00		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.799.800,00	(6.200.200,00)	69,00		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.799.800,00	(6.200.200,00)	69,00		
04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	40.000.000,00	1.856.500,00	(38.143.500,00)	4,64		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	1.856.500,00	(38.143.500,00)	4,64		
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	600.000,00	(14.400.000,00)	4,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	600.000,00	(14.400.000,00)	4,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	600.000,00	(14.400.000,00)	4,00		
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	1.256.500,00	(23.743.500,00)	5,03		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	1.256.500,00	(23.743.500,00)	5,03		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	1.256.500,00	(23.743.500,00)	5,03		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	6.747.040.080,00	6.417.737.229,00	(329.302.851,00)	95,12		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.747.040.080,00	6.417.737.229,00	(329.302.851,00)	95,12		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.647.040.080,00	6.330.281.444,00	(316.758.636,00)	95,23		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.204.270.080,00	4.957.737.954,00	(246.532.126,00)	95,26		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.204.270.080,00	4.957.737.954,00	(246.532.126,00)	95,26		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	1.442.770.000,00	1.372.543.490,00	(70.226.510,00)	95,13		
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.637.000,00	228.825.000,00	(40.812.000,00)	84,86		
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.030.633.000,00	1.003.355.990,00	(27.277.010,00)	97,35		
04.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.500.000,00	140.362.500,00	(2.137.500,00)	98,50		
04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	80.000.000,00	70.321.435,00	(9.678.565,00)	87,90		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	9.678.250,00	(5.321.750,00)	64,52		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.678.250,00	(5.321.750,00)	64,52		
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	60.643.185,00	(4.356.815,00)	93,30		
04.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	60.643.185,00	(4.356.815,00)	93,30		
04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20.000.000,00	17.134.350,00	(2.865.650,00)	85,67		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.134.350,00	(2.865.650,00)	85,67		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.134.350,00	(2.865.650,00)	85,67		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	106.209.000,00	99.782.900,00	(6.426.100,00)	93,95		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.054.000,00	15.157.800,00	(1.896.200,00)	88,88		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.619.000,00	7.982.500,00	(1.636.500,00)	82,99		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.619.000,00	7.982.500,00	(1.636.500,00)	82,99		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.619.000,00	7.982.500,00	(1.636.500,00)	82,99		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7.435.000,00	7.175.300,00	(259.700,00)	96,51		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.435.000,00	7.175.300,00	(259.700,00)	96,51		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.435.000,00	7.175.300,00	(259.700,00)	96,51		
04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.155.000,00	4.050.000,00	(105.000,00)	97,47		
04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.155.000,00	4.050.000,00	(105.000,00)	97,47		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.155.000,00	4.050.000,00	(105.000,00)	97,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.000,00	4.050.000,00	(105.000,00)	97,47		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.000.000,00	68.750.000,00	(1.250.000,00)	98,21		
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.000.000,00	68.750.000,00	(1.250.000,00)	98,21		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	68.750.000,00	(1.250.000,00)	98,21		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.750.000,00	(1.250.000,00)	98,21		
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	11.825.100,00	(3.174.900,00)	78,83		
04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.000.000,00	11.825.100,00	(3.174.900,00)	78,83		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.825.100,00	(3.174.900,00)	78,83		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.825.100,00	(3.174.900,00)	78,83		
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	5.523.371.125,00	5.299.850.041,00	(223.521.084,00)	95,95		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.523.371.125,00	5.299.850.041,00	(223.521.084,00)	95,95		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.693.137.725,00	3.648.900.724,00	(44.237.001,00)	98,80		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.693.137.725,00	3.648.900.724,00	(44.237.001,00)	98,80		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.693.137.725,00	3.648.900.724,00	(44.237.001,00)	98,80		
04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50.347.300,00	30.682.000,00	(19.665.300,00)	60,94		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.347.300,00	30.682.000,00	(19.665.300,00)	60,94		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.347.300,00	30.682.000,00	(19.665.300,00)	60,94		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.409.450,00	(590.550,00)	94,09		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.409.450,00	(590.550,00)	94,09		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.409.450,00	(590.550,00)	94,09		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	256.991.000,00	248.535.000,00	(8.456.000,00)	96,71		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	256.991.000,00	248.535.000,00	(8.456.000,00)	96,71		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.991.000,00	248.535.000,00	(8.456.000,00)	96,71		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	120.000.000,00	119.873.620,00	(126.380,00)	99,89		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.873.620,00	(126.380,00)	99,89		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.873.620,00	(126.380,00)	99,89		
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	800.000.000,00	713.078.400,00	(86.921.600,00)	89,13		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	713.078.400,00	(86.921.600,00)	89,13		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	713.078.400,00	(86.921.600,00)	89,13		
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.895.100,00	49.809.620,00	(1.085.480,00)	97,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	50.895.100,00	49.809.620,00	(1.085.480,00)	97,87		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.895.100,00	49.809.620,00	(1.085.480,00)	97,87		
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	17.500.000,00	12.638.000,00	(4.862.000,00)	72,22		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	12.638.000,00	(4.862.000,00)	72,22		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	12.638.000,00	(4.862.000,00)	72,22		
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	162.500.000,00	137.889.200,00	(24.610.800,00)	84,85		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	162.500.000,00	137.889.200,00	(24.610.800,00)	84,85		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.500.000,00	137.889.200,00	(24.610.800,00)	84,85		
04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	350.000.000,00	323.799.427,00	(26.200.573,00)	92,51		
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	323.799.427,00	(26.200.573,00)	92,51		
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	323.799.427,00	(26.200.573,00)	92,51		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12.000.000,00	5.234.600,00	(6.765.400,00)	43,62		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	5.234.600,00	(6.765.400,00)	43,62		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	5.234.600,00	(6.765.400,00)	43,62		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	6.715.200.000,00	6.289.639.828,00	(425.560.172,00)	93,66		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.709.200.000,00	6.283.689.928,00	(425.510.072,00)	93,66		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	232.820.000,00	(127.180.000,00)	64,67		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	232.820.000,00	(127.180.000,00)	64,67		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	232.820.000,00	(127.180.000,00)	64,67		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.117.300.000,00	5.825.015.400,00	(292.284.600,00)	95,22		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.117.300.000,00	5.825.015.400,00	(292.284.600,00)	95,22		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.117.300.000,00	5.825.015.400,00	(292.284.600,00)	95,22		
04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	189.400.000,00	183.976.800,00	(5.423.200,00)	97,14		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	189.400.000,00	183.976.800,00	(5.423.200,00)	97,14		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.400.000,00	183.976.800,00	(5.423.200,00)	97,14		
04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	42.500.000,00	41.877.728,00	(622.272,00)	98,54		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000,00	41.877.728,00	(622.272,00)	98,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	41.877.728,00	(622.272,00)	98,54		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000,00	5.949.900,00	(50.100,00)	99,17		
04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.000.000,00	5.949.900,00	(50.100,00)	99,17		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.949.900,00	(50.100,00)	99,17		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.949.900,00	(50.100,00)	99,17		
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	222.367.000,00	208.705.500,00	(13.661.500,00)	93,86		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	222.367.000,00	208.705.500,00	(13.661.500,00)	93,86		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	92.050.000,00	88.752.000,00	(3.298.000,00)	96,42		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.050.000,00	88.752.000,00	(3.298.000,00)	96,42		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.050.000,00	88.752.000,00	(3.298.000,00)	96,42		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.317.000,00	73.711.000,00	(6.606.000,00)	91,78		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.317.000,00	73.711.000,00	(6.606.000,00)	91,78		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.317.000,00	73.711.000,00	(6.606.000,00)	91,78		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000,00	46.242.500,00	(3.757.500,00)	92,49		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.242.500,00	(3.757.500,00)	92,49		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.242.500,00	(3.757.500,00)	92,49		
04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	106.096.200,00	103.336.160,00	(2.760.040,00)	97,40		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.096.200,00	103.336.160,00	(2.760.040,00)	97,40		
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	40.414.600,00	39.964.050,00	(450.550,00)	98,89		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.414.600,00	39.964.050,00	(450.550,00)	98,89		
04.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.404.600,00	38.954.050,00	(450.550,00)	98,86		
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	19.725.000,00	18.414.700,00	(1.310.300,00)	93,36		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.725.000,00	18.414.700,00	(1.310.300,00)	93,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.715.000,00	18.414.700,00	(300.300,00)	98,40		
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	45.956.600,00	44.957.410,00	(999.190,00)	97,83		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.956.600,00	44.957.410,00	(999.190,00)	97,83		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.946.600,00	43.947.410,00	(999.190,00)	97,78		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.185.400.000,00	1.100.052.220,00	(85.347.780,00)	92,80		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000,00	98.027.400,00	(1.972.600,00)	98,03		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000,00	98.027.400,00	(1.972.600,00)	98,03		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.027.400,00	(1.972.600,00)	98,03		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.027.400,00	(1.972.600,00)	98,03		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.085.400.000,00	1.002.024.820,00	(83.375.180,00)	92,32		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	810.400.000,00	733.845.550,00	(76.554.450,00)	90,55		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	810.400.000,00	733.845.550,00	(76.554.450,00)	90,55		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	99.635.850,00	(10.364.150,00)	90,58		
04.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	700.400.000,00	634.209.700,00	(66.190.300,00)	90,55		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.937.270,00	(62.730,00)	99,93		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.500.000,00	82.437.270,00	(62.730,00)	99,92		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	82.437.270,00	(62.730,00)	99,92		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	190.000.000,00	183.242.000,00	(6.758.000,00)	96,44		
04.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	183.242.000,00	(6.758.000,00)	96,44		
04.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	33.242.000,00	(6.758.000,00)	83,11		
04.2.04.05.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	29.746.000,00	29.246.000,00	(500.000,00)	98,32		
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	29.746.000,00	29.246.000,00	(500.000,00)	98,32		
04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	24.746.000,00	24.246.000,00	(500.000,00)	97,98		
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	24.746.000,00	24.246.000,00	(500.000,00)	97,98		
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.746.000,00	24.246.000,00	(500.000,00)	97,98		
04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	1.453.300.000,00	1.359.268.072,00	(94.031.928,00)	93,53		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	114.474.350,00	(15.525.650,00)	88,06		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000,00	114.474.350,00	(15.525.650,00)	88,06		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	114.474.350,00	(15.525.650,00)	88,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	114.474.350,00	(15.525.650,00)	88,06		
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	717.300.000,00	645.787.570,00	(71.512.430,00)	90,03		
04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	717.300.000,00	645.787.570,00	(71.512.430,00)	90,03		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	717.300.000,00	645.787.570,00	(71.512.430,00)	90,03		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.300.000,00	645.787.570,00	(71.512.430,00)	90,03		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	531.000.000,00	526.743.002,00	(4.256.998,00)	99,20		
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	486.000.000,00	483.214.720,00	(2.785.280,00)	99,43		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	486.000.000,00	483.214.720,00	(2.785.280,00)	99,43		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.214.720,00	(2.785.280,00)	94,43		
04.2.04.01.5.1.05	Belanja Hibah	436.000.000,00	436.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	45.000.000,00	43.528.282,00	(1.471.718,00)	96,73		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.528.282,00	(1.471.718,00)	96,73		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.528.282,00	(1.471.718,00)	96,73		
04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	75.000.000,00	72.263.150,00	(2.736.850,00)	96,35		
04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	75.000.000,00	72.263.150,00	(2.736.850,00)	96,35		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	72.263.150,00	(2.736.850,00)	96,35		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.263.150,00	(2.736.850,00)	96,35		
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	1.002.000.000,00	989.735.100,00	(12.264.900,00)	98,78		
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000,00	142.779.050,00	(7.220.950,00)	95,19		
04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	150.000.000,00	142.779.050,00	(7.220.950,00)	95,19		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	142.779.050,00	(7.220.950,00)	95,19		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	142.779.050,00	(7.220.950,00)	95,19		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	822.000.000,00	819.840.200,00	(2.159.800,00)	99,74		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	822.000.000,00	819.840.200,00	(2.159.800,00)	99,74		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	822.000.000,00	819.840.200,00	(2.159.800,00)	99,74		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.000.000,00	819.840.200,00	(2.159.800,00)	99,74		
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.115.850,00	(2.884.150,00)	90,39		
04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000,00	27.115.850,00	(2.884.150,00)	90,39		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.115.850,00	(2.884.150,00)	90,39		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.115.850,00	(2.884.150,00)	90,39		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	50.000.000,00	25.434.000,00	(24.566.000,00)	50,87		
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	25.434.000,00	(24.566.000,00)	50,87		
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	25.434.000,00	(24.566.000,00)	50,87		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	25.434.000,00	(24.566.000,00)	50,87		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.434.000,00	(24.566.000,00)	50,87		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	5.335.430.200,00	4.901.685.866,00	(433.744.334,00)	91,87		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.335.430.200,00	4.901.685.866,00	(433.744.334,00)	91,87		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	908.153.100,00	813.039.850,00	(95.113.250,00)	89,53		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	908.153.100,00	813.039.850,00	(95.113.250,00)	89,53		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.153.100,00	813.039.850,00	(95.113.250,00)	89,53		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	970.980.000,00	954.005.600,00	(16.974.400,00)	98,25		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	970.980.000,00	954.005.600,00	(16.974.400,00)	98,25		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.980.000,00	954.005.600,00	(16.974.400,00)	98,25		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	328.700.000,00	303.723.700,00	(24.976.300,00)	92,40		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	328.700.000,00	303.723.700,00	(24.976.300,00)	92,40		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.700.000,00	303.723.700,00	(24.976.300,00)	92,40		
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	456.163.852,00	427.440.395,00	(28.723.457,00)	93,70		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	456.163.852,00	427.440.395,00	(28.723.457,00)	93,70		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.163.852,00	427.440.395,00	(28.723.457,00)	93,70		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.472.065.900,00	1.376.899.881,00	(95.166.019,00)	93,54		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.472.065.900,00	1.376.899.881,00	(95.166.019,00)	93,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.065.900,00	1.376.899.881,00	(95.166.019,00)	93,54		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.118.851.348,00	959.209.440,00	(159.641.908,00)	85,73		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.118.851.348,00	959.209.440,00	(159.641.908,00)	85,73		
04.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	13.370.000,00	(9.550.000,00)	58,33		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.931.348,00	945.839.440,00	(150.091.908,00)	86,30		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	61.300.000,00	50.412.550,00	(10.887.450,00)	82,24		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	61.300.000,00	50.412.550,00	(10.887.450,00)	82,24		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.300.000,00	50.412.550,00	(10.887.450,00)	82,24		
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	19.216.000,00	16.954.450,00	(2.261.550,00)	88,23		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	19.216.000,00	16.954.450,00	(2.261.550,00)	88,23		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.216.000,00	16.954.450,00	(2.261.550,00)	88,23		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	3.975.494.250,00	3.838.151.830,00	(137.342.420,00)	96,55		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.227.375.750,00	1.163.322.900,00	(64.052.850,00)	94,78		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.227.375.750,00	1.163.322.900,00	(64.052.850,00)	94,78		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.227.375.750,00	1.163.322.900,00	(64.052.850,00)	94,78		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.375.750,00	1.163.322.900,00	(64.052.850,00)	94,78		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.748.118.500,00	2.674.828.930,00	(73.289.570,00)	97,33		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.479.782.000,00	2.413.153.100,00	(66.628.900,00)	97,31		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.479.782.000,00	2.413.153.100,00	(66.628.900,00)	97,31		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.479.782.000,00	2.413.153.100,00	(66.628.900,00)	97,31		
04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	268.336.500,00	261.675.830,00	(6.660.670,00)	97,52		
04.7.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	268.336.500,00	261.675.830,00	(6.660.670,00)	97,52		
04.7.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.336.500,00	261.675.830,00	(6.660.670,00)	97,52		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	1.282.225.500,00	1.278.636.750,00	(3.588.750,00)	99,72		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.282.225.500,00	1.278.636.750,00	(3.588.750,00)	99,72		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.282.225.500,00	1.278.636.750,00	(3.588.750,00)	99,72		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.282.225.500,00	1.278.636.750,00	(3.588.750,00)	99,72		
04.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.690.000,00	65.101.250,00	(3.588.750,00)	94,78		
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.212.325.500,00	1.212.325.500,00	0,00	100,00		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	2.042.220.078,00	1.913.864.450,00	(128.355.628,00)	93,71		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.650.000,00	436.202.750,00	(19.447.250,00)	95,73		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	455.650.000,00	436.202.750,00	(19.447.250,00)	95,73		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	455.650.000,00	436.202.750,00	(19.447.250,00)	95,73		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.650.000,00	436.202.750,00	(19.447.250,00)	95,73		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.120.800,00	(879.200,00)	98,90		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	80.000.000,00	79.120.800,00	(879.200,00)	98,90		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.120.800,00	(879.200,00)	98,90		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.120.800,00	(879.200,00)	98,90		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.506.570.078,00	1.398.540.900,00	(108.029.178,00)	92,83		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.506.570.078,00	1.398.540.900,00	(108.029.178,00)	92,83		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.506.570.078,00	1.398.540.900,00	(108.029.178,00)	92,83		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.506.570.078,00	1.398.540.900,00	(108.029.178,00)	92,83		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	8.015.479.600,00	7.653.179.248,00	(362.300.352,00)	95,48		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.015.479.600,00	7.653.179.248,00	(362.300.352,00)	95,48		
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	180.957.615,00	(19.042.385,00)	90,48		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	180.957.615,00	(19.042.385,00)	90,48		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	180.957.615,00	(19.042.385,00)	90,48		
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.400.000.000,00	3.391.422.600,00	(8.577.400,00)	99,75		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000.000,00	3.391.422.600,00	(8.577.400,00)	99,75		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	143.422.600,00	(8.577.400,00)	94,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.06.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.248.000.000,00	3.248.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	700.000.000,00	626.109.230,00	(73.890.770,00)	89,44		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000,00	626.109.230,00	(73.890.770,00)	89,44		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	626.109.230,00	(73.890.770,00)	89,44		
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.801.990.000,00	1.800.000.000,00	(1.990.000,00)	99,89		
05.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.801.990.000,00	1.800.000.000,00	(1.990.000,00)	99,89		
05.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.801.990.000,00	1.800.000.000,00	(1.990.000,00)	99,89		
05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	946.000.000,00	794.130.650,00	(151.869.350,00)	83,95		
05.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.861.650,00	(138.350,00)	96,54		
05.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.861.650,00	(138.350,00)	96,54		
05.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	942.000.000,00	790.269.000,00	(151.731.000,00)	83,89		
05.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.000.000,00	790.269.000,00	(151.731.000,00)	83,89		
05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	550.000.000,00	486.320.953,00	(63.679.047,00)	88,42		
05.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	486.320.953,00	(63.679.047,00)	88,42		
05.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	486.320.953,00	(63.679.047,00)	88,42		
05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	417.489.600,00	374.238.200,00	(43.251.400,00)	89,64		
05.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	401.489.600,00	374.238.200,00	(27.251.400,00)	93,21		
05.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.489.600,00	374.238.200,00	(27.251.400,00)	93,21		
05.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0		
05.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0		
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	2.150.060.000,00	1.896.442.827,00	(253.617.173,00)	88,20		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.150.060.000,00	1.896.442.827,00	(253.617.173,00)	88,20		
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000,00	41.505.000,00	(8.495.000,00)	83,01		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	41.505.000,00	(8.495.000,00)	83,01		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	41.505.000,00	(8.495.000,00)	83,01		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.885.960.000,00	1.697.067.122,00	(188.892.878,00)	89,98		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	585.630.000,00	427.361.722,00	(158.268.278,00)	72,97		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.630.000,00	427.361.722,00	(158.268.278,00)	72,97		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.300.330.000,00	1.269.705.400,00	(30.624.600,00)	97,64		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.700.000,00	22.400.000,00	(300.000,00)	98,68		
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	969.765.400,00	(30.234.600,00)	96,98		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	265.400.000,00	265.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.230.000,00	12.140.000,00	(90.000,00)	99,26		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100.000.000,00	84.500.465,00	(15.499.535,00)	84,50		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	84.500.465,00	(15.499.535,00)	84,50		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	84.500.465,00	(15.499.535,00)	84,50		
05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	114.100.000,00	73.370.240,00	(40.729.760,00)	64,30		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	114.100.000,00	73.370.240,00	(40.729.760,00)	64,30		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.100.000,00	73.370.240,00	(40.729.760,00)	64,30		
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	9.628.648.804,00	8.822.412.684,00	(806.236.120,00)	91,63		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.628.648.804,00	8.822.412.684,00	(806.236.120,00)	91,63		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	75.749.184,00	(4.250.816,00)	94,69		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	75.749.184,00	(4.250.816,00)	94,69		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	75.749.184,00	(4.250.816,00)	94,69		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.750.000,00	87.364.000,00	(8.386.000,00)	91,24		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.250.000,00	63.864.000,00	(8.386.000,00)	88,39		
05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	0		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	63.864.000,00	(6.776.000,00)	90,41		
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.427.898.804,00	8.639.942.500,00	(787.956.304,00)	91,64		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.427.898.804,00	8.639.942.500,00	(787.956.304,00)	91,64		
05.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.820.000,00	5.040.000,00	(10.780.000,00)	31,86		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.412.078.804,00	8.634.902.500,00	(777.176.304,00)	91,74		
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25.000.000,00	19.357.000,00	(5.643.000,00)	77,43		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	19.357.000,00	(5.643.000,00)	77,43		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.357.000,00	(5.643.000,00)	77,43		
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	323.000.000,00	196.884.350,00	(126.115.650,00)	60,95		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000,00	35.292.000,00	(21.708.000,00)	61,92		
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	32.000.000,00	18.172.000,00	(13.828.000,00)	56,79		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	18.172.000,00	(13.828.000,00)	56,79		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	0		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.980.000,00	18.172.000,00	(11.808.000,00)	60,61		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000,00	17.120.000,00	(7.880.000,00)	68,48		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	17.120.000,00	(7.880.000,00)	68,48		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.990.000,00	17.120.000,00	(6.870.000,00)	71,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	266.000.000,00	161.592.350,00	(104.407.650,00)	60,75		
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.000.000,00	59.655.200,00	(9.344.800,00)	86,46		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.000.000,00	59.655.200,00	(9.344.800,00)	86,46		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	59.655.200,00	(9.344.800,00)	86,46		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000,00	4.475.000,00	(12.525.000,00)	26,32		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	4.475.000,00	(12.525.000,00)	26,32		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	4.475.000,00	(12.525.000,00)	26,32		
05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	10.000.000,00	7.245.500,00	(2.754.500,00)	72,46		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.245.500,00	(2.754.500,00)	72,46		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.245.500,00	(2.754.500,00)	72,46		
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	58.724.400,00	(41.275.600,00)	58,72		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	58.724.400,00	(41.275.600,00)	58,72		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	58.724.400,00	(41.275.600,00)	58,72		
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70.000.000,00	31.492.250,00	(38.507.750,00)	44,99		
05.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	31.492.250,00	(38.507.750,00)	44,99		
05.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	31.492.250,00	(38.507.750,00)	44,99		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	10.000.000,00	9.995.100,00	(4.900,00)	99,95		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.995.100,00	(4.900,00)	99,95		
05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.995.100,00	(4.900,00)	99,95		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.995.100,00	(4.900,00)	99,95		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.995.100,00	(4.900,00)	99,95		
05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	35.000.000,00	33.599.900,00	(1.400.100,00)	96,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	33.599.900,00	(1.400.100,00)	96,00		
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	33.599.900,00	(1.400.100,00)	96,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.599.900,00	(1.400.100,00)	96,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.599.900,00	(1.400.100,00)	96,00		
05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	5.782.000.000,00	5.193.541.020,00	(588.458.980,00)	89,82		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.782.000.000,00	5.193.541.020,00	(588.458.980,00)	89,82		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.782.000.000,00	5.193.541.020,00	(588.458.980,00)	89,82		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	184.353.650,00	(35.646.350,00)	83,80		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	184.353.650,00	(35.646.350,00)	83,80		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06		
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	60.000.000,00	32.363.200,00	(27.636.800,00)	53,94		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	40.000.000,00	22.233.000,00	(17.767.000,00)	55,58		
05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000,00	13.335.500,00	(6.664.500,00)	66,68		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.335.500,00	(6.664.500,00)	66,68		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.335.500,00	(6.664.500,00)	66,68		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	20.000.000,00	8.897.500,00	(11.102.500,00)	44,49		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	8.897.500,00	(11.102.500,00)	44,49		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.897.500,00	(11.102.500,00)	44,49		
05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	10.130.200,00	(9.869.800,00)	50,65		
05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000,00	10.130.200,00	(9.869.800,00)	50,65		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	10.130.200,00	(9.869.800,00)	50,65		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.130.200,00	(9.869.800,00)	50,65		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	53.882.000,00	51.527.000,00	(2.355.000,00)	95,63		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	53.882.000,00	51.527.000,00	(2.355.000,00)	95,63		
05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	53.882.000,00	51.527.000,00	(2.355.000,00)	95,63		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.882.000,00	51.527.000,00	(2.355.000,00)	95,63		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.882.000,00	51.527.000,00	(2.355.000,00)	95,63		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	1.600.065.600,00	1.559.592.368,00	(40.473.232,00)	97,47		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.600.065.600,00	1.559.592.368,00	(40.473.232,00)	97,47		
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.000.000,00	8.521.050,00	(7.478.950,00)	53,26		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	8.521.050,00	(7.478.950,00)	53,26		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	8.521.050,00	(7.478.950,00)	53,26		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.003.700.000,00	975.982.622,00	(27.717.378,00)	97,24		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.003.700.000,00	975.982.622,00	(27.717.378,00)	97,24		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.700.000,00	975.982.622,00	(27.717.378,00)	97,24		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.000.000,00	32.586.300,00	(2.413.700,00)	93,10		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.586.300,00	(2.413.700,00)	93,10		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.586.300,00	(2.413.700,00)	93,10		
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.000.000,00	37.515.516,00	(2.484.484,00)	93,79		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.515.516,00	(2.484.484,00)	93,79		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.515.516,00	(2.484.484,00)	93,79		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	505.365.600,00	504.986.880,00	(378.720,00)	99,93		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	505.365.600,00	504.986.880,00	(378.720,00)	99,93		
05.2.01.09.5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.705.600,00	495.326.880,00	(378.720,00)	99,92		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	200.000.000,00	194.788.260,00	(5.211.740,00)	97,39		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	194.788.260,00	(5.211.740,00)	97,39		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000,00	194.788.260,00	(5.211.740,00)	97,39		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	194.788.260,00	(5.211.740,00)	97,39		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	194.788.260,00	(5.211.740,00)	97,39		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	574.650.000,00	538.264.500,00	(36.385.500,00)	93,67		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	574.650.000,00	538.264.500,00	(36.385.500,00)	93,67		
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	209.450.000,00	209.316.000,00	(134.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	209.450.000,00	209.316.000,00	(134.000,00)	99,94		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.450.000,00	209.316.000,00	(134.000,00)	99,94		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000,00	186.090.000,00	(13.910.000,00)	93,05		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	186.090.000,00	(13.910.000,00)	93,05		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	186.090.000,00	(13.910.000,00)	93,05		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	165.200.000,00	142.858.500,00	(22.341.500,00)	86,48		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	165.200.000,00	142.858.500,00	(22.341.500,00)	86,48		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.200.000,00	142.858.500,00	(22.341.500,00)	86,48		
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	208.050.758,00	167.240.740,00	(40.810.018,00)	80,38		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	65.183.157,00	27.663.350,00	(37.519.807,00)	42,44		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	65.183.157,00	27.663.350,00	(37.519.807,00)	42,44		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.138.157,00	25.618.350,00	(37.519.807,00)	40,58		
05.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.128.157,00	25.618.350,00	(36.509.807,00)	41,23		
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	100,00		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	142.867.601,00	139.577.390,00	(3.290.211,00)	97,70		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	98.288.144,00	96.510.590,00	(1.777.554,00)	98,19		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.113.144,00	95.650.590,00	(1.462.554,00)	98,49		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.113.144,00	95.650.590,00	(1.462.554,00)	98,49		
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	1.175.000,00	860.000,00	(315.000,00)	73,19		
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.175.000,00	860.000,00	(315.000,00)	73,19		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	44.579.457,00	43.066.800,00	(1.512.657,00)	96,61		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.579.457,00	17.566.800,00	(12.657,00)	99,93		
05.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.569.457,00	16.556.800,00	(12.657,00)	99,92		
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	25.500.000,00	(1.500.000,00)	94,44		
05.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	6.500.000,00	(1.500.000,00)	81,25		
05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00		
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00		
05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00		
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	2.477.113.000,00	2.385.063.554,00	(92.049.446,00)	96,28		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.477.113.000,00	2.385.063.554,00	(92.049.446,00)	96,28		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	33.983.000,00	32.982.900,00	(1.000.100,00)	97,06		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.983.000,00	32.982.900,00	(1.000.100,00)	97,06		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.983.000,00	32.982.900,00	(1.000.100,00)	97,06		
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2.413.130.000,00	2.323.030.654,00	(90.099.346,00)	96,27		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.162.530.000,00	2.084.086.654,00	(78.443.346,00)	96,37		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.162.530.000,00	2.084.086.654,00	(78.443.346,00)	96,37		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	250.600.000,00	238.944.000,00	(11.656.000,00)	95,35		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.600.000,00	63.284.000,00	(7.316.000,00)	89,64		
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	175.660.000,00	(4.340.000,00)	97,59		
05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30.000.000,00	29.050.000,00	(950.000,00)	96,83		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.050.000,00	(950.000,00)	96,83		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.050.000,00	(950.000,00)	96,83		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	546.700.000,00	531.389.377,00	(15.310.623,00)	97,20		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	546.700.000,00	531.389.377,00	(15.310.623,00)	97,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	244.200.000,00	235.922.400,00	(8.277.600,00)	96,61		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.200.000,00	235.922.400,00	(8.277.600,00)	96,61		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.200.000,00	235.922.400,00	(8.277.600,00)	96,61		
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	225.000.000,00	220.684.705,00	(4.315.295,00)	98,08		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	220.684.705,00	(4.315.295,00)	98,08		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	220.684.705,00	(4.315.295,00)	98,08		
05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	77.500.000,00	74.782.272,00	(2.717.728,00)	96,49		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	74.782.272,00	(2.717.728,00)	96,49		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	74.782.272,00	(2.717.728,00)	96,49		
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	50.000.000,00	43.686.125,00	(6.313.875,00)	87,37		
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.686.125,00	(6.313.875,00)	87,37		
05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	30.000.000,00	28.304.335,00	(1.695.665,00)	94,35		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.304.335,00	(1.695.665,00)	94,35		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.304.335,00	(1.695.665,00)	94,35		
05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000,00	15.381.790,00	(4.618.210,00)	76,91		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	15.381.790,00	(4.618.210,00)	76,91		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.381.790,00	(4.618.210,00)	76,91		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	2.510.827.200,00	2.392.679.999,00	(118.147.201,00)	95,29		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.510.827.200,00	2.392.679.999,00	(118.147.201,00)	95,29		
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.426.327.200,00	2.314.160.689,00	(112.166.511,00)	95,38		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.424.827.200,00	2.312.660.689,00	(112.166.511,00)	95,37		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.424.827.200,00	2.312.660.689,00	(112.166.511,00)	95,37		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.500.000,00	78.519.310,00	(5.980.690,00)	92,92		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	84.500.000,00	78.519.310,00	(5.980.690,00)	92,92		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.500.000,00	78.519.310,00	(5.980.690,00)	92,92		
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	94.750.000,00	74.185.250,00	(20.564.750,00)	78,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	94.750.000,00	74.185.250,00	(20.564.750,00)	78,30		
05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.000.000,00	1.663.500,00	(3.336.500,00)	33,27		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.663.500,00	(3.336.500,00)	33,27		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.663.500,00	(3.336.500,00)	33,27		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80.000.000,00	63.189.750,00	(16.810.250,00)	78,99		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	63.189.750,00	(16.810.250,00)	78,99		
05.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.990.000,00	62.179.750,00	(16.810.250,00)	78,72		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.750.000,00	4.522.000,00	(228.000,00)	95,20		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.522.000,00	(228.000,00)	95,20		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.522.000,00	(228.000,00)	95,20		
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.000.000,00	4.810.000,00	(190.000,00)	96,20		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.810.000,00	(190.000,00)	96,20		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.810.000,00	(190.000,00)	96,20		
06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	85.000.000,00	81.974.650,00	(3.025.350,00)	96,44		
06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	81.974.650,00	(3.025.350,00)	96,44		
06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.029.650,00	(1.970.350,00)	95,07		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.029.650,00	(1.970.350,00)	95,07		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.029.650,00	(1.970.350,00)	95,07		
06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	43.945.000,00	(1.055.000,00)	97,66		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.945.000,00	(1.055.000,00)	97,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.945.000,00	(1.055.000,00)	97,66		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	2.893.894.000,00	2.798.093.280,00	(95.800.720,00)	96,69		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.893.894.000,00	2.798.093.280,00	(95.800.720,00)	96,69		
06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	220.000.000,00	215.751.980,00	(4.248.020,00)	98,07		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	215.751.980,00	(4.248.020,00)	98,07		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	215.751.980,00	(4.248.020,00)	98,07		
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.373.894.000,00	2.310.330.150,00	(63.563.850,00)	97,32		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	43.894.000,00	29.090.150,00	(14.803.850,00)	66,27		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.894.000,00	29.090.150,00	(14.803.850,00)	66,27		
06.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	2.330.000.000,00	2.281.240.000,00	(48.760.000,00)	97,91		
06.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.330.000.000,00	2.281.240.000,00	(48.760.000,00)	97,91		
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000,00	191.194.200,00	(8.805.800,00)	95,60		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	191.194.200,00	(8.805.800,00)	95,60		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	191.194.200,00	(8.805.800,00)	95,60		
06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000,00	80.816.950,00	(19.183.050,00)	80,82		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	66.770.850,00	49.266.950,00	(17.503.900,00)	73,79		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.770.850,00	49.266.950,00	(17.503.900,00)	73,79		
06.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	33.229.150,00	31.550.000,00	(1.679.150,00)	94,95		
06.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.229.150,00	31.550.000,00	(1.679.150,00)	94,95		
06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	200.275.000,00	66.414.300,00	(133.860.700,00)	33,16		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	177.000.000,00	45.331.500,00	(131.668.500,00)	25,61		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	30.000.000,00	1.480.000,00	(28.520.000,00)	4,93		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	1.480.000,00	(28.520.000,00)	4,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	1.480.000,00	(28.520.000,00)	4,93		
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0		
06.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.990.000,00	0,00	(28.990.000,00)	0		
06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000.000,00	23.364.500,00	(6.635.500,00)	77,88		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	23.364.500,00	(6.635.500,00)	77,88		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	0		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.390.000,00	23.364.500,00	(5.025.500,00)	82,30		
06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	67.000.000,00	13.307.000,00	(53.693.000,00)	19,86		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	13.307.000,00	(53.693.000,00)	19,86		
06.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.590.000,00	11.897.000,00	(53.693.000,00)	18,14		
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.000.000,00	7.180.000,00	(12.820.000,00)	35,90		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	7.180.000,00	(12.820.000,00)	35,90		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.180.000,00	(12.820.000,00)	35,90		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	23.275.000,00	21.082.800,00	(2.192.200,00)	90,58		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	23.275.000,00	21.082.800,00	(2.192.200,00)	90,58		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.275.000,00	21.082.800,00	(2.192.200,00)	90,58		
06.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.265.000,00	20.072.800,00	(2.192.200,00)	90,15		
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	395.800.000,00	373.299.497,00	(22.500.503,00)	94,32		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	253.000.000,00	236.358.997,00	(16.641.003,00)	93,42		
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	223.000.000,00	207.359.597,00	(15.640.403,00)	92,99		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	223.000.000,00	207.359.597,00	(15.640.403,00)	92,99		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	194.359.597,00	(15.640.403,00)	92,55		
06.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.999.400,00	(1.000.600,00)	96,66		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.999.400,00	(1.000.600,00)	96,66		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.999.400,00	(1.000.600,00)	96,66		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	142.800.000,00	136.940.500,00	(5.859.500,00)	95,90		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.800.000,00	109.945.000,00	(5.855.000,00)	94,94		
06.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.800.000,00	109.945.000,00	(5.855.000,00)	94,94		
06.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	97.945.000,00	(5.855.000,00)	94,36		
06.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.995.500,00	(4.500,00)	99,98		
06.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.995.500,00	(4.500,00)	99,98		
06.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.995.500,00	(4.500,00)	99,94		
06.2.02.04.5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	50.000.000,00	20.636.800,00	(29.363.200,00)	41,27		
06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	20.636.800,00	(29.363.200,00)	41,27		
06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	6.335.000,00	(18.665.000,00)	25,34		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	6.335.000,00	(18.665.000,00)	25,34		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	6.335.000,00	(18.665.000,00)	25,34		
06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	14.301.800,00	(10.698.200,00)	57,21		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	14.301.800,00	(10.698.200,00)	57,21		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.301.800,00	(10.698.200,00)	57,21		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	89.152.000,00	71.856.883,00	(17.295.117,00)	80,60		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.152.000,00	71.856.883,00	(17.295.117,00)	80,60		
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000,00	19.408.700,00	(10.591.300,00)	64,70		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	19.408.700,00	(10.591.300,00)	64,70		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	19.408.700,00	(10.591.300,00)	64,70		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.152.000,00	35.419.433,00	(3.732.567,00)	90,47		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	39.152.000,00	35.419.433,00	(3.732.567,00)	90,47		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.152.000,00	35.419.433,00	(3.732.567,00)	90,47		
06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	20.000.000,00	17.028.750,00	(2.971.250,00)	85,14		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.028.750,00	(2.971.250,00)	85,14		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.028.750,00	(2.971.250,00)	85,14		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	261.487.500,00	255.126.200,00	(6.361.300,00)	97,57		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.487.500,00	255.126.200,00	(6.361.300,00)	97,57		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	261.487.500,00	255.126.200,00	(6.361.300,00)	97,57		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	187.033.252,00	181.351.200,00	(5.682.052,00)	96,96		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.033.252,00	181.351.200,00	(5.682.052,00)	96,96		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	74.454.248,00	73.775.000,00	(679.248,00)	99,09		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.454.248,00	73.775.000,00	(679.248,00)	99,09		
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	70.000.000,00	60.198.500,00	(9.801.500,00)	86,00		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000,00	60.198.500,00	(9.801.500,00)	86,00		
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000,00	60.198.500,00	(9.801.500,00)	86,00		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	60.198.500,00	(9.801.500,00)	86,00		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	60.198.500,00	(9.801.500,00)	86,00		
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	36.600.000,00	35.466.513,00	(1.133.487,00)	96,90		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	36.600.000,00	35.466.513,00	(1.133.487,00)	96,90		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	36.600.000,00	35.466.513,00	(1.133.487,00)	96,90		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.553.250,00	20.619.763,00	(933.487,00)	95,67		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.553.250,00	20.619.763,00	(933.487,00)	95,67		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	15.046.750,00	14.846.750,00	(200.000,00)	98,67		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.046.750,00	14.846.750,00	(200.000,00)	98,67		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	2.704.985.699,00	2.469.712.800,00	(235.272.899,00)	91,30		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.704.985.699,00	2.469.712.800,00	(235.272.899,00)	91,30		
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	406.339.450,00	376.068.430,00	(30.271.020,00)	92,55		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	406.339.450,00	376.068.430,00	(30.271.020,00)	92,55		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.339.450,00	376.068.430,00	(30.271.020,00)	92,55		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	237.853.000,00	218.145.650,00	(19.707.350,00)	91,71		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	237.853.000,00	218.145.650,00	(19.707.350,00)	91,71		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.853.000,00	218.145.650,00	(19.707.350,00)	91,71		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	161.516.000,00	151.108.800,00	(10.407.200,00)	93,56		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	161.516.000,00	151.108.800,00	(10.407.200,00)	93,56		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.516.000,00	151.108.800,00	(10.407.200,00)	93,56		
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	176.969.950,00	153.835.450,00	(23.134.500,00)	86,93		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	176.969.950,00	153.835.450,00	(23.134.500,00)	86,93		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.969.950,00	153.835.450,00	(23.134.500,00)	86,93		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	372.369.500,00	352.853.650,00	(19.515.850,00)	94,76		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	372.369.500,00	352.853.650,00	(19.515.850,00)	94,76		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.369.500,00	352.853.650,00	(19.515.850,00)	94,76		
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	62.646.000,00	58.193.600,00	(4.452.400,00)	92,89		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	62.646.000,00	58.193.600,00	(4.452.400,00)	92,89		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.646.000,00	58.193.600,00	(4.452.400,00)	92,89		
06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	38.343.089,00	29.891.000,00	(8.452.089,00)	77,96		
06.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	38.343.089,00	29.891.000,00	(8.452.089,00)	77,96		
06.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.343.089,00	29.891.000,00	(8.452.089,00)	77,96		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.176.691.860,00	1.060.443.620,00	(116.248.240,00)	90,12		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.175.066.860,00	1.058.850.620,00	(116.216.240,00)	90,11		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.066.860,00	1.058.850.620,00	(116.216.240,00)	90,11		
06.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	1.625.000,00	1.593.000,00	(32.000,00)	98,03		
06.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.625.000,00	1.593.000,00	(32.000,00)	98,03		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.700.000,00	1.599.900,00	(100.100,00)	94,11		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.599.900,00	(100.100,00)	94,11		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.599.900,00	(100.100,00)	94,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	24.003.850,00	22.968.000,00	(1.035.850,00)	95,68		
06.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	24.003.850,00	22.968.000,00	(1.035.850,00)	95,68		
06.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.003.850,00	22.968.000,00	(1.035.850,00)	95,68		
06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	46.553.000,00	44.604.700,00	(1.948.300,00)	95,81		
06.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	46.553.000,00	44.604.700,00	(1.948.300,00)	95,81		
06.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.553.000,00	44.604.700,00	(1.948.300,00)	95,81		
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	1.956.002.500,00	1.751.358.599,00	(204.643.901,00)	89,54		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.956.002.500,00	1.751.358.599,00	(204.643.901,00)	89,54		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	247.500.000,00	164.800.199,00	(82.699.801,00)	66,59		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	247.500.000,00	164.800.199,00	(82.699.801,00)	66,59		
06.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.290.000,00	163.590.199,00	(82.699.801,00)	66,42		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.708.502.500,00	1.586.558.400,00	(121.944.100,00)	92,86		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.708.502.500,00	1.586.558.400,00	(121.944.100,00)	92,86		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.650.000,00	284.175.500,00	(52.474.500,00)	84,41		
06.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	1.371.852.500,00	1.302.382.900,00	(69.469.600,00)	94,94		
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	169.000.000,00	115.111.579,00	(53.888.421,00)	68,11		
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	169.000.000,00	115.111.579,00	(53.888.421,00)	68,11		
07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.000.000,00	22.501.922,00	(1.498.078,00)	93,76		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	22.501.922,00	(1.498.078,00)	93,76		
07.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.390.000,00	20.891.922,00	(1.498.078,00)	93,31		
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	145.000.000,00	92.609.657,00	(52.390.343,00)	63,87		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	92.609.657,00	(52.390.343,00)	63,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	0		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.390.000,00	92.609.657,00	(50.780.343,00)	64,59		
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	15.000.000,00	14.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	1.242.170.000,00	1.191.900.475,00	(50.269.525,00)	95,95		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.242.170.000,00	1.191.900.475,00	(50.269.525,00)	95,95		
07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	42.000.000,00	38.099.900,00	(3.900.100,00)	90,71		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	38.099.900,00	(3.900.100,00)	90,71		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	38.099.900,00	(3.900.100,00)	90,71		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.200.170.000,00	1.153.800.575,00	(46.369.425,00)	96,14		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.170.000,00	1.153.800.575,00	(46.369.425,00)	96,14		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.170.000,00	1.153.800.575,00	(46.369.425,00)	96,14		
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	946.500.000,00	875.874.280,00	(70.625.720,00)	92,54		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	946.500.000,00	875.874.280,00	(70.625.720,00)	92,54		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150.000.000,00	127.853.680,00	(22.146.320,00)	85,24		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	127.853.680,00	(22.146.320,00)	85,24		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	127.853.680,00	(22.146.320,00)	85,24		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	497.500.000,00	450.088.000,00	(47.412.000,00)	90,47		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	497.500.000,00	450.088.000,00	(47.412.000,00)	90,47		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.500.000,00	450.088.000,00	(47.412.000,00)	90,47		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	299.000.000,00	297.932.600,00	(1.067.400,00)	99,64		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	299.000.000,00	297.932.600,00	(1.067.400,00)	99,64		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.000.000,00	297.932.600,00	(1.067.400,00)	99,64		
07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	245.000.000,00	204.031.409,00	(40.968.591,00)	83,28		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	245.000.000,00	204.031.409,00	(40.968.591,00)	83,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	245.000.000,00	204.031.409,00	(40.968.591,00)	83,28		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	245.000.000,00	204.031.409,00	(40.968.591,00)	83,28		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	204.031.409,00	(40.968.591,00)	83,28		
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	83.321.690.648,00	64.891.785.537,00	(18.429.905.111,00)	77,88		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	83.321.690.648,00	64.891.785.537,00	(18.429.905.111,00)	77,88		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600.000.000,00	531.483.250,00	(68.516.750,00)	88,58		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	531.483.250,00	(68.516.750,00)	88,58		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	531.483.250,00	(68.516.750,00)	88,58		
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	64.171.690.648,00	46.152.445.287,00	(18.019.245.361,00)	71,92		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.722.786.740,00	3.126.752.210,00	(596.034.530,00)	83,99		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.722.786.740,00	3.126.752.210,00	(596.034.530,00)	83,99		
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	60.448.903.908,00	43.025.693.077,00	(17.423.210.831,00)	71,18		
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.448.903.908,00	43.025.693.077,00	(17.423.210.831,00)	71,18		
08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100.000.000,00	52.726.900,00	(47.273.100,00)	52,73		
08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	52.726.900,00	(47.273.100,00)	52,73		
08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	52.726.900,00	(47.273.100,00)	52,73		
08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.450.000.000,00	18.155.130.100,00	(294.869.900,00)	98,40		
08.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	18.450.000.000,00	18.155.130.100,00	(294.869.900,00)	98,40		
08.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000.000,00	18.155.130.100,00	(294.869.900,00)	98,40		
08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	178.897.000,00	105.011.000,00	(73.886.000,00)	58,70		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.897.000,00	105.011.000,00	(73.886.000,00)	58,70		
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	20.807.500,00	(9.192.500,00)	69,36		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.807.500,00	(9.192.500,00)	69,36		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.807.500,00	(9.192.500,00)	69,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	148.897.000,00	84.203.500,00	(64.693.500,00)	56,55		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	143.397.000,00	79.203.500,00	(64.193.500,00)	55,23		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.397.000,00	79.203.500,00	(64.193.500,00)	55,23		
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,91		
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,91		
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	50.000.000,00	42.644.880,00	(7.355.120,00)	85,29		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	50.000.000,00	42.644.880,00	(7.355.120,00)	85,29		
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50.000.000,00	42.644.880,00	(7.355.120,00)	85,29		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.644.880,00	(7.355.120,00)	85,29		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.644.880,00	(7.355.120,00)	85,29		
09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	1.910.000.000,00	1.727.745.625,00	(182.254.375,00)	90,46		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.910.000.000,00	1.727.745.625,00	(182.254.375,00)	90,46		
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	236.251.950,00	(63.748.050,00)	78,75		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	236.251.950,00	(63.748.050,00)	78,75		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	236.251.950,00	(63.748.050,00)	78,75		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.510.000.000,00	1.436.678.675,00	(73.321.325,00)	95,14		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.310.000.000,00	1.239.785.675,00	(70.214.325,00)	94,64		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.000.000,00	1.239.785.675,00	(70.214.325,00)	94,64		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	196.893.000,00	(3.107.000,00)	98,45		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.893.000,00	(3.107.000,00)	98,45		
09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000,00	54.815.000,00	(45.185.000,00)	54,82		
09.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	54.815.000,00	(45.185.000,00)	54,82		
09.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	54.815.000,00	(45.185.000,00)	54,82		
09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	590.000.000,00	526.500.300,00	(63.499.700,00)	89,24		
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	590.000.000,00	526.500.300,00	(63.499.700,00)	89,24		
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	590.000.000,00	526.500.300,00	(63.499.700,00)	89,24		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	521.576.100,00	458.750.300,00	(62.825.800,00)	87,95		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.576.100,00	458.750.300,00	(62.825.800,00)	87,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	68.423.900,00	67.750.000,00	(673.900,00)	99,02		
09.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.423.900,00	67.750.000,00	(673.900,00)	99,02		
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	97.799.467.000,00	91.950.379.894,00	(5.849.087.106,00)	94,02		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	97.799.467.000,00	91.950.379.894,00	(5.849.087.106,00)	94,02		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	300.000.000,00	281.177.430,00	(18.822.570,00)	93,73		
10.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	281.177.430,00	(18.822.570,00)	93,73		
10.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	281.177.430,00	(18.822.570,00)	93,73		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	660.000.000,00	635.237.000,00	(24.763.000,00)	96,25		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	660.000.000,00	635.237.000,00	(24.763.000,00)	96,25		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	635.237.000,00	(24.763.000,00)	96,25		
10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	19.347.849.000,00	18.547.414.985,00	(800.434.015,00)	95,86		
10.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	19.347.849.000,00	18.547.414.985,00	(800.434.015,00)	95,86		
10.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.347.849.000,00	18.547.414.985,00	(800.434.015,00)	95,86		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	52.056.000.000,00	49.139.637.461,00	(2.916.362.539,00)	94,40		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	52.056.000.000,00	49.139.637.461,00	(2.916.362.539,00)	94,40		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.056.000.000,00	49.139.637.461,00	(2.916.362.539,00)	94,40		
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	3.942.900.000,00	3.533.247.650,00	(409.652.350,00)	89,61		
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	3.942.900.000,00	3.533.247.650,00	(409.652.350,00)	89,61		
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.942.900.000,00	3.533.247.650,00	(409.652.350,00)	89,61		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.492.718.000,00	19.813.665.368,00	(1.679.052.632,00)	92,19		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	21.031.213.000,00	19.390.910.368,00	(1.640.302.632,00)	92,20		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.031.213.000,00	19.390.910.368,00	(1.640.302.632,00)	92,20		
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	461.505.000,00	422.755.000,00	(38.750.000,00)	91,60		
10.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.505.000,00	422.755.000,00	(38.750.000,00)	91,60		
10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	55.000.000,00	15.017.175,00	(39.982.825,00)	27,30		
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	15.017.175,00	(39.982.825,00)	27,30		
10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	30.000.000,00	10.900.300,00	(19.099.700,00)	36,33		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	10.900.300,00	(19.099.700,00)	36,33		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	10.900.300,00	(19.099.700,00)	36,33		
10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	4.116.875,00	(20.883.125,00)	16,47		
10.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	4.116.875,00	(20.883.125,00)	16,47		
10.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	4.116.875,00	(20.883.125,00)	16,47		
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	39.661.000,00	21.833.975,00	(17.827.025,00)	55,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	39.661.000,00	21.833.975,00	(17.827.025,00)	55,05		
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.661.000,00	13.322.425,00	(6.338.575,00)	67,76		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.661.000,00	13.322.425,00	(6.338.575,00)	67,76		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.661.000,00	13.322.425,00	(6.338.575,00)	67,76		
10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20.000.000,00	8.511.550,00	(11.488.450,00)	42,56		
10.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	8.511.550,00	(11.488.450,00)	42,56		
10.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.511.550,00	(11.488.450,00)	42,56		
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	350.000.000,00	202.579.700,00	(147.420.300,00)	57,88		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	144.519.600,00	(55.480.400,00)	72,26		
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	144.519.600,00	(55.480.400,00)	72,26		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	144.519.600,00	(55.480.400,00)	72,26		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	144.519.600,00	(55.480.400,00)	72,26		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	46.407.750,00	(3.592.250,00)	92,82		
11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000,00	46.407.750,00	(3.592.250,00)	92,82		
11.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.407.750,00	(3.592.250,00)	92,82		
11.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.407.750,00	(3.592.250,00)	92,82		
11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100.000.000,00	11.652.350,00	(88.347.650,00)	11,65		
11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
11.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
11.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
11.2.03.05	Pemantauan dan EvaluasiI UJK Nasional yang Telah Diterbitkan	50.000.000,00	11.652.350,00	(38.347.650,00)	23,30		
11.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	11.652.350,00	(38.347.650,00)	23,30		
11.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	11.652.350,00	(38.347.650,00)	23,30		
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	20.082.256.164,00	18.095.304.787,00	(1.986.951.377,00)	90,11		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	20.082.256.164,00	18.095.304.787,00	(1.986.951.377,00)	90,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.062.109.830,00	8.696.849.397,00	(365.260.433,00)	95,97		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.028.809.830,00	8.663.549.397,00	(365.260.433,00)	95,95		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.028.809.830,00	8.663.549.397,00	(365.260.433,00)	95,95		
11.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.344.339.989,00	1.219.871.908,00	(124.468.081,00)	90,74		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.309.339.989,00	1.184.871.908,00	(124.468.081,00)	90,49		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.339.989,00	1.184.871.908,00	(124.468.081,00)	90,49		
11.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	92.700.000,00	80.379.148,00	(12.320.852,00)	86,71		
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	92.700.000,00	80.379.148,00	(12.320.852,00)	86,71		
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.700.000,00	80.379.148,00	(12.320.852,00)	86,71		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.583.106.345,00	8.098.204.334,00	(1.484.902.011,00)	84,51		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	681.985.220,00	613.828.054,00	(68.157.166,00)	90,01		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.985.220,00	613.828.054,00	(68.157.166,00)	90,01		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	8.901.121.125,00	7.484.376.280,00	(1.416.744.845,00)	84,08		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.505.121.125,00	7.101.148.500,00	(1.403.972.625,00)	83,49		
11.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	189.202.000,00	(8.798.000,00)	95,56		
11.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.000.000,00	194.025.780,00	(3.974.220,00)	97,99		
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	1.198.682.000,00	924.396.310,00	(274.285.690,00)	77,12		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	363.682.000,00	267.319.186,00	(96.362.814,00)	73,50		
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	263.682.000,00	214.579.186,00	(49.102.814,00)	81,38		
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	263.682.000,00	214.579.186,00	(49.102.814,00)	81,38		
12.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.682.000,00	214.579.186,00	(49.102.814,00)	81,38		
12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	52.740.000,00	(47.260.000,00)	52,74		
12.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	52.740.000,00	(47.260.000,00)	52,74		
12.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	52.740.000,00	(47.260.000,00)	52,74		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	205.808.800,00	(94.191.200,00)	68,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00	154.268.000,00	(45.732.000,00)	77,13		
12.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	154.268.000,00	(45.732.000,00)	77,13		
12.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	154.268.000,00	(45.732.000,00)	77,13		
12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	100.000.000,00	51.540.800,00	(48.459.200,00)	51,54		
12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	51.540.800,00	(48.459.200,00)	51,54		
12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	51.540.800,00	(48.459.200,00)	51,54		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	170.319.908,00	(29.680.092,00)	85,16		
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	79.798.993,00	(20.201.007,00)	79,80		
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	79.798.993,00	(20.201.007,00)	79,80		
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	79.798.993,00	(20.201.007,00)	79,80		
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000,00	90.520.915,00	(9.479.085,00)	90,52		
12.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	90.520.915,00	(9.479.085,00)	90,52		
12.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.520.915,00	(9.479.085,00)	90,52		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	335.000.000,00	280.948.416,00	(54.051.584,00)	83,87		
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200.000.000,00	189.481.116,00	(10.518.884,00)	94,74		
12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	96.530.116,00	(7.469.884,00)	92,82		
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	96.530.116,00	(7.469.884,00)	92,82		
12.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	96.000.000,00	92.951.000,00	(3.049.000,00)	96,82		
12.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	92.951.000,00	(3.049.000,00)	96,82		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	135.000.000,00	91.467.300,00	(43.532.700,00)	67,75		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	91.467.300,00	(43.532.700,00)	67,75		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	91.467.300,00	(43.532.700,00)	67,75		
	SURPLUS / DEFISIT	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	319.430.015.779,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	0,00	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**319.430.015.779,00**	**319.430.015.779,00**	**0**		

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.434.782.223.834,00	272.675.401.117,00	0,00	0,00	
		1.268.126.183.245,00	240.520.724.442,00	0,00	0,00	
1.01	**PENDIDIKAN**	866.397.059.198,00	47.424.191.888,00	0,00	0,00	
		779.975.522.751,00	45.272.862.040,00	0,00	0,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	674.405.415.491,00	417.875.000,00	0,00	0,00	
		599.267.157.924,00	386.090.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.179.000,00	0,00	0,00	0,00	
		166.185.250,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.792.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		22.892.650,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		11.881.800,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		24.751.300,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.379.000,00	0,00	0,00	0,00	
		95.867.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	671.222.464.491,00	0,00	0,00	0,00	
		596.433.158.948,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	671.167.464.491,00	0,00	0,00	0,00	
		596.387.954.398,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		45.204.550,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	411.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		377.320.515,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	411.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		377.320.515,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.748.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		70.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.748.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		891.887.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			788.645.118,00	885.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		21.921.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.598.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		330.486.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			321.669.650,00	885.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.315.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.211.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		24.949.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.656.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		59.396.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.389.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		248.420.000,00	0,00	0,00	0,00
			189.556.568,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		199.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			167.563.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.616.000,00	413.875.000,00	0,00	0,00
			3.539.000,00	385.205.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.616.000,00	413.875.000,00	0,00	0,00
			3.539.000,00	385.205.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.219.304.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.101.975.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		283.544.000,00	0,00	0,00	0,00
			177.695.221,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		920.760.000,00	0,00	0,00	0,00
			909.719.979,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		340.715.000,00	0,00	0,00	0,00
			337.585.193,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		252.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			252.544.593,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65.460.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.900.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	22.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	ANGGARAN	165.487.313.707,00	44.827.217.888,00	0,00	0,00
		REALISASI	159.273.469.877,00	43.167.002.540,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	ANGGARAN	81.365.253.363,00	23.070.804.638,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.464.860.423,00	22.252.761.867,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ANGGARAN	95.316.250,00	1.323.913.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	45.379.500,00	1.187.082.992,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ANGGARAN	84.323.100,00	658.016.650,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.750.575,00	641.362.715,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	ANGGARAN	23.737.150,00	205.002.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.969.500,00	203.728.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ANGGARAN	69.838.700,00	965.894.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.653.780,00	950.400.392,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	ANGGARAN	5.932.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.517.918.593,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	ANGGARAN	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.759.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	ANGGARAN	65.185.000,00	1.584.815.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.591.750,00	1.550.388.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	ANGGARAN	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	878.732.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	ANGGARAN	98.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	77.767.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ANGGARAN	67.819.591,00	4.026.816.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.125.350,00	3.646.044.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ANGGARAN	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	127.232.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	ANGGARAN	166.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	148.489.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ANGGARAN	997.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	747.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	ANGGARAN	3.493.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.216.469.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	ANGGARAN	554.300.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	468.099.900,00	33.600.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	ANGGARAN	67.612.238.572,00	12.530.213.238,00	0,00	0,00
		REALISASI	66.033.091.175,00	12.342.403.868,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	ANGGARAN	855.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	804.266.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	ANGGARAN	92.295.000,00	1.740.434.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	91.023.500,00	1.697.751.400,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	60.562.374.279,00	21.223.053.315,00	0,00	0,00
		REALISASI	59.137.294.479,00	20.391.370.338,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ANGGARAN	10.200.000,00	239.800.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.759.440,00	234.526.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ANGGARAN	47.658.000,00	907.280.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	45.379.420,00	696.935.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ANGGARAN	42.784.600,00	846.327.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.416.700,00	815.096.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	ANGGARAN	73.881.700,00	1.489.499.300,00	0,00	0,00
		REALISASI	70.682.850,00	1.384.372.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ANGGARAN	351.675.000,00	6.783.920.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.896.550,00	6.494.981.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ANGGARAN	7.136.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.921.484.732,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ANGGARAN	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.888.622,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ANGGARAN	90.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	87.598.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	ANGGARAN	13.699.200,00	384.268.800,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.125.300,00	383.616.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	ANGGARAN	1.671.157.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.648.003.150,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	146.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.906.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ANGGARAN	10.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.470.900,00	1.930.500.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ANGGARAN	156.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.206.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	218.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	191.083.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ANGGARAN	819.557.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	709.964.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	970.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	829.021.050,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1.442.000.000,00	299.000.000,00	0,00	0,00
			1.396.335.600,00	291.200.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		46.997.633.779,00	8.322.957.815,00	0,00	0,00
			46.361.010.265,00	8.160.143.838,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		238.511.000,00	0,00	0,00	0,00
			228.061.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		21.412.974.665,00	67.750.335,00	0,00	0,00
			19.607.494.025,00	64.302.335,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		182.599.000,00	0,00	0,00	0,00
			175.578.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		118.314.000,00	0,00	0,00	0,00
			114.678.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		99.655.000,00	0,00	0,00	0,00
			97.746.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		99.755.000,00	0,00	0,00	0,00
			97.243.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD		4.055.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00
			3.955.800,00	41.952.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		325.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			320.235.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		187.729.000,00	0,00	0,00	0,00
			137.532.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		74.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.666.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		769.952.000,00	0,00	0,00	0,00
			489.199.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		278.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			211.920.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		19.156.049.665,00	22.350.335,00	0,00	0,00
			17.788.961.425,00	22.350.335,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		117.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.773.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		2.146.711.400,00	465.609.600,00	0,00	0,00
			2.063.820.950,00	458.568.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		23.590.400,00	421.409.600,00	0,00	0,00
			22.255.500,00	414.368.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		99.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			97.609.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	ANGGARAN	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.554.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	110.421.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	109.629.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.895.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	67.762.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	1.732.100.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.685.113.800,00	44.200.000,00	0,00	0,00
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	ANGGARAN	1.895.365.000,00	2.179.099.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.768.604.800,00	1.719.769.500,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	ANGGARAN	1.641.365.000,00	2.179.099.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.548.632.800,00	1.719.769.500,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	ANGGARAN	12.721.000,00	2.179.099.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.071.000,00	1.719.769.500,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	ANGGARAN	1.628.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.539.561.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	ANGGARAN	254.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	219.972.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	ANGGARAN	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	125.851.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	94.120.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	ANGGARAN	24.523.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.584.315.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	24.523.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.584.315.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	24.523.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.584.315.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	ANGGARAN	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.974.650,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.974.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.029.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**KESEHATAN**	ANGGARAN	402.343.843.594,00	62.050.466.019,00	0,00	0,00
		REALISASI	340.947.858.599,00	55.431.519.556,00	0,00	0,00
1.02.00	**Non Program**	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00	Non Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	306.462.098.355,00	16.594.229.611,00	0,00	0,00
		REALISASI	257.387.251.861,00	12.178.009.933,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	338.607.916,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	331.265.754,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	58.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.074.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	136.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	136.532.254,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.897.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	98.417.916,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	92.402.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	148.767.674.015,00	1.665.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	134.137.204.246,00	1.650.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	148.183.041.815,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	133.566.948.198,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ANGGARAN	479.376.200,00	1.665.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	465.568.848,00	1.650.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	81.256.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	80.837.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		244.642.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.047.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		244.642.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.047.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		603.434.000,00	0,00	0,00	0,00
			589.126.918,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		22.528.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.521.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		52.014.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.524.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.425.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		80.450.000,00	0,00	0,00	0,00
			74.810.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		403.442.000,00	0,00	0,00	0,00
			402.846.168,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.240.700,00	1.620.835.100,00	0,00	0,00
			9.411.300,00	1.557.013.438,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		3.815.700,00	180.184.100,00	0,00	0,00
			2.613.900,00	178.050.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.473.000,00	712.103.000,00	0,00	0,00
			1.020.500,00	654.453.438,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.952.000,00	728.548.000,00	0,00	0,00
			5.776.900,00	724.510.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.608.435.171,00	0,00	0,00	0,00
			3.525.164.622,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.660.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.625.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		380.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			375.549.794,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.215.775.171,00	0,00	0,00	0,00
			3.144.989.828,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.268.780.000,00	0,00	0,00	0,00
			727.182.613,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		234.155.000,00	0,00	0,00	0,00
			216.142.528,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	143.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.901.601,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	820.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	297.528.484,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	ANGGARAN	151.619.284.553,00	14.971.729.511,00	0,00	0,00
		REALISASI	117.857.848.608,00	10.619.346.495,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	ANGGARAN	151.619.284.553,00	14.971.729.511,00	0,00	0,00
		REALISASI	117.857.848.608,00	10.619.346.495,00	0,00	0,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	ANGGARAN	91.610.358.161,00	45.456.236.408,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.653.246.153,00	43.253.509.623,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	12.101.617.539,00	25.199.066.658,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.011.552.350,00	23.229.354.623,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	ANGGARAN	203.971.200,00	2.855.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	196.188.200,00	2.855.353.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	ANGGARAN	1.834.890.500,00	3.907.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.804.037.400,00	3.853.956.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	50.170.000,00	1.086.071.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.430.000,00	1.060.150.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	46.103.000,00	17.350.195.658,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.799.600,00	15.459.895.623,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	ANGGARAN	4.347.981.539,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.052.648.282,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	ANGGARAN	5.411.791.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.710.400.428,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	173.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	131.680.340,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.368.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	77.344.681.372,00	20.218.656.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.975.500.025,00	19.991.955.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		2.328.398.472,00	0,00	0,00	0,00
			2.186.118.260,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		122.366.000,00	0,00	0,00	0,00
			106.492.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		195.112.460,00	0,00	0,00	0,00
			172.176.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		920.299.407,00	0,00	0,00	0,00
			857.043.440,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		752.810.000,00	0,00	0,00	0,00
			683.441.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		558.819.450,00	4.800.000,00	0,00	0,00
			504.941.100,00	3.895.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		119.489.000,00	0,00	0,00	0,00
			113.150.550,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		461.350.750,00	0,00	0,00	0,00
			418.946.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		1.240.267.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
			1.021.705.800,00	5.040.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		179.743.000,00	0,00	0,00	0,00
			162.676.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		519.209.032,00	0,00	0,00	0,00
			445.707.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		1.029.501.000,00	0,00	0,00	0,00
			982.727.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		173.595.000,00	0,00	0,00	0,00
			151.277.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		76.260.000,00	0,00	0,00	0,00
			74.059.580,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		11.867.190.000,00	20.173.256.000,00	0,00	0,00
			10.430.650.145,00	19.953.920.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		555.270.000,00	0,00	0,00	0,00
			502.249.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1.174.185.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.081.308.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		2.665.018.572,00	0,00	0,00	0,00
			2.299.777.020,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		132.605.000,00	0,00	0,00	0,00
			116.934.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	355.278.100,00	0,00	0,00	0,00
		287.627.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.612.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.915.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	916.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		898.785.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.888.847.429,00	0,00	0,00	0,00
		2.434.217.686,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.610.729.200,00	0,00	0,00	0,00
		37.990.569.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	60.227.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.989.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.436.316.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.239.214.890,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	784.100.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		709.049.327,00	29.100.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	880.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		810.288.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.310.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.974.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.052.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.048.327,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	79.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.166.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	229.684.250,00	38.513.750,00	0,00	0,00
		210.139.250,00	32.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	118.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.835.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.589.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		66.384.250,00	38.513.750,00	0,00	0,00
			60.714.750,00	32.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.934.375.000,00	0,00	0,00	0,00
			456.054.528,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.743.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		1.914.375.000,00	0,00	0,00	0,00
			436.311.528,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		1.565.021.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.426.533.285,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			51.636.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.692.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.944.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		158.175.000,00	0,00	0,00	0,00
			152.781.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.666.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		28.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.595.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		89.585.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.353.846.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.222.115.585,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.353.846.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.222.115.585,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		664.146.000,00	0,00	0,00	0,00
			566.962.850,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	ANGGARAN	159.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	140.112.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	ANGGARAN	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	56.555.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	ANGGARAN	93.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.557.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	280.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	240.673.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	280.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	240.673.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	158.966.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	132.791.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		158.966.000,00	0,00	0,00	0,00
			132.791.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		2.042.220.078,00	0,00	0,00	0,00
			1.913.864.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		455.650.000,00	0,00	0,00	0,00
			436.202.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		455.650.000,00	0,00	0,00	0,00
			436.202.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.120.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.120.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.506.570.078,00	0,00	0,00	0,00
			1.398.540.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1.506.570.078,00	0,00	0,00	0,00
			1.398.540.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		95.583.231.184,00	156.810.375.471,00	0,00	0,00
			87.384.464.017,00	133.809.928.343,00	0,00	0,00
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		27.737.121.907,00	2.046.302.500,00	0,00	0,00
			24.200.187.758,00	1.864.085.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			189.313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			92.640.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.672.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.013.493.587,00	0,00	0,00	0,00
			16.995.990.218,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.573.943.587,00	0,00	0,00	0,00
			16.666.292.118,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		78.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.731.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.224.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	310.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	239.265.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.477.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	358.436.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	259.017.300,00	20.145.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	328.436.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	229.227.000,00	20.145.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.790.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	677.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	572.033.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	164.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	163.424.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.314.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	ANGGARAN	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	134.980.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.236.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	291.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	228.079.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	837.392.500,00	244.615.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	733.684.323,00	239.985.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.708.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	96.935.000,00	163.065.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	94.708.050,00	158.460.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ANGGARAN	10.547.500,00	81.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.330.000,00	81.525.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	97.249.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.256.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	181.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	121.394.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	413.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	382.038.773,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	25.751.500,00	1.779.487.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.547.400,00	1.603.955.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	10.210.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.462.500,00	125.798.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	ANGGARAN	0,00	418.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	345.871.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	15.541.500,00	1.228.987.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.084.900,00	1.132.286.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	2.818.056.120,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.084.127.078,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.748.450,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	443.814.574,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	196.588.880,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	1.803.056.120,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.428.975.174,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	3.806.992.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.343.475.139,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	484.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.571.609,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	3.289.712.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.966.383.530,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	ANGGARAN	6.283.314.087,00	14.589.685.913,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.569.544.873,00	13.603.014.740,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	536.954.000,00	2.938.046.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	448.077.400,00	2.739.605.300,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	ANGGARAN	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	68.950.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.099.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	ANGGARAN	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	283.396.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	ANGGARAN	426.954.000,00	2.563.046.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	350.041.000,00	2.387.259.300,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	50.936.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.746.360.087,00	11.651.639.913,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.121.467.473,00	10.863.409.440,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	ANGGARAN	525.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	504.859.500,00	692.053.500,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	ANGGARAN	0,00	275.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	255.647.600,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	ANGGARAN	0,00	7.143.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	6.719.914.900,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	ANGGARAN	0,00	1.850.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.773.413.200,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	ANGGARAN	5.221.360.087,00	1.683.639.913,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.616.607.973,00	1.422.380.240,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	ANGGARAN	3.544.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.147.150.680,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	3.544.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.147.150.680,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.941.825,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	96.413.188,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	ANGGARAN	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.833.859.125,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.049.550,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.644.992,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	ANGGARAN	944.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	899.242.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	ANGGARAN	2.703.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.662.249.715,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.703.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.662.249.715,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	ANGGARAN	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.387.758.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	ANGGARAN	303.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	274.491.515,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	ANGGARAN	7.057.479.600,00	958.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.862.910.248,00	790.269.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	7.057.479.600,00	958.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.862.910.248,00	790.269.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.957.615,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	ANGGARAN	3.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.391.422.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	ANGGARAN	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	626.109.230,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	ANGGARAN	1.801.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	ANGGARAN	4.000.000,00	942.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.861.650,00	790.269.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	ANGGARAN	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	486.320.953,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	ANGGARAN	401.489.600,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	374.238.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	ANGGARAN	530.664.850,00	2.363.229.150,00	0,00	0,00
		REALISASI	485.303.280,00	2.312.790.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	530.664.850,00	2.363.229.150,00	0,00	0,00
		REALISASI	485.303.280,00	2.312.790.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ANGGARAN	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	215.751.980,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	ANGGARAN	43.894.000,00	2.330.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.090.150,00	2.281.240.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	191.194.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	66.770.850,00	33.229.150,00	0,00	0,00
		49.266.950,00	31.550.000,00	0,00	0,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	22.872.786.740,00	60.448.903.908,00	0,00	0,00
		21.866.092.460,00	43.025.693.077,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.872.786.740,00	60.448.903.908,00	0,00	0,00
		21.866.092.460,00	43.025.693.077,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		531.483.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.722.786.740,00	60.448.903.908,00	0,00	0,00
		3.126.752.210,00	43.025.693.077,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.726.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.155.130.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	1.710.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		1.530.852.625,00	196.893.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.710.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		1.530.852.625,00	196.893.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.251.950,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.310.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		1.239.785.675,00	196.893.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.815.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	21.691.213.000,00	76.108.254.000,00	0,00	0,00
		20.026.147.368,00	71.924.232.526,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	21.691.213.000,00	76.108.254.000,00	0,00	0,00
		20.026.147.368,00	71.924.232.526,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	281.177.430,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		635.237.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		0,00	19.347.849.000,00	0,00	0,00
			0,00	18.547.414.985,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan		0,00	52.056.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	49.139.637.461,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan		0,00	3.942.900.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.533.247.650,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan		21.031.213.000,00	461.505.000,00	0,00	0,00
			19.390.910.368,00	422.755.000,00	0,00	0,00
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			202.579.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			144.519.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			144.519.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			46.407.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			46.407.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.652.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan EvaluasiI UJK Nasional yang Telah Diterbitkan		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.652.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		1.102.682.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
			831.445.310,00	92.951.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		363.682.000,00	0,00	0,00	0,00
			267.319.186,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		263.682.000,00	0,00	0,00	0,00
			214.579.186,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.740.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			205.808.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			154.268.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.540.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.319.908,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.798.993,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.520.915,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	239.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
		187.997.416,00	92.951.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	104.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
		96.530.116,00	92.951.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.467.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	22.921.575.336,00	3.724.058.850,00	0,00	0,00
		19.133.085.348,00	3.492.694.253,00	0,00	0,00
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.851.669.436,00	1.278.728.850,00	0,00	0,00
		7.237.308.068,00	1.100.281.770,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.538.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.333.550,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.732.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.496.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.345.250,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.630.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.368.345.706,00	0,00	0,00	0,00
		3.612.233.580,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.184.345.706,00	0,00	0,00	0,00
		3.440.462.230,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.476.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.704.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.479.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.911.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.577.750,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.843.250,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.856.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.878.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.791.050,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.576.050,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.573.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	102.322.720,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.767.680,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.555.040,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	374.380.400,00	10.619.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	364.607.235,00	9.830.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	14.747.400,00	5.252.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.729.206,00	4.730.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.337.229,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ANGGARAN	14.633.000,00	5.367.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.599.300,00	5.100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.070.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.291.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.014.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.565.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.224.404.250,00	0,00	0,00
		0,00	1.048.032.770,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	506.493.750,00	0,00	0,00
		0,00	410.725.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	80.577.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	585.910.500,00	0,00	0,00
		0,00	508.635.770,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	48.095.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.223.943.330,00	43.705.000,00	0,00	0,00
		2.485.542.703,00	42.419.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.774.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.358.227.930,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		818.958.061,00	13.879.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.295.000,00	29.705.000,00	0,00	0,00
		15.050.000,00	28.540.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.825.420.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.631.760.442,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		536.694.530,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		262.072.763,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.977.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.645.267,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.479.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.519.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		1.171.175.900,00	0,00	0,00	0,00
			724.607.978,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		344.831.000,00	0,00	0,00	0,00
			296.634.280,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		112.121.000,00	0,00	0,00	0,00
			104.156.580,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		113.418.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.007.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		6.538.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		12.754.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			87.470.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		98.794.900,00	0,00	0,00	0,00
			76.273.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		64.240.500,00	0,00	0,00	0,00
			55.186.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		22.478.400,00	0,00	0,00	0,00
			21.087.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		3.709.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		8.366.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		381.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.550.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.550.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		5.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	271.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.449.478,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	221.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.741.650,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.707.828,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.700.920,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.700.920,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	540.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00
		304.655.125,00	928.085.427,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.733.350,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.733.350,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.546.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.292.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.494.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.728.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	110.031.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	205.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	129.375.575,00	928.085.427,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	94.075.175,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	ANGGARAN	35.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.976.900,00	163.154.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	ANGGARAN	20.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.216.500,00	764.931.427,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.107.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	ANGGARAN	11.459.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.239.776.750,00	194.621.656,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	11.459.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.239.776.750,00	194.621.656,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	11.434.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.225.547.925,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	25.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.228.825,00	194.621.656,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	ANGGARAN	849.730.000,00	1.300.330.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	626.737.427,00	1.269.705.400,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	ANGGARAN	849.730.000,00	1.300.330.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	626.737.427,00	1.269.705.400,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	ANGGARAN	585.630.000,00	1.300.330.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	427.361.722,00	1.269.705.400,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	84.500.465,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	ANGGARAN	114.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.370.240,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	ANGGARAN	26.269.722.417,00	2.236.414.389,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.115.330.317,00	2.110.223.250,00	0,00	0,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	13.372.014.680,00	599.958.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.041.246.653,00	561.276.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	183.690.782,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	161.484.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	66.690.782,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.684.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	105.799.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	9.924.805.261,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.851.601.496,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	9.869.245.261,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.800.048.696,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ANGGARAN	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	28.144.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	24.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.407.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	360.678.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	344.776.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	345.500.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	337.684.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	7.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.092.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	615.472.911,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	506.787.199,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	57.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.281.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	53.057.911,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.155.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.882.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.776.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	93.893.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	86.968.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	339.272.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	255.722.699,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	16.803.000,00	595.608.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.800.000,00	561.276.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	ANGGARAN	0,00	88.852.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	83.425.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	803.000,00	71.713.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	61.450.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	16.000.000,00	435.043.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.800.000,00	416.401.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	740.816.726,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	676.714.833,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.460.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	221.415.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	182.530.882,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	155.633.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	146.211.124,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	351.767.726,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	337.512.827,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	1.529.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.485.082.225,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	1.045.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.017.935.328,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	ANGGARAN	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	229.973.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	219.231.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	234.450.897,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.515.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	ANGGARAN	5.923.655.393,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.630.776.466,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	4.834.355.393,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.651.343.566,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	ANGGARAN	3.792.855.393,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.650.561.416,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.865.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.748.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN	206.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	196.021.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	ANGGARAN	739.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	722.434.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.329.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	ANGGARAN	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.384.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	1.086.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	976.472.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	50.996.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	451.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	415.042.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	580.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	510.434.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	ANGGARAN	3.452.790.001,00	159.284.949,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.023.545.952,00	105.375.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	146.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.237.270,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	ANGGARAN	146.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.237.270,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	ANGGARAN	1.385.373.351,00	21.734.949,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.205.431.567,00	21.340.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	118.172.228,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	ANGGARAN	170.577.551,00	21.734.949,00	0,00	0,00
		REALISASI	167.506.100,00	21.340.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		262.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			253.253.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		183.250.600,00	0,00	0,00	0,00
			133.215.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		92.128.000,00	0,00	0,00	0,00
			67.977.182,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		355.417.200,00	0,00	0,00	0,00
			341.075.257,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi		97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			83.877.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.855.898.650,00	46.800.000,00	0,00	0,00
			1.656.643.315,00	46.400.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		389.569.100,00	0,00	0,00	0,00
			345.956.506,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		947.394.000,00	0,00	0,00	0,00
			834.920.293,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		453.063.550,00	46.800.000,00	0,00	0,00
			426.125.216,00	46.400.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		65.872.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.641.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		65.384.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00
			57.233.800,00	37.635.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		18.610.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.025.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		36.674.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.072.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		10.100.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00
			9.136.000,00	37.635.000,00	0,00	0,00
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		3.521.262.343,00	1.467.171.440,00	0,00	0,00
			3.419.761.246,00	1.443.572.250,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.417.356.027,00	946.368.900,00	0,00	0,00
			3.324.793.446,00	925.916.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		139.011.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.678.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.230.184.027,00	936.957.900,00	0,00	0,00
		3.208.854.946,00	916.570.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	34.508.000,00	9.411.000,00	0,00	0,00
		33.607.000,00	9.346.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	13.653.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.653.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	24.829.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.829.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	7.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	17.721.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.721.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	21.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.635.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	31.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.425.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	26.017.316,00	520.802.540,00	0,00	0,00
		17.078.800,00	517.656.250,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.681.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	4.676.116,00	520.802.540,00	0,00	0,00
		571.800,00	517.656.250,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.741.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**SOSIAL**	21.266.792.105,00	429.894.500,00	0,00	0,00
		18.569.922.213,00	403.497.000,00	0,00	0,00
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.127.861.301,00	308.034.500,00	0,00	0,00
		5.922.166.269,00	283.232.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.374.150,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.374.150,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.383.530.418,00	0,00	0,00	0,00
			4.211.151.323,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.368.530.418,00	0,00	0,00	0,00
			4.196.194.323,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.957.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		345.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			341.452.866,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.299.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.403.549,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.744.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.935.950,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		155.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			154.629.367,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.165.500,00	308.034.500,00	0,00	0,00
			7.710.000,00	283.232.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.165.500,00	308.034.500,00	0,00	0,00
			7.710.000,00	283.232.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		484.065.383,00	0,00	0,00	0,00
			470.441.998,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			86.833.430,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		392.365.383,00	0,00	0,00	0,00
			382.312.568,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		694.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			681.035.932,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		229.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			225.858.526,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		395.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			385.472.406,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			69.705.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		2.238.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.145.432.592,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		2.238.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.145.432.592,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		647.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			641.340.852,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.570.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.487.044.840,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.046.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		1.926.157.000,00	98.360.000,00	0,00	0,00
			1.521.884.789,00	96.765.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.590.151.000,00	98.360.000,00	0,00	0,00
			1.204.870.687,00	96.765.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		792.387.000,00	0,00	0,00	0,00
			520.709.428,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		776.844.000,00	98.360.000,00	0,00	0,00
			667.304.009,00	96.765.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.937.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.480.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	336.006.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.014.102,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.648.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	312.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		295.446.002,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	9.605.148.804,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		8.798.912.684,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.605.148.804,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		8.798.912.684,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.749.184,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.250.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
		63.864.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.427.898.804,00	0,00	0,00	0,00
		8.639.942.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.357.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	200.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.414.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.331.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.364.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		67.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.307.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		23.275.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.082.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		23.275.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.082.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		169.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			115.111.579,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		169.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			115.111.579,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.501.922,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			92.609.657,00	0,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		209.465.658.904,00	36.925.276.669,00	0,00	0,00
			217.383.803.688,00	33.838.390.116,00	0,00	0,00
2.07	**TENAGA KERJA**		14.215.336.270,00	0,00	0,00	0,00
			10.168.086.953,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.743.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.743.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.743.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		10.367.336.270,00	0,00	0,00	0,00
			6.659.207.673,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		10.297.336.270,00	0,00	0,00	0,00
			6.600.654.673,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		10.297.336.270,00	0,00	0,00	0,00
			6.600.654.673,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.508.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.508.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.044.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.044.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	ANGGARAN	3.520.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.309.251.730,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.814.919.490,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	ANGGARAN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.978.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	67.874.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	ANGGARAN	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.722.066.690,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	ANGGARAN	425.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	393.842.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.603.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	ANGGARAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	370.239.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.741.740,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.741.740,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.748.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.748.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	ANGGARAN	323.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	196.884.350,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.292.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	ANGGARAN	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.172.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	266.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	161.592.350,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	59.655.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.245.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.724.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.492.250,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	ANGGARAN	1.569.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.517.539.870,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	ANGGARAN	77.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.107.817,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.982.467,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.820.567,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	ANGGARAN	22.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.161.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.125.350,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	ANGGARAN	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.125.350,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		1.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.042.421.056,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.061.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.042.421.056,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		276.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			274.728.628,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		785.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			767.692.428,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.995.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.995.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.995.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		395.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			373.299.497,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		253.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			236.358.997,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		223.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			207.359.597,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.999.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		142.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			136.940.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		115.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			109.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.995.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.996.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.996.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.996.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**PANGAN**		2.049.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			29.974.642.214,00	101.530.000,00	0,00	0,00
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		0,00	0,00	0,00	0,00
			27.985.221.569,00	101.530.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
			31.876.400,00	20.300.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
			26.423.400,00	11.900.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
			5.453.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
			26.259.284.335,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	0,00	0,00	0,00
			26.119.294.335,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00	0,00	0,00
			139.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
			31.523.798,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00
			31.523.798,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.772.257,00	17.390.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.624.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.390.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.250.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.357.457,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.833.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.833.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		825.940.642,00	39.890.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.999.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.440.671,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		643.500.971,00	39.890.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		613.431.137,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.613.450,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		490.912.787,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.904.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.617.682.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.617.682.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.617.682.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		314.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			296.447.395,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		264.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			255.301.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		124.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.742.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.309.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			71.749.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.645.595,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.645.595,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.690.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.690.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.890.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.799.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.599.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.599.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.599.900,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**PERTANAHAN**	ANGGARAN	365.000.000,00	5.562.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	221.864.125,00	5.009.187.370,00	0,00	0,00
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.856.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.856.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.256.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	ANGGARAN	220.000.000,00	5.562.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	184.353.650,00	5.009.187.370,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	220.000.000,00	5.562.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	184.353.650,00	5.009.187.370,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	220.000.000,00	5.562.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	184.353.650,00	5.009.187.370,00	0,00	0,00
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.636.800,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.636.800,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.335.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.301.800,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.017.175,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.017.175,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.900.300,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.116.875,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**		31.131.302.837,00	10.891.115.025,00	0,00	0,00
			28.854.957.910,00	9.389.862.955,00	0,00	0,00
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		12.849.245.698,00	340.000.000,00	0,00	0,00
			11.724.642.515,00	331.250.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		121.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			108.420.650,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.189.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			53.230.950,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.710.945.778,00	0,00	0,00	0,00
			9.840.369.275,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.660.945.778,00	0,00	0,00	0,00
			9.794.434.775,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.934.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.100.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	519.660.337,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	46.835.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.833.950,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	134.831.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.870.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	18.164.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.164.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	85.453.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.506.787,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	340.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	331.250.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	340.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	331.250.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	634.886.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	501.348.202,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.369.536,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	497.386.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	428.503.666,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	717.413.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	659.744.051,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	326.943.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	283.726.051,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	255.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	248.708.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	127.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	ANGGARAN	724.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	648.895.779,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	324.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	279.558.815,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	ANGGARAN	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.350.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	ANGGARAN	199.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	175.208.315,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	369.336.964,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	ANGGARAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	369.336.964,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	ANGGARAN	321.843.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	269.425.197,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ANGGARAN	239.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	213.945.079,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	ANGGARAN	169.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	152.191.604,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.753.475,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ANGGARAN	82.075.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.480.118,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	ANGGARAN	82.075.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.480.118,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	ANGGARAN	5.239.270.080,00	1.507.770.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.984.550.554,00	1.433.186.675,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.239.270.080,00	1.507.770.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.984.550.554,00	1.433.186.675,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	ANGGARAN	5.204.270.080,00	1.442.770.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.957.737.954,00	1.372.543.490,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	ANGGARAN	15.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.678.250,00	60.643.185,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.134.350,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.363.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.233.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.335.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.897.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.130.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.130.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	ANGGARAN	89.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.856.883,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	89.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.856.883,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.408.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	39.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.419.433,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.028.750,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	ANGGARAN	173.397.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	100.011.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	173.397.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	100.011.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.807.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	ANGGARAN	143.397.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.203.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	ANGGARAN	521.576.100,00	68.423.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	458.750.300,00	67.750.000,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	521.576.100,00	68.423.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	458.750.300,00	67.750.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		521.576.100,00	68.423.900,00	0,00	0,00
			458.750.300,00	67.750.000,00	0,00	0,00
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		39.661.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.833.975,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		39.661.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.833.975,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		19.661.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.322.425,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.511.550,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		11.112.835.039,00	8.969.421.125,00	0,00	0,00
			10.542.628.507,00	7.552.676.280,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		11.112.835.039,00	8.969.421.125,00	0,00	0,00
			10.542.628.507,00	7.552.676.280,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		9.028.809.830,00	33.300.000,00	0,00	0,00
			8.663.549.397,00	33.300.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		1.309.339.989,00	35.000.000,00	0,00	0,00
			1.184.871.908,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		92.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.379.148,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		681.985.220,00	8.901.121.125,00	0,00	0,00
			613.828.054,00	7.484.376.280,00	0,00	0,00
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		9.483.513.816,00	1.300.750.020,00	0,00	0,00
			8.267.284.658,00	1.169.459.950,00	0,00	0,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		8.242.702.816,00	1.300.750.020,00	0,00	0,00
			7.075.544.460,00	1.169.459.950,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.335.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.844.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.756.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.735.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.259.217.251,00	0,00	0,00	0,00
			4.449.030.358,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.236.297.251,00	0,00	0,00	0,00
			4.426.110.358,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		22.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		354.180.000,00	0,00	0,00	0,00
			277.852.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		244.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			172.924.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		110.180.000,00	0,00	0,00	0,00
			104.928.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.835.933.000,00	549.700.000,00	0,00	0,00
			1.658.747.996,00	492.199.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.373.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.472.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.623.650.000,00	549.700.000,00	0,00	0,00
			1.452.117.350,00	492.199.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		14.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.539.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.433.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			149.625.546,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.648.478,00	710.759.620,00	0,00	0,00
			2.571.100,00	677.260.950,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.648.478,00	710.759.620,00	0,00	0,00
			2.571.100,00	677.260.950,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		581.214.487,00	0,00	0,00	0,00
			538.453.991,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.908.049,00	0,00	0,00	0,00
			2.647.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		194.250.438,00	0,00	0,00	0,00
			193.826.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	383.056.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	341.980.991,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	193.509.600,00	40.290.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	133.552.515,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	92.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	92.585.015,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	100.829.600,00	40.290.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.967.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	ANGGARAN	647.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	628.310.068,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	634.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	617.274.768,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	607.856.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	591.240.568,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	17.124.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.455.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.579.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	12.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.035.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.765.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	ANGGARAN	432.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	412.120.230,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	ANGGARAN	427.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	407.980.230,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	ANGGARAN	427.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	407.980.230,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	ANGGARAN	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	ANGGARAN	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	ANGGARAN	106.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	99.782.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	ANGGARAN	17.054.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.157.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	ANGGARAN	9.619.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.982.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	ANGGARAN	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.175.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	68.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	68.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.825.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.825.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	ANGGARAN	53.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	51.527.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	ANGGARAN	53.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	51.527.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	53.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	51.527.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	ANGGARAN	11.436.953.826,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.492.623.096,00	104.708.000,00	0,00	0,00
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	4.276.987.801,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.597.005.131,00	104.708.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.707.694.933,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.045.807.786,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	3.707.694.933,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.045.807.786,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	182.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	177.211.980,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.362.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.609.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	31.815.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.815.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.963.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	99.737.880,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	104.708.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	104.708.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	121.095.868,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	116.011.335,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.894.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.975.359,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	79.095.868,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	75.141.976,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	266.128.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	257.974.030,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	85.056.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.173.683,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.732.591,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	106.072.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.067.756,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	ANGGARAN	36.529.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.175.556,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	ANGGARAN	36.529.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.175.556,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	ANGGARAN	36.529.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.175.556,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	ANGGARAN	5.523.371.125,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.299.850.041,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	ANGGARAN	5.523.371.125,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.299.850.041,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	ANGGARAN	3.693.137.725,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.648.900.724,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	ANGGARAN	50.347.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.682.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.409.450,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	ANGGARAN	256.991.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	248.535.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	ANGGARAN	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	119.873.620,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	ANGGARAN	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	713.078.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	ANGGARAN	50.895.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.809.620,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	ANGGARAN	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.638.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	ANGGARAN	162.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	137.889.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	ANGGARAN	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	323.799.427,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	ANGGARAN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.234.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	ANGGARAN	1.600.065.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.559.592.368,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.600.065.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.559.592.368,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	ANGGARAN	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.521.050,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	ANGGARAN	1.003.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	975.982.622,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.586.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	ANGGARAN	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	37.515.516,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	ANGGARAN	505.365.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	504.986.880,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	ANGGARAN	14.425.015.000,00	1.020.800.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.571.194.807,00	954.238.750,00	0,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	ANGGARAN	1.022.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	963.479.616,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.017.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	958.479.816,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	ANGGARAN	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	ANGGARAN	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	63.100.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	ANGGARAN	474.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	468.199.168,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	ANGGARAN	349.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	336.043.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	ANGGARAN	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	88.637.448,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	ANGGARAN	6.687.345.000,00	1.020.800.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.318.075.363,00	954.238.750,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	ANGGARAN	1.331.918.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.269.806.379,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	ANGGARAN	206.368.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.576.499,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	140.594.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	ANGGARAN	338.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	337.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	ANGGARAN	557.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	521.840.180,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	ANGGARAN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	ANGGARAN	1.112.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.094.636.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	ANGGARAN	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	307.545.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	ANGGARAN	802.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	787.091.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	3.180.427.000,00	1.020.800.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.970.040.284,00	954.238.750,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ANGGARAN	98.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.855.900,00	1.485.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ANGGARAN	2.787.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.649.876.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	ANGGARAN	196.623.000,00	1.019.300.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	194.460.000,00	952.753.750,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ANGGARAN	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.926.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.127.084,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	ANGGARAN	1.063.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	983.591.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	ANGGARAN	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.999.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		1.054.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			974.592.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		6.715.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.289.639.828,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		6.709.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.283.689.928,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			232.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		6.117.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.825.015.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		189.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			183.976.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.877.728,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.949.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.949.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**PERHUBUNGAN**		45.826.556.231,00	8.968.688.850,00	0,00	0,00
			44.397.178.720,00	8.483.283.649,00	0,00	0,00
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		35.884.346.081,00	1.142.197.000,00	0,00	0,00
			34.993.814.128,00	1.077.083.249,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.305.135.081,00	0,00	0,00	0,00
			4.807.288.084,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.230.255.081,00	0,00	0,00	0,00
			4.732.408.084,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.024.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.024.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.457.000,00	0,00	0,00	0,00
		659.736.266,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.833.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.674.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.298.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.821.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.547.000,00	0,00	0,00	0,00
		269.188.666,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.803.000,00	1.142.197.000,00	0,00	0,00
		22.664.200,00	1.077.083.249,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.370.000,00	750.630.000,00	0,00	0,00
		1.769.000,00	705.532.249,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00
		4.223.400,00	104.900.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.933.000,00	282.067.000,00	0,00	0,00
		16.671.800,00	266.651.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.554.221.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.268.160.390,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.101.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.969.621.856,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.448.221.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.293.538.534,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.034.940.288,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	560.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	504.353.233,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	391.548.055,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	114.589.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	ANGGARAN	9.942.210.150,00	7.826.491.850,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.403.364.592,00	7.406.200.400,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	4.241.551.050,00	7.020.076.850,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.917.389.230,00	6.624.553.400,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	42.051.050,00	7.020.076.850,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.820.300,00	6.624.553.400,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	ANGGARAN	4.199.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.878.568.930,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.766.479,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.766.479,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	ANGGARAN	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.177.818.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.177.818.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	631.476.000,00	806.415.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	600.466.950,00	781.647.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	1.476.000,00	806.415.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.403.400,00	781.647.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.470.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	254.837.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	192.755.550,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	3.011.583.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.936.389.660,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	646.119.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	619.581.720,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	157.206.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.055.464.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.013.888.290,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	145.713.350,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.888.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.584.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.304.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	ANGGARAN	346.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	304.466.273,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	ANGGARAN	206.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	193.533.423,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.751.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.597.450,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.129.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.454.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	246.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	218.152.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	246.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	218.152.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.696.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.696.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	ANGGARAN	20.230.261.841,00	927.367.414,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.757.124.714,00	909.150.000,00	0,00	0,00
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	6.928.519.180,00	215.850.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.906.859.099,00	208.200.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	75.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.867.100,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.505.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.172.100,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.911.876.835,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.037.972.529,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	3.869.711.835,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.998.937.529,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	25.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	12.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.062.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ANGGARAN	4.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	1.971.632.935,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.941.338.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	1.971.632.935,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.941.338.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	195.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	184.006.452,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	36.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.778.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.824.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.645.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	98.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	97.758.252,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	31.775.000,00	215.850.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.621.650,00	208.200.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	ANGGARAN	18.000.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.400.000,00	68.550.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	13.775.000,00	141.950.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.221.650,00	139.650.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	136.259.410,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.282.924,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.637.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	37.960.721,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	82.259.410,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	80.684.403,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	606.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	518.769.644,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	319.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	244.613.644,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	189.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	183.774.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	97.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	90.382.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	ANGGARAN	5.701.537.661,00	589.578.414,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.398.914.264,00	581.050.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.701.537.661,00	589.578.414,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.398.914.264,00	581.050.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	ANGGARAN	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.366.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	ANGGARAN	20.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.561.550,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	ANGGARAN	585.165.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	505.632.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ANGGARAN	583.291.586,00	589.578.414,00	0,00	0,00
		REALISASI	547.857.700,00	581.050.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	ANGGARAN	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.263.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	ANGGARAN	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	345.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ANGGARAN	189.312.875,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	184.187.640,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	ANGGARAN	3.944.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.773.045.174,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	ANGGARAN	7.600.205.000,00	121.939.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.451.351.351,00	119.900.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	6.551.363.000,00	61.011.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.445.858.860,00	59.300.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ANGGARAN	6.551.363.000,00	61.011.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.445.858.860,00	59.300.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.048.842.000,00	60.928.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.005.492.491,00	60.600.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	127.297.000,00	60.928.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	126.188.623,00	60.600.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ANGGARAN	464.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	453.049.235,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	ANGGARAN	237.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	224.350.063,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ANGGARAN	219.915.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	201.904.570,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	ANGGARAN	20.426.836.799,00	488.076.250,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.753.961.013,00	380.937.000,00	0,00	0,00
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	18.864.666.799,00	488.076.250,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.257.862.343,00	380.937.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.109.550,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.044.990,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.064.560,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.950.123.049,00	0,00	0,00	0,00
			10.376.515.917,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.886.123.049,00	0,00	0,00	0,00
			10.322.393.217,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.040.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.082.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.781.350,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.781.350,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.715.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.715.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		202.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			193.458.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.323.170,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			192.135.330,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		626.690.450,00	5.309.550,00	0,00	0,00
			581.876.990,00	5.237.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		50.152.950,00	1.847.050,00	0,00	0,00
			44.244.300,00	1.837.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		66.537.500,00	3.462.500,00	0,00	0,00
			62.606.910,00	3.400.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		83.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			82.948.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.235.060,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			316.941.820,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		21.233.300,00	482.766.700,00	0,00	0,00
			20.977.800,00	375.700.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		20.376.000,00	416.624.000,00	0,00	0,00
			20.175.000,00	313.800.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		857.300,00	66.142.700,00	0,00	0,00
			802.800,00	61.900.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.415.220.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.482.003.997,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.802.410,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		870.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			368.029.123,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.541.720.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.111.172.464,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		596.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			553.422.539,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		258.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			241.457.644,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.734.370,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			264.684.025,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.546.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			66.765.055,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			66.765.055,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			66.765.055,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			194.788.260,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			194.788.260,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			194.788.260,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		1.242.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.191.900.475,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.242.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.191.900.475,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.099.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		1.200.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.153.800.575,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.644.880,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.644.880,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.644.880,00	0,00	0,00	0,00
2.18	**PENANAMAN MODAL**		6.242.214.953,00	551.633.105,00	0,00	0,00
			5.203.019.484,00	515.390.940,00	0,00	0,00
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		4.812.575.181,00	477.178.857,00	0,00	0,00
			3.843.628.779,00	441.615.940,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		157.403.500,00	0,00	0,00	0,00
			149.860.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		157.403.500,00	0,00	0,00	0,00
			149.860.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.892.216.360,00	0,00	0,00	0,00
			2.117.263.373,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.862.216.360,00	0,00	0,00	0,00
			2.088.383.373,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.530.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.884.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		22.530.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.884.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		514.073.991,00	58.275.000,00	0,00	0,00
			503.949.040,00	56.555.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.989.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		89.875.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.023.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.289.000,00	58.275.000,00	0,00	0,00
			16.962.900,00	56.555.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			99.959.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		14.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.934.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		123.194.000,00	0,00	0,00	0,00
			122.225.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		153.915.991,00	0,00	0,00	0,00
			153.854.940,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		299.055.543,00	418.903.857,00	0,00	0,00
			198.703.024,00	385.060.940,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		2.550.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00
			2.533.000,00	267.250.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		296.505.543,00	128.903.857,00	0,00	0,00
			196.170.024,00	117.810.940,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		712.295.787,00	0,00	0,00	0,00
			655.260.710,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		209.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			176.579.114,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		497.345.787,00	0,00	0,00	0,00
			475.911.596,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		215.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			196.708.132,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.329.432,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.630.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	56.748.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	288.990.450,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	277.769.685,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	217.345.450,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.673.935,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	ANGGARAN	157.345.450,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.532.735,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	57.141.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	ANGGARAN	71.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.095.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	ANGGARAN	71.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.095.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	156.599.070,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	153.299.820,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	156.599.070,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	153.299.820,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	156.599.070,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	153.299.820,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	222.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.705.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	222.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.705.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	92.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	88.752.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	ANGGARAN	80.317.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.711.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.242.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	574.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	538.264.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	574.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	538.264.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	209.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	209.316.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	186.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	165.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.858.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	187.033.252,00	74.454.248,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.351.200,00	73.775.000,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	187.033.252,00	74.454.248,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.351.200,00	73.775.000,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	187.033.252,00	74.454.248,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.351.200,00	73.775.000,00	0,00	0,00
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	ANGGARAN	13.773.928.249,00	6.281.995.780,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.203.124.240,00	6.039.153.000,00	0,00	0,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	ANGGARAN	697.710.036,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	681.909.285,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	ANGGARAN	630.225.036,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	614.499.285,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	ANGGARAN	12.371.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.371.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	ANGGARAN	66.982.036,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.175.660,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	ANGGARAN	42.495.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.681.125,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	ANGGARAN	90.129.250,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	86.487.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.642.750,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.942.750,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	ANGGARAN	18.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.785.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	ANGGARAN	28.539.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.539.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	ANGGARAN	320.780.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	318.517.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	67.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	67.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	ANGGARAN	17.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	ANGGARAN	13.076.218.213,00	6.281.995.780,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.521.214.955,00	6.039.153.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	6.284.021.107,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.246.669.715,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	ANGGARAN	8.587.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.334.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	ANGGARAN	5.856.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.856.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	ANGGARAN	418.983.607,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	381.885.215,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.146.925.386,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	996.785.510,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	715.238.750,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	145.370.386,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	131.214.760,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	ANGGARAN	151.555.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	150.332.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	ANGGARAN	5.300.552.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.967.393.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	ANGGARAN	8.493.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.668.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	ANGGARAN	7.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.303.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	ANGGARAN	7.878.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.069.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.269.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.941.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	ANGGARAN	7.303.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.303.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	ANGGARAN	344.719.220,00	6.281.995.780,00	0,00	0,00
		REALISASI	310.366.230,00	6.039.153.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	ANGGARAN	118.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	110.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	ANGGARAN	218.004.220,00	6.281.995.780,00	0,00	0,00
		REALISASI	191.815.730,00	6.039.153.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	ANGGARAN	8.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.970.500,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**STATISTIK**	ANGGARAN	152.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.389.322,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	ANGGARAN	152.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.389.322,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	152.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.389.322,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	ANGGARAN	52.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.797.520,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.591.802,00	0,00	0,00	0,00
2.21	**PERSANDIAN**	ANGGARAN	388.642.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.003.216,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	ANGGARAN	388.642.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.003.216,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	388.642.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.003.216,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	199.842.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.689.416,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.313.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22	**KEBUDAYAAN**	12.493.099.458,00	400.353.925,00	0,00	0,00
		10.883.256.366,00	385.107.500,00	0,00	0,00
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.357.199.503,00	258.275.000,00	0,00	0,00
		5.496.564.729,00	254.702.500,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.535.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00
		131.757.518,00	1.665.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147.535.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00
		131.757.518,00	1.665.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.979.754.503,00	0,00	0,00	0,00
		4.168.601.302,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.979.754.503,00	0,00	0,00	0,00
		4.168.601.302,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		357.042.838,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.439.450,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.967.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.124.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.974.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.507.388,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.886.000,00	256.610.000,00	0,00	0,00
		3.658.658,00	253.037.500,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.886.000,00	256.610.000,00	0,00	0,00
		3.658.658,00	253.037.500,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.854.498,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.492.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.194.168,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.168.330,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.649.915,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.397.955,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.251.960,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	5.350.992.797,00	111.858.925,00	0,00	0,00
		4.736.121.257,00	102.000.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.151.521.472,00	0,00	0,00	0,00
		1.037.334.075,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.055.845.000,00	0,00	0,00	0,00
		968.018.455,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	95.676.472,00	0,00	0,00	0,00
		69.315.620,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.199.471.325,00	111.858.925,00	0,00	0,00
		3.698.787.182,00	102.000.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.804.701.025,00	111.858.925,00	0,00	0,00
		3.334.190.182,00	102.000.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	44.770.300,00	0,00	0,00	0,00
		14.597.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	500.980.200,00	0,00	0,00	0,00
		408.398.480,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.980.200,00	0,00	0,00	0,00
		408.398.480,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	64.728.100,00	0,00	0,00	0,00
		33.316.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	43.430.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	392.821.500,00	0,00	0,00	0,00
		375.082.480,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	ANGGARAN	106.096.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	103.336.160,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	106.096.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	103.336.160,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	ANGGARAN	40.414.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.964.050,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	ANGGARAN	19.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.414.700,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	ANGGARAN	45.956.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.957.410,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	ANGGARAN	177.830.758,00	30.220.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	138.835.740,00	28.405.000,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	63.138.157,00	2.045.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.618.350,00	2.045.000,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	ANGGARAN	63.138.157,00	2.045.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.618.350,00	2.045.000,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	114.692.601,00	28.175.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	113.217.390,00	26.360.000,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	ANGGARAN	97.113.144,00	1.175.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	95.650.590,00	860.000,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	ANGGARAN	17.579.457,00	27.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.566.800,00	25.500.000,00	0,00	0,00
2.23	**PERPUSTAKAAN**	ANGGARAN	4.903.018.624,00	416.496.300,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.277.599.542,00	390.381.002,00	0,00	0,00
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	4.629.687.024,00	323.964.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.025.538.085,00	308.127.500,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	22.750.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.302.600,00	8.250.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	14.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.023.300,00	8.250.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.279.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.759.903.813,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.189.314.777,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	3.735.903.813,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.165.404.777,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.910.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		157.670.311,00	20.733.800,00	0,00	0,00
			147.229.099,00	20.475.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.537.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.923.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.111.200,00	20.733.800,00	0,00	0,00
			10.656.200,00	20.475.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.729.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		69.180.000,00	0,00	0,00	0,00
			61.071.299,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.379.111,00	0,00	0,00	0,00
			2.371.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		463.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			446.016.809,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			133.359.581,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		308.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			307.657.228,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		225.562.900,00	294.981.100,00	0,00	0,00
			220.674.800,00	279.402.500,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		177.555.000,00	0,00	0,00	0,00
			174.175.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		24.825.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.319.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		23.182.900,00	294.981.100,00	0,00	0,00
			23.180.000,00	279.402.500,00	0,00	0,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		273.331.600,00	92.531.400,00	0,00	0,00
			252.061.457,00	82.253.502,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		52.786.800,00	60.880.200,00	0,00	0,00
			49.880.100,00	60.603.502,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	ANGGARAN	3.335.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.229.500,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	ANGGARAN	19.625.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.464.750,00	8.250.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.770.550,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.981.850,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	ANGGARAN	11.826.800,00	50.965.200,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.444.450,00	50.953.502,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.989.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	220.544.800,00	31.651.200,00	0,00	0,00
		REALISASI	202.181.357,00	21.650.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	ANGGARAN	166.684.800,00	31.651.200,00	0,00	0,00
		REALISASI	155.858.657,00	21.650.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	ANGGARAN	53.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.322.700,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**KEARSIPAN**	ANGGARAN	353.624.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	341.953.438,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	ANGGARAN	206.209.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	197.843.696,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	179.359.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	171.295.456,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	ANGGARAN	85.583.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.779.416,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	93.776.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	87.516.040,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.679.840,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	ANGGARAN	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.679.840,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.868.400,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.868.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		147.415.000,00	0,00	0,00	0,00
			144.109.742,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		40.125.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.432.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		24.175.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.543.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		15.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.889.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		35.540.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.892.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		35.540.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.892.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.088.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.992.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		50.380.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.222.492,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		50.380.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.222.492,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		14.270.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.474.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		14.270.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.474.250,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		74.305.600.886,00	11.252.788.250,00	0,00	0,00
			37.068.761.101,00	10.259.199.932,00	0,00	0,00
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		1.307.900.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			1.207.870.900,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.520.180,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.520.180,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.520.180,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	ANGGARAN	1.182.900.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.097.552.220,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	98.027.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	98.027.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	ANGGARAN	1.082.900.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	999.524.820,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	810.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	733.845.550,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	82.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.437.270,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	ANGGARAN	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	183.242.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.198.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.198.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.198.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26	**PARIWISATA**	ANGGARAN	6.734.035.883,00	6.577.106.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.469.776.229,00	5.918.600.182,00	0,00	0,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	ANGGARAN	2.241.034.883,00	6.208.506.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.150.000.555,00	5.562.881.182,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	147.854.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.981.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.891.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.982.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	193.489.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.992.300,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	183.496.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.816.034.883,00	6.208.506.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.743.121.155,00	5.562.881.182,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	295.254.355,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.916.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.229.802.883,00	6.208.506.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.181.179.800,00	5.562.881.182,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	241.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	234.592.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.178.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.535.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.386.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.149.300,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	ANGGARAN	2.236.742.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.144.410.120,00	116.775.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.236.742.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.144.410.120,00	116.775.000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	ANGGARAN	190.200.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	189.702.520,00	116.775.000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.958.027.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.876.247.600,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	ANGGARAN	28.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.460.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	ANGGARAN	29.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.246.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	ANGGARAN	29.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.246.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	ANGGARAN	24.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.246.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	ANGGARAN	2.226.513.000,00	250.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.146.119.554,00	238.944.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	ANGGARAN	2.226.513.000,00	250.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.146.119.554,00	238.944.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	ANGGARAN	33.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.982.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	ANGGARAN	2.162.530.000,00	250.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.084.086.654,00	238.944.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27	**PERTANIAN**	ANGGARAN	46.557.005.138,00	1.098.457.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.773.501.628,00	940.253.000,00	0,00	0,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	31.526.379.538,00	102.907.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	33.667.500,00	20.332.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.067.500,00	11.932.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.710.789.739,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.570.789.739,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.365.320,00	18.260.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000,00	18.260.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.325.320,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.885.000,00	24.115.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.885.000,00	24.115.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.171.979,00	40.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		657.171.979,00	40.200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		635.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		7.132.575.600,00	49.000.000,00	0,00	0,00
			6.092.149.621,00	47.250.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		6.419.975.600,00	0,00	0,00	0,00
			5.460.758.051,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		3.950.729.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.192.321.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		2.469.246.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.268.436.901,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		712.600.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
			631.391.570,00	47.250.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		451.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
			400.867.750,00	47.250.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		261.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			230.523.820,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		4.951.550.000,00	946.550.000,00	0,00	0,00
			4.914.820.278,00	893.003.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		116.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			112.904.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			73.291.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.612.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	ANGGARAN	4.285.450.000,00	946.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.256.437.420,00	893.003.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	ANGGARAN	4.198.920.000,00	33.080.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.172.559.920,00	32.450.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	ANGGARAN	86.530.000,00	913.470.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.877.500,00	860.553.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	550.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	545.478.858,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	ANGGARAN	550.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	545.478.858,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	ANGGARAN	1.453.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.359.268.072,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	114.474.350,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	ANGGARAN	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	114.474.350,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	717.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	645.787.570,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	717.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	645.787.570,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	ANGGARAN	531.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	526.743.002,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	ANGGARAN	486.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	483.214.720,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.528.282,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	ANGGARAN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	72.263.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	ANGGARAN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	72.263.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	ANGGARAN	546.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	531.389.377,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	ANGGARAN	546.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	531.389.377,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ANGGARAN	244.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	235.922.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ANGGARAN	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	220.684.705,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ANGGARAN	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.782.272,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	ANGGARAN	946.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	875.874.280,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	ANGGARAN	946.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	875.874.280,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	127.853.680,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	ANGGARAN	497.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	450.088.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	ANGGARAN	299.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	297.932.600,00	0,00	0,00	0,00
3.30	**PERDAGANGAN**	ANGGARAN	3.201.953.250,00	2.606.646.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.058.489.089,00	2.606.446.750,00	0,00	0,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	ANGGARAN	1.883.400.000,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.800.416.692,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	ANGGARAN	1.338.400.000,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.297.114.492,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	ANGGARAN	828.400.000,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	791.623.742,00	2.591.600.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	ANGGARAN	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	505.490.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	ANGGARAN	545.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	503.302.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	ANGGARAN	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	211.869.350,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	ANGGARAN	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	291.432.850,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	ANGGARAN	1.002.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	989.735.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.779.050,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.779.050,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	ANGGARAN	822.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	819.840.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	822.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	819.840.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.115.850,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.115.850,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.686.125,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.686.125,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	28.304.335,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.381.790,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	ANGGARAN	21.553.250,00	15.046.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.619.763,00	14.846.750,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	ANGGARAN	21.553.250,00	15.046.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.619.763,00	14.846.750,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	ANGGARAN	21.553.250,00	15.046.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.619.763,00	14.846.750,00	0,00	0,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	ANGGARAN	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	204.031.409,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	ANGGARAN	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	204.031.409,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	204.031.409,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31	**PERINDUSTRIAN**		16.448.706.615,00	968.078.000,00	0,00	0,00
			12.527.048.405,00	791.400.000,00	0,00	0,00
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		5.750.028.615,00	968.078.000,00	0,00	0,00
			4.746.010.505,00	791.400.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.544.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.935.600,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.955.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.653.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.215.818.393,00	0,00	0,00	0,00
			3.670.368.453,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.204.818.393,00	0,00	0,00	0,00
			3.661.466.353,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.836.900,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.794.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.270.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		288.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.629.038,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.085.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.448.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.959.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.430.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.018.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			138.688.038,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.210.222,00	968.078.000,00	0,00	0,00
		2.326.500,00	791.400.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.000,00	755.228.000,00	0,00	0,00
		0,00	661.500.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	350.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	39.400.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.588.222,00	173.200.000,00	0,00	0,00
		2.326.500,00	90.500.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.974.548,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.938.654,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		626.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.409.394,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		648.167.766,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.801.958,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.394.278,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.971.530,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	10.648.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.755.603.900,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	10.648.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.755.603.900,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.896.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		406.512.350,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.195.178.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.085.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	ANGGARAN	6.486.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.208.367.050,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	ANGGARAN	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.224.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.434.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.434.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.434.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**TRANSMIGRASI**	ANGGARAN	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.074.850,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	ANGGARAN	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.074.850,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.074.850,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.418.850,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	ANGGARAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.656.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	ANGGARAN	131.112.589.330,00	3.437.988.720,00	0,00	0,00
		REALISASI	116.343.608.097,00	3.011.522.989,00	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	ANGGARAN	63.666.213.286,00	2.152.310.720,00	0,00	0,00
		REALISASI	54.161.748.455,00	1.872.785.529,00	0,00	0,00
4.01.00	**Non Program**	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00	Non Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	48.165.898.704,00	1.642.534.752,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.535.170.374,00	1.444.402.529,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	55.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.927.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	53.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.020.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.907.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	20.011.647.656,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.625.096.651,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	19.748.377.656,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.385.632.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	144.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	138.559.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ANGGARAN	89.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	87.622.101,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.282.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.021.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.021.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	187.831.550,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.852.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.979.550,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	5.964.139.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.228.260.511,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	261.342.812,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	364.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	345.963.770,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	85.244.848,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	186.363.050,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	304.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	289.966.740,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.707.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.987.445,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.927.657.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.654.734.102,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.664.863.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.337.427.444,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.340.548,00	1.450.213.752,00	0,00	0,00
		42.937.300,00	1.272.403.429,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.061.050,00	424.751.950,00	0,00	0,00
		195.700,00	392.054.429,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.462.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	372.500,00	89.627.500,00	0,00	0,00
		352.600,00	88.450.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.906.998,00	934.334.302,00	0,00	0,00
		42.389.000,00	790.437.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.891.952.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.904.309.109,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.168.134,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.618.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.186.185.001,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.498.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.479.372.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.675.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.164.583.474,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.519.966.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.111.791.558,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	409.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		388.109.058,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.810.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.613.393.689,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	83.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		116.688.305,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	755.666.246,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	265.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	237.934.260,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	2.794.747.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.167.163.590,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	174.747.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	168.402.604,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.775.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	165.070.533,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	2.295.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.690.915.453,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	ANGGARAN	3.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.427.565.475,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	ANGGARAN	2.260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.207.477.584,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	1.290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.220.087.891,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	ANGGARAN	488.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	470.118.474,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	ANGGARAN	136.900.209,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	131.366.378,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ANGGARAN	125.335.148,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	120.894.513,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	ANGGARAN	210.399.943,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	202.153.583,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ANGGARAN	15.864.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.704.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ANGGARAN	3.612.019.000,00	192.321.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.333.147.256,00	171.999.100,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	ANGGARAN	478.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	451.195.918,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	ANGGARAN	2.393.797.500,00	20.462.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.157.570.555,00	15.680.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		739.641.500,00	171.858.500,00	0,00	0,00
			724.380.783,00	156.318.600,00	0,00	0,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		10.945.321.032,00	509.775.968,00	0,00	0,00
			8.969.616.479,00	428.383.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		451.143.000,00	0,00	0,00	0,00
			432.170.865,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.788.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		200.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			191.395.365,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		235.443.000,00	0,00	0,00	0,00
			225.987.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		8.813.258.032,00	509.775.968,00	0,00	0,00
			6.935.956.172,00	428.383.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		6.915.224.032,00	509.775.968,00	0,00	0,00
			5.229.658.672,00	428.383.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		1.819.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.642.420.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		78.784.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.877.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		1.583.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.516.410.642,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		615.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			598.621.378,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		583.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			558.247.446,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		385.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			359.541.818,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.078.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			69.408.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.300.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.370.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		4.554.993.550,00	0,00	0,00	0,00
			3.656.961.602,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	ANGGARAN	2.377.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.242.189.608,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	ANGGARAN	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	80.278.054,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	ANGGARAN	197.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	171.316.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	ANGGARAN	2.090.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.990.595.554,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	ANGGARAN	708.626.550,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	568.768.290,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	ANGGARAN	19.788.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.726.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	ANGGARAN	285.513.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	253.628.540,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	ANGGARAN	403.324.550,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	301.413.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	924.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	563.591.453,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	678.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	411.022.437,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	ANGGARAN	100.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.666.236,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	144.957.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.902.780,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	ANGGARAN	545.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	282.412.251,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	ANGGARAN	485.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	248.663.251,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.749.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	ANGGARAN	67.446.376.044,00	1.285.678.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.181.859.642,00	1.138.737.460,00	0,00	0,00
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	41.389.131.023,00	1.285.678.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.051.972.905,00	1.138.737.460,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.588.350,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.588.350,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.909.795.892,00	0,00	0,00	0,00
			3.357.412.011,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.811.209.892,00	0,00	0,00	0,00
			3.270.945.961,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		98.586.000,00	0,00	0,00	0,00
			86.466.050,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		795.194.000,00	0,00	0,00	0,00
			694.830.825,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12.935.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.766.215,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19.450.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.016.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		34.470.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.415.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		82.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			66.239.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		177.939.000,00	0,00	0,00	0,00
			142.812.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		467.534.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.581.360,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		750.000,00	1.285.678.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.138.737.460,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		750.000,00	616.285.000,00	0,00	0,00
			0,00	549.631.460,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	669.393.000,00	0,00	0,00
			0,00	589.106.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.609.962.131,00	0,00	0,00	0,00
			1.339.134.642,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		34.536.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.451.150,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		400.216.131,00	0,00	0,00	0,00
			292.347.240,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		274.551.000,00	0,00	0,00	0,00
			199.099.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		900.659.000,00	0,00	0,00	0,00
			819.236.552,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.806.742.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.362.751.621,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	48.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.894.140,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	355.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	308.379.569,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	ANGGARAN	61.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	818.206.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	676.977.409,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	523.017.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	305.220.503,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	ANGGARAN	31.568.654.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.182.445.050,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	ANGGARAN	31.194.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.865.846.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	ANGGARAN	320.364.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	290.880.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	ANGGARAN	53.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.718.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	ANGGARAN	1.678.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.099.810.406,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	ANGGARAN	66.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.576.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	ANGGARAN	1.114.567.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	808.389.992,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	ANGGARAN	497.146.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	266.844.214,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	ANGGARAN	26.057.245.021,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.129.886.737,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	ANGGARAN	5.977.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.596.607.948,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	ANGGARAN	692.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	655.129.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	ANGGARAN	5.204.728.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.871.228.148,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.464.688.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.303.122.765,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.464.688.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.303.122.765,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.547.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.110.234.056,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.876.924.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.177.358,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.570.769.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.479.351.030,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.513.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.360.375.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.586.017.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.542.330.068,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.797.294.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.898.019.119,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.999.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.185.950.371,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	498.378.000,00	0,00	0,00	0,00
		417.565.748,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.503.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.852.475.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.195.607.451,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.247.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.822.475.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.193.359.951,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	348.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.857.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	348.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.857.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.069.404.221,00	0,00	0,00	0,00
		2.844.437.498,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	189.389.021,00	0,00	0,00	0,00
		133.876.312,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.112.818.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.001.415.376,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.767.197.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.709.145.810,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	60.548.620.993,00	3.629.630.450,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		53.540.761.185,00	3.367.234.205,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00
5.01	**PERENCANAAN**	9.324.201.696,00	48.035.000,00	0,00	0,00
		7.830.913.829,00	40.924.800,00	0,00	0,00
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.261.857.631,00	42.835.000,00	0,00	0,00
		5.069.220.147,00	40.924.800,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.425.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.380.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.373.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.671.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.954.909.631,00	0,00	0,00	0,00
		3.858.732.029,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.941.259.631,00	0,00	0,00	0,00
		3.851.328.629,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.010.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.392.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.618.000,00	0,00	0,00	0,00
		471.016.388,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.921.510,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.832.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.938.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.466.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.917.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		366.618.000,00	0,00	0,00	0,00
			335.639.778,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.270.000,00	42.835.000,00	0,00	0,00
			10.966.500,00	40.924.800,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.270.000,00	41.585.000,00	0,00	0,00
			10.966.500,00	39.674.800,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			86.089.020,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.998.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.971.660,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.118.460,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		401.060.000,00	0,00	0,00	0,00
			385.991.210,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.016.210,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		20.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		84.570.000,00	0,00	0,00	0,00
			81.905.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.890.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.910.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		1.655.044.065,00	0,00	0,00	0,00
			1.423.393.266,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.090.044.065,00	0,00	0,00	0,00
			921.618.350,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		117.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.548.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.474.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	ANGGARAN	91.684.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.949.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	ANGGARAN	24.069.360,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.600.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	88.065.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.276.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	691.690.705,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	629.702.950,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.495.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.495.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	321.279.016,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	ANGGARAN	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	212.777.436,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	108.501.580,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	ANGGARAN	1.407.300.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.338.300.416,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	ANGGARAN	648.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	621.338.476,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.501.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.267.851,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.970.994,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	ANGGARAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	143.873.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.056.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.641.081,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ANGGARAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.144.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ANGGARAN	248.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.883.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	ANGGARAN	424.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	399.600.390,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	102.506.594,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.283.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	ANGGARAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.455.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	ANGGARAN	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	177.757.044,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.719.272,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.739.450,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	ANGGARAN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.442.130,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	ANGGARAN	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.696.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	ANGGARAN	334.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	317.361.550,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.858.090,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.787.750,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.591.514,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.847.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANGGARAN	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.883.436,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ANGGARAN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.675.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.372.360,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	96.346.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	**KEUANGAN**	ANGGARAN	37.348.270.147,00	3.468.095.450,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		REALISASI	32.945.682.693,00	3.234.519.405,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00
5.02.00	**Non Program**	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	214.122.579.600,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	214.122.579.600,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	214.122.579.600,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	23.813.351.754,00	3.218.987.750,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.682.907.986,00	2.989.659.505,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	31.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.551.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	15.607.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.408.300,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.607.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.143.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.889.272.754,00	0,00	0,00	0,00
		17.403.414.211,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.779.448.754,00	0,00	0,00	0,00
		17.295.084.211,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.824.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.330.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.820.245,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.820.245,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.216.195.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00
		1.914.049.040,00	2.180.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.901.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.085.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.667.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.670.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.412.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.738.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.481.951.220,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	121.595.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00
		110.721.120,00	2.180.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	3.216.683.750,00	0,00	0,00
		0,00	2.987.479.505,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	2.782.830.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.573.899.505,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.940.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	418.853.750,00	0,00	0,00
		0,00	398.640.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		355.670.000,00	0,00	0,00	0,00
			348.172.015,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			186.820.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		160.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			156.302.015,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.121.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			793.900.725,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		990.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			664.185.725,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			74.715.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		4.938.831.748,00	59.107.500,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
			4.474.176.000,00	56.220.000,00	657.130.800,00	519.462.597.463,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2.591.204.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.381.806.541,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		192.812.000,00	0,00	0,00	0,00
			186.672.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		192.812.000,00	0,00	0,00	0,00
			181.784.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		30.740.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.175.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		35.316.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.502.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		7.085.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.855.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		11.025.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.271.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		637.474.000,00	0,00	0,00	0,00
			553.743.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	ANGGARAN	738.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	656.531.841,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	727.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	ANGGARAN	877.306.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	694.669.746,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	ANGGARAN	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.905.720,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	ANGGARAN	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.243.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	ANGGARAN	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.488.859,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	ANGGARAN	67.306.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	63.764.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	ANGGARAN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	66.901.550,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	92.793.031,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	ANGGARAN	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.133.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	466.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	355.438.486,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	ANGGARAN	1.396.560.500,00	59.107.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.382.057.213,00	56.220.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	ANGGARAN	65.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.702.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	99.090.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.761.105,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	492.543.500,00	59.107.500,00	0,00	0,00
		482.633.508,00	56.220.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	685.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		682.870.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	73.761.248,00	0,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		15.642.500,00	0,00	657.130.800,00	519.462.597.463,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	73.761.248,00	0,00	0,00	718.001.023.560,00
		15.642.500,00	0,00	0,00	501.405.461.000,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	21.382.536.680,00	0,00
		0,00	0,00	657.130.800,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	21.333.031.019,00
		0,00	0,00	0,00	18.057.136.463,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	3.260.656.445,00	190.000.200,00	0,00	0,00
		2.886.912.841,00	188.639.900,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.260.656.445,00	190.000.200,00	0,00	0,00
		2.886.912.841,00	188.639.900,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	322.344.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.692.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.023.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	459.999.800,00	190.000.200,00	0,00	0,00
		323.004.036,00	188.639.900,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.616.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.566.261.345,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.522.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.167.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	699.581.300,00	0,00	0,00	0,00
		686.887.505,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	5.335.430.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.901.685.866,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.335.430.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.901.685.866,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	908.153.100,00	0,00	0,00	0,00
		813.039.850,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	970.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		954.005.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	328.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.723.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	456.163.852,00	0,00	0,00	0,00
		427.440.395,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.472.065.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.376.899.881,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.118.851.348,00	0,00	0,00	0,00
		959.209.440,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.412.550,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	19.216.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.954.450,00	0,00	0,00	0,00
5.03	**KEPEGAWAIAN**	8.386.178.050,00	98.800.000,00	0,00	0,00
		7.493.657.262,00	91.790.000,00	0,00	0,00
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.966.059.550,00	98.800.000,00	0,00	0,00
		5.467.424.623,00	91.790.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.388.240.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.900.217.109,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.358.240.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.870.297.109,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.699.250,00	0,00	0,00	0,00
		401.741.560,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.199.250,00	0,00	0,00	0,00
		42.555.050,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.995.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.755.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.435.710,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.120.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	91.790.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.120.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	91.790.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			980.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			980.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		172.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			164.485.954,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.065.454,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		97.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.420.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		2.420.118.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.026.232.639,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		843.817.100,00	0,00	0,00	0,00
			700.744.193,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		542.026.550,00	0,00	0,00	0,00
			404.836.531,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		57.456.650,00	0,00	0,00	0,00
			54.919.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		7.724.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		47.757.200,00	0,00	0,00	0,00
			46.349.312,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		188.852.200,00	0,00	0,00	0,00
			187.339.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		480.980.079,00	0,00	0,00	0,00
			388.371.043,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			223.261.253,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		200.980.079,00	0,00	0,00	0,00
			165.109.790,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		779.868.321,00	0,00	0,00	0,00
			649.870.088,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center		691.509.600,00	0,00	0,00	0,00
			569.378.758,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		41.057.179,00	0,00	0,00	0,00
			37.487.290,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		47.301.542,00	0,00	0,00	0,00
			43.004.040,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	315.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.247.315,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.752.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.710.275,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	28.073.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.541.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.472.790,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	16.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.286.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	21.257.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.237.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	4.094.671.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.994.352.650,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	4.094.671.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.994.352.650,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.562.012.650,00	0,00	0,00	0,00
		1.522.894.600,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.562.012.650,00	0,00	0,00	0,00
		1.522.894.600,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.532.658.450,00	0,00	0,00	0,00
		2.471.458.050,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.532.658.450,00	0,00	0,00	0,00
		2.471.458.050,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	1.395.300.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
		1.276.154.751,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	1.395.300.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
		1.276.154.751,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		459.435.671,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	440.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.814.329,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.829.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.791.842,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		351.391.060,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.389.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.201.460,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.800.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.738.620,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.468.620,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	335.300.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
		308.589.400,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.431.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.897.900,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.300.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
		5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	15.353.323.518,00	520.478.308,00	0,00	0,00
		12.316.338.825,00	428.790.000,00	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT**	15.353.323.518,00	520.478.308,00	0,00	0,00
		12.316.338.825,00	428.790.000,00	0,00	0,00
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.281.395.512,00	520.478.308,00	0,00	0,00
		9.192.149.513,00	428.790.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.465.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.206.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		330.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		606.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.723.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.946.140.665,00	0,00	0,00	0,00
		7.515.626.696,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.852.603.665,00	0,00	0,00	0,00
		7.455.458.696,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.537.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.932.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.310.733,00	0,00	0,00	0,00
		28.948.001,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.310.733,00	0,00	0,00	0,00
		28.830.001,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.620.900,00	0,00	0,00	0,00
		517.987.741,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.687.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.201.850,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.320.100,00	0,00	0,00	0,00
		20.407.657,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.300.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.087.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.076.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.594.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.878.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.954.534,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.215.830,00	520.478.308,00	0,00	0,00
		97.535.000,00	428.790.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	664.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	84.400.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	297.000.000,00	0,00	0,00
		2.335.000,00	243.600.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.551.830,00	137.478.308,00	0,00	0,00
		77.000.000,00	100.790.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.787.384,00	0,00	0,00	0,00
		523.203.553,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.806.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.671.776,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.387.384,00	0,00	0,00	0,00
		321.725.577,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		490.382.822,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		273.077.422,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.007.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.398.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	931.606.972,00	0,00	0,00	0,00
		653.632.850,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	660.816.868,00	0,00	0,00	0,00
		467.716.950,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	56.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.923.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66.372.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.708.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	84.028.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.131.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	199.316.868,00	0,00	0,00	0,00
		146.738.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.694.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.860.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.660.550,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	270.790.104,00	0,00	0,00	0,00
		185.915.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	36.458.604,00	0,00	0,00	0,00
		16.665.800,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	234.331.500,00	0,00	0,00	0,00
		169.250.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	3.140.321.034,00	0,00	0,00	0,00
		2.470.556.462,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.491.260.639,00	0,00	0,00	0,00
		1.268.962.783,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	764.030.639,00	0,00	0,00	0,00
		699.866.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	727.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		569.096.183,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.649.060.395,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.593.679,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	384.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.365.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ANGGARAN	374.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	278.086.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ANGGARAN	586.626.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	474.493.336,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	ANGGARAN	303.644.395,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	260.649.343,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	ANGGARAN	86.821.408.718,00	4.305.523.417,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.187.541.483,00	4.169.014.835,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	ANGGARAN	86.821.408.718,00	4.305.523.417,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.187.541.483,00	4.169.014.835,00	0,00	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	70.187.143.795,00	2.407.829.792,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.334.962.158,00	2.337.974.937,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	169.065.757,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	155.451.215,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	97.333.250,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	92.253.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	68.732.507,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.612.465,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	58.501.750.703,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.580.148.080,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	58.323.968.711,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.417.526.630,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	115.606.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	108.483.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	46.944.379,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.130.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ANGGARAN	15.231.613,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.007.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	140.118.230,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	140.118.230,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.224.307.698,00	7.525.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.970.121.461,00	7.289.037,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	159.274.390,00	7.525.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	141.468.829,00	7.289.037,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422.828.724,00	0,00	0,00	0,00
		405.373.351,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.920.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.032.384,00	0,00	0,00	0,00
		182.499.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.180.700,00	0,00	0,00	0,00
		35.986.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	797.179.000,00	0,00	0,00	0,00
		763.550.620,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.618.812.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.438.322.811,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.988.005,00	2.364.616.220,00	0,00	0,00
		52.399.400,00	2.297.724.900,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	420.000,00	550.275.000,00	0,00	0,00
		99.900,00	538.640.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	36.860.000,00	0,00	0,00
		0,00	36.300.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	490.000,00	261.233.000,00	0,00	0,00
		480.000,00	237.694.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.078.005,00	1.516.248.220,00	0,00	0,00
		51.819.500,00	1.485.090.900,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.955.376.691,00	35.687.972,00	0,00	0,00
		4.597.992.928,00	32.961.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.952.164,00	0,00	0,00	0,00
		88.476.175,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	835.833.196,00	0,00	0,00	0,00
		603.299.623,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.015.591.331,00	35.687.972,00	0,00	0,00
		3.906.217.130,00	32.961.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.115.654.941,00	0,00	0,00	0,00
		2.838.730.844,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.314.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	941.849.100,00	0,00	0,00	0,00
		776.961.294,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	55.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.435.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.095.880,00	0,00	0,00	0,00
		184.617.580,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.529.789.910,00	0,00	0,00	0,00
		1.457.086.505,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.166.450,00	0,00	0,00	0,00
		78.289.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308.033.601,00	0,00	0,00	0,00
		287.026.965,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	186.468.900,00	0,00	0,00	0,00
		176.046.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.494.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.494.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	175.968.900,00	0,00	0,00	0,00
		165.552.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	175.968.900,00	0,00	0,00	0,00
		165.552.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	7.259.613.874,00	1.894.568.625,00	0,00	0,00
		6.979.080.846,00	1.827.946.898,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.645.169.715,00	12.600.000,00	0,00	0,00
		3.483.480.714,00	5.340.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	756.700.590,00	0,00	0,00	0,00
		707.458.319,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.888.469.125,00	12.600.000,00	0,00	0,00
		2.776.022.395,00	5.340.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.614.444.159,00	1.881.968.625,00	0,00	0,00
		3.495.600.132,00	1.822.606.898,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	110.814.163,00	0,00	0,00	0,00
		109.456.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	854.477.800,00	1.855.000.000,00	0,00	0,00
		835.169.500,00	1.798.143.898,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.649.152.196,00	26.968.625,00	0,00	0,00
			2.550.974.232,00	24.463.000,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		3.975.494.250,00	0,00	0,00	0,00
			3.838.151.830,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.227.375.750,00	0,00	0,00	0,00
			1.163.322.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1.227.375.750,00	0,00	0,00	0,00
			1.163.322.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2.748.118.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.674.828.930,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2.479.782.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.413.153.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		268.336.500,00	0,00	0,00	0,00
			261.675.830,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		2.509.327.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			2.391.179.999,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		2.509.327.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			2.391.179.999,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		2.424.827.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			2.312.660.689,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		84.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			78.519.310,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		2.703.360.699,00	1.625.000,00	0,00	0,00
			2.468.119.800,00	1.593.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2.703.360.699,00	1.625.000,00	0,00	0,00
			2.468.119.800,00	1.593.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		406.339.450,00	0,00	0,00	0,00
			376.068.430,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		237.853.000,00	0,00	0,00	0,00
			218.145.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		161.516.000,00	0,00	0,00	0,00
			151.108.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		176.969.950,00	0,00	0,00	0,00
			153.835.450,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		372.369.500,00	0,00	0,00	0,00
			352.853.650,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	ANGGARAN	62.646.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.193.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	ANGGARAN	38.343.089,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.891.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN	1.175.066.860,00	1.625.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.058.850.620,00	1.593.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	ANGGARAN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.599.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	ANGGARAN	24.003.850,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	22.968.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	ANGGARAN	46.553.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.604.700,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	ANGGARAN	35.979.314.126,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.951.313.792,00	0,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	ANGGARAN	35.979.314.126,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.951.313.792,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	3.752.156.626,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.242.031.893,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.093.254.602,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.629.939.740,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	2.999.474.314,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.543.006.316,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ANGGARAN	93.780.288,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	86.933.424,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	215.853.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	197.194.281,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.406.151,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	15.603.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.932.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.969.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	125.452.330,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	117.038.165,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.530.376,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.511.789,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	323.048.924,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	297.859.707,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	148.048.924,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	137.006.707,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.173.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	ANGGARAN	196.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	141.715.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	ANGGARAN	196.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	141.715.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ANGGARAN	191.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	139.815.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	ANGGARAN	28.697.779.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	28.463.386.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	ANGGARAN	28.697.779.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	28.463.386.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		28.697.779.500,00	0,00	0,00	0,00
			28.463.386.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		1.282.225.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.636.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1.282.225.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.636.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1.282.225.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.278.636.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		94.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			74.185.250,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		94.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			74.185.250,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.663.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.189.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.522.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.810.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		1.956.002.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.751.358.599,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	ANGGARAN	1.956.002.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.751.358.599,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	ANGGARAN	247.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	164.800.199,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.708.502.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.586.558.400,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		ANGGARAN	2.048.368.740.309,00	332.747.086.931,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		REALISASI	1.813.918.311.416,00	295.594.876.519,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.6.1	529.593.676.302,00	493.720.575.841,28
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berja	B.6.2	529.593.676.302,00	493.720.575.841,28
Sub Total		**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	B.6.3	319.430.015.779,00	529.593.676.302,00
Sub Total		**319.430.015.779,00**	**529.593.676.302,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.6.4	0,00	0,00
Lain-lain	B.6.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**B.6.6**	**319.430.015.779,00**	**529.593.676.302,00**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2023 (AUDITED)	SALDO 2022 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**D.6.1**	**2.340.677.515.718,92**	**2.161.686.973.726,13**	**178.990.541.992,79**	**8,28**
7 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**D.6.1.1**	**363.149.639.433,92**	**307.852.873.233,13**	**55.296.766.200,79**	**17,96**
7 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	D.6.1.1.1	174.795.384.628,00	155.590.565.653,00	19.204.818.975,00	12,34
7 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	D.6.1.1.2	19.380.192.527,00	17.007.390.739,00	2.372.801.788,00	13,95
7 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	D.6.1.1.3	32.960.510.844,51	8.725.989.436,59	24.234.521.407,92	277,73
7 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	D.6.1.1.4	136.013.551.434,41	126.528.927.404,54	9.484.624.029,87	7,50
7 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**D.6.1.2**	**1.947.990.344.690,00**	**1.823.543.004.002,00**	**124.447.340.688,00**	**6,82**
7 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	D.6.1.2.1	1.696.736.093.174,00	1.579.705.339.504,00	117.030.753.670,00	7,41
7 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	D.6.1.2.2	11.882.483.000,00	11.209.129.000,00	673.354.000,00	106,01
7 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	D.6.1.2.3	239.371.768.516,00	232.628.535.498,00	6.743.233.018,00	2,90
7 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG**	**D.6.1.3**	**29.537.531.595,00**	**30.291.096.491,00**	**(753.564.896,00)**	**(2,49)**
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	D.6.1.3.1	29.537.531.595,00	30.291.096.491,00	(753.564.896,00)	(2,49)
8	**BEBAN**	**D.6.2**	**2.426.888.360.975,11**	**2.107.832.967.179,57**	**319.055.393.795,54**	**15,14**
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	D.6.2.1	974.016.906.811,00	965.951.761.671,00	8.065.145.140,00	0,83
8 . 1 . 2	Beban Persediaan	D.6.2.2	262.272.864.903,88	185.994.092.097,97	76.278.772.805,91	41,01
8 . 1 . 3	Beban Jasa	D.6.2.3	335.783.193.329,18	324.045.257.079,00	11.737.936.250,18	3,62
8 . 1 . 4	Beban Pemeliharaan	D.6.2.4	75.000.244.712,00	57.611.210.893,00	17.389.033.819,00	30,18
8 . 1 . 5	Beban Perjalanan Dinas	D.6.2.5	67.837.193.471,00	40.003.233.737,00	27.833.959.734,00	69,58
8 . 1 . 6	Beban Bunga	D.6.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Subsidi	D.6.2.6	1.907.074.332,00	1.795.750.000,00	111.324.332,00	6,20
8 . 1 . 8	Beban Hibah	D.6.2.7	89.978.195.464,00	57.936.215.269,00	32.041.980.195,00	55,31
8 . 1 . 9	Beban Bantuan Sosial	D.6.2.8	13.071.300.000,00	10.729.800.000,00	2.341.500.000,00	21,82
8 . 1 . 10	Beban Penyusutan	D.6.2.9	225.195.441.262,24	176.136.076.751,60	49.059.364.510,64	27,85
8 . 1 . 11	Beban Penyisihan Piutang	D.6.2.10	27.837.375.213,81	13.190.577.276,00	14.646.797.937,81	111,04
8 . 1 . 12	Beban Transfer	D.6.2.11	353.988.571.476,00	274.438.992.405,00	79.549.579.071,00	28,99
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**(86.210.845.256,19)**	**53.854.006.546,56**	**(140.064.851.802,75)**	**(260,08)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D.6.3**				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.6.3.1	473.126,00	0,00	473.126,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	D.6.3.2	0,00	27.600.734.343,61	(27.600.734.343,61)	0,00
8 . 5 . 2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.6.3.3	309.611.044,88	0,00	309.611.044,88	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		**(309.137.918,88)**	**(27.600.734.343,61)**	**27.290.650.172,73**	**(98,88)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR		**(86.519.983.175,07)**	**26.253.272.202,95**	**(112.774.201.630,02)**	**(429,56)**
	POS LUAR BIASA	**D.6.4**				
7 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa	D.6.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	D.6.4.2	943.774.800,00	4.109.666.900,00	-3.165.892.100,00	-77,04
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		**(943.774.800,00)**	**(4.109.666.900,00)**	**3.165.892.100,00**	**(77,04)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**D.6.5**	**(87.463.757.975,07)**	**22.143.605.302,95**	**(109.607.363.278,02)**	**(494,98)**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	F.6.1	3.524.401.938.130,28	3.506.874.599.618,72
SURPLUS/DEFISIT-LO	F.6.2	(87.463.757.975,07)	22.143.605.302,95
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	F.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	F.6.3.1	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	F.6.3.2	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	F.6.3.3	0,00	(4.616.266.791,39)
EKUITAS AKHIR	F.6.4	**3.436.938.180.155,21**	**3.524.401.938.130,28**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

REKENING	URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	**ASET**	**C.6.1**		
1.1	**ASET LANCAR**	**C.6.1.1**		
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	C.6.1.1.1	281.309.763.923,00	454.620.325.065,00
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	C.6.1.1.2	33.212.050,00	0,00
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.6.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.04	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	C.6.1.1.4	36.699.785.283,00	71.922.513.457,00
1.1.1.05	Kas di Bendahara BOS	C.6.1.1.5	1.387.254.523,00	3.050.837.780,00
1.1.1.06	Kas di Bendahara FKTP	C.6.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.07	Kas Lainnya	C.6.1.1.7	0,00	51.400.000,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	C.6.1.1.8	46.730.213.291,00	50.345.896.886,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	C.6.1.1.9	625.146.692,00	609.008.887,00
1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	C.6.1.1.10	23.664.637.289,65	8.725.989.436,59
1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	C.6.1.1.11	8.649.991.238,00	10.889.281.623,00
1.1.8	Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya	C.6.1.1.12	8.602.274.223,00	3.066.129.116,00
1.1.9	Piutang Lainnya	C.6.1.1.13	3.562.116.481,00	3.565.121.339,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	C.6.1.1.14	-31.586.996.875,81	-47.463.880.886,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	C.6.1.1.15	351.141.102,00	358.229.090,00
1.1.12	Persediaan	C.6.1.1.16	51.014.293.647,41	61.836.175.763,47
	JUMLAH ASET LANCAR		**431.042.832.867,25**	**621.577.027.557,06**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**C.6.1.2**		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.6.1.2.1	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	C.6.1.2.2		
1.2.2.1	Penyertaan Modal	C.6.1.2.2.1	220.911.479.273,81	200.331.096.802,95
1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	C.6.1.2.2.2	3.021.092.661,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		**223.932.571.934,81**	**200.331.096.802,95**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		223.932.571.934,81	200.331.096.802,95
1.3	**ASET TETAP**	**C.6.1.3**		
1.3.1	Tanah	C.6.1.3.1	883.964.452.106,00	876.430.381.056,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	C.6.1.3.2	1.030.039.299.542,30	930.401.453.124,30
1.3.3	Gedung dan Bangunan	C.6.1.3.3	1.147.038.482.182,20	1.081.341.113.090,00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6.1.3.4	1.843.870.379.498,87	1.741.846.607.536,87
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	C.6.1.3.5	318.155.313.068,62	296.112.363.856,61
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6.1.3.6	28.226.907.291,00	22.718.467.637,20
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	C.6.1.3.7	-2.563.801.367.925,37	-2.395.247.897.684,54
	JUMLAH ASET TETAP		**2.687.493.465.763,62**	**2.553.602.488.616,45**
1.4	**DANA CADANGAN**	**C.6.1.4**		
1.4.1	Dana Cadangan	C.6.1.4.1	45.877.805.225,00	30.334.954.186,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		**45.877.805.225,00**	**30.334.954.186,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**C.6.1.5**		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	C.6.1.5.1	0,00	0,00
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.6.1.5.2	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	C.6.1.5.3	13.281.564.707,00	13.107.021.728,00
1.5.4	Aset Lain-lain	C.6.1.5.4	154.601.374.732,43	265.892.865.204,38
1.5.5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	C.6.1.5.5	-10.859.892.037,89	-9.974.225.581,62
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.6.1.5.6	-107.378.281.954,01	-148.431.504.364,94
1.5.8	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	C.6.1.5.7	3.460.083.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		**62.637.279.207,53**	**130.126.587.745,82**
	JUMLAH ASET		**3.450.983.954.998,21**	**3.535.972.154.908,27**
2	**KEWAJIBAN**	**C.6.2**		
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**C.6.2.1**		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.6.2.1.1	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.2.1.2	1.764.311.436,00	1.243.506.508,00
2.1.6	Utang Belanja	C.6.2.1.3	12.281.463.407,00	10.275.310.270,00
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.2.1.4	0,00	51.400.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**14.045.774.843,00**	**11.570.216.778,00**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**C.6.2.2**		
	Utang Dalam Negeri	C.6.2.2.1	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	C.6.2.2.2	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		**14.045.774.843,00**	**11.570.216.778,00**
3	**EKUITAS**	**C.6.3**		
3.1	**EKUITAS**			
3.1.1	Ekuitas		3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.450.983.954.998,21**	**3.535.972.154.908,28**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**E.6.1**		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		165.852.621.120,00	146.179.152.569,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		18.784.804.890,00	17.152.918.048,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		21.741.480.548,00	18.641.433.357,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		132.167.330.372,00	174.404.610.229,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.693.276.010.174,00	1.591.689.816.675,00
DID		11.882.483.000,00	11.209.129.000,00
Dana Desa		380.301.846.000,00	379.338.801.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		222.908.195.166,00	218.303.369.271,00
Bantuan Keuangan - LRA		10.927.428.243,00	14.035.213.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		14.500.000.000,00	15.069.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**2.672.342.199.513,00**	**2.586.023.443.149,00**
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		974.218.788.878	965.541.425.166
Belanja Barang dan Jasa		734.742.952.742	583.404.693.292
Belanja Subsidi		1.907.074.332	1.795.750.000
Belanja Hibah		89.978.195.464	57.905.772.769
Belanja Bantuan Sosial		13.071.300.000	10.729.800.000
Belanja Tak Terduga		657.130.800	7.794.077.100
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		15.879.816.030	14.687.250.527
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.177.320.433	1.933.815.478
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		508.532.040.600	500.018.748.000
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		206.996.000.000	137.137.979.400
Jumlah Arus Kas Keluar		**2.548.160.619.279,00**	**2.280.949.311.732,28**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**124.181.580.234,00**	**305.074.131.416,72**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**E.6.2**		
Arus Kas Masuk			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		513.908.999	1.598.039.786
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		35.726.763	71.950.000
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**549.635.762,00**	**1.669.989.786,00**
Arus Kas Keluar			
Belanja Modal Tanah		5.009.187.370	1.853.240.700
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		103.690.199.242	63.015.807.876
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		81.821.621.133	65.909.190.529
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		93.344.039.187	107.441.269.466
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		11.729.829.587	8.450.512.171
Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	15.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		24.300.000.000	9.201.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar		**334.894.876.519,00**	**270.871.020.742,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(334.345.240.757,00)**	**(269.201.030.956,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**E.6.3**		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**E.6.4**		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		152.888.804.540	143.717.616.112
Jumlah Arus Kas Masuk		**152.888.804.540,00**	**143.717.616.112,00**
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		152.940.204.540,00	143.713.341.112,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**152.940.204.540,00**	**143.713.341.112,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(51.400.000,00)**	**4.275.000,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas		**(210.215.060.523,00)**	**35.877.375.460,72**
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran		**529.645.076.302,00**	**493.767.700.841,28**
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran		**319.430.015.779,00**	**529.645.076.302,00**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		**0,00**	**0,00**
Kas Lainnya		**-**	**-**
Saldo Akhir Kas		**319.430.015.779,00**	**529.645.076.302,00**

-

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas;
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya;
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- b. Kebijakan Keuangan;
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan;
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Bab V Kebijakan Akuntansi
- a. Entitas Pelaporan;
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 6.a.1 Pendapatan – LRA.
  - 6.a.2 Belanja.
  - 6.a.3 Pembiayaan.
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 6.c.1 Aset.
  - 6.c.2 Kewajiban.
  - 6.c.3 Ekuitas.
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 6.d.1 Pendapatan – LO.
  - 6.d.2 Beban.
  - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional.
  - 6.d.4 Akun Luar Biasa.
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
  - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.

6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VIII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <100mdpl, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200mdpl, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat).
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400mdpl, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karanganom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat).
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000mdpl, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari

2 (dua) OPD berbentuk Sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enam belas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2023

Organisasi Daerah Kabupaten KlatenTahun 2019-2023	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	5	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	-	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
6. Kelurahan	10	10	10	10	10
7. Satuan Setingkat Dinas	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
9. RSUD	1	1	1	1	1
Jumlah	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2023

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
01 Prambanan	16	-	183	26,09
02 Gantiwarno	16	-	149	26,44
03 Wedi	19	-	178	26,26
04 Bayat	18	-	228	42,1
05 Cawas	20	-	238	35,94
06 Trucuk	18	-	171	34,69
07 Kalikotes	7	-	99	14,11
08 Kebonarum	7	-	65	10,42

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
09 Jogonalan	18	-	202	27,59
10 Manisrenggo	16	-	252	30,6
11 Karangnongko	14	-	35	29,49
12 Ngawen	13	-	124	18,45
13 Ceper	18	-	42	25,77
14 Pedan	14	-	151	20
15 Karangdowo	19	-	161	30,83
16 Juwiring	19	-	208	30,9
17 Wonosari	18	-	149	33,38
18 Delanggu	16	-	37	20,03
19 Polanharjo	18	-	44	25,22
20 Karanganom	19	-	48	25,62
21 Tulung	18	-	185	34,44
22 Jatinom	17	1	207	37,11
23 Kemalang	13	-	214	60,19
24 Klaten Selatan	11	1	112	15,09
25 Klaten Tengah	3	6	97	9,59
26 Klaten Utara	6	2	124	11,17
Jumlah 2023	391	10	3.703	701,52
2022	391	10	3.703	655,56
2021	391	10	3.703	655,56
2020	391	10	3.703	655,56
2019	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2023

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

2.5 Demografi

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2023

NO	1	2	3	4
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	PRAMBANAN	26.148	26.564	52.712
2	GANTIWARNO	19.488	19.603	39.091
3	WEDI	26.166	26.550	52.716
4	BAYAT	32.189	32.185	64.374
5	CAWAS	28.810	29.529	58.339
6	TRUCUK	40.505	40.063	80.568
7	KEBONARUM	9.800	10.111	19.911
8	JOGONALAN	29.957	29.936	59.893
9	MANISRENGGO	21.777	22.133	43.910
10	KARANGNONGKO	18.505	18.915	37.420
11	CEPER	32.871	33.047	65.918
12	PEDAN	23.788	23.798	47.586
13	KARANGDOWO	21.703	22.170	43.873
14	JUWIRING	29.513	29.685	59.198
15	WONOSARI	31.925	32.138	64.063
16	DELANGGU	21.093	21.467	42.560
17	POLANHARJO	20.382	20.989	41.371
18	KARANGANOM	23.310	23.869	47.179
19	TULUNG	27.335	27.521	54.856
20	JATINOM	30.792	30.734	61.526
21	KEMALANG	20.065	20.307	40.372
22	NGAWEN	23.246	23.079	46.325
23	KALIKOTES	18.757	18.852	37.609
24	KLATEN UTARA	24.217	24.686	48.903
25	KLATEN TENGAH	20.411	21.146	41.557
26	KLATEN SELATAN	22.161	22.701	44.862
Total		**644.914**	**651.778**	**1.296.692**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Semester II Tahun 2023

2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah sekolah setingkat SD/MI 823, setingkat SMP/MTs 137, setingkat SMA/MA/SMK 89. Jumlah guru TK sebanyak 1098 guru (ASN dan non ASN); guru sekolah tingkat pendidikan SD sebanyak 2483 guru (ASN dan non ASN), guru SMP : 2483 guru (ASN dan non ASN). Selain itu terdapat 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 365 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	10
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Puskesmas	34
6	Puskesmas Pembantu	85
7	Apotek	218
8	Posyandu	2.276
9	Balai Kesehatan Masyarakat	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2023

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	308
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	9
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambahan Lainnya	10
4	Dokter Spesialis	152
5	Dokter Gigi	87
6	Dokter Spesialis Gigi	11
7	Bidan	400
8	Kefarmasian	207
9	Perawat	970
10	Psikologi Klinis	1
11	Radiografer	40
12	Terapi Wicara	5
13	Akupasi Terapi	3
14	Fisioterapis	44
15	Analis Kesehatan	82
16	Perekam Medis	91
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingungan	32
18	Tenaga Gizi	54
19	Teaga Kesehatan Tradisional	4
20	Ortotis Prostetis	-
21	Akupuntur Terapis	1
22	Refraksion Optisien	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2023

2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sepanjang 720.85 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebanyak 315 buah, seluruhnya sepanjang 4.018,5 meter. Kondisi jembatan pada umumnya baik.

2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Keterangan	Satuan					
		2019	2020	2021	2022	2023
Sumber Air	Buah	174	216	126	126	126
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	43.076	45.376	46.062	46.062	46.062
Saluran Sekunder	Km	482.970	512.748	452.481	452.481	452.481
Saluran Tersier	Km					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Tahun 2023

2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".** Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.

- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.

- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

2.8 Personalia

2.8.1 Pimpinan Daerah

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2023

2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19, dimana munculnya varian baru omicron mengharuskan pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih efektif guna mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial guna pencegahan terhadap semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 yang telah ditempuh oleh pemerintah sebelumnya, mengakibatkan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Hal inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Saat ini upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat covid-19 lebih difokuskan dalam rangka pemulihan ekonomi. Upaya nyata berupa perbaikan pada berbagai aspek dan sektor ekonomi antara lain sektor industri, pariwisata dan investasi.

Kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan ekonomi akan bertumbuh secara positif. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Konsumsi dalam negeri merupakan salah satu penggerak roda ekonomi, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Namun jumlah konsumsi sangat tergantung dengan daya beli masyarakat, stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat, disamping itu pemberian stimulus juga diberikan kepada para pelaku usaha UMKM untuk menggerakkan dunia usaha. Percepatan realisasi belanja-belanja daerah dalam APBD pun turut mendorong konsumsi yang diarahkan untuk produk-produk dalam negeri.

Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah ditempuh secara signifikan menunjukan ke arah perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten telah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.82% perlahan naik dan pada tahun 2023 telah menjadi 5.7%.

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2023

Keterangan	Satuan/Unit	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,82	4,48	5,7
Tingkat Kemiskinan	%	13,49	12,33	12,28
Inflasi	%	2,58	7,03	3,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48	4,31	4,2
Rasio Gini	%	0.351	0,364	0,406
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,12	76,95	77,59

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2023

Laju inflasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, namun dari nilai inflasi yang terjadi di kabupaten Klaten masih tergolong pada inflasi ringan, karena masih di bawah nilai 10% per tahun. Hal ini disebabkan oleh harga beberapa komoditas pangan utama terkendali serta peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten tahun 2023 menunjukan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 TPT di Klaten adalah 5,48% turun sebesar 1,17% dibanding tahun 2022 dan turun sebesar 0,11%, di banding Tahun 2023.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Klaten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,406. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yaitu sebesar 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Nilai ini juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih kurang merata.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 mangalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 0,05%. Dan di Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 sebesar 1,16% dibandingkan Tahun 2021, hal ini menunjukan bahwa pada Tahun 2023 upaya pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik.

3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan dilakukan diantaranya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD
4. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pendanaan program pembangunan daerah dengan urutan prioritas sebagai berut:

1. Prioritas Kesatu untuk pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar
2. Prioritas Kedua untuk pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;

3. Prioritas Ketiga dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2023 diarahkan untuk:

a. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023 yang berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan.
b. Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan daerah juga diarahkan pada penyediaan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah antara lain Pajak Daerah dengan asumsi mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Induk Tahun 2023 hal ini berdasarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah. Proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah juga meningkat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b. Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan turun adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Restribusi Daerah dari APBD Murni Tahun 2023. Selain dari Restribusi Daerah pada komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami Penurunan.

c. Pendapatan transfer pusat pada komponen Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan, sedangkan pada komponen Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan. Sementara itu Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan dengan komponen tertinggi pada pendapatan transfer Bagi Hasil dari Dari Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD diarahkan sebagai berikut:

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan komponen asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK lebih dominan peningkatanyan serta adanya penambahan DAU earmark untuk belanja gaji PPPK.

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial utamanya fokus pada RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim, dan bantuan sosial lainya sedangkan untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang utamanya hibah kepada KPU dan Bawaslu sebesar 40% dari total hibah keseluruhan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2024.

c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku).

d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 26 dan beserta aturan pelaksanaannya. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah desa diarahkan untuk sarana dan prasarana pedesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana sesuai diselaraskan dengan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran kebutuhan yang mendesak serta siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social, mengingat Kabupaten Klaten termasuk dalam kawasan siaga rawan bencana.

f. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perecepatan pengurangan tingkat kemiskinan;

g. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;

h. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

i. Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting..

3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada:

a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 Audited BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan;

b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada:

a. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehatihatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terdiri pada penyertaan modal Bank Jateng, Bank Klaten serta Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

3.2.7 Mandatory Spending

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending*. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pada bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah. Pada tahun 2023 belanja daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.817.015.906.174,00 sudah mengakomodir belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp993.440.103.174,00 atau sebesar 35,27% (tga puluh lima koma dua puluh tujuh persen) dari total belanja APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka meningkatkan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 sudah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar Rp277.174.716.485,00 atau sebesar 14,09% (empat belas koma nol sembilan persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebesar Rp1.966.683.781.175,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastuktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) Tahun. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 sudah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp608.590.685.079,00 atau sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima puluh tiga persen) dari total anggaran sebesar Rp2.210.389.131.900,00.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2023 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.672.891.835.275,00 atau 100,88% dari anggaran sebesar Rp2.651.538.742.197,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 10 OPD tersebut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	Persen
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Dinas Kesehatan	127.452.980.607,00	149.805.057.234,00	22.352.076.627,00	117,54
DPUPR	1.511.500.000,00	1.877.861.345,00	366.361.345,00	124,24
Disbudporapar	2.234.545.207,00	2.455.205.278,00	220.660.071,00	109,87
BPKPAD	2.508.263.328.519,00	2.354.192.045.006,00	-154.071.283.513,00	93,86
DKPP	210.956.000,00	230.686.500,00	19.730.500,00	109,35
DKUKMP	6.921.294.864,00	7.797.185.944,00	875.891.080,00	112,66
Diperakim	612.485.000,00	841.975.921,00	229.490.921,00	137,47
Dishub	2.914.292.000,00	2.960.249.500,00	45.957.500,00	101,58
Diskominfo	1.074.400.000,00	1.208.721.500,00	134.321.500,00	112,50
DLH	342.960.000,00	766.969.398,00	424.009.398,00	223,63
Dinas Pendidikan		150.755.877.649,00	150.755.877.649,00	
Jumlah	**2.651.538.742.197,00**	**2.672.891.835.275,00**	**21.353.093.078,00**	**100,81**

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKPAD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan terealisasi sebesar Rp2.843.755.495.798,00 atau 90,51% terdiri dari belanja daerah sebesar Rp2.402.498.363.920,00 dan belanja transfer sebesar Rp739.334.054.579,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2023, disajikan sebagai berikut.

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2023

1. Realisasi Pendapatan	2.672.891.835.275,00	
2. Realisasi Belanja	2.110.170.318.735,00	
3. Realisasi Transfer	733.585.177.063,00	
4. Surplus (Defisit)		-170.863.660.523,00
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	529.593.676.302,00	
b. Pengeluaran	39.300.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		490.293.676.302,00
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		**319.430.015.779,00**

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi Pendapatan

4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	326.447.398.322,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	339.095.872.692,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	12.648.474.370,00

Realisasi PAD Tahun 2023 sebesar 103,87% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	155.000.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	165.852.621.120,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	10.852.621.120,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 107,00% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	16.054.516.821,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	18.784.804.890,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.730.288.069,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 117,01% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	21.741.480.894,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	21.741.480.548,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(346,00)

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,00% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	133.651.400.607,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	132.716.966.134,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(934.434.473,00)

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 99,30% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPh pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.310.851.343.875,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	2.319.295.962.583,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	8.444.618.708,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar 100,36% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.064.148.165.567,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	2.085.460.339.174,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	21.312.173.307,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar 101,03% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	1.671.963.836.567,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	1.693.276.010.174,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	21.312.173.607,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar 101,27% dari anggarannya. Terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	46.821.062.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	52.581.051.641,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.759.989.641,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 112,30% dari anggarannya.

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	1.189.650.925.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	1.209.400.877.465,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	19.749.952.465,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 101,66% dari anggarannya.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	65.510.623.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	63.086.397.870,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.424.225.130,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 96,29% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang jalan, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang pariwisata, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang industri kecil dan menengah, dan bidang pendidikan.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	369.981.226.567,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	368.207.683.196,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	(1.773.543.369,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 99,52% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, dana pelayanan kepariwisataan, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dan dana ketahanan pangan dan pertanian.

4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Fiskal

a) Dianggarkan sebesar	Rp	11.882.483.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	11.882.483.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar 100% dari anggarannya

4.1.1.2.1.3 Dana Desa

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	380.301.846.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	380.301.846.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Desa Sebesar 100% dari anggarannya

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	246.703.178.308,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	233.835.623.409,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	12.867.554.899,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 94,78% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

a)	Dianggarkan Sebesar	Rp	235.191.178.308,00
b)	Realisasi Sebesar	Rp	222.908.195.166,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	12.282.983.142,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 94,77% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 94,77% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

2) Bantuan Keuangan

a)	Dianggarkan Sebesar	Rp	11.512.000.000,00
b)	Realisasi Sebesar	Rp	10.927.428.243,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(584.571.757,00)

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 94,92% dari anggarannya.

4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	14.240.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	14.500.000.000,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	260.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar 101,82% dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	1.200.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	1.200.000.000,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 sedangkan anggaran Rp. 1.200.000.000,00 berupa hibah air minum perdesaan.

2) Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya adalah sebagai berikut:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	13.300.000.000,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	260.000.000,00

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2023 sebesar 101,99% dari anggarannya.

4.1.2 Realisasi Belanja

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.402.498.363.920,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	2.110.170.318.735,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(292.328.045.185,00)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar 87,83% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.048.368.740.309,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	1.813.918.311.416,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(234.450.428.893,00)

Realisasi belanja operasi sebesar 88,55% dari anggarannya, terdiri atas:

1) Belanja Pegawai:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	1.104.348.700.587,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	974.218.788.878,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(130.129.911.709,00)

Realisasi belanja pegawai sebesar 88,22% dari anggarannya.

2) Belanja Barang dan Jasa:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	835.553.082.222,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	734.742.952.742,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(100.810.129.480,00)

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 87,93% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi, ketersediaan layanan (*availibillity payment*), kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

3) Belanja Subsidi:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.000.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	1.907.074.332,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(92.925.668,00)

Realisasi belanja subsidi sebesar 95,35% dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	92.154.157.500,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	89.978.195.464,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.175.962.036,00)

Realisasi belanja hibah sebesar 97,63% dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	14.312.800.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	13.071.300.000,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.241.500.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 91,32% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Individu.

4.1.2.2 Belanja Modal:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	332.747.086.931,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	295.594.876.519,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(37.152.210.412,00)

Realisasi belanja modal sebesar 88,83% dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	5.562.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	5.009.187.370,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(552.812.630,00)

Realisasi belanja modal tanah sebesar 90,06% dari anggarannya

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	115.245.784.370,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	103.690.199.242,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(11.555.585.128,00)

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 89,97% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab fisika nuklir/elektronika, komputer unit, peralatan komputer, alat eksplorasi topografi, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	101.316.519.808,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	81.821.621.133,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(19.494.898.675,00)

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 80,75% dari anggarannya.
Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanda batas, gedung dan bangunan BLUD.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	98.425.735.262,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	93.344.039.187,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.081.696.075,00)

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 94,83% dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam,bangunan air kotor, instalasi pengaman, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	12.197.047.491,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	11.729.829.587,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(467.217.904,00)

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 96,16% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, tanaman, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	21.382.536.680,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	657.130.800,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(20.725.405.880,00)

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 3,07% dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp598.100.000,00, dan Restitusi pajak BPHTB tahun 2022 sebesar Rp59.030.800,00

4.1.3 Belanja Transfer:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	739.334.054.579,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	733.585.177.063,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.748.877.516,00)

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar 99,22% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	21.333.031.019,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	18.057.136.463,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.275.894.556,00)

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 84,64% dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	18.993.765.335,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	15.879.816.030,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.113.949.305,00)

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 83,60% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

2) Bagi Hasil Retribusi Daerah :

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	2.339.265.684,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	2.177.320.433,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(161.945.251,00)

Realisasi bagi hasil retribusi daerah sebesar 93,07% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil retribusi dipergunakan untuk bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa.

4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	718.001.023.560,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	715.528.040.600,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.472.982.960,00)

Realisasi Belanja bantuan keuangan sebesar 99,65% dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	508.532.040.600,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	508.532.040.600,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	209.468.982.960,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	206.996.000.000,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.472.982.960,00)

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 98,81% dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp2.472.982.960,00 terdiri atas setor kembali belanja transfer sebesar Rp287.500.000,00, sebesar Rp2.185.482.960,00 tidak direalisasikan.

4.1.4 Realisasi Pembiayaan

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	529.593.676.302,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	529.593.676.302,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100% dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	529.593.676.302,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	529.593.676.302,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100% dari anggarannya.

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	39.300.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	39.300.000.000,00
	Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	15.000.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	15.000.000.000,00
	Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2024.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	24.300.000.000,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	24.300.000.000,00
	Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100% dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp24.300.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal kepada Bank Jateng sebesar Rp6.000.000.000,00, PT.BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp3.000.000.000,00., PT. Aneka Usaha (Perseroda) sebesar Rp300.000.000,00 dan Perumda Tirta Merapi sebesar Rp15.000.000.000,00.

4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	490.293.676.302,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	490.293.676.302,00
	Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 100% dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a)	Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b)	Realisasi sebesar	Rp	319.430.015.779,00
	Lebih dari anggaran sebesar	Rp	319.430.015.779,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2023

Rincian SiLPA :	2023
1) Kas di Kasda	281.309.763.923,00
2) Kas di BLUD	31.591.336.088,00
3) Kas di Bendahara BOS	1.373.732.440,00
4) Kas di Bendahara FKTP	5.108.449.195,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00
6) Koreksi Kas BOS	13.522.083,00
JUMLAH:	**319.430.015.779,00**

4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
3. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
4. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
5. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Penyajian Laporan Keuangan

5.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.1.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumer daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
4. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk ha katas kekayaan intelektual.
5. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
18. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
19. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
20. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
23. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
26. Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

28. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
31. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
32. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
33. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
34. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
35. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
36. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
   - Aset
   - Kewajiban
   - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   - Pendapatan
   - Belanja
   - Pembiayaan
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
   - Pendapatan-LO
   - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya mapping kode rekening.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. **Ruang Lingkup**

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan**.**

c. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
   a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

   Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

   a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
   b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
   c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
   d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
   e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

   Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara

penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
    Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14) **Belanja Daerah** diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

    Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Belanja Operasi
    b. Belanja Modal
    c. Belanja Tak Terduga

    dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat

diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
    f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
    b. Beban Transfer
    c. Beban Non Operasional
    d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. **Tujuan**
   a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
   b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
2. **Ruang Lingkup**
   a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
   b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. **Definisi**
   a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
   c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
   d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
   g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. **Transfer Keluar dan Beban Transfer**
   a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
   b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**
   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
   b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.
2. **Transfer Keluar dan Beban Transfer**
   a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
   b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.
   Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. ***Pembiayaan (financing)*** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
   - ***Azas Bruto*** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
   - ***Basis Kas*** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
   - ***Kas Daerah*** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
   - ***Kurs*** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

- ***Rekening Kas Umum Daerah*** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- ***Surplus/Defisit*** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas:
   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian

yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

a. ***Kas*** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
b. ***Setara kas*** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Klasifikasi

a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo

kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
   1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
   2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang BelumDisetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daeran (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
   a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.

5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

3. Definisi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

    1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
    2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
    3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

    1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
    Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
    2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

   1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
b. Investasi jangka panjang non permanen:

   1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.
4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
1) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
   a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
   b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
   c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian pinjaman
      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman

lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
   c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan;
   d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
   a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
   c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
    b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
    c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
    c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
    d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
    c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
    d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
    a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
    c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
    d. kualitas macet apabila:
        - Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
        - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
    a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
    b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
    a. 5‰ (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
      2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
      3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

   b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
   c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara,untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
   a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual
   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
2. Metode Periodik
   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
   1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).

2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*). Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

3. Definisi

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c. Masa manfaat adalah:
   1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
   1) Tanah;
   2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya;
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
u. Jalan,Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
   d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
   g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

   Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:
    1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
    2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
    3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
        a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00;
        b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00;
        c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
    4) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan
    5) Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.
    6) Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:Diameter batang minimal 20 cm; dan
    7) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
        a. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
        b. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
        c. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Komponen Biaya:
    a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
    b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
        1. biaya perencanaan;
        2. biaya lelang;
        3. biaya persiapan tempat;
        4. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
        5. biaya pemasangan (instalationcost);
        6. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
        7. biaya konstruksi.
    c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
    d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
    e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
    f. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten),

jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.5 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

5.3.11.7 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

5.3.11.8 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai

wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carryingamount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.9 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5.3.11.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.

4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada asset tetap apabila memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4.

5.3.11.11 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.12 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.

5.3.11.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

5.3.11.14 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.15 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) penambahan;
      2) pelepasan;
      3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
      4) mutasi aset tetap lainnya.
   c. Informasi penyusutan, meliputi:
      1) Nilai penyusutan;
      2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
   d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b. Tanggal efektif penilaian kembali;
   c. Jika ada, nama penilai independen;
   d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
   e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

5.3.11.16 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.17 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
   d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.18 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
   a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
   b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

5.3.11.19 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
   b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.20 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
   d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   a. Asuransi;
   b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
   c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

5.3.11.21 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
   1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
   2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
g. **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
   b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
   c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
   d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:
    a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
    c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
    a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
    b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
    c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        1) Pengurangan pinjaman;
        2) Modifikasi persyaratan utang;
        3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
        4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
        5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;dan
        6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    c. Biaya pinjaman:
        1) Perlakuan biaya pinjaman;
        2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
        3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

5.3.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

5.3.13.2 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Properti investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
    1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
    2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

5.3.13.2 Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
    a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
    b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan

pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

5. Berdasarkan prinsip pengakuan property investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.13.3 Pengukuran Dan Penilaian

1 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan
c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biayabiaya di bawah ini:
    1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali :
    1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
    2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   3. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti

investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
j. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

5.3.13.4 Penyajian

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

1. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
2. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

5.3.13.5 Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

c. Pelepasan;
d. Penyusutan;
e. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain.

6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan halhal sebagai berikut:
   a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. Tanggal efektif penilaian kembali;
   d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
   e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
    a. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
    b. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

5.3.13.6 Alih Guna

1. Alihguna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:

a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

5.3.13.7 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

5.3.13.8 Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya kedalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat asset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

5.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

5.3.14.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4) Aset Tidak Berwujud;
5) Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

f. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

g. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

h. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya

kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

i. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

j. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

k. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

l. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) Software. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

2) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

3) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu dengan adanya hak ini dapat mengandalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

4) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasikan sebagai aset.

5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

m. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

n. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4. Klasifikasi

Klasifikasi Aset Lainnya sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.14.2 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.14.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
   a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilaitercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
   b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan dan/atau penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-. Mulai berlaku sejak peraturan diundangkan.
9. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud dikategorikan sebagai berikut:
   a. Masa Manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
   b. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.

10. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
11. Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
12. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
13. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

5.3.14.4 Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

5.3.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

5.3.15.1 Umum

1. **Tujuan**

   Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. **Ruang Lingkup**

   a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

   b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. **Definisi**

   a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

   b. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya,dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

   c. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

   d. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4. **Klasifikasi**

   Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

5.3.15.2 Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah- bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5.3.15.3 Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

5.3.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
   b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
   c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
   e. Sumber Dana Cadangan; dan
   f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB VI
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 40 Tahun 2021, Bab I, Huruf G, Poin 3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023

Perhitungan APBD	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00
2. Belanja	2.402.498.363.920,00	2.110.170.318.735,00	87,83	1.873.841.539.069,28
3. Transfer	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00
4. Surplus (Defisit) Anggaran	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	34,85	60.074.100.460,72
5. Penerimaan Pembiayaan	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
6. Pengeluaran Pembiayaan	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00
7. Pembiayaan Bersih (Netto)	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28
SiLPA	**0,00**	**319.430.015.779,00**	**0,00**	**529.593.676.302,00**

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2023 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp2.672.891.835.275,00 (100,81%) dari anggarannya sebesar Rp2.651.538.742.197,00, dan naik sebesar Rp85.198.402.340,00 (3,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.587.693.432.935,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	103,87	358.048.103.989,00
2. Pendapatan Transfer	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	100,37	2.214.576.328.946,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83	15.069.000.000,00
Jumlah	**2.651.538.742.197,00**	**2.672.891.835.275,00**	**100,81**	**2.587.693.432.935,00**

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp339.095.872.692,00 (103,87%) dari anggaran sebesar Rp326.447.398.322,00 dan turun sebesar Rp18.952.231.297,00 (5,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp358.048.103.989,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	107,00	146.179.152.569,00
2. Retribusi Daerah	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	117,01	17.152.918.048,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	100,00	18.641.433.357,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	99,30	176.074.600.015,00
Jumlah	**326.447.398.322,00**	**339.095.872.692,00**	**103,87**	**358.048.103.989,00**

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2023 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24). Dalam penganggaran target pajak daerah pada tahun 2022 dengan mendasarkan pada potensi pajak PBB pada tahun berjalan dengan berdasarkan ketetapan PBB yang ada, kemudian dari potensi PBB yang belum tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memperkirakan potensi piutang pajak PBB diproyeksikan tertagih sebesar 10 persen dari piutang PBB yang dianggap lancar.

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2023

Uraian	Perda		Pengenaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Pengenaan
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	17	2011	0,100% & 0,20%	NJOP
10. BPHTB	9	2010	5%	NJOP
11. Air Tanah	8	2010	20%	Nilai Perolehan Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp165.852.621.120,00 (107%) dari anggarannya sebesar Rp155.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp19.673.468.551,00 (13,46%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp146.179.152.569,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	1.250.000.000,00	1.360.479.499,00	108,84	1.302.383.278,00
2. Restoran	10.500.000.000,00	14.510.909.854,00	138,20	9.933.095.026,00
3. Hiburan	1.150.000.000,00	1.079.516.039,00	93,87	1.030.498.417,00
4. Reklame	4.200.000.000,00	4.394.210.917,00	104,62	4.266.670.723,00
5. Pajak Penerangan Jalan	54.000.000.000,00	57.596.454.790,00	106,66	54.239.571.235,00
6. Parkir	1.300.000.000,00	1.565.885.426,00	120,45	1.151.697.520,00
7. Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.141.007.300,00	101,32	3.086.985.100,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	913.434.000,00	91,34	1.004.754.750,00
9. Pajak Bumi & Bangunan (PBBP2)	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	102,53	33.416.750.099,00
10. Pajak BPHTB	38.500.000.000,00	40.279.425.821,00	104,62	36.746.746.421,00
Jumlah	**155.000.000.000,00**	**165.852.621.120,00**	**107,00**	**146.179.152.569,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp1.360.479.499,00 (108,84%) dari anggarannya sebesar Rp1.250.000.000,00 dan naik sebesar Rp58.096.221,00 (4,46%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.302.383.278,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.177.765.048,00	117,78	1.136.795.371,00
b. Pajak Motel	250.000.000,00	182.714.451,00	73,09	165.587.907,00
Jumlah	**1.250.000.000,00**	**1.360.479.499,00**	**108,84**	**1.302.383.278,00**

Kenaikan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp58.096.221,00 dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Klaten.

2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp14.510.909.854,00 (138,20%) dari anggarannya sebesar Rp10.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp4.577.814.828,00 (46,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.933.095.026,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	7.091.155.252,00	283,65	4.418.592.021,00
b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	7.419.754.602,00	92,75	5.514.503.005,00
Jumlah	**10.500.000.000,00**	**14.510.909.854,00**	**138,20**	**9.933.095.026,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

a. Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 naik sebesar Rp2.672.563.231,00 (60,48%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 dikontribusi oleh meningkatnya pengunjung rumah makan.
b. Realisasi Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya TA 2023 naik sebesar Rp1.905.251.597,00 (34,55%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.514.503.005,00, karena bertambahnya wajib pajak baru di Kabupaten Klaten.

3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp1.079.516.039,00 (93,87%) dari anggarannya sebesar Rp1.150.000.000,00 dan naik sebesar Rp49.017.622,00 (4,76%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.030.498.417,00, dikarenakan adanya peningkatan pengunjung di Taman Wisata Candi (TWC), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	505.000.000,00	279.572.356,00	55,36	346.457.502,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	310.000.000,00	253.111.183,00	81,65	278.295.615,00
c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	115.000.000,00	54.482.500,00	47,38	49.409.300,00
d. Pertandingan Olahraga	220.000.000,00	492.350.000,00	223,80	356.336.000,00
Jumlah	**1.150.000.000,00**	**1.079.516.039,00**	**93,87**	**1.030.498.417,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:

a. Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2023 sebesar Rp279.572.356,00 (55,36%) dari anggarannya sebesar Rp505.000.000,00 berkurang sebesar Rp66.885.146,00 (19,31%) dibanding realisasi TA 2022 Rp346.457.502,00.
b. Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2023 sebesar Rp253.111.183,00 (81,65%) dari anggarannya sebesar Rp310.000.000,00 turun sebesar Rp25.184.432,00 (9,05%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp278.295.615,00.

c. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2023 sebesar Rp54.482.500,00 (47,38%) dari anggaran sebesar Rp115.000.000,00 naik sebesar Rp5.073.200,00 (10,27%) dibanding Realisasi TA 2022 sebesar Rp49.409.300,00.
d. Realisasi Pajak Pertandingan Olahraga TA 2023 sebesar Rp492.350.000,00 (223,80%) dari anggarannya sebesar Rp220.000.000,00 naik sebesar Rp136.014.000,00 (38,17%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp356.336.000,00.

4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp4.394.210.917,00 (104,62%) dari anggarannya sebesar Rp4.200.000.000,00 dan naik sebesar Rp127.540.194,00 (2,99%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.266.670.723,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.400.000.000,00	1.733.827.753,00	72,24	1.850.425.653,00
b. Reklame Kain	1.800.000.000,00	2.660.383.164,00	147,80	2.416.245.070,00
Jumlah	**4.200.000.000,00**	**4.394.210.917,00**	**104,62**	**4.266.670.723,00**

Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pertumbuhna relatif sama dan pemasangan reklame diluar reklame politik.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2023 sebesar Rp57.596.454.790,00 (106,66%) dari anggarannya sebesar Rp54.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.356.883.555,00 (6,19%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp54.239.571.235,00, dikarenakan tingkat penggunaan listrik di kalangan masyarakat meningkat.

Pemungutan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPJ Pemkab Klaten.

6. Pajak Parkir

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp1.565.885.426,00 (120,45%) dari anggarannya sebesar Rp1.300.000.000,00 yang terdiri dari 89 Wajib Pajak dan naik sebesar Rp414.187.906,00 (35,96%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.151.697.520,00, dikarenakan peningkatan pengunjung di Taman Wisata Candi (TWC).

7. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp3.141.007.300,00 (101,32%) dari anggarannya sebesar Rp3.100.000.000,00 terdiri dari 118 Wajib Pajak dari berbagai macam nama obyek pajak diantaranya beberapa perusahaan dan hotel. Naik sebesar Rp54.022.200,00 (1,75%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.086.985.100,00 dikarenakan pertumbuhan relatif sama.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp913.434.000,00 (91,25%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp91.320.750,00 (9,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.004.754.750,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	0,00	970.000,00	0,00	1.104.500,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	912.464.000,00	91,25	1.003.528.000,00
c. Pajak Mineral bukan Logam	0,00	0,00	0,00	122.250,00
Jumlah	**1.000.000.000,00**	**913.434.000,00**	**91,34**	**1.004.754.750,00**

Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil mengalami kenaikan dikarenakan penambangan IUP sudah banyak yang habis masa ijinnya.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2023 sebesar Rp41.011.297.474,00 (102,53%) dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp7.594.547.375,00 (22,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp33.416.750.099,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBBP2	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	102,53	33.416.750.099,00
Jumlah	**40.000.000.000,00**	**41.011.297.474,00**	**102,53**	**33.416.750.099,00**

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2023 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp40.279.425.821,00 (104,62%) dari anggarannya sebesar Rp38.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.532.679.400,00 (9,61%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp36.746.746.421,00.

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya adanya kenaikan NJOP PBB dan bertambahnya transaksi peralihan hak atha katas dan bangunan di Kabupaten Klaten.

A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tiga Perda Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 2 Tahun 2021), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 2 Tahun 2020), dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 1 Tahun 2021).

Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	8.652.267.650,00	9.457.790.299,00	109,31	9.100.404.920,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.152.249.171,00	7.867.424.109,00	127,88	6.663.556.016,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.250.000.000,00	1.459.590.482,00	116,77	1.388.957.112,00
Jumlah		**16.054.516.821,00**	**18.784.804.890,00**	**117,01**	**17.152.918.048,00**

Penjelasan atas masing-masing jenis Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	242.080.000,00	393.676.500,00	162,62	408.122.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	590.574.400,00	1.025.084.398,00	173,57	928.140.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	9.100.001,00	157,30	7.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.768.478.000,00	1.907.212.000,00	107,84	1.498.378.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.772.741.250,00	3.764.697.900,00	99,79	3.789.182.060,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.112.769.000,00	1.002.783.500,00	90,12	1.116.451.860,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.600.000,00	84.600.000,00	174,07	120.900.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	132.564.500,00	132,56	123.730.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.011.240.000,00	1.138.071.500,00	112,54	1.107.701.000,00
Jumlah		**8.652.267.650,00**	**9.457.790.299,00**	**109,31**	**9.100.404.920,00**

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp393.676.500,00 (162,62%) dari anggarannya sebesar Rp242.080.000,00, turun sebesar Rp14.445.500,00 (3,54%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp408.122.000,00.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp1.025.084.398,00 (173,57%) dari anggarannya sebesar Rp590.574.400,00, dan naik sebesar Rp96.944.398,00 (10,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp928.140.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.

1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TA 2023 sebesar Rp9.100.001,00 atau (157,30%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan naik sebesar Rp1.300.001,00 (16,67%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.800.000,00.

1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 adalah sebesar Rp1.907.212.000,00 (107,84%) dari anggaran sebesar Rp1.768.478.000,00 dan naik sebesar Rp408.834.000,00 (27,29%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.498.378.000,00.

1.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp3.764.697.900,00 (99,79%) dari anggaran sebesar Rp3.772.741.250,00 dan turun sebesar Rp24.484.160,00 (0,65%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.789.182.060,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan karena banyak pasar yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Desa.

1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 adalah sebesar Rp1.002.783.500,00 (90,12%) dari anggaran sebesar Rp1.112.769.000,00 dan turun sebesar Rp113.668.360,00 (10,18%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.116.451.860,00. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

1.7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi

penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2023 sebesar Rp84.600.000,00 (174,07%) dari anggaran sebesar Rp48.600.000,00 dan turun sebesar Rp36.300.000,00 (30,02%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp120.900.000,00. Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus mengalami Penurunan karena adanya pengurangan armada di tahun 2023.

1.8 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp132.564.500,00 (132,56%) dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan naik sebesar Rp8.834.500,00 (7,14%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp123.730.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya pengajuan tera/tera ulang.

1.9 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp1.138.071.500,00 (112,54%) dari anggaran sebesar Rp1.011.240.000,00, dan naik sebesar Rp30.370.500,00 (2,74%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.107.701.000,00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 6A.14 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	991.143.750,00	1.863.904.065,00	188,06	1.221.288.778,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.784.139.214,00	3.631.633.544,00	130,44	2.976.975.238,00
3	Retribusi Terminal	33.045.000,00	50.254.000,00	152,08	47.128.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	16.800.000,00	10.175.000,00	60,57	7.625.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.756.000,00	44.968.000,00	107,69	48.180.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2.141.365.207,00	2.108.299.000,00	98,46	2.186.293.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	144.000.000,00	158.190.500,00	109,85	176.066.000,00
Jumlah		**6.152.249.171,00**	**7.867.424.109,00**	**127,88**	**6.663.556.016,00**

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.863.904.065 (188,06%) dari anggaran sebesar Rp991.143.750,00 dan naik sebesar Rp642.615.287,00 (52,62%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.221.288.778,00.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 adalah sebesar Rp3.631.633.544,00 (130,44%) dari anggaran sebesar Rp2.784.139.214,00 dan naik sebesar Rp654.658.306,00 (21,99%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.976.975.238,00.

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami kenaikan dikarenakan Pemulihan perekonomian di tahun 2023 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

2.3 Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2023 adalah sebesar Rp50.254.000,00 (152,08%) dari anggaran sebesar Rp33.045.000,00 dan naik sebesar Rp3.126.000,00 (6,63%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp47.128.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami kenaikan dari tahun 2022 dikarenakan masyarakat yang menggunakan transportasi umum dari tahun ke tahun mengalami pertambahan karena mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum.

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 sebesar Rp10.175.000,00 (60,57%) dari anggaran sebesar Rp16.800.000,00 dan naik sebesar Rp2.550.000,00 (33,44%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.625.000,00.

Realisasi untuk tahun 2023 mengalami kenaikan karena mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi meningkat.

2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 sebesar Rp44.968.000,00 (107,69%) dari anggaran sebesar Rp41.756.000,00 dan turun sebesar Rp3.212.000,00 (6,67%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp48.180.000,00.

2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2023 sebesar Rp2.108.299.000,00 (98,46%) dari anggaran sebesar Rp2.141.365.207,00 dan turun sebesar Rp77.994.000,00 (3,57%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.186.293.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Obyek Wisata Mata Air Cokro	893.017.207,00	1.014.179.000,00	113,57	1.478.943.000,00
b. Obyek Wisata Makam Pandanaran	239.580.000,00	285.800.000,00	119,29	210.580.000,00
c. Obyek Wisata Jombor Permai-Sidoguro	484.000.000,00	318.025.000,00	65,71	156.015.000,00
d. Obyek Wisata Pemandian Jolotundo	484.000.000,00	453.980.000,00	93,80	337.285.000,00
e. Obyek Wisata Lain-Lain	40.768.000,00	36.315.000,00	89,08	3.470.000,00
Jumlah	**2.141.365.207,00**	**2.108.299.000,00**	**98,46**	**2.186.293.000,00**

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya wisatawan yang berkunjung di Objek Wisata Pemerintah Kabupaten Klaten.

2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp158.190.500,00 (109,85%) dari anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dan turun sebesar Rp17.875.500,00 (10,15%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp176.066.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.16 Anggaran dan Realisasi
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Usaha Benih Tanaman	84.000.000,00	98.163.000,00	116,86	118.086.000,00
b. Retribusi Usaha Benih Ikan	60.000.000,00	60.027.500,00	100,05	57.980.000,00
Jumlah	**144.000.000,00**	**158.190.500,00**	**109,85**	**176.066.000,00**

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Srinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Jasa Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Peubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2023 adalah sebesar Rp1.459.590.482,00 (116,77%) dari anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 dan naik sebesar Rp70.633.370,00 (5,09%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.388.957.112,00.

Retribusi IMB pada tahun 2021 hanya diberlakukan mulai Bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember tidak dikenakan tarif Retribusi IMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan. Sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut tentang PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja yang baru.

A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Air Minum Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp21.741.480.548,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp21.741.480.895,00, dan naik sebesar Rp3.100.047.191,00 (16,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp18.641.433.357,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perumda Air Minum Tirta Merapi	3.844.624.046,00	3.844.624.046,00	100,00	3.572.062.128,00
2	Bank Klaten	4.312.099.623,00	4.312.099.650,00	100,00	3.369.181.500,00
3	Bank Jateng	13.015.491.462,00	13.015.491.084,00	100,00	11.341.811.839,00
4	Aneka Usaha	348.841.525,00	348.841.529,00	100,00	336.312.825,00
5	PT BPR BKK TULUNG	220.424.239,00	220.424.239,00	100,00	22.065.065,00
Jumlah		**21.741.480.895,00**	**21.741.480.548,00**	**100,00**	**18.641.433.357,00**

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, Pasal 47 ayat (1) ditetapkan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk deviden 55%, cadangan 20%, tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dengan demikian bagian laba Perumda Air Minum Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.844.624.046,00 (100,00%) dari anggaran sebesar Rp3.844.624.046,00 dan naik sebesar Rp272.561.918,00 (7,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.572.062.128,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.312.099.623,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp4.312.099.623,00 dan naik sebesar Rp942.918.150,00 (27,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.369.181.500,00.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan RUPS tersebut PT Bank Jateng menyetorkan deviden sebesar Rp13.015.491.462,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp13.015.491.462,00 naik sebesar Rp1.673.679.245,00 (14,76%) dibandingan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.341.811.839,00.
4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp348.841.529,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp348.841.525,00 naik sebesar Rp12.528.704,00 (3,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.336.312.825,00.
5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Tulung Tahun 2022 sesuai dengan hasil notulen perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian dividen PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) tutup buku tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Februari 2022 pukul 09.00 WIB, diputuskan bahwa alokasi laba setelah pajak untuk deviden 57,5%, cadangan umum 10%, cadangan tujuan 7,5%, *corporate social responsibility* 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan

pegawai 10%. Dari alokasi deviden sebesar 57,5%, yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp220.424.239,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp220.424.239,00 naik sebesar Rp198.359.174,00 (898,97%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp22.065.065,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 secara umum meningkat untuk BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten hal tersebut dikarenakan pada TA 2023 sudah tidak diberlakukannya kebijakan atas pemotongan setoran laba BUMD dikarenakan pandemic Covid-19.

A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp132.716.966.134,00 (99,30%) dari anggarannya sebesar Rp133.651.400.607,00 dan turun sebesar Rp43.357.633.881,00 (24,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp176.074.600.015,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	130.500.000,00	549.635.762,00	421,18	1.669.989.786,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	310.000.000,00	474.055.920,00	152,92	215.420.244,00
3	Hasil Kerjasama Daerah	0,00	195.993.278,00	0,00	221.176.180,00
4	Jasa Giro	6.000.000.000,00	8.291.014.118,00	138,18	9.068.746.262,00
5	Pendapatan Bunga	0,00	116.651.197,00	0,00	0,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.004.858,00	0,00	3.303.684,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	201.162.740,00	0,00	1.101.605.046,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	356.908.901,00	0,00	249.363.915,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.822.601.626,00	0,00	515.502.908,00
10	Pendapatan BLUD	127.210.900.607,00	120.705.937.734,00	94,89	163.029.491.990,00
Jumlah		**133.651.400.607,00**	**132.716.966.134,00**	**99,30**	**176.074.600.015,00**

Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

   Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp549.635.762,00 (421,18%) dari Anggaran sebesar Rp130.500.000,00 turun sebesar Rp1.120.354.024,00 (67,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.669.989.786,00. Realisasi atas Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp35.726.763,00 dan Hasil Penjualan aset Lainnya sebesar Rp513.908.999,00.

2. **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

   Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp474.055.920,00 (152,92%) dari Anggaran sebesar Rp310.000.000,00 naik sebesar Rp258.635.676,00 (120,06%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp215.420.244,00. Realisasi dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri Hasil dari Bangun Guna Serah Sewa Rusunawa dan Sewa Gedung GRHA Bung Karno yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 6A.19 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
1	25-09-2023	0137/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	20.000.000
2	25-09-2023	0138/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	40.000.000
3	25-09-2023	0139/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	56.000.000
4	25-09-2023	0140/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	76.000.000
5	25-09-2023	0141/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	92.000.000
6	25-09-2023	0142/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	112.000.000
7	25-09-2023	0143/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	132.000.000
8	25-09-2023	0144/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	152.000.000
9	30-11-2023	0172/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	156.000.000
10	30-11-2023	0173/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	6.400.000,00	162.400.000
11	30-11-2023	0174/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	166.400.000
12	19-12-2023	0189/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	186.400.000
13	19-12-2023	0190/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	206.400.000
14	19-12-2023	0191/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	16.000.000,00	222.400.000
15	19-12-2023	0192/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	242.400.000
16	19-12-2023	0193/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	246.400.000
17	19-12-2023	0194/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	4.000.000,00	250.400.000
18	21-12-2023	0188/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung GRHA BUNG KARNO)	0,00	20.000.000,00	270.400.000
19	22-12-2023	0199/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil Sewa BMD (Parkir Gedung RSPD Pandanaran dan Gedu	0,00	5.150.000,00	275.550.000
21	30-01-2023	0010/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	18.943.842,00	18.943.842
22	24-02-2023	0026/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	16.970.296,00	35.914.138
23	17-03-2023	0027/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	17.842.522,00	53.756.660
24	18-04-2023	0049/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	10.185.942,00	63.942.602
25	29-05-2023	0064/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	18.305.772,00	82.248.374
26	27-06-2023	0098/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	15.483.598,00	97.731.972
27	31-07-2023	0114/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)v	0,00	13.783.114,00	111.515.086
28	30-08-2023	0121/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	15.794.804,00	127.309.890
29	27-09-2023	0151/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	14.082.388,00	141.392.278
30	31-10-2023	0164/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	17.215.766,00	158.608.044
31	29-11-2023	0171/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	19.590.364,00	178.198.408
32	21-12-2023	0198/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	20.173.012,00	198.371.420
33	28-12-2023	0200/PENERIMAAN/DISPERAKIM/2023	Diterima Hasil dari Bangun Guna Serah (Sewa Rusunawa)	0,00	134.500,00	198.505.920

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerjasama Daerah Pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp195.993.278,00 meskipun tidak dianggarkan di TA 2023 turun sebesar Rp25.182.902,00 (11,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp221.176.180,00.

Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

4. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp8.291.014.118,00 (138,18%) dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp777.732.144,00 (8,58%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.068.746.262,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Jasa Giro Pada Kasda	6.000.000.000,00	8.098.394.103,00	134,97	8.956.579.363,00
b	Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	192.620.015,00	0,00	112.166.899,00
Jumlah		**6.000.000.000,00**	**8.291.014.118,00**	**138,18**	**9.068.746.262,00**

5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga TA 2023 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp116.651.197 dan tidak ada realisasi di TA 2022.

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp3.004.858,00 naik sebesar Rp298.826,00 (9,05%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp3.303.684,00. Realisasi dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

7. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp201.162.740,00 dan turun sebesar Rp900.442.306,00 (81,74%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.101.605.046,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023

Uraian		TA 2023	TA 2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pendidikan	2.556.106,00	0,00
2	Bidang Kesehatan	3.838.660,00	31.839.708,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	192.125.400,00	956.072.833,00
4	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	113.692.505,00
5	Bidang Keuangan	92.574,00	0,00
6	Bidang Lingkungan Hidup	2.550.000,00	0,00
Jumlah		**201.162.740,00**	**1.101.605.046,00**

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2023 sebesar Rp356.908.901,00, dan naik sebesar Rp107.544.986,00 (43,13%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp249.363.915,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berupa pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

9. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp1.822.601.626,00, dan naik sebesar Rp1.307.098.718,00 (253,56%) dari TA 2022 sebesar Rp515.502.908,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp120.705.937.734,00 (94,89%) dari anggarannya sebesar Rp127.210.900.607,00 dan turun sebesar Rp42.323.554.256,00 (25,96%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp163.029.491.990,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.319.295.962.583,00 (100,37%) dari anggaran sebesar Rp2.310.851.343.875,00 dan naik sebesar Rp104.719.633.637,00 (4,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.214.576.328.946,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023

Pendapatan Transfer		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	101,03	1.982.237.746.675,00
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	94,78	232.338.582.271,00
Jumlah		**2.310.851.343.875,00**	**2.319.295.962.583,00**	**100,37**	**2.214.576.328.946,00**

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp2.085.460.339.174,00 (101,03%) dari anggaran sebesar Rp2.064.148.165.567,00 dan naik sebesar Rp103.222.592.499,00 (5,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.982.237.746.675,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.671.963.836.567,00	1.693.276.010.174,00	101,27	1.591.689.816.675,00
2	Dana Insentif Fisikal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	100,00	11.209.129.000,00
3	Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	100,00	379.338.801.000,00
Jumlah		**2.064.148.165.567,00**	**2.085.460.339.174,00**	**101,03**	**1.982.237.746.675,00**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fisikal dan Dana Desa.

A.6.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.693.276.010.174,00 (101,27%) dari anggaran sebesar Rp1.671.963.836.567,00 dan naik sebesar Rp101.586.193.499,00 (6,38%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.591.689.816.675,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	46.821.062.000,00	52.581.051.641,00	112,30	48.519.870.872,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.189.650.925.000,00	1.209.400.877.465,00	101,66	1.144.695.548.127,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.510.623.000,00	63.086.397.870,00	96,30	63.675.427.513,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	369.981.226.567,00	368.207.683.198,00	99,52	334.798.970.163,00
Jumlah		**1.671.963.836.567,00**	**1.693.276.010.174,00**	**101,27**	**1.591.689.816.675,00**

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 sebesar Rp52.581.051.641,00 (112,30%) dari anggaran sebesar Rp46.821.062.000,00 dan naik sebesar Rp4.061.180.769,00 (8,37%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp48.519.870.872,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 129 Tahun 2022 dan KMK Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023

1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.803.909.000,00	2.872.194.123,00	159,22	6.800.979.825,00
2	DBH PPh Pasal 21	15.487.973.000,00	17.473.326.138,00	112,82	16.466.300.137,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.919.983.000,00	2.174.717.623,00	113,27	3.318.410.797,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.999.898.000,00	28.167.993.893,00	108,34	18.856.467.859,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	21.649.000,00	23.720.996,00	109,57	68.880.379,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	133.601.000,00	155.597.345,00	116,46	394.616.382,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.570.000,00	14.571.460,00	170,03	198.124.609,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	337.000,00	553.491,00	164,24	325.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	532.653,00	0,00	1.263.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	212.008.000,00	252.956.708,00	119,31	456.191.884,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
Jumlah		**46.821.062.000,00**	**52.581.051.641,00**	**112,30**	**48.519.870.872,00**

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), membawa konsekuensi Dana Alokasi Umum dari yang semula hanya bersifat *block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*, hal ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa "Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya".

DAU yang bersifat specific grant penggunaannya diatur dan ditentukan antara lain untuk:

a. Pendanaan Kelurahan
   Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan Dana untuk Kelurahan sebesar Rp2.000.000.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.983.530.346,00 (99,18%)
b. Pendanaan di Bidang Pekerjaan Umum
   Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp8.642.101.000,00 dan terealisasi 100%
c. Pendanaan di Bidang Pendidikan
   Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp96.468.696.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.124.239.107,00 (89,28%)
d. Pendanaan untuk Penggajian Formasi PPPK
   Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menganggarkan sebesar Rp61.236.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.999.346.152,00 (16,33%)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 sebesar Rp1.209.400.877.465,00 (101,66%) dari anggarannya Rp1.189.650.925.000,00, dan naik sebesar Rp64.705.329.338,00 (5,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.144.695.548.127,00.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2023 sebesar Rp63.086.397.870,00 (96,30%) dari anggaran Rp65.510.623.000,00, turun sebesar Rp589.029.643,00 (0,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp63.675.427.513,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	300.913.000,00	290.302.600,00	96,47	184.791.700,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.845.152.000,00	4.775.953.100,00	98,57	2.266.985.875,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.732.626.000,00	9.124.663.920,00	93,75	5.415.456.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.475.032.451,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	20.173.256.000,00	19.953.920.000,00	98,91	1.258.152.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.010.525.000,00	958.000.000,00	94,80	3.785.681.948,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.215.923.000,00	1.147.213.750,00	94,35	1.261.168.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	462.627.824,00
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.095.178.000,00	1.085.500.000,00	99,12	990.555.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	8.605.326.005,00
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.027.041.000,00	5.391.027.000,00	89,45	5.040.417.250,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			0,00	6.091.742.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.259.749.000,00	8.853.524.000,00	95,61	14.185.632.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	944.149.000,00	899.242.000,00	95,24	2.465.690.600,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.201.990.000,00	4.196.377.000,00	99,87	4.184.500.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.097.579.700,00
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.108.434.000,00	1.092.822.000,00	98,59	2.568.088.960,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.595.687.000,00	5.317.852.500,00	95,03	0,00
Jumlah		**65.510.623.000,00**	**63.086.397.870,00**	**96,30**	**63.675.427.513,00**

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2023 sebesar Rp368.207.683.198,00 (99,52%) dari anggaran Rp369.981.226.567,00, dan naik sebesar Rp33.408.713.035,00 (9,98%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp334.798.970.163,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.930.676.766,00	125.680.565.649,00	99,80	125.434.683.097,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.481.528.858,00	5.507.500.000,00	84,97	4.361.400.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.302.221.000,00	169.302.220.000,00	100,00	158.399.398.752,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.953.750.000,00	6.676.800.000,00	83,95	6.222.972.500,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.787.000.000,00	17.811.312.000,00	100,14	18.314.379.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.756.500.000,00	1.756.500.000,00	100,00	1.219.300.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.477.611.394,00	27.943.252.000,00	101,69	9.052.485.538,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	0,00	445.836.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	346.975.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.229.339.135,00	8.229.339.135,00	100,00	8.081.926.676,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	299.991.100,00	299.991.100,00	100,00	1.522.754.900,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.399.180.650,00	1.399.180.650,00	100,00	766.412.900,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	245.153.500,00	245.153.500,00	100,00	208.506.000,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	762.191.000,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	931.401.664,00	931.401.664,00	100,00	421.939.800,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.662.276.500,00	1.662.276.500,00	100,00	0,00
Jumlah		**369.981.226.567,00**	**368.207.683.198,00**	**99,52**	**334.798.970.163,00**

A.6.1.2.1.2 Dana Insentif Fisikal

Realisasi Dana Insentif Fisikal TA 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp11.882.483.000,00. Realisasi Dana Insentif Fisikal pada Tahun 2023 terinci pada Tabel berikut:

Tabel 6A.28 Anggaran dan Realiasasi Dana Insentif Fisikal TA 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENURUNAN STUNTING	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**100,00**
1. Peningkatan keterampilan ibu dalam penyajian asupan makanan bergizi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	**8.500.000.000,00**	**8.500.000.000,00**	**100,00**
1. Pelatihan dan Pemberian Alat Kerja	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
2. Penyediaan jamban yang layak	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
PENINGKATAN INVESTASI	**1.482.483.000,00**	**1.482.483.000,00**	**100,00**
1. DED Kawasan Pendukung Rowo Jombor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2. Expo Pengadaan Barang Jasa (Katalog Lokal)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
3. Klaten Expo	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
4. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
5. Olahraga Wisatas (Soprt Tourism)	382.483.000,00	382.483.000,00	100,00
6. Pembunuhan ide kreatif kawula muda dalam promosi wisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
PENGENDALIAN INFLASI	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**100,00**
1. Fasilitasi Pelaporan dan Evaluasi TKDN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2. Optimalisasi Pasar Gedhe	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
3. Pasar Murah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
4. Pelaporan dan Evaluasi TKDN	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
Jumlah	**11.882.483.000,00**	**11.882.483.000,00**	**100,00**

A.6.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp380.301.846.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp380.301.846.000,00 pada rekening Dana Desa. Adapun realisasi Dana Desa terdapat pada **Lampiran 1** Realisasi Dana Desa.

A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp233.835.623.409,00 (94,78%) dari anggaran sebesar Rp246.703.178.308,00 dan naik sebesar Rp1.497.041.138,00 (0,64%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp232.338.582.271,00.

Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023

Pendapatan Transfer Antar Daerah		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	94,78	218.303.369.271,00
2	Bantuan Keuangan	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	94,92	14.035.213.000,00
Jumlah		**246.703.178.308,00**	**233.835.623.409,00**	**94,78**	**232.338.582.271,00**

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp222.908.195.166,00 (94,78%) dari anggaran sebesar Rp235.191.178.308,00, dan naik sebesar Rp4.604.825.895,00 (2,11%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp218.303.369.271,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	56.518.082.892,00	61.961.787.975,00	109,63	61.802.851.816,00
2	BBNKB	30.132.659.103,00	30.384.672.653,00	100,84	30.706.700.966,00
3	PBBKB	68.734.230.999,00	65.070.543.496,00	94,67	58.340.832.206,00
4	PPPAP	279.029.343,00	277.252.286,00	99,36	304.266.948,00
5	P Rokok	79.527.175.971,00	65.213.938.756,00	82,00	67.148.717.335,00
Jumlah		**235.191.178.308,00**	**222.908.195.166,00**	**94,78**	**218.303.369.271,00**

Dari realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp222.908.195.166,00 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp235.191.178.308,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : 25/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 masih terdapat kurang bayar sebesar Rp3.066.129.116,00.

A.6.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp11.512.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.927.428.243,00 (94,92%) atau turun sebesar Rp3.107.784.757,00 (22,14%) dibanding

realisasi TA 2022 sebesar Rp14.035.213.000,00. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disalurkan untuk kegiatan TMDD Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp682.000.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi Peningkatan Jalan Surowono Jatirajeg sebesar Rp1.519.867.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Renov GOR Gelarsena Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Tahap I 30%) sebesar Rp587.418.600,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD N 1 Bumiharjo Kec. Kemalang dan rehab Ruang Kelas Rusak SD N 2 Ceporan Kec. gantiwarno) sebesar Rp106.537.243,00, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Rehab ruang Kelas Rusak SD N 3 Pundungsari Kec. Trucuk) sebesar Rp106.449.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota (Peningkatan Jalan Surowono-Jatirajeg kec. Karangnongko-kemalang tahap II) sebesar Rp6.079.470.400,00, Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Jawa Tengah (Peningkatan jalan RW 01 dan RW 04 Kelurahan) sebesar Rp475.042.000,00, Bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Klaten (Kegiatan renov GOR Gelarsena Desa Jonggrangan Kec. Klaten Utara Tahap II) sebesar Rp1.370.643.400,00.

A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp14.500.000.000,00 (101,83%) dari anggaran sebesar Rp14.240.000.000,00 dan turun sebesar Rp569.000.000,00 (3,78%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp15.069.000.000,00.

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	794.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	13.040.000.000,00	13.300.000.000,00	101,99	14.275.000.000,00
Jumlah		**14.240.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**101,83**	**15.069.000.000,00**

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan TA 2023. Sedangkan unuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama dan PT. Sari Husada.

A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp2.843.755.495.798,00 (90,51%) dari anggaran sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan naik sebesar Rp316.136.163.323,72 (12,51%)

dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.527.619.332.474,28 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	2.048.368.740.309,00	1.813.918.311.416,00	88,55	1.619.377.441.227,28
2. Belanja Modal (BM)	332.747.086.931,00	295.594.876.519,00	88,83	246.670.020.742,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07	7.794.077.100,00
4. Belanja Transfer (BT)	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22	653.777.793.405,00
Jumlah	**3.141.832.418.499,00**	**2.843.755.495.798,00**	**90,51**	**2.527.619.332.474,28**

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.813.918.311.416 (88,55%) dari anggaran sebesar Rp2.048.368.740.309,00 dan naik sebesar Rp194.540.870.188,72 (12,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.619.377.411.227,28 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	88,22	965.541.425.166,00
2. Belanja Barang dan Jasa	835.553.082.222,00	734.742.952.742,00	87,93	583.404.693.292,28
3. Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	95,35	1.795.750.000,00
4. Belanja Hibah	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	97,64	57.905.772.769,00
5. Belanja Bantuan Sosial	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33	10.729.800.000,00
Jumlah	**2.048.368.740.309,00**	**1.813.918.311.416,00**	**88,55**	**1.619.377.441.227,28**

A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp974.218.788.878,00 atau (88,22%) dari anggaran sebesar Rp1.104.348.700.587,00 dan naik sebesar Rp8.677.363.712,00 (0,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp965.541.425.166,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	728.300.579.010,00	638.798.353.448,00	87,71	626.287.118.465,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	149.999.976.100,00	118.818.943.328,00	79,21	119.608.691.951,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.411.748.789,00	182.934.823.585,00	95,57	186.818.956.071,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.801.310.000,00	30.472.726.750,00	98,93	29.676.335.410,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.491.545.523,00	1.075.997.099,00	72,14	1.099.801.917,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	988.284.400,00	99,51	993.120.000,00
7. Belanja Pegawai BLUD	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	83,65	1.057.401.352,00
Jumlah	**1.104.348.700.587,00**	**974.218.788.878,00**	**88,22**	**965.541.425.166,00**

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2023 adalah sebesar Rp638.798.353.448,00 (87,71%) dari anggaran sebesar Rp728.300.579.010,00 dan naik sebesar Rp12.511.234.983,00 (2,00%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp626.287.118.465,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	541.213.730.241,00	491.653.536.770,00	90,84	480.443.544.494,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.712.009.195,00	43.746.381.762,00	86,26	41.685.427.372,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.307.743.638,00	4.813.779.057,00	90,69	5.267.505.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.342.199.750,00	29.048.550.000,00	95,74	28.654.476.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.887.207.750,00	6.344.935.000,00	92,13	7.417.026.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.809.157.426,00	27.123.245.340,00	85,27	25.679.184.129,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.289.241.462,00	1.260.030.992,00	97,73	2.516.203.640,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.631.407,00	7.207.273,00	74,83	6.726.002,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.527.254.822,00	30.755.376.752,00	86,57	30.671.549.226,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.132.685.481,00	1.010.262.190,00	89,19	986.295.499,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.398.132.054,00	3.032.629.592,00	89,24	2.959.181.103,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.669.167.064,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	2.418.720,00	2.418.720,00	100,00	0,00
Jumlah		**728.300.579.010,00**	**638.798.353.448,00**	**87,71**	**626.287.118.465,00**

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 adalah sebesar Rp118.818.943.328,00 (79,21%) dari anggarannya sebesar Rp149.999.976.100,00 dan turun sebesar Rp789.748.623,00 (0,66%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp119.608.691.951,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	110.144.874.200,00	84.920.281.911,00	77,10	114.580.702.414,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	39.771.194.700,00	33.814.755.179,00	85,02	2.365.204.146,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	83.907.200,00	83.906.238,00	100,00	2.609.376.697,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	53.408.694,00
	Jumlah	**149.999.976.100,00**	**118.818.943.328,00**	**79,21**	**119.608.691.951,00**

Belanja Tambahan Penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 adalah sebesar Rp182.934.823.585,00 (95,57%) dari anggarannya sebesar Rp191.411.748.789,00 dan turun sebesar Rp3.884.132.486,00 (2,08%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp186.818.956.071,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.011.447.266,00	5.988.805.079,00	99,62	5.426.162.586,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	974.652.143,00	894.462.656,00	91,77	382.510.865,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.304.400.380,00	165.805.741.184,00	96,79	173.180.702.620,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.639.240.000,00	6.897.950.000,00	79,84	5.762.420.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.919.465.000,00	972.699.666,00	50,68	0,00
6	Belanja Honorarium	1.737.444.000,00	1.557.465.000,00	89,64	1.266.710.000,00
7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	825.100.000,00	817.700.000,00	99,10	800.450.000,00
Jumlah		**191.411.748.789,00**	**182.934.823.585,00**	**95,57**	**186.818.956.071,00**

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 adalah sebesar Rp30.472.726.750,00 (98,93%) dari anggarannya sebesar Rp30.801.310.000,00 dan naik sebesar Rp796.391.340,00 (2,68%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp29.676.335.410,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.114.260.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.997.000,00	134.893.500,00	86,47	134.421.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.000.000,00	149.692.140,00	69,30	148.750.680,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.615.677.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	135.989.700,00	88,19	148.352.400,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	12362700,00	18,80	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00
11	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	67.642,00	0,34	67.642,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.571.450.000,00	8475592068,00	98,88	8.040.672.688,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.713.684.000,00	7.713.684.000,00	100,00	7.353.626.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**30.801.310.000,00**	**30.472.726.750,00**	**98,93**	**29.676.335.410,00**

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 adalah sebesar Rp1.075.997.099,00 (72,14%) dari anggarannya sebesar Rp1.491.545.523,00 dan turun sebesar Rp23.804.818,00 (2,16%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.099.801.917,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	97,54	3.528.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	5.069.400,00	97,54	4.345.200,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.475.000,00	1.112.204,00	75,40	1.451.500,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	1.160,00	0,14	960,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.413.000,00	5.362.560,00	83,62	5.362.560,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	83,20	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	336.960,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.177.562.500,00	802.016.501,00	68,11	877.140.002,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	139.236.023,00	105.577.994,00	75,83	54.644.415,00
Jumlah		**1.491.545.523,00**	**1.075.997.099,00**	**72,14**	**1.099.801.917,00**

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 adalah sebesar Rp988.284.400,00 (99,51%) dari anggarannya sebesar Rp993.120.000,00

dan turun sebesar Rp4.835.600,00 (0,49%) dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp993.120.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	595.164.400,00	99,19	600.000.000,00
Jumlah		**993.120.000,00**	**988.284.400,00**	**99,51**	**993.120.000,00**

7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2023 adalah sebesar Rp1.129.660.268,00 (83,65%) dari anggarannya sebesar Rp1.350.421.165,00 dan naik sebesar Rp72.258.916,00 (6,83%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.057.401.352,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena gaji pegawai ASN BLUD yang Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan di masing-masing BLUD pada Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan.

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp734.742.952.742,00 (87,93%) dari anggarannya sebesar Rp835.553.082.222,00 dan naik sebesar Rp151.338.259.449,72 (25,94%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp583.404.693.292,28,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	152.071.982.308,00	133.518.769.345,00	87,80	95.431.111.509,00
2	Belanja Jasa	270.347.041.922,00	240.554.378.963,00	88,98	187.604.148.790,00
3	Belanja Pemeliharaan	80.467.843.171,00	76.253.100.847,00	94,76	42.588.016.801,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	79.621.173.384,00	68.008.204.871,00	85,41	39.336.866.715,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.241.905.698,00	15.102.848.800,00	92,99	11.372.721.200,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	97,73	84.568.561.830,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	77,64	122.503.266.447,28
Jumlah		**835.553.082.222,00**	**734.742.952.742,00**	**87,93**	**583.404.693.292,28**

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 adalah sebesar Rp133.518.769.345,00 (87,80%) dari anggarannya sebesar Rp152.071.982.308,00 dan naik sebesar Rp38.087.657.836,00 (39,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.431.111.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	151.336.720.538,00	132.855.719.065,00	87,79	95.280.817.509,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	735.261.770,00	663.050.280,00	90,18	150.294.000,00
Jumlah		**152.071.982.308,00**	**133.518.769.345,00**	**87,80**	**95.431.111.509,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2023 adalah sebesar Rp132.855.719.065,00 (87,79%) dari anggarannya sebesar Rp151.336.720.538,00 dan naik sebesar

Rp37.574.901.556,00 (39,44%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.280.817.509,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2022

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.724.619.609,00	1.996.068.709,00	73,26	1.575.295.260,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.120.938.182,00	4.060.759.133,00	79,30	999.728.371,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.097.384.142,00	1.733.193.735,00	82,64	885.264.586,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	409.496.019,00	269.108.312,00	65,72	140.844.300,00
5	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	42.350.000,00	42.300.000,00	99,88	0,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	515.386.250,00	505.275.000,00	98,04	209.242.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	62.511.658,00	61.533.000,00	98,43	23.460.500,00
8	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	49.866.000,00	44.661.000,00	89,56	47.544.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	417.400.000,00	413.030.000,00	98,95	158.350.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	9.800.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	183.344.972,00	172.844.600,00	94,27	413.088.500,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	158.000,00	158.000,00	100,00	1.562.500,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	134.303.155,00	130.113.930,00	96,88	100.665.000,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.367.855,00	4.872.855,00	90,78	9.367.900,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.072.674.967,00	13.361.402.272,00	88,65	10.456.487.797,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.768.729.655,00	2.496.487.535,00	90,17	2.065.453.713,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	258.155.500,00	209.522.700,00	81,16	210.845.560,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.447.705.416,00	3.827.965.051,00	86,07	3.126.274.870,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.702.884.297,00	2.396.635.430,00	88,67	2.789.520.043,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.718.670.307,00	3.458.777.210,00	93,01	2.369.831.742,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	11.349.961.899,00	10.417.129.677,00	91,78	4.300.533.442,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.130.000,00	33.430.000,00	97,95	15.110.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	650.505.000,00	591.119.600,00	90,87	613.715.000,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.435.000,00	8.295.000,00	98,34	278.670.000,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.875.461.024,00	7.432.490.809,00	75,26	8.688.375.360,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.845.319.838,00	22.951.648.550,00	96,25	17.335.757.930,00
27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.737.408.680,00	1.710.793.000,00	98,47	1.979.466.900,00
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	346.433.557,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.904.051.960,00	11.787.531.517,00	91,35	2.432.838.277,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	154.728.894,00	153.569.200,00	99,25	127.861.100,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.847.563.259,00	42.397.083.240,00	85,05	28.962.640.395,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000,00	0,00	0,00	4.179.313.300,00
33	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67	13.600.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	105.000.000,00
35	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000,00	18.400.000,00	99,46	61.720.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	110.116.750,00
38	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
39	Belanja Pakaian Batik Tradisional	83.700.000,00	76.720.000,00	91,66	0,00
40	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
41	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	101.038.856,00
Jumlah		**151.336.720.538,00**	**132.855.719.065,00**	**87,79**	**95.280.817.509,00**

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023 adalah sebesar Rp663.050.280,00 (90,18%) dari anggarannya sebesar Rp735.261.770,00 dan naik sebesar Rp512.756.280,00 (341,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp150.294.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	719.177.280,00	650.012.280,00	90,38	130.227.000,00
2	Belanja Pipa-Pipa Baja	3.000.000,00	2.990.000,00	99,67	1.500.000,00
3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.084.490,00	10.048.000,00	76,79	18.567.000,00
Jumlah		**735.261.770,00**	**663.050.280,00**	**90,18**	**150.294.000,00**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp240.554.378.963,00 (88,98%) dari anggarannya sebesar Rp270.347.041.922,00 dan naik sebesar Rp52.950.230.173,00 (28,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp187.604.148.790,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	181.404.308.217,00	160.903.941.995,00	88,70	125.777.271.455,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.223.394.568,00	38.293.575.383,00	95,20	35.040.742.283,00
3	Belanja Sewa Tanah	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	1.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.935.554.844,00	6.985.150.879,00	78,17	3.257.279.385,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.427.550.000,00	1.002.520.000,00	70,23	774.509.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	471.235.000,00	413.030.900,00	87,65	95.874.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.102.872.400,00	8.610.045.993,00	85,22	4.750.598.682,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.036.274.578,00	16.058.166.828,00	84,36	11.694.071.982,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.059.862.081,00	7.601.956.751,00	94,32	5.929.342.090,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	560.990.234,00	560.990.234,00	100,00	283.459.913,00
Jumlah		**270.347.041.922,00**	**240.554.378.963,00**	**88,98**	**187.604.148.790,00**

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 adalah sebesar Rp160.903.941.995,00 (88,70%) dari anggarannya sebesar Rp181.404.308.217,00 dan naik sebesar Rp35.126.670.540,00 (27,93%) dibandingkan realisasi TA 2022 Rp125.777.271.455,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tagihan Telepon	533.198.474,00	325.341.074,00	61,02	322.210.685,00
2	Belanja Tagihan Air	1.761.875.000,00	1.048.710.844,00	59,52	906.168.475,00
3	Belanja Tagihan Listrik	32.342.241.780,00	30.674.015.749,00	94,84	26.848.789.447,00
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	313.947.500,00	279.053.445,00	88,89	260.735.168,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.570.924.778,00	9.116.506.129,00	95,25	7.755.779.383,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	78.960.709,00	34.378.500,00	43,54	43.744.280,00
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa A	16.482.505.100,00	11.319.876.005,00	68,68	7.789.722.200,00
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksa	5.594.050.000,00	5.332.175.000,00	95,32	4.835.505.000,00
9	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	278.800.000,00	270.500.000,00	97,02	295.760.000,00
10	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	698.920.152,00	698.920.152,00	100,00	995.720.152,00
11	Honorarium Rohaniwan	34.000.000,00	11.600.000,00	34,12	15.800.000,00
12	Honorarium Penyelenggara Ujian	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00	45.937.500,00
13	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten at	7.400.000,00	3.100.000,00	41,89	800.000,00
14	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.098.650.000,00	2.060.200.000,00	66,49	775.900.000,00
15	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	898.700.000,00	92,23	864.250.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.507.590.000,00	19.926.440.000,00	81,31	23.601.560.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.261.913.480,00	656.420.104,00	52,02	1.726.499.900,00
18	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	758.078.500,00
19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.924.716.560,00	3.622.046.710,00	92,29	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlin	747.936.320,00	747.636.320,00	99,96	486.000.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	996.869.280,00	996.869.280,00	100,00	723.092.160,00
22	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	435.550.000,00	418.180.000,00	96,01	350.550.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	241.500.000,00	229.800.000,00	95,16	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	447.000.000,00	408.350.000,00	91,35	0,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	129.260.000,00	107.676.640,00	83,30	5.500.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	933.800.000,00	777.575.640,00	83,27	67.900.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.410.816.569,00	28.155.621.271,00	95,73	31.029.884.171,00
28	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.685.722.720,00	1.578.344.880,00	93,63	937.848.480,00
29	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.443.406.222,00	6.013.711.918,00	93,33	2.054.632.538,00
30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.913.594.664,00	4.401.016.066,00	89,57	1.958.384.912,00
31	Belanja Jasa Tenaga Supir	673.327.436,00	570.852.183,00	84,78	268.581.633,00
32	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.820.000,00	55.845.000,00	66,62	225.064.400,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	541.200.000,00	448.150.000,00	82,81	248.100.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	194.350.000,00	183.850.000,00	94,60	66.042.400,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.065.200.000,00	1.008.199.148,00	94,65	597.400.000,00
36	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.959.900,00	7.859.000,00	98,73	116.219.000,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.751.735.321,00	16.993.143.957,00	95,73	1.279.300.000,00
38	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00	77.000.000,00	88,51	65.000.000,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,	37.770.000,00	36.176.600,00	95,78	28.821.450,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	44.485.950,00	35.985.100,00	80,89	20.417.450,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	110.400.000,00	62.900.000,00	56,97	5.100.000,00
42	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.940.000,00	11.417.478,00	95,62	13.556.030,00
43	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.024.293.125,00	5.648.070.000,00	93,75	1.597.741.500,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.178.025.577,00	681.701.369,00	57,87	583.203.142,00
46	Belanja Lembur	5.492.091.000,00	4.773.000.000,00	86,91	5.061.434.446,00
47	Belanja Medical Check Up	225.000.000,00	187.908.833,00	83,52	144.537.053,00
48	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.880.600,00	3.837.600,00	65,26	0,00
	Jumlah	**181.404.308.217,00**	**160.903.941.995,00**	**88,70**	**125.777.271.455,00**

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 adalah sebesar Rp38.293.575.383,00 (95,20%) dari anggarannya sebesar Rp40.223.394.568,00 dan naik sebesar Rp3.252.833.100,00 (9,28%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp35.040.742.283,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.045.636.000,00	33.759.486.700,00	96,33	30.280.735.200,00
b	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.721.300.000,00	3.701.471.200,00	99,47	4.021.869.600,00
c	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.177.928.034,00	598.572.363,00	50,82	535.229.650,00
d	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126.907.256,00	106.564.146,00	83,97	91.326.435,00
e	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.623.278,00	127.480.974,00	84,08	111.581.398,00
Jumlah		**40.223.394.568,00**	**38.293.575.383,00**	**95,20**	**35.040.742.283,00**

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp125.000.000,00, dan naik sebesar Rp124.000.000,00 (12.400%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.000.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp6.985.150.879,00 (78,17%) dari anggarannya sebesar Rp8.935.554.844,00 dan naik sebesar Rp3.727.871.494,00 (114,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.257.279.385,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Hauler	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Loader	631.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	287.850.000,00	257.500.000,00	89,46	74.750.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	40.169.375,00	40.126.750,00	99,89	0,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.922.458.194,00	1.463.559.198,00	76,13	731.083.999,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	6.410.400,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	187.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	123.093.000,00	93.520.500,00	75,98	20.600.000,00
12	Belanja Sewa Mebel	1.507.192.750,00	1.239.953.000,00	82,27	604.223.500,00
13	Belanja Sewa Alat Pendingin	255.185.000,00	247.490.000,00	96,98	92.770.000,00
14	Belanja Sewa Alat Dapur	34.625.000,00	31.512.500,00	91,01	8.750.000,00
15	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.290.542.625,00	3.152.948.931,00	73,49	1.447.136.486,00
16	Belanja Sewa Personal Computer	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	48.000.000,00
17	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	435.100.000,00	422.000.000,00	96,99	216.055.000,00
Jumlah		**8.935.554.844,00**	**6.985.150.879,00**	**78,17**	**3.257.279.385,00**

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp1.002.520.000,00 (70,23%) dari anggarannya sebesar Rp1.427.550.000,00 dan naik sebesar Rp228.011.000,00 (29,44%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp774.509.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.382.750.000,00	962.720.000,00	69,62	759.509.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.000.000,00	2.000.000,00	28,57	15.000.000,00
3	Belanja Sewa Hotel	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	
Jumlah		**1.427.550.000,00**	**1.002.520.000,00**	**70,23**	**774.509.000,00**

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainya TA 2023 adalah sebesar Rp413.030.900,00 (87,65%) dari anggarannya sebesar Rp471.235.000,00 dan naik sebesar Rp317.156.900,00 (330,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.874.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	109.950.000,00	99.700.000,00	90,68	13.500.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	292.210.000,00	261.250.000,00	89,40	31.250.000,00
3	Belanja Sewa Tanaman	69.075.000,00	52.080.900,00	75,40	51.124.000,00
Jumlah		**471.235.000,00**	**413.030.900,00**	**87,65**	**95.874.000,00**

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023 adalah sebesar Rp8.610.045.993,00 (85,22%) dari anggarannya sebesar Rp10.102.872.400,00, dan naik sebesar Rp3.859.447.311,00 (81,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.750.598.682,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.282.215.000,00	4.766.469.283,00	90,24	365.692.523,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	74.264.400,00	63.153.500,00	85,04	493.453.400,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	86.848.320,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.364.000,00	34.521.000,00	97,62	386.873.025,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.272.380.000,00	1.769.190.003,00	77,86	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	265.667.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	605.183.650,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	839.409.164,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	144.989.200,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	391.355.150,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	102.972.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	431.355.350,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	139.539.700,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	378.649.000,00	354.882.811,00	93,72	402.133.200,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.490.000.000,00	1.066.639.536,00	71,59	95.127.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	570.000.000,00	555.189.860,00	97,40	0,00
	Jumlah	**10.102.872.400,00**	**8.610.045.993,00**	**85,22**	**4.750.598.682,00**

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023 adalah sebesar Rp16.058.166.828,00 (84,36%) dari anggarannya sebesar Rp19.036.274.578,00, dan naik sebesar Rp4.364.094.846,00 (37,32%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp11.694.071.982,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	39.821.250,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	3.985.013.328,00	3.944.228.468,00	98,98	3.696.089.597,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	2.164.196.000,00	1.699.715.000,00	78,54	384.900.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	5.826.147.250,00	3.777.487.336,00	64,84	1.340.661.637,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.155.143.000,00	2.979.781.688,00	94,44	1.564.978.368,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	369.300.000,00	369.250.000,00	99,99	262.800.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.271.375.000,00	3.024.004.990,00	92,44	4.296.021.130,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan	80.000.000,00	79.640.946,00	99,55	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	113.100.000,00	112.058.400,00	99,08	50.400.000,00
Jumlah		**19.036.274.578,00**	**16.058.166.828,00**	**84,36**	**11.694.071.982,00**

i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2023 sebesar Rp7.601.956.751,00 (94,32%) dari anggarannya sebesar Rp8.059.862.081,00 dan naik sebesar Rp1.672.614.661,00 (28,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.929.342.090,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp3.072.183.806,00; Belanja Sosialisasi sebesar Rp1.115.793.945,00; dan Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp3.413.979.000,00.

j) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2023 sebesar Rp560.990.234,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp560.990.234,00 dan naik sebesar Rp277.530.321,00 (97,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp283.459.913,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.54 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.455.566,00	3.455.566,00	100,00	2.527.500,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.026.758,00	29.026.758,00	100,00	18.008.438,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.179.121,00	3.179.121,00	100,00	1.508.317,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.610.703,00	11.610.703,00	100,00	8.425.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	149.280.469,00	149.280.469,00	100,00	101.100.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.593.789,00	3.593.789,00	100,00	1.767.689,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.569.805,00	8.569.805,00	100,00	7.424.531,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.764.453,00	2.764.453,00	100,00	1.579.688,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	110.578.125,00	110.578.125,00	100,00	69.506.250,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	238.931.445,00	238.931.445,00	100,00	71.612.500,00
Jumlah		**560.990.234,00**	**560.990.234,00**	**100,00**	**283.459.913,00**

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 adalah sebesar Rp76.353.100.847,00 (94,76%) dari anggarannya sebesar Rp80.476.843.171,00, dan naik sebesar Rp33.665.084.046,00 (79,05%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.588.016.801,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.55 Belanja Pemeliharaan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	135.815.500,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.343.602.227,00	14.708.549.607,00	90,00	12.417.601.655,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.788.415.280,00	41.134.550.534,00	96,13	19.043.291.450,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.077.455.664,00	20.157.782.006,00	95,64	10.769.867.196,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.250.000,00	98,65	221.441.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	239.870.000,00	233.968.700,00	97,54	0,00
Jumlah		**80.467.843.171,00**	**76.253.100.847,00**	**94,76**	**42.588.016.801,00**

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Tidak ada penganggaran di Tahun 2023 untuk realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah. Sedangkan untuk realisasi TA 2022 sebesar Rp135.815.500,00.

Tabel 6A.56 Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	109.100.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	26.715.500,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.815.500,00**

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp14.708.549.607,00 (90,00%) dari anggaran sebesar Rp16.343.602.227,00 dan naik sebesar Rp2.290.947.952,00 (18,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp12.417.601.655,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	13.250.000,00	9.389.000,00	70,86	270.692.742,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	134.859.204,00	130.211.240,00	96,55	52.130.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	14.275.000,00	7.399.130,00	51,83	150.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	250.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	0,00	0,00	0,00	19.150.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	377.100.000,00	359.916.558,00	95,44	293.034.928,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.707.091.325,00	9.986.913.344,00	93,27	8.525.696.195,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.593.373.847,00	1.163.547.137,00	73,02	902.599.932,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	25.000.000,00	23.832.000,00	95,33	20.475.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	6.107.500,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	164.587.500,00	158.502.450,00	96,30	145.370.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	10.200.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	420.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.000.000,00	26.850.000,00	99,44	13.722.000,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.739.361,00	1.610.000,00	58,77	455.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	207.880.000,00	194.820.000,00	93,72	41.485.500,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	409.454.000,00	356.093.305,00	86,97	149.255.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.875.000,00	17.705.000,00	80,94	15.640.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	558.870.000,00	465.260.200,00	83,25	431.766.500,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.145.000,00	10.687.000,00	66,19	17.560.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	107.500.000,00	79.253.000,00	73,72	18.500.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	144.375.000,00	130.665.000,00	90,50	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	26.700.000,00	26.535.000,00	99,38	43.200.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	131.780.000,00	99.330.760,00	75,38	55.870.200,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	49.228.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	102.750.000,00	81.143.000,00	78,97	
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	791.260.890,00	701.263.933,00	88,63	602.289.509,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	563.556.000,00	497.867.550,00	88,34	465.630.299,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.400.000,00	825.000,00	7,24	86.699.450,00
37	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	58.757.600,00	58.510.000,00	99,58	93.533.900,00
38	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	105.572.500,00	104.870.000,00	99,33	38.980.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	5.330.000,00	5.300.000,00	99,44	0,00
Jumlah		**16.343.602.227,00**	**14.708.549.607,00**	**90,00**	**12.417.601.655,00**

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp41.134.550.534,00 (96,13%) dari anggaran sebesar Rp42.788.415.280,00 dan naik sebesar Rp22.091.259.084,00 (116,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp19.043.291.450,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.239.735.460,00	26.983.566.900,00	95,55	7.471.089.100,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	60.720.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.020.000.000,00	1.984.210.000,00	98,23	1.693.355.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	199.507.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	7.723.707.400,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.145.027.800,00	11.075.877.000,00	99,38	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	481.681.620,00	449.189.900,00	93,25	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	37.344.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	507.199.000,00	295.991.965,00	58,36	748.029.950,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	224.600.400,00	217.786.000,00	96,97	381.569.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	130.571.000,00	92.717.269,00	71,01	620.140.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	0,00	0,00	89.450.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	35.211.500,00	88,92	18.380.000,00
Jumlah		**42.788.415.280,00**	**41.134.550.534,00**	**96,13**	**19.043.291.450,00**

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp20.157.782.006,00 (95,64%) dari anggaran sebesar Rp21.077.455.664,00 dan naik sebesar Rp9.387.914.810,00 (87,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.769.867.196,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	16.330.000.000,00	15.709.925.470,00	96,20	10.530.868.696,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	1.580.000.000,00	1.526.554.508,00	96,62	19.646.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	49.589.000,00	49.589.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigas	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.080.000.000,00	2.024.540.000,00	97,33	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	150.000.000,00	146.669.992,00	97,78	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggula	190.000.000,00	187.380.000,00	98,62	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	691.866.664,00	507.423.036,00	73,34	219.352.500,00
Jumlah		**21.077.455.664,00**	**20.157.782.006,00**	**95,64**	**10.769.867.196,00**

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp18.250.000,00 (98,65%) dari anggaran sebesar Rp18.500.000,00 dan turun sebesar Rp203.191.000,00 (91,76%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp221.441.000,00. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya TA 2023 berupa belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga (alat musik).

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2023 adalah sebesar Rp233.968.700,00 (97,54%) dari anggaran sebesar Rp239.870.000,00 dan naik sebesar 100% dikarenakan tidak dianggarkan di TA 2022.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp68.008.204.871,00 (85,41%) dari anggarannya sebesar Rp79.621.173.384,00 dan naik sebesar Rp28.671.338.156,00 (72,88%) dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp39.336.866.715,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.663.853.384,00	67.050.885.671,00	85,24	39.128.277.445,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	957.320.000,00	957.319.200,00	100,00	208.589.270,00
Jumlah		**79.621.173.384,00**	**68.008.204.871,00**	**85,41**	**39.336.866.715,00**

Pada TA 2023 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri masuk dalam pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp15.102.848.800,00 (92,99%) dari anggarannya sebesar Rp16.241.905.698,00, dan naik sebesar Rp3.730.127.600,00 (32,80%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.372.721.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.234.345.698,00	15.098.348.800,00	93,00	10.684.250.000,00
2	Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.560.000,00	4.500.000,00	59,52	688.471.200,00
Jumlah		**16.241.905.698,00**	**15.102.848.800,00**	**92,99**	**11.372.721.200,00**

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp15.098.348.800,00 (93,00%) dari anggarannya sebesar Rp16.234.345.698,00, dan naik sebesar Rp4.414.098.800,00 (41,31%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.684.250.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.62Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.298.345.698,00	1.046.400.000,00	80,59	423.000.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.942.500.000,00	5.614.348.800,00	94,48	771.500.000,00
3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.993.500.000,00	8.437.600.000,00	93,82	9.489.750.000,00
Jumlah		**16.234.345.698,00**	**15.098.348.800,00**	**93,00**	**10.684.250.000,00**

b) Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp4.500.000,00 (59,52%) dari anggarannya sebesar Rp7.560.000,00, dan turun sebesar Rp683.971.200,00 (99,35%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp688.471.200,00.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 adalah sebesar Rp84.917.541.576,00 (97,73%) dari anggarannya sebesar Rp86.891.872.351,00 dan naik sebesar Rp348.979.746,00 (0,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.568.561.830,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	SD Negeri	48.719.438.572,00	47.277.541.917,00	97,04	47.192.104.139,00
2	SMP Negeri	38.172.433.779,00	37.639.999.659,00	98,61	37.376.457.691,00
Jumlah		**86.891.872.351,00**	**84.917.541.576,00**	97,73	**84.568.561.830,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 660 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 adalah sebesar Rp116.388.108.340,00 (77,64%) dari anggarannya sebesar Rp149.911.263.388,00 dan turun sebesar Rp6.115.158.107,28 (4,99%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp122.503.266.447,28,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Puskesmas	62.033.772.098,00	52.899.280.186,00	85,27	47.709.996.643,00
2	RSUD Bagas Waras	87.877.491.290,00	63.488.828.154,00	72,25	74.793.269.804,28
Jumlah		**149.911.263.388,00**	**116.388.108.340,00**	**77,64**	**122.503.266.447,28**

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi melalui SP2D TA 2023 sebesar Rp1.907.474.332,00 (95,35%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp111.724.332,00 (6,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.795.750.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023

No	Bulan	PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	Jumlah Subsidi
1	Januari	37.169.667	139.934.000	177.103.667
2	Februari	38.649.000	145.306.000	183.955.000
3	Maret	39.067.667	133.766.000	172.833.667
4	April	40.175.333	129.184.000	169.359.333
5	Mei	41.495.333	121.326.000	162.821.333
6	Juni	41.095.333	117.836.000	158.931.333
7	Juli	40.251.333	112.082.000	152.333.333
8	Agustus	39.827.333	107.316.000	147.143.333
9	September	39.713.333	105.482.000	145.195.333
10	Oktober	40.770.000	105.394.000	146.164.000
11	November	41.542.000	104.366.000	145.908.000
12	Desember	42.622.000	103.104.000	145.726.000
	JUMLAH	**482.378.332**	**1.425.096.000**	**1.907.474.332**

Di Bulan Desember ada pengembalian Belanja Subsidi Bunga pada BKK Tulung sebesar Rp400.000,00 di keranakan ada Debitur dalam pengajuan permohonan pencairan subsidi Bunga untuk pengusaha mikro atas nama Listiyanto terdata 2 kali.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 1 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Dari realisasi TA 2023 jumlah debitur yang menerima subsidi sebesar 876 debitur yang terdiri dari 222 debitur BPR BKK Tulung dan 654 debitur BPR Bank Klaten.

A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00 (97,64%) dari anggaran sebesar Rp92.154.157.500,00, dan naik sebesar Rp32.072.422.695,00 (55,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp57.905.772.769,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.571.852.500,00	28.502.382.900,00	99,76	626.869.500,00
b	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.767.785.500,00	32.902.733.200,00	94,64	29.235.638.685,00
c	Belanja Hibah Dana BOS	27.718.000.000,00	27.476.559.864,00	99,13	26.946.745.084,00
d	Belanja Hibah Bantuan Keuagan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	1.096.519.500,00
	Jumlah	**92.154.157.500,00**	**89.978.195.464,00**	**97,64**	**57.905.772.769,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. **Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**
   Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp28.502.382.900,00 (99,76%) dari anggaran sebesar Rp28.571.852.500,00 atau naik sebesar Rp27.875.513.400,00 (4.446,78%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp626.869.500,00.
   Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 merupakan Hibah Barang yang terdiri dari Belanja saran prasarana ruang sidang Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Belanja PERKINS-STAMFORD 150 KVA DIESEL GENSET C/W SILENT, Panel AMF, Pekerjaan Pembuatan Rumah Diesel Generator Set.

2. **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**
   Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp32.902.733.200,00 (94,64%) dari anggaran sebesar Rp34.767.785.500,00 atau naik sebesar Rp3.667.094.515,00 (12,54%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp29.235.638.685,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.953.285.500,00	31.241.923.500,00	94,81	29.106.683.974,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.400.000,00	1.096.709.700,00	87,71	128.954.711,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**34.767.785.500,00**	**32.902.733.200,00**	**94,64**	**29.235.638.685,00**

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp31.241.923.500,00 dari Anggaran sebesar Rp32.953.285.500,00 dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp1.096.709.700,00 dari Anggaran sebesar Rp1.250.400.000,00.

3. **Belanja Hibah Dana BOS**
   Realisasi Belanja Dana BOS TA 2023 sebesar Rp27.476.559.864,00 (99,13%) dari anggaran sebesar Rp27.718.000.000,00 atau naik sebesar Rp529.814.780,00 (1,97%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp26.946.745.084,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKDAS Swasta sebesar Rp18.755.549.258,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKMEN Swasta sebesar Rp8.721.010.606,00.
4. **Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
   Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp1.096.519.500,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp1.096.519.500,00. Adapun rinciannya:

Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023

Uraian		TA 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8	Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah		**1.096.519.500,00**	**1.096.519.500,00**	**100,00**

Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 200/39 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten TA 2022.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp13.071.300.000,00 (91,33%) dari anggarannya sebesar Rp14.312.800.000,00, dan naik sebesar Rp2.341.500.000,00 (21,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp13.071.300.000,00 terdapat di 3 OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.69 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluar Berencana	936.800.000,00	667.300.000,00	71,23	2.141.300.000,00
2	Bantuan Sosial Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.128.000.000,00	9.156.000.000,00	90,40	7.000.000.000,00
3	Bantuan Sosial Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.248.000.000,00	3.248.000.000,00	100,00	0,00
4	Bantuan Sosial Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	933.300.000,00
5	Bantuan Sosial Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	655.200.000,00
Jumlah		14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33	10.729.800.000,00

1. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
   - Sasaran Bantuan ditujukan untuk Lanjut Usia Terlantar 630 sebesar Rp252.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp11.200.000,00 sehingga Realisasi Bantuan Sosial ditujukan untuk Lanjut Usia Terlantar terealisasi sebesar Rp240.800.000,00.
   - Sasaran Bantuan ditujukan untuk Orang dengan Kedisabilitasan Berat (ODKB) sebesar Rp235.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp4.000.000,00 sehingga Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Individu ODKB terealisasi sebesar Rp231.000.000,00.
   - Sasaran Bantuan ditujukan untuk Anak luar panti sebesar Rp200.000.000,00. Ada setor kembali sebesar Rp4.500.000,00 sehingga Realisasi Bantuan Sosial ditujukan Anak Luar Panti terealisasi sebesar Rp195.500.000,00.

2. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*
   Pembayaran 100% Belanja Bansos Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp9.156.000.000,00.
3. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
   Pembayaran Bantuan Sosial jambanisasi sebesar Rp3.248.000.000,00.

A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp295.594.876.519,00 (88,83%) dari anggarannya sebesar Rp332.747.086.931,00, dan naik sebesar Rp48.924.855.777,00 (19,83%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp246.670.020.742,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	90,06	1.853.240.700,00
2	Peralatan dan Mesin	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	89,97	63.015.807.876,00
3	Gedung dan Bangunan	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76	65.909.190.529,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84	107.441.269.466,00
5	Aset Tetap Lainnya	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	96,17	8.450.512.171,00
Jumlah		**332.747.086.931,00**	**295.594.876.519,00**	**88,83**	**246.670.020.742,00**

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp5.009.187.370,00 (90,06%) dari anggaran sebesar Rp5.562.000.000,00 dan naik sebesar Rp3.155.946.670,00 (170,29%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp1.853.240.700,00. Belanja Modal Tanah TA 2023 berupa Belanja Modal Tanah Persil yang digunakan untuk Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon dan Biaya 17 Bidang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah terletak di desa Troketon.

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp103.690.199.242,00 (89,97%) dari anggaran sebesar Rp115.245.784.370,00, dan naik sebesar Rp40.674.391.366,00 (64,55%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp63.015.807.876,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	8.648.057.590,00	7.077.823.640,00	81,84	1.246.125.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	11.679.237.215,00	10.614.893.670,00	90,89	9.800.574.182,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	592.813.861,00	492.596.645,00	83,09	336.177.720,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.367.281.922,00	1.316.537.100,00	96,29	99.573.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.043.103.652,00	15.575.769.257,00	103,54	7.165.518.420,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.540.652.513,00	2.300.672.500,00	90,55	1.119.332.730,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.987.362.847,00	34.797.111.762,00	91,60	4.054.874.624,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.694.747.360,00	6.644.208.673,00	86,35	2.683.515.653,00
9	Belanja Modal Komputer	27.342.614.930,00	22.840.402.995,00	83,53	7.815.354.195,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	17.890.000,00	17.140.000,00	95,81	266.286.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	3.600.000,00	3.500.000,00	97,22	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	54.170.000,00	52.986.000,00	97,81	0,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.272.002.480,00	1.955.800.000,00	86,08	399.579.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.250.000,00	757.000,00	33,64	3.000.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.365.707.659,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	13.655.064.693,00
Jumlah		**115.245.784.370,00**	**103.690.199.242,00**	**89,97**	**63.015.807.876,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat Besar*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023 adalah sebesar Rp7.077.823.640,00 (81,84%) dari anggaran sebesar Rp8.648.057.590,00 dan naik sebesar Rp5.831.698.640,00 (467,99%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.246.125.000,00. Belanja Modal Alat Besar TA 2022 berupa Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tractor	3.627.200.000,00	2.450.000.000,00	67,55	0,00
2	Belanja Modal Excavator	2.978.586.550,00	2.659.808.640,00	89,30	0,00
3	Belanja Modal Hauler	1.219.800.000,00	1.172.298.000,00	96,11	1.000.000.000,00
4	Belanja Modal Compacting Equipment	105.000.000,00	103.500.000,00	98,57	188.100.000,00
5	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	25.000.000,00	24.700.000,00	98,80	24.500.000,00
6	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	8.975.000,00
7	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
8	Belanja Modal Pompa	97.683.000,00	76.107.000,00	77,91	19.300.000,00
9	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	594.788.040,00	591.410.000,00	99,43	0,00
Jumlah		**8.648.057.590,00**	**7.077.823.640,00**	**81,84**	**1.246.125.000,00**

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023 adalah sebesar Rp10.614.893.670,00 (90,89%) dari anggaran sebesar Rp11.679.237.215,00, dan naik sebesar Rp814.319.488,00 (8,31%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp9.800.574.182,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.691.352.250,00	2.526.500.000,00	93,87	3.024.500.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.796.588.000,00	2.606.400.000,00	93,20	5.254.998.200,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.249.872.000,00	981.100.000,00	78,50	414.074.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.501.351.610,00	1.340.758.942,00	89,30	124.170.822,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.729.481.250,00	1.624.840.500,00	93,95	227.079.200,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.416.674.000,00	1.286.291.000,00	90,80	594.999.960,00
7	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	226.849.355,00	198.253.228,00	87,39	160.752.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	67.068.750,00	50.750.000,00	75,67	0,00
Jumlah		**11.679.237.215,00**	**10.614.893.670,00**	**90,89**	**9.800.574.182,00**

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 adalah sebesar Rp492.596.645,00 (83,09%) dari anggaran sebesar Rp592.813.861,00, dan naik sebesar Rp156.418.925,00 (46,53%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp336.177.720,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.850.000,00	3.695.900,00	96,00	98.753.000,00
2	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.849.000,00	6.720.600,00	98,13	3.927.000,00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	6.042.772,00	4.124.800,00	68,26	7.880.000,00
4	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	181.050.500,00	176.685.000,00	97,59	85.415.000,00
5	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	18.822.720,00
6	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
7	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	27.716.000,00	26.157.000,00	94,38	6.900.000,00
8	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.620.000,00	1.589.800,00	98,14	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	17.356.748,00	12.706.550,00	73,21	1.606.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	949.000,00	946.000,00	99,68	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	4.767.206,00	3.930.600,00	82,45	10.800.000,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Universal	11.440.700,00	9.566.200,00	83,62	32.230.000,00
13	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.668.000,00	6.026.800,00	78,60	0,00
15	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.037.185,00	1.415.395,00	28,10	0,00
16	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.600.000,00	1.750.000,00	48,61	600.000,00
17	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	59.706.000,00
18	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	218.115.000,00	199.647.000,00	91,53	0,00
19	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	96.750.000,00	37.635.000,00	38,90	4.320.000,00
Jumlah		**592.812.111,00**	**492.596.645,00**	**83,09**	**336.177.720,00**

4. *Belanja Modal Alat Pertanian*

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023 adalah sebesar Rp1.316.537.100,00 (96,29%) dari anggaran sebesar Rp1.367.281.922,00, dan naik sebesar Rp1.216.964.100,00 (1.222,18%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp99.573.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20.656.652,00	17.630.000,00	85,35	10.800.000,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	92.794.145,00	81.202.100,00	87,51	20.380.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	899.680.500,00	874.640.000,00	97,22	0,00
5	Belanja Modal Alat Pasca Panen			0,00	66.433.000,00
6	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	353.485.625,00	343.000.000,00	97,03	1.960.000,00
Jumlah		**1.367.281.922,00**	**1.316.537.100,00**	**96,29**	**99.573.000,00**

5. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023 sebesar Rp15.575.769.257,00 (103,54%) dari anggaran sebesar Rp15.043.103.652,00 naik sebesar Rp8.410.250.837,00 (117.37%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp7.165.518.420,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	2.503.352.783,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.551.323.045,00	1.276.681.320,00	82,30	746.147.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.653.841.600,00	1.505.835.940,00	91,05	1.129.853.740,00
4	Belanja Modal Mebel	3.679.351.150,00	3.420.957.539,00	92,98	2.573.408.530,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	12.728.000,00	6.732.000,00	52,89	33.200.000,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	227.971.250,00	209.610.000,00	91,95	117.908.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	909.525.000,00	781.684.875,00	85,94	716.955.000,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	75.654.902,00	74.421.000,00	98,37	15.149.900,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.036.368.805,00	4.965.252.000,00	82,26	1.477.145.250,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	818.339.900,00	796.638.800,00	97,35	200.831.000,00
11	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	78.000.000,00	34.603.000,00	44,36	4.550.000,00
12	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	150.370.000,00
Jumlah		**15.043.103.652,00**	**15.575.769.257,00**	**103,54**	**7.165.518.420,00**

6. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Realisasi Belanja Modal *Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar* TA 2023 sebesar Rp2.300.672.500,00 (90.55%) dari anggaran sebesar Rp2.540.652.513,00 naik sebesar Rp1.181.339.770,00 (105,54%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp1.119.332.730,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	269.405.600,00	223.582.000,00	82,99	170.659.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	911.053.305,00	748.709.100,00	82,18	433.788.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Cetak	60.275.000,00	58.340.000,00	96,79	158.400.000,00
4	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	297.780.028,00	277.438.000,00	93,17	268.851.000,00
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	33.450.000,00	33.000.000,00	98,65	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	0,00
8	Belanja Modal Humidity Control	0,00	0,00	0,00	14.194.730,00
9	Belanja Modal Switcher /Menara Antena	55.750.000,00	55.750.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima	215.800.000,00	213.500.000,00	98,93	0,00
11	Belanja Modal Program Input Equipment	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	40.535.000,00	40.000.000,00	98,68	69.930.000,00
13	Belanja Modal Sumber Tenaga	649.003.580,00	642.783.400,00	99,04	0,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**2.540.652.513,00**	**2.300.672.500,00**	**90,55**	**1.119.332.730,00**

7. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023 adalah sebesar Rp34.797.111.762,00 (91.60%) dari anggarannya sebesar Rp37.987.362.847,00 dan naik sebesar Rp30.742.237.138,00 (758,16%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp4.054.874.624,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.379.928.333,00	1.748.230.176,00	73,46	3.549.824.804,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.057.047.398,00	1.672.195.618,00	81,29	500.033.820,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	198.590.000,00	176.382.940,00	88,82	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.375.602.888,00	1.354.387.590,00	98,46	0,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.787.687,00	2.988.307.680,00	85,36	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	335.530.200,00	80.473.920,00	23,98	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	110.222.750,00	14.875.000,00	13,50	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	338.245.784,00	321.189.500,00	94,96	0,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	20.138.245.556,00	20.035.783.000,00	99,49	0,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.662.568.000,00	1.270.659.000,00	76,43	4.600.000,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	0,00	0,00	0,00	416.000,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	765.059.400,00	619.500.000,00	80,97	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.916.184.513,00	2.847.112.818,00	97,63	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	424.907.088,00	412.789.000,00	97,15	0,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	509.600.000,00	464.206.000,00	91,09	0,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	603.978.350,00	450.376.425,00	74,57	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	508.008.900,00	333.768.095,00	65,70	0,00
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	156.856.000,00	6.875.000,00	4,38	0,00
Jumlah		**37.987.362.847,00**	**34.797.111.762,00**	**91,60**	**4.054.874.624,00**

8. *Belanja Modal Alat Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2023 adalah sebesar Rp6.644.208.673,00 (86,35%) dari anggarannya sebesar Rp7.694.747.360,00 naik sebesar Rp3.960.693.020,00 (147,59%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.683.515.653,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	588.300.000,00	582.000.000,00	98,93	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.566.239.000,00	1.384.654.749,00	88,41	2.362.017.653,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.953.506.000,00	1.779.900.000,00	91,11	0,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	190.000.000,00	189.074.324,00	99,51	0,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	721.737.000,00	618.077.000,00	85,64	0,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.000.000,00	960.000,00	96,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	24.335.000,00	14.381.600,00	59,10	0,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	656.562.500,00	584.000.000,00	88,95	0,00
14	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	10.260.000,00	8.700.000,00	84,80	16.750.000,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	6.470.000,00	0,00	0,00	990.000,00
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	360.166.524,00	151.950.000,00	42,19	152.533.000,00
19	Belanja Modal General Laboratory Tool	239.250,00	225.000,00	94,04	6.120.000,00
20	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	180.000.000,00	119.800.000,00	66,56	950.000,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5.517.000,00	5.181.000,00	93,91	0,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	546.040,00	350.000,00	64,10	0,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	1.625.000,00	1.593.000,00	98,03	0,00
26	Belanja Modal Measuring/Testing Device	107.250.000,00	36.000.000,00	33,57	3.575.000,00
27	Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	18.679.200,00	17.370.000,00	92,99	0,00
28	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	6.331.446,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00
30	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00
31	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	44.654.900,00	24.100.000,00	53,97	0,00
32	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	1.002.187.000,00	911.200.000,00	90,92	0,00
33	Belanja Modal Cavitation Tunnel	66.000.000,00	64.900.000,00	98,33	0,00
34	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	103.966.500,00	98.432.000,00	94,68	0,00
35	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	300.000,00	260.000,00	86,67	0,00
Jumlah		**7.694.747.360,00**	**6.644.208.673,00**	**86,35**	**2.683.515.653,00**

9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023 sebesar Rp 22.840.402.995,00 (83,53%) dari anggaran sebesar Rp27.342.614.930,00 naik sebesar Rp15.025.048.800,00 (192,25%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp7.815.354.195,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	186.500.000,00	170.300.000,00	91,31	0,00
2	Belanja Modal Personal Computer	24.206.767.734,00	20.116.832.838,00	83,10	5.691.950.110,00
3	Belanja Modal Peralatan Mainframe	14.231.250,00	0,00	0,00	24.727.750,00
4	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.509.034.646,00	2.199.195.850,00	87,65	1.321.650.950,00
5	Belanja Modal Peralatan Jaringan	426.081.300,00	354.074.307,00	83,10	777.025.385,00
Jumlah		**27.342.614.930,00**	**22.840.402.995,00**	**83,53**	**7.815.354.195,00**

10. *Belanja Modal Alat Eksplorasi*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2023 dan di TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp5.125.000,00.

11. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023 adalah sebesar Rp17.140.000 (95,81%) dari anggaran sebesar Rp17.890.000,00 turun sebesar Rp249.146.000,00

(93,56%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp266.286.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Penolong	4.300.000,00	4.250.000,00	98,84	0,00
2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	11.900.000,00	11.200.000,00	94,12	264.600.000,00
3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00	1.686.000,00
Jumlah		**17.890.000,00**	**17.140.000,00**	**95,81**	**266.286.000,00**

12. *Belanja Modal Alat Peraga*

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2023 adalah sebesar Rp3.500.000,00 (97,22%) dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00 naik sebesar Rp3.500.000,00 (100%) karena tidak ada belanja Modal Alat Peraga di TA 2022. Belanja Modal Alat Peraga berupa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

13. *Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi*

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi TA 2023 adalah sebesar Rp52.986.000,00 (97,81%) dari anggaran sebesar Rp54.170.000,00 naik sebesar Rp52.986.000,00 (100%) karena tidak ada Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi.

14. *Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat*

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 sebesar Rp1.955.800,00 (86,08%) dari anggaran sebesar Rp2.272.002.480,00 naik sebesar Rp1.556.221.000 (389,47%) dari TA 2022 sebesar Rp399.579.000. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu tidak Bersuar).

15. *Belanja Modal Peralatan Olahraga*

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2023 adalah sebesar Rp757.000,00 (33,64%) dari anggaran sebesar Rp2.250.000,00 turun sebesar Rp2.243.000,00 (74,77%) dibanding Realisasi TA 2022 Sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2023 berupa Peralatan Permainan.

16. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp14.365.707.659,00.

17. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD*

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp13.655.064.693,00.

A.6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp81.821.621.133,00 (80,76%) dari anggaran sebesar Rp101.316.519.808,00 dan naik sebesar Rp15.912.430.604,00 (24,14%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp65.909.190.529,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.456.110.008,00	80.974.470.233,00	80,61	64.426.273.229,00
2	Belanja Modal Monumen	190.000.200,00	188.639.900,00	99,28	373.547.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	670.409.600,00	658.511.000,00	98,23	240.058.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	869.312.300,00
	Jumlah	**101.316.519.808,00**	**81.821.621.133,00**	**80,76**	**65.909.190.529,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2023 adalah sebesar Rp80.974.470.233,00 (80,61%) dari anggarannya sebesar Rp100.456.110.008,00, dan naik sebesar Rp16.548.197.004,00 (25,69%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp64.426.273.229,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2023 berupa Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gudang, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Bangunan gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, Bangunan terbuka, Bangunan Fasilitas Umum, Taman, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

2. Belanja Modal Monumen

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2023 sebesar Rp188.639.900,00 (99,28%) dari anggarannya sebesar Rp190.000.200,00 turun sebesar Rp184.907.100,00 (49,50%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp373.547.000,00. Belanja Modal Monumen TA 2023 Berupa Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

3. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 sebesar Rp658.511.000,00 (98,23%) dari anggarannya sebesar Rp670.409.600,00 naik sebesar Rp418.453.000,00 (174,31%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp240.058.000,00. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas (Pagar).

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2023 dan realisasi di TA 2022 sebesar Rp869.312.300,00.

A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 seluruhnya sebesar Rp93.344.039.187,00 (94,84%) dari anggaran sebesar Rp98.425.735.262,00 dan turun sebesar Rp14.097.230.279,00 (13.12%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp107.441.269.466,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, dan Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023

Uraian		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Jalan	76.959.549.000,00	72.760.919.294,00	94,54	94.629.999.650,00
2	Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	281.177.430,00	93,73	7.909.533.016,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.906.046.000,00	12.180.634.500,00	94,38	3.391.894.800,00
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3.938.400.000,00	3.863.372.863,00	98,09	966.155.000,00
5	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah	150.000.000,00	145.514.700,00	97,01	137.590.000,00
6	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	12.000.000,00	11.865.000,00	98,88	402.597.000,00
7	Pengadaan Jaringan Listrik	4.159.740.262,00	4.100.555.400,00	98,58	3.500.000,00
Jumlah		**98.425.735.262,00**	**93.344.039.187,00**	**94,84**	**107.441.269.466,00**

1. *Belanja Modal Pengadaan Jalan*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan TA 2023 adalah sebesar Rp72.760.919.294,00 (094,54%) dari anggaran sebesar Rp76.959.000,00 dan turun sebesar Rp21.869.080.356,00 (23,11%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jalan di TA 2022.

2. *Belanja Modal Pengadaan Jembatan*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jembatan TA 2023 adalah sebesar Rp281.177.430,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan turun sebesar Rp7.628.355.586,00 (96.45%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jembatan di TA 2022.

3. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Irigasi*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp12.180.634.500,00 (94,38%) dari anggaran sebesar Rp12.906.046.000,00 dan naik sebesar Rp8.788.739.700,00 (259,11%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Bangunan Irigasi di TA 2022.

4. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam TA 2023 adalah sebesar Rp3.863.372.863,00 (98,09%) dari anggaran sebesar Rp3.938.400.000,00 dan naik sebesar Rp2.897.217.863,00 (299,87%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam di TA 2022.

5. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengadaan Pengembangan Sumber dan Air Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp145.514.700,00 (97,01%) dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan naik sebesar Rp7.924.700,00 (5,76%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber dan Air Tanah di TA 2022.

6. *Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah TA 2023 adalah sebesar Rp11.865.000,00 (98,88%) dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dan turun sebesar Rp390.732.000,00 (97,05%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah di TA 2022.

7. *Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik TA 2023 adalah sebesar Rp4.100.555.400,00 (98,58%) dari anggaran sebesar Rp4.159.740.262,00 dan naik sebesar Rp4.097.055.400,00 (117.058,73%) jika dibandingkan dengan belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik di TA 2022.

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp11.729.829.587,00 (96,17%) dari anggarannya sebesar Rp12.197.047.491,00, dan naik sebesar Rp3.279.317.416,00 (38,81%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp8.450.512.171,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.624.027.786,00	7.030.925.012,00	73,06	212.121.400,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.296.089.705,00	2.237.452.500,00	97,45	6.000.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	154.730.000,00	152.502.500,00	98,56	569.856.000,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	119.700.000,00	2.306.449.575,00	1.926,86	543.555.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	7.114.075.371,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	4.904.400,00
Jumlah		**12.197.047.491,00**	**11.729.829.587,00**	**96,17**	**8.450.512.171,00**

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak berupa Buku Umum, Buku Ilmu Sosial dan Buku Laporan. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga berupa Alat Musik; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan serta Tanda Penghargaan Bidang Olahraga. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Hak Paten dan Software.

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Perpustakaan Tercetak terdiri dari belanja buku umum yang berasal dari belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, buku ilmu sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Bagian Hukum di Sekretariat Daerah, dan belanja buku laporan di Dinas Lingkungan Hidup, seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	59.665.200,00	58.018.502,00
2	Belanja Modal Ilmu Sosial	7.381.763.586,00	5.249.675.010,00
3	Belanja Modal Buku Laporan	2.180.599.000,00	1.721.231.500,00
Jumlah		**9.622.027.786,00**	**7.028.925.012,00**

b. Belanja Modal barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga merupakan Belanja Modal Alat Musik dan Belanja Modal Paket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah, dengan rincian Sub. Kegiatan SPB BOP Paud, Perlenkapan Siswa, Belanja Perlatan Drumband, Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Belanja Gamelan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.237.452.500,00.

c. Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Tanaman ini ini merupakan Belanja Modal tanaman Jenis Tabibuya ukuran Sedang yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp152.502.500,00.

d. Belanja Modal Biota Perairan

Belanja Modal Biota Perairan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000,00.

e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja modal ini merupakan Belanja Modal atas Belanja Hak Paten di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Belanja atas Belanja Modal Software pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata seperti terinci di bawah ini:

Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Hak Paten	14.700.000,00	0,00
2	Belanja Modal Software	105.000.000,00	104.775.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	2.201.674.575,00
Jumlah		**119.700.000,00**	**2.306.449.575,00**

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS yang berasal dari sumber Anggaran 2023.

Pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp7.114.075.371,00.

g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Tidak ada Belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD di Tahun Anggaran 2023 dan terdapat realisasi Belanja di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.904.400,00.

A.6.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Belanja Tak Terduga sebesar Rp657.130.800,00 (3,07%) dari anggaran sebesar Rp21.382.536.680,00.

A.6.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2023 realisasi sebesar Rp657.130.800,00 (3,07%) dari anggaran sebesar Rp21.382.536.680,00 turun sebesar Rp7.136.946.300,00 (91,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.794.077.100,00. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dan Restitusi Pajak BPHTB Tahun 2022.

A.6.3 Belanja Transfer

Realisasi Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp733.585.177.063,00 (99,22%) dari anggarannya sebesar Rp739.334.054.579,00, dan naik sebesar Rp79.807.383.658,00 (12,21%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp653.777.793.405,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64	16.621.066.005,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66	637.156.727.400,00
Jumlah	**739.334.054.579,00**	**733.585.177.063,00**	**99,22**	**653.777.793.405,00**

A.6.3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi hasil Penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/1 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Sementara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp18.057.136.463,00 (84,64%) dari anggaran sebesar Rp21.333.031.019,00, naik sebesar Rp1.436.070.458,00 (8.64%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp16.621.066.005,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.993.765.335,00	15.879.816.030,00	83,61	14.687.250.527,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.339.265.684,00	2.177.320.433,00	93,08	1.933.815.478,00
Jumlah	**21.333.031.019,00**	**18.057.136.463,00**	**84,64**	**16.621.066.005,00**

1. *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*
   Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2023 adalah sebesar Rp15.879.816.030,00 (83,61%) dari anggaran sebesar Rp18.993.765.335,00 dan naik sebesar Rp1.192.565.503,00 (8,12%) jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa di TA 2022.
2. *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*
   Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kapada Pemerintah Desa TA 2023 adalah sebesar Rp2.177.320.433,00 (93,08%) dari anggaran sebesar Rp2.339.265.684,00 dan naik sebesar Rp243.504.955,00 (12,59%) jika dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kapada Pemerintah Desa di TA 2022.

A.6.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Dasar pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 mengacu pada SK Bupati Klaten Nomor 974.16/472 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 974.16/378 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp715.528.040.600,00 (99,66%) dari anggarannya sebesar Rp718.001.023.560,00 naik sebesar Rp78.371.313.200,00 (12,30%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp637.156.727.400,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	508.532.040.600,00	508.532.040.600,00	100,00	500.018.748.000,00
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	209.468.982.960,00	206.996.000.000,00	98,82	137.137.979.400,00
Jumlah	**718.001.023.560,00**	**715.528.040.600,00**	**99,66**	**637.156.727.400,00**

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
   Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp508.532.040.600,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp508.532.040.600,00 atau naik sebesar Rp8.513.292.600,00 (1,70%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp500.018.748.000,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
   Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.996.000.000,00 (98,82%) dari anggarannya sebesar Rp209.468.982.960,00 atau naik sebesar Rp69.858.020.600,00 (50,94%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp137.137.979.400,00.

A.6.4 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2023 menunjukkan defisit sebesar Rp170.863.660.523,00 (34,85%) dari anggaran defisit sebesar Rp490.293.676.302,00, dan turun sebesar Rp230.937.760.983,72 (384,42%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp60.074.100.460,72 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.90 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	100,81	2.587.693.432.935,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	90,51	2.527.619.332.474,28
Surplus (Defisit) Anggaran : a – b	**(490.293.676.302,00)**	**(170.863.660.523,00)**	**34,85**	**60.074.100.460,72**

A.6.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2023 menunjukkan nilai sebesar Rp490.293.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp490.293.676.302,00 dan naik sebesar Rp20.774.100.460,72 (4,42%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp469.519.575.841,28 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00	493.720.575.841,28
2. Pengeluaran Pembiayaan	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00	24.201.000.000,00
Pembiayaan Netto : a – b	**490.293.676.302,00**	**490.293.676.302,00**	**100,00**	**469.519.575.841,28**

Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp529.593.676.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.873.100.460,72 (7,27%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.900.000.000,00	32.900.000.000,00	100,00	0,00
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	6.233.397.782,00	6.233.397.782,00	100,00	149.693.500,00
c. Penghematan Belanja	420.490.038.760,00	420.490.038.760,00	100,00	408.967.400.694,00
d. Sisa Belanja Lainnya	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	100,00	47.050.337.659,28
e. Pelampauan Penerimaan PAD	28.918.726.303,00	28.918.726.303,00	100,00	37.553.143.988,00
f. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.029.000.000,00	2.029.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**529.593.676.302,00**	**529.593.676.302,00**	**100,00**	**493.720.575.841,28**

A.6.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Rp529.593.676.302,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp529.593.676.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.873.100.460,72 (7,27%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28

A.6.5.1 .2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.1 .3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.1 .4 Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Piutang Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp39.300.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp39.300.000.000,00 dan naik sebesar Rp15.099.000.000,00 (62,39%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp24.201.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
2) Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	100,00	9.201.000.000,00
Jumlah	**39.300.000.000,00**	**39.300.000.000,00**	**100,00**	**24.201.000.000,00**

A.6.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00(100%) dari anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8 Adalah Dana Cadangan disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dasar pembentukan Dana Cadangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Di Tahun 2023 pembentukan Dana Cadangan melalui SP2D Nomor 3026/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang disimpan dalam bentuk Giro.

A.6.5.2.2 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp24.300.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp24.300.000.000,00 atau sebesar (100%) dan naik sebesar Rp15.099.000.000,00 (164,10%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp9.201.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
2. Bank Jateng	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.201.000.000,00
3. Aneka Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
3. BPR Bank Klaten	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**24.300.000.000,00**	**24.300.000.000,00**	**100,00**	**9.201.000.000,00**

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah dapat melakukan penyertaan moda pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksut pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMD saja.

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD juga mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten menganggarkan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp24.300.000.000,00 dan terealisasi melalui SP2D Nomor 0096/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023/ JMQ2, sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. SP2D Nomor 1380/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk

penyertaan Modal pada PT BPR Bank Klaten (PERSERODA). . SP2D Nomor 1381/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp300.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada PT Aneka Usaha (PERSERODA). SP2D Nomor 2497/SP2D.LS/PEMBIAYAAN/BPKPAD/2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Merapi.

A.6.5.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,00.

A.6.6 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp490.293.676.302,00 dan naik sebesar Rp20.774.100.460,72 (4,42%) dibanding TA 2022 sebesar Rp469.519.575.841,28.

A.6.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2023 menunjukkan SiLPA sebesar Rp319.430.015.779,00 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp210.163.660.523 (39,68%) dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.95 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	34,85	60.074.100.460,72
b. Pembiayaan Neto	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00	469.519.575.841,28
SiLPA (SiKPA) : a + b	**0,00**	**319.430.015.779,00**	**0,00**	**529.593.676.302,00**

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

Tabel 6A.96 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tunai & Giro Bank TA 2023

Rincian SiLPA :	2023
1) Kas di Kasda	281.309.763.923,00
2) Kas di BLUD	31.591.336.088,00
3) Kas di Bendahara BOS	1.373.732.440,00
4) Kas di Bendahara FKTP	5.108.449.195,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00
6) Koreksi Kas BOS	13.522.083,00
JUMLAH:	**319.430.015.779,00**

SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00 tersebut turun sebesar Rp210.163.660.523,00 atau sebesar (39,68%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 6A.97 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**21.353.093.078,00**	**21.353.093.078,00**
2.	**PENGHEMATAN BELANJA**	**298.076.922.701,000**	**298.076.922.701,00**
	a. Belanja Operasi	234.450.428.893,00	
	1) Belanja Pegawai	**130.129.911.709,00**	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	89.502.225.562,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.181.032.772,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.476.925.204,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	328.583.250,00	*Bebas*
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	415.548.424,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.835.600,00	*Bebas*
	Belanja Pegawai BLUD	*220.760.897,00*	*Bebas*
	-		
	2) Belanja Barang dan Jasa	***100.810.129.480,00***	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	3) Belanja Subsidi	***92.925.668,00***	Bebas
	4) Belanja Hibah	***2.175.962.036,00***	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
	5) Belanja Bantuan Sosial	***1.241.500.000,00***	Bebas
	b. Belanja Modal	**37.152.210.412,00**	
	- Belanja Modal	**37.152.210.412,00**	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	c. Belanja Tidak Terduga	**20.725.405.880,00**	
	- *BTT*	**20.725.405.880,00**	Bebas
	d. Belanja Transfer	**5.748.877.516,00**	
	1) Belanja Bagi Hasil	**3.275.894.556,00**	*Terikat/Kurang Salur*
	2) Belanja Bantuan Keuangan	**2.472.982.960,00**	
	e. Belanja Yang Belum dianggarkan	**0,00**	
	****) Belanja Terikat Lain***	***139.723.522.527,00***	
	1) DAK Fisik	***2.154.796.773,00***	
	1 Bid. Pendidikan	*1.061.175.891,00*	
	2 Bid. Kesehatan + KB	*100.898.490,00*	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	*94.526.600,00*	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi	*45.591.500,00*	
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum	*433.845.000,00*	
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan		
	7 Bid. Pertanian	*98.303.133,00*	
	8 Bid. Lingkungan Hidup	*5.437.722,00*	
	9 Bid. Keluarga Berencana		
	10 Bid. Pariwisata	*4.603.200,00*	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman	*280.497.437,00*	
	12 Bid. Pasar		
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	*592.000,00*	
	14 Bid. Sanitasi	*29.325.800,00*	
	2) Dak Non Fisik	***11.867.162.863,00***	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	*455.500.000,00*	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	*5.495.177.496,00*	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	*3.877.827.770,00*	
	5 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	*1.811.657.772,00*	***Terikat***
	6 Pelayanan Adminduk	-	
	7 Pelayanan Kepariwisataan	*39.189.000,00*	
	8 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	*29.499.065,00*	
	9 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	
	10 Fasilitasi Penanaman Modal	*36.251.500,00*	
	11 Ketahanan Pangan dan Pertanian	*66.393.110,00*	
	12 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	*55.667.150,00*	
	3) Bankeu Provinsi	***37.977.000,00***	
	4) DBHCHT	***4.439.820.531,00***	
	5) BOS SDN	**633.512.649,00**	
	- Bos Reguler	*633.512.649,00*	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
	6) BOS SMP	**695.219.551,00**	
	- Bos Reguler	*654.187.032,00*	
	- Bos Afirmasi		
	- Bos Kinerja	*41.032.519,00*	
	7) BOP PAUD	**240,00**	
	8) BOP Kesetaraan	**45.000.000,00**	
	9) BLUD RSUD	***25.625.077.423,00***	***Dikembalikan ke BLUD***
	- Silpa BLUD RSUD TA 2023	*25.625.077.423,00*	
	10) BLUD PUSKESMAS	***5.966.258.665,00***	***Dikembalikan ke BLUD***
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2023	*5.966.258.665,00*	
	11) BOK PUSKESMAS	***5.108.449.195,00***	
	12) DID/Insentif Fiskal	***1.717.419.482,00***	***2021 dan 2022***
	13) DAU SG	***61.598.000.395,00***	
	1 Bidang Kelurahan	*16.469.654,00*	
	2 Bidang Pekerjaan Umum	-	
	3 Bidang Pendidikan	*10.344.456.893,00*	
	4 PPPK	*51.237.073.848,00*	
	14) DAU Tambahan	***19.834.828.000,00***	
3.	**PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**
4.	**PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH	**319.430.015.779,00**	**319.430.015.779,00**

SiLPA sebesar Rp319.430.015.779,00 merupakan SiLPA Bebas dari penghematan belanja dengan rincian sebagai berikut : Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp89.502.225.562,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp31.181.032.772, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp8.476.925.204,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp328.583.250,00, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

sebesar Rp415.548.424,00, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp4.835.600,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp220.760.897,00.
SiLPA sebesar Rp100.810.129.480,00 dari Belanja Barang dan Jasa.
SiLPA sebesar Rp92.925.668,00 dari Belanja Subsidi.
SiLPA sebesar Rp2.175.962.036,00 dari Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp69.469.600,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.865.052.300,00 dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp241.440.136,00.
SiLPA sebesar Rp1.241.500.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial.
SiLPA sebesar Rp37.152.210.412,00 dari Belanja Modal.
SiLPA sebesar Rp20.725.405.880,00 dari Belaja Tidak Terduga.
SiLPA sebesar Rp5.748.877.516,00 dari Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp3.275.894.556,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2.472.982.960,00.
SiLPA sebesar Rp106.256.633.389,00 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari:
1. DAK Fisik sebesar Rp2.154.796.773,00.
2. DAK Non Fisik sebesar Rp11.867.162.863,00

SiLPA sebesar Rp37.977.000,00 dari Bankeu Provinsi.
SiLPA sebesar Rp4.439.820.531,00 dari DBHCHT.
SiLPA sebesar Rp31.591.336.088,00 dari BLUD.

B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2023 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2023 yaitu sebesar Rp529.593.676.302,00 dan tahun 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28.

B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00 dan tahun 2022 sebesar Rp493.720.575.841,28.

B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

-	Defisit Anggaran	Rp -170.863.660.523,00	
-	Pembiayaan Netto	Rp 490.293.676.302,00	+
	SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 319.430.015.779,00	

Sedangkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00.

B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan Pada Tahun Anggaran 2022 yang akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2023.

B.6.5 Lain-Lain

Tidak terdapat Koreksi Lain-lain pada Laporan Perubahan SAL di TA 2023.

B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp319.430.015.779,00 dan tahun 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00.

Seperti terinci lebih jelas pada Tabel Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran di bawah ini :

Tabel 6B.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**21.353.093.078,00**	**21.353.093.078,00**
2.	**PENGHEMATAN BELANJA**	**298.076.922.701,000**	**298.076.922.701,00**
	a. Belanja Operasi	234.450.428.893,00	
	1) Belanja Pegawai	**130.129.911.709,00**	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	89.502.225.562,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.181.032.772,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.476.925.204,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	328.583.250,00	*Bebas*
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	415.548.424,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.835.600,00	*Bebas*
	Belanja Pegawai BLUD	*220.760.897,00*	*Bebas*
	-		
	2) Belanja Barang dan Jasa	***100.810.129.480,00***	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	3) Belanja Subsidi	***92.925.668,00***	Bebas
	4) Belanja Hibah	***2.175.962.036,00***	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
	5) Belanja Bantuan Sosial	***1.241.500.000,00***	Bebas
	b. Belanja Modal	**37.152.210.412,00**	
	- Belanja Modal	**37.152.210.412,00**	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	c. Belanja Tidak Terduga	**20.725.405.880,00**	
	- *BTT*	**20.725.405.880,00**	Bebas
	d. Belanja Transfer	**5.748.877.516,00**	
	1) Belanja Bagi Hasil	**3.275.894.556,00**	*Terikat/Kurang Salur*
	2) Belanja Bantuan Keuangan	**2.472.982.960,00**	
	e. Belanja Yang Belum dianggarkan	**0,00**	
	****) Belanja Terikat Lain***	***139.723.522.527,00***	
	1) DAK Fisik	***2.154.796.773,00***	
	1 Bid. Pendidikan	*1.061.175.891,00*	
	2 Bid. Kesehatan + KB	*100.898.490,00*	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	*94.526.600,00*	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi	*45.591.500,00*	
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum	*433.845.000,00*	
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan		
	7 Bid. Pertanian	*98.303.133,00*	
	8 Bid. Lingkungan Hidup	*5.437.722,00*	
	9 Bid. Keluarga Berencana		
	10 Bid. Pariwisata	*4.603.200,00*	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman	*280.497.437,00*	
	12 Bid. Pasar		
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	*592.000,00*	
	14 Bid. Sanitasi	*29.325.800,00*	
	2) Dak Non Fisik	***11.867.162.863,00***	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	*455.500.000,00*	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	*5.495.177.496,00*	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	*-*	
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	*3.877.827.770,00*	
	5 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	*1.811.657.772,00*	***Terikat***
	6 Pelayanan Adminduk	*-*	
	7 Pelayanan Kepariwisataan	*39.189.000,00*	
	8 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	*29.499.065,00*	
	9 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	*-*	
	10 Fasilitasi Penanaman Modal	*36.251.500,00*	
	11 Ketahanan Pangan dan Pertanian	*66.393.110,00*	
	12 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	*55.667.150,00*	
	3) Bankeu Provinsi	***37.977.000,00***	
	4) DBHCHT	***4.439.820.531,00***	
	5) BOS SDN	**633.512.649,00**	
	- Bos Reguler	*633.512.649,00*	
	- Bos Afirmasi	*-*	
	- Bos Kinerja	*-*	
	6) BOS SMP	**695.219.551,00**	
	- Bos Reguler	*654.187.032,00*	
	- Bos Afirmasi		
	- Bos Kinerja	*41.032.519,00*	
	7) BOP PAUD	**240,00**	
	8) BOP Kesetaraan	**45.000.000,00**	
	9) BLUD RSUD	***25.625.077.423,00***	***Dikembalikan ke BLUD***
	- Silpa BLUD RSUD TA 2023	*25.625.077.423,00*	
	10) BLUD PUSKESMAS	***5.966.258.665,00***	***Dikembalikan ke BLUD***
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2023	*5.966.258.665,00*	
	11) BOK PUSKESMAS	***5.108.449.195,00***	
	12) DID/Insentif Fiskal	***1.717.419.482,00***	***2021 dan 2022***
	13) DAU SG	***61.598.000.395,00***	
	1 Bidang Kelurahan	*16.469.654,00*	
	2 Bidang Pekerjaan Umum	*-*	
	3 Bidang Pendidikan	*10.344.456.893,00*	
	4 PPPK	*51.237.073.848,00*	
	14) DAU Tambahan	***19.834.828.000,00***	
3.	**PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**
4.	**PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH	**319.430.015.779,00**	**319.430.015.779,00**

C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.450.983.954.998,21 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	431.042.832.867,25	621.577.027.557,06	(190.534.194.689,81)	(30,65)
2	Investasi Jangka Panjang	223.932.571.934,81	200.331.096.802,95	23.601.475.131,86	11,78
3	Aset Tetap	2.687.493.465.763,62	2.553.602.488.616,45	133.890.977.147,18	5,24
4	Dana Cadangan	45.877.805.225,00	30.334.954.186,00	15.542.851.039,00	51,24
5	Aset Lainnya	62.637.279.207,53	130.126.587.745,82	(67.489.308.538,29)	(51,86)
Jumlah		**3.450.983.954.998,21**	**3.535.972.154.908,27**	(84.988.199.910,06)	(2,40)

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp84.988.199.910,06 atau sebesar 2,40%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp431.042.832.867,25 turun sebesar Rp190.534.194.689,81 (30,65%) dibanding Saldo per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp621.577.027.557,06 dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2023

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kasda	281.309.763.923,00	454.620.325.065,00	(173.310.561.142,00)	(38,12)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00	0,00	33.212.050,00	0,00
3	Kas di BLUD	36.699.785.283,00	71.922.513.457,00	(35.222.728.174,00)	(48,97)
4	Kas di Bendahara BOS	1.387.254.523,00	3.050.837.780,00	(1.663.583.257,00)	(54,53)
6	Kas lainnya	0,00	51.400.000,00	(51.400.000,00)	(100,00)
7	Piutang Pajak	46.730.213.291,00	50.345.896.886,00	(3.615.683.595,00)	(7,18)
8	Piutang Retribusi	625.146.692,00	609.008.887,00	16.137.805,00	2,65
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.664.637.289,65	8.725.989.436,59	14.938.647.853,06	171,20
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.649.991.238,00	10.889.281.623,00	(2.239.290.385,00)	(20,56)
11	PiutangTransfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	8.602.274.223,00	3.066.129.116,00	5.536.145.107,00	180,56
13	Piutang Lainnya	3.562.116.481,00	3.565.121.339,00	(3.004.858,00)	(0,08)
14	Penyisihan Piutang	(31.586.996.875,81)	(47.463.880.886,00)	15.876.884.010,19	(33,45)
15	Beban Biaya di Muka	351.141.102,00	358.229.090,00	(7.087.988,00)	(1,98)
16	Persediaan	51.014.293.647,41	61.836.175.763,47	(10.821.882.116,06)	(17,50)
Jumlah		**431.042.832.867,25**	**621.577.027.557,06**	**(190.534.194.689,81)**	**(30,65)**

C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00000-3 sebesar Rp281.309.763.923,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp173.310.561.142,00 atau sebesar 38,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.620.325.065,00.

Saldo Kas per 31 Desember 2023 di rekening PBB-P2 Nomor 1-009-00425-1 Sebesar Rp0,00. Pada akhir tahun 2023, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp281.309.763.923,00 seluruhnya merupakan bagian dari SILPA milik Pemerintah Kabupaten Klaten. Rincian SK rekening terlampir

C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp33.212.050,00. Terdiri dari kas di bendahara penerimaan pada DKUKMP sebesar Rp3.951.200,00 dan Disbudporapar sebesar Rp29.260.850,00 kejadian tersebut karena adanya setoran dari setoran parkir sampah dan dasaran pada beberapa pasar yang masih beroperasi sampai sore atau malam dan beberapa tempat wisata yang beroperasi sampai sore/malam hari karena adanya perayaan tahun baru. Karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2023 bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah. Masih ada saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp33.212.050,00.

C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran karena sesuai dengan amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/900/930/30 Tanggal 04 November 2023 bahwa pada tanggal 31 Desember seluruh Kas di Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke Kas Daerah.

C.6.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terdiri atas kas dari BLUD itu sendiri dan kas FKTP/BOK. Kas BLUD merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD dan Kas FKTP yang dikuasai oleh Bendahara BOK dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 900/248 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2022 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah.

Saldo Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.591.336.088,00 dan Kas Dana Kapitasi FKTP Sebesar Rp5.108.449.195 jadi total dari kas di BLUD sebesar Rp36.699.785.283,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.222.728.174,00 atau (48,97%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.922.513.457,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2023

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-23	Saldo Per 31-Des-22	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	11.074.707.860,00	6.023.355.003,00	5.051.352.857,00	83,86
2	Rumah Sakit Umum Daerah	25.625.077.423,00	65.899.158.454,00	(40.274.081.031,00)	(61,11)
JUMLAH		**36.699.785.283,00**	**71.922.513.457,00**	**(35.222.728.174,00)**	**(48,97)**

Penurunan sebesar Rp35.222.728.174,00 dikarenakan adanya maksimalisasi belanja terutama belanja pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Bagas Waras menggunakan Silpa BLUD tahun lalu. Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2.**

C.6.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas Dana BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.387.254.523,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.663.583.257,00 atau 54,53% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.050.837.780,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.4 Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2023

No	BOS	Saldo Per 31-Des-23	Saldo Per 31-Des-22	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	633.512.649,00	1.618.213.038,00	- 984.700.389,00	-60,85%
2	BOS SMP	695.219.551,00	1.432.624.742,00	- 737.405.191,00	-51,47%
Jumlah		**1.328.732.200,00**	**3.050.837.780,00**	**- 1.722.105.580,00**	**-56,45%**

Penurunan saldo Kas BOS sebesar Rp1.677.105.340,00 atau 54,97% dikarenakan adanya maksimalisasi pemanfaatkan dana bos dan pada tahun lalu Silpa belum digunakan untuk belanja di akhir tahun. Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di **Lampiran 3.**

C.6.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak terdapat saldo kas di bendahara FKTP.

C.6.1.1.7 Kas Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat saldo kas lainnya dikarenakan saldo kas lainnya di tahun anggaran 2022 sebesar Rp51.400.000,00 yang merupakan uang titipan rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah dikembalikan ke rekening penampungan rusunawa.

C.6.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.730.213.291,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.615.683.595,00 atau sebesar 7,18% dibandingkan Piutang Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp50.345.896.886,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.5 Piutang Pajak Daerah TA 2023

No	Jenis Piutang/Nama Debitur	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	1.364.489.157,00	1.360.479.499,00	4.009.658,00	4.009.658,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	22.208.162,00	14.530.142.003,00	14.510.909.854,00	41.440.311,00	19.232.149,00	86,60
3	Piutang Pajak Hiburan	7.860.000,00	1.079.871.039,00	1.079.516.039,00	8.215.000,00	355.000,00	4,52
4	Piutang Pajak Reklame	26.426.400,00	4.399.358.917,00	4.394.210.917,00	31.574.400,00	5.148.000,00	19,48
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.593.420.899,00	58.379.769.052,00	57.596.454.790,00	5.376.735.161,00	783.314.262,00	17,05
7	Piutang Pajak Parkir	11.771.000,00	1.561.467.926,00	1.565.885.426,00	7.353.500,00	-4.417.500,00	-37,53
8	Piutang Pajak Air Tanah	15.540.500,00	3.152.293.500,00	3.141.007.300,00	26.826.700,00	11.286.200,00	72,62
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	913.434.000,00	913.434.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	45.668.669.925,00	50.235.187.973,00	54.669.799.337,00	41.234.058.561,00	-4.434.611.364,00	-9,71
11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	40.301.745.821,00	40.301.745.821,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**50.345.896.886,00**	**135.616.013.567,00**	**139.231.697.162,00**	**46.730.213.291,00**	**-3.615.683.595,00**	**-7,18**

Selama Tahun 2023 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp139.231.697.162,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 971.11/534 Tahun 2023 tentang Penghapusan Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang atas Piutang Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2014, 2015, 2016, dan 2017 dari daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp13.658.501.863,00. Sedangkan penambahan piutang di tahun 2023 sebesar Rp50.235.187.973,00. Sehingga penurunan piutang pajak diantara dikarenakan adanya penghapusan piutang pokok PBB P2 tahun anggaran pajak 2014-2017.

C.6.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp625.146.692,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp16.137.805,00 atau sebesar 2,65% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp609.008.887,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.6 Piutang Retribusi Daerah TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.465.000,00	742.744.398,00	756.794.398,00	4.415.000,00	-14.050.000,00	-76,09
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	26.540.050,00	1.835.198.400,00	1.826.714.050,00	35.024.400,00	8.484.350,00	31,97
4	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	376.899.688,00	2.784.139.214,00	2.762.435.759,00	398.603.143,00	21.703.455,00	5,76
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	0,00	0,00	13.906.149,00	0,00	0,00
Jumlah		**609.008.887,00**	**5.362.082.012,00**	**5.345.944.207,00**	**625.146.692,00**	**16.137.805,00**	**2,65**

Penurunan Piutang Retribusi Daerah dikarenakan adanya kesadaran masyarakat atas kebersihan sehingga mendorong atas ketertiban pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan adanya penambahan pengelola sampah mandiri di desa-desa.

C.6.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.664.637.289,65 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.725.989.436,59. Piutang ini merupakan bagian laba pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	BKK Tulung	220.424.239,34	0,00	220.424.239,34	0,00	-220.424.239,34	-100,00
2	Bank Klaten	4.312.099.623,15	4.768.397.867,75	4.312.099.623,15	4.768.397.867,75	456.298.244,60	10,58
3	Bank Jateng	0,00	14.222.154.744,00	0,00	14.222.154.744,00	14.222.154.744,00	0,00
4	PDAM	3.844.624.045,90	4.283.635.392,30	3.844.624.045,90	4.283.635.392,30	439.011.346,40	11,42
5	Perseroda Aneka Usaha	348.841.528,20	390.449.285,60	348.841.528,20	390.449.285,60	41.607.757,40	11,93
Jumlah		**8.725.989.436,59**	**23.664.637.289,65**	**8.725.989.436,59**	**23.664.637.289,65**	**14.938.647.853,06**	**171,20**

Penurunan yang terjadi pada piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BKK Tulung sebesar Rp220.424.239,34 dikarenakan belum adanya informasi yang lengkap atas besaran pembagian Deviden di tahun anggaran 2023.

C.6.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.649.991.238,00 terdiri dari Piutang BLUD sebesar Rp196.696.236,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp8.453.295.002,00. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp116.489.878,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp80.206.358,00 yang terdiri dari Piutang BPJS sebesar Rp228.584.239,00, dan Piutang Kerja Sama sebesar Rp45.000.000,00. Piutang BLUD RSUD Bagas Waras TA 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan piutang dan tidak adanya pemberian insentif tenaga kesehatan.

Piutang denda Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.067.677.256,00 yang antara lain terdiri dari penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Klaten tahun pajak 2009

sampai dengan 2010 sesuai Keputusan Bupati Nomor 971.11/535 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2014, 2015, 2016, dan 2017 Dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar Rp4.097.550.559,00. dan Piutang BLUD mengalami penurunan sebesar Rp171.613.129,00 dari TA 2022 sebesar Rp368.309.365,00 dan di TA 2023 sebesar Rp196.696.236,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C. 8 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	**Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPKPAD)**	**10.520.972.258,00**	**2.925.247.363,00**	**4.992.924.619,00**	**8.453.295.002,00**	**-2.067.677.256,00**	**-19,65**
2	**Piutang Pendapatan BLUD**	**368.309.365,00**	**196.696.236,00**	**368.309.365,00**	**196.696.236,00**	**-171.613.129,00**	**-46,59**
	- Puskesmas Klaten Utara	1.048.000,00	980.000,00	1.048.000,00	980.000,00	-68.000,00	-6,49
	- Puskesmas Klaten Tengah	1.754.000,00	1.902.000,00	1.754.000,00	1.902.000,00	148.000,00	8,44
	- Puskesmas Klaten Selatan	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00
	- Puskesmas Kalikotes	335.000,00	1.155.000,00	335.000,00	1.155.000,00	820.000,00	244,78
	- Puskesmas Ngawen	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	-100,00
	- Puskesmas Kebonarum	1.420.000,00	1.900.000,00	1.420.000,00	1.900.000,00	480.000,00	33,80
	- Puskesmas Wedi	5.065.000,00	1.220.000,00	5.065.000,00	1.220.000,00	-3.845.000,00	-75,91
	- Puskesmas Jogonalan 1	5.370.000,00	1.670.000,00	5.370.000,00	1.670.000,00	-3.700.000,00	-68,90
	- Puskesmas Jogonalan 2	3.270.000,00	4.360.000,00	3.270.000,00	4.360.000,00	1.090.000,00	33,33
	- Puskesmas Gantiwarno	13.506.126,00	37.452.878,00	13.506.126,00	37.452.878,00	23.946.752,00	177,30
	- Puskesmas Prambanan	7.910.000,00	2.895.000,00	7.910.000,00	2.895.000,00	-5.015.000,00	-63,40
	- Puskesmas Kebondalem Lor	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	-100,00
	- Puskesmas Manisrenggo	18.271.000,00	0,00	18.271.000,00	0,00	-18.271.000,00	-100,00
	- Puskesmas Kemalang	8.461.000,00	921.000,00	8.461.000,00	921.000,00	-7.540.000,00	-89,11
	- Puskesmas Jatinom	0,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00
	- Puskesmas Kayumas	2.135.000,00	2.570.000,00	2.135.000,00	2.570.000,00	435.000,00	20,37
	- Puskesmas Karanganom	835.000,00	2.070.000,00	835.000,00	2.070.000,00	1.235.000,00	147,90
	- Puskesmas Tulung	1.116.000,00	3.946.000,00	1.116.000,00	3.946.000,00	2.830.000,00	253,58
	- Puskesmas Majegan	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	-1.090.000,00	-100,00
	- Puskesmas Polanharjo	2.105.000,00	4.587.000,00	2.105.000,00	4.587.000,00	2.482.000,00	117,91
	- Puskesmas Delanggu	1.451.000,00	20.527.000,00	1.451.000,00	20.527.000,00	19.076.000,00	1.314,68
	- Puskesmas Juwiring	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	-1.506.000,00	-100,00
	- Puskesmas Wonosari I	0,00	8.224.000,00	0,00	8.224.000,00	8.224.000,00	0,00
	- Puskesmas Wonosari II	1.675.000,00	2.466.000,00	1.675.000,00	2.466.000,00	791.000,00	47,22
	- Puskesmas Ceper	1.090.000,00	1.168.000,00	1.090.000,00	1.168.000,00	78.000,00	7,16
	- Puskesmas Jambu Kulon	1.755.000,00	355.000,00	1.755.000,00	355.000,00	-1.400.000,00	-79,77
	- Puskesmas Karangdowo	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
	- Puskesmas Cawas II	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-100,00
	- Puskesmas Trucuk I	8.545.000,00	7.440.000,00	8.545.000,00	7.440.000,00	-1.105.000,00	-12,93
	- Puskesmas Trucuk II	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	0,00	-1.264.000,00	-100,00
	- Puskesmas Bayat	100.000,00	4.995.000,00	100.000,00	4.995.000,00	4.895.000,00	4.895,00
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	273.584.239,00	80.206.358,00	273.584.239,00	80.206.358,00	-193.377.881,00	-70,68
Jumlah		**10.889.281.623,00**	**3.121.943.599,00**	**5.361.233.984,00**	**8.649.991.238,00**	**-2.239.290.385,00**	**-20,56**

Penurunan yang terjadi pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada BPKPAD sebesar Rp2.067.677.256,00 dikarenakan adanya penghapusan piutang denda PBB P2 sebesar Rp4.097.550.559,00.

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 40 Tahun 2022 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman,

penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. Jumlah piutang dapat diukur.

C.6.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.536.145.107,00 atau 180,56% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2023 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp1.994.924.418,00, BBNKB sebesar Rp875.666.875,00, PBBKB sebesar Rp5.720.995.094,00, dan PAP sebesar Rp10.687.836,00.

Tabel 6C.9 Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.467.960.719,00	1.994.924.418,00	1.467.960.719,00	1.994.924.418,00	526.963.699,00	35,90
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	776.412.915,00	875.666.875,00	776.412.915,00	875.666.875,00	99.253.960,00	12,78
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	816.339.632,00	5.720.995.094,00	816.339.632,00	5.720.995.094,00	4.904.655.462,00	600,81
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.415.850,00	10.687.836,00	5.415.850,00	10.687.836,00	5.271.986,00	97,34
Jumlah		**3.066.129.116,00**	**8.602.274.223,00**	**3.066.129.116,00**	**8.602.274.223,00**	**5.536.145.107,00**	**180,56**

C.6.1.1.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.562.116.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.004.858,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.565.121.339,00.

Tabel 6C.10 Piutang Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Dana Bergulir Kepada Koperasi	3.241.514.114,00	0,00	0,00	3.241.514.114,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	323.607.225,00	0,00	3.004.858,00	320.602.367,00	-3.004.858,00	-0,93
Jumlah		**3.565.121.339,00**	**0,00**	**3.004.858,00**	**3.562.116.481,00**	**-3.004.858,00**	**-0,08**

Penurunan yang terjadi pada Piutang Lainnya pada Bagian Lancar Bagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp3.004.858,00 merupakan penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

C.6.1.1.13.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.241.514.114,00. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah sebesar (Rp3.241.514.114,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantumkannya dalam dokumen pengganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2023 ini bersaldo sebesar Rp3.241.514.114,00 per 31 Desember 2023.

C.6.1.1.13.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp320.602.367,00 berkurang sebesar Rp3.004.858,00 koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.607.225,00.

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2023. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp326.910.909,00. Ini terdiri dari tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp273.386.359,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. untuk tahun anggaran 2023 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp3.004.858,00. Sehingga Bagian Lancar Tuntuntan Ganti Rugi Kerugian Daerah di TA 2023 sebesar Rp320.602.367,00.

Realisasi dari Pendapatan Lain-Lain Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.004.858,00 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS, AH, BB.

C.6.1.1.14 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang disajikan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) atas piutang. Nilai Penyisihan Piutang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 Sebesar Rp31.586.996.875,81 dan Penyisihan Piutang TA 2022 dan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp47.463.880.886,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.11 Penyisihan Piutang TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(34.738.967.033,00)	34.738.967.033,00	22.367.602.608,81	(22.367.602.608,81)	12.371.364.424,19	(35,61)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(362.275.047,00)	(6.070.439,00)	484.900,00	(368.830.386,00)	(6.555.339,00)	1,81
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.797.517.467,00)	8.796.885.569,00	5.287.815.502,00	(5.288.447.400,00)	3.509.070.067,00	(39,89)
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(3.241.514.114,00)	0,00	0,00	(3.241.514.114,00)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(323.607.225,00)	3.004.858,00	0,00	(320.602.367,00)	3.004.858,00	(0,93)
Jumlah		**(47.463.880.886,00)**	**43.532.787.021,00**	**27.655.903.010,81**	**(31.586.996.875,81)**	**15.876.884.010,19**	**(33,45)**

Penurunan yang terjadi pada Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp15.876.884.010,19 merupakan Piutang Retribusi Sampah, adanya penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan denda pajak, dan terdapat penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

   Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2023

NO.	Jenis Piutang					Jumlah Piutang Pajak (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
							0-1 tahun	> 1 - 2 tahun	> 2 - 5 tahun	> 5 tahun	
							0,5%	10%	50%	100%	
1	2	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	3	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
1	Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Motel	4.009.658,00	-	-	-	4.009.658,00	20.048,29	-	-	-	20.048,00
2	Pajak Rumah Makan	31.457.101,00	-	9.983.210		41.440.311,00	157.285,51	-	4.991.605,00	-	5.148.891,00
	Pajak Warung		-			-	-	-	-	-	-
	Pajak Katering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pajak Hiburan kesenian musik	-			-	-	-	-	-	-	-
	Pajak permainan ketangkasan	5.070.000,00	-	1.230.000		6.300.000,00	25.350,00	123.000,00	615.000,00	-	763.350,00
	Pajak Panti pijat /kebugaran	30.000,00	-	410.000		440.000,00	150,00	-	205.000,00	-	205.150,00
	Pajak pertandingan olahraga	100.000,00	-	1.375.000		1.475.000,00	500,00	-	687.500,00	-	688.000,00
4	Pajak Reklame	31.574.400,00	-	-	-	31.574.400,00	157.872,00	-	-	-	157.872,00
6	PPJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Batu Kapur	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Pasir dan Kerikil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	pajak Parkir	353.500,00	-	2.600.000	4.400.000	7.353.500,00	1.767,50	-	1.300.000,00	4.400.000,00	5.701.768,00
10	Pajak Air tanah	19.996.100,00	590.600	6.240.000	-	26.826.700,00	99.980,50	59.060,00	3.120.000,00	-	3.279.041,00
										-	-
NO.	Jenis Piutang					Jumlah Piutang Pajak (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
							0-3 bulan	> 3 - 12 bulan	> 1 - 5 tahun	> 5 tahun	
							0,30	0,50	0,80	1,00	
11	PBB	12.589.785.444	14.558.664.379	14.085.608.738	-	41.234.058.561,00	3.776.935.633,20	7.279.332.189,50	11.268.486.990,40	-	22.324.754.813,00
TOTAL		**12.673.166.545**	**14.559.254.979**	**14.104.431.948**	**4.400.000**	**41.353.478.130**	**3.777.352.538,71**	**7.279.391.249,50**	**11.277.898.595,40**	**4.400.000,00**	**22.340.718.933,00**

2. Penyisihan Piutang Retribusi

   Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Retribusi yang terdiri dari Piutang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.13 Penyisihan Piutang Retribusi TA 2023

Jenis piutang	PIUTANG					Penyisihan Piutang				Total (Rp)
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	0-6 Bulan	6 - 12 Bulan	1-3 Tahun	>3 Tahun		0,5%	10%	50%	100%	
						0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.480.000,00	0,00	935.000,00	0,00	4.415.000,00	17.400,00	0,00	467.500,00	0,00	484.900,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Los	16.001.000,00	17.403.400,00	0,00	0,00	33.404.400,00	80.005,00	1.740.340,00	0,00	0,00	1.820.345,00
Retribusi Kios	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	33.588.600,00	46.254.493,00	289.884.900,00	28.875.150,00	398.603.143,00	167.943,00	4.625.449,30	144.942.450,00	28.875.150,00	178.610.992,30
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
Jumlah	**53.069.600,00**	**63.657.893,00**	**292.439.900,00**	**215.979.299,00**	**625.146.692,00**	**265.348,00**	**6.365.789,30**	**146.219.950,00**	**215.979.299,00**	**368.830.386,30**

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
   Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG					PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
		0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun		0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	Puskesmas Klaten Utara	980.000,00	-	-	-	980.000,00	4.900,00	-	-	-	4.900,00
2	Puskesmas Klaten Tengah	1.902.000,00	-	-	-	1.902.000,00	9.510,00	-	-	-	9.510,00
3	Puskesmas Klaten Selatan	1.428.000,00	-	-	-	1.428.000,00	7.140,00	-	-	-	7.140,00
4	Puskesmas Kalikotes	1.155.000,00	-	-	-	1.155.000,00	5.775,00	-	-	-	5.775,00
5	Puskesmas Ngawen	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6	Puskesmas Kebonarum	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00	9.500,00	-	-	-	9.500,00
7	Puskesmas Wedi	1.220.000,00	-	-	-	1.220.000,00	6.100,00	-	-	-	6.100,00
8	Puskesmas Jogonalan 1	1.670.000,00	-	-	-	1.670.000,00	8.350,00	-	-	-	8.350,00
9	Puskesmas Jogonalan 2	4.360.000,00	-	-	-	4.360.000,00	21.800,00	-	-	-	21.800,00
10	Puskesmas Gantiwarno	37.452.878,00	-	-	-	37.452.878,00	187.264,39	-	-	-	187.264,39
11	Puskesmas Prambanan	2.895.000,00	-	-	-	2.895.000,00	14.475,00	-	-	-	14.475,00
12	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
13	Puskesmas Manisrenggo	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14	Puskesmas Kemalang	921.000,00	-	-	-	921.000,00	4.605,00	-	-	-	4.605,00
15	Puskesmas Karangnongko	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
16	Puskesmas Jatinom	1.246.000,00	-	-	-	1.246.000,00	6.230,00	-	-	-	6.230,00
17	Puskesmas Kayumas	2.570.000,00	-	-	-	2.570.000,00	12.850,00	-	-	-	12.850,00
18	Puskesmas Karanganom	2.070.000,00	-	-	-	2.070.000,00	10.350,00	-	-	-	10.350,00
19	Puskesmas Tulung	3.946.000,00	-	-	-	3.946.000,00	19.730,00	-	-	-	19.730,00
20	Puskesmas Majegan	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
21	Puskesmas Polanharjo	4.587.000,00	-	-	-	4.587.000,00	22.935,00	-	-	-	22.935,00
22	Puskesmas Delanggu	20.527.000,00	-	-	-	20.527.000,00	102.635,00	-	-	-	102.635,00
23	Puskesmas Juwiring	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
24	Puskesmas Wonosari I	8.224.000,00	-	-	-	8.224.000,00	41.120,00	-	-	-	41.120,00
25	Puskesmas Wonosari II	2.466.000,00	-	-	-	2.466.000,00	12.330,00	-	-	-	12.330,00
26	Puskesmas Ceper	1.168.000,00	-	-	-	1.168.000,00	5.840,00	-	-	-	5.840,00
27	Puskesmas Jambu Kulon	355.000,00	-	-	-	355.000,00	1.775,00	-	-	-	1.775,00
28	Puskesmas Pedan	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
29	Puskesmas Karangdowo	1.012.000,00	-	-	-	1.012.000,00	5.060,00	-	-	-	5.060,00
30	Puskesmas Cawas I	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
31	Puskesmas Cawas II	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
32	Puskesmas Trucuk I	7.440.000,00	-	-	-	7.440.000,00	37.200,00	-	-	-	37.200,00
33	Puskesmas Trucuk II	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
34	Puskesmas Bayat	4.995.000,00	-	-	-	4.995.000,00	24.975,00	-	-	-	24.975,00
35	RSUD	80.206.358,00		-	-	80.206.358,00	401.031,79	-	-	-	401.031,79
36	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapa	602.974.434,00	3.912.282.886,00	3.938.037.682,00	-	8.453.295.002,00	180.892.330,20	1.956.141.443,00	3.150.430.145,60	0,00	5.287.463.918,80
Jumlah		**799.670.670,00**	**3.912.282.886,00**	**3.938.037.682,00**	**0,00**	**8.649.991.238,00**	**181.875.811,38**	**1.956.141.443,00**	**3.150.430.145,60**	**0,00**	**5.288.447.399,98**

4. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
   Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sudah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp3.241.514.114,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini bersal dari piutang yang merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

5. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mecapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp320.602.367,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini menrupakan penyisihan dari nilai TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah.

C.6.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka TA 2023 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp351.141.102,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut

Tabel 6C.15 Beban Dibayar Dimuka TA 2023

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKPAD	Asuransi Gedung	November 2022 - November 2023	175.064.145,30
2	BPKPAD	Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	Desember 2022 - Desember 2023	176.076.956,70
Jumlah				**351.141.102,00**

C.6.1.1.16 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp61.836.175.763,47, dengan uraian pada tabel berikut:

Tabel 6C.16 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.642.177.623,40	2.020.250.439,50	1.642.177.623,40	2.020.250.439,50	378.072.816,10	23,02
2	Bahan Kimia	755.145.352,00	1.320.504.925,33	755.145.352,00	1.320.504.925,33	565.359.573,33	74,87
3	Bahan Bakar dan Pelumas	386.850,00	522.240,00	386.850,00	522.240,00	135.390,00	35,00
4	Bahan Baku	52.534.026,00	74.478.045,00	52.534.026,00	74.478.045,00	21.944.019,00	41,77
5	Bahan/Bibit Tanaman	171.858.000,00	80.250.000,00	171.858.000,00	80.250.000,00	-91.608.000,00	-53,30
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.235.000,00	1.934.000,00	2.235.000,00	1.934.000,00	-301.000,00	-13,47
7	Isi Tabung Gas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
8	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	1.907.038,00	0,00	1.907.038,00	1.907.038,00	0,00
9	Suku Cadang Alat Besar	457.284.805,00	332.697.600,00	457.284.805,00	332.697.600,00	-124.587.205,00	-27,24
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	10.009.900,00	25.872.800,00	10.009.900,00	25.872.800,00	15.862.900,00	158,47
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	-20.370,00	-100,00
12	Suku Cadang Alat Pertanian	4.977.000,00	5.670.000,00	4.977.000,00	5.670.000,00	693.000,00	13,92
13	Alat Tulis Kantor	5.114.033.567,45	3.274.098.481,90	5.114.033.567,45	3.274.098.481,90	-1.839.935.085,55	-35,98
14	Kertas dan Cover	643.351.076,00	425.973.408,00	643.351.076,00	425.973.408,00	-217.377.668,00	-33,79
15	Benda Pos	17.666.000,00	11.548.000,00	17.666.000,00	11.548.000,00	-6.118.000,00	-34,63
16	Bahan Komputer	2.467.564.186,00	2.519.057.233,00	2.467.564.186,00	2.519.057.233,00	51.493.047,00	2,09
17	Perabot Kantor	2.091.049.300,50	2.473.564.392,20	2.091.049.300,50	2.473.564.392,20	382.515.091,70	18,29
18	Alat Listrik	293.102.787,00	494.047.010,00	293.102.787,00	494.047.010,00	200.944.223,00	68,56
19	Perlengkapan Dinas	290.953.321,49	499.791.132,89	290.953.321,49	499.791.132,89	208.837.811,40	71,78
20	Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.301.000,00	620.000,00	12.301.000,00	620.000,00	-11.681.000,00	-94,96
21	Suvenir/Cendera Mata	13.175.000,00	11.740.000,00	13.175.000,00	11.740.000,00	-1.435.000,00	-10,89
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.243.287,00	6.177.204,00	6.243.287,00	6.177.204,00	-66.083,00	-1,06
23	Obat	43.391.303.171,58	35.409.230.731,09	43.391.303.171,58	35.409.230.731,09	-7.982.072.440,49	-18,40
24	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.450.442.805,00	498.369.965,00	3.450.442.805,00	498.369.965,00	-2.952.072.840,00	-85,56
25	Natura	638.033.582,05	855.139.313,50	638.033.582,05	855.139.313,50	217.105.731,45	34,03
26	Pakan	287.814.000,00	288.714.000,00	287.814.000,00	288.714.000,00	900.000,00	0,31
27	Komponen Rambu-Rambu	11.448.840,00	360.722.480,00	11.448.840,00	360.722.480,00	349.273.640,00	3.050,73
28	Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.019.913,00	21.413.208,00	11.019.913,00	21.413.208,00	10.393.295,00	94,31
Jumlah		**61.836.175.763,47**	**51.014.293.647,41**	**61.836.175.763,47**	**51.014.293.647,41**	**-10.821.882.116,06**	**-17,50**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41. Pada data persediaan di atas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.732.628.669,64 terdiri dari persediaan Bahan Kimia sebesar Rp165.000,00, Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp2.372.112,00, Persediaan Obat sebesar Rp2.730.091.557,64. Pergerakan persediaan terinci pada bagan dibawah ini:

Saldo awal	**61.942.225.762,03**
Penerimaan	**251.344.932.789,23**
Belanja Persediaan	133.081.095.436,00
Produksi	171.765.500,00
Belanja dari akun non-belanja persediaan	79.895.223.826,29
hibah masuk	38.148.247.091,41
Selisih aplikasi	48.600.935,53
Pengeluaran	**262.272.864.903,88**
Beban Persediaan	262.272.864.903,88
Saldo Akhir Perhitungan	**51.014.293.647,41**
Saldo Akhir Final	**51.014.293.647,41**

Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 6C.17 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang TA 2023

NO	OPD	ED 2023			Total ED 2023
		1.1.7.01.01.02	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	
		Bahan Kimia	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	
1	2	3		4	5
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	829.482.319,42	829.482.319,42
2	Puskesmas Klaten Utara	0,00	0,00	15.632.134,00	15.632.134,00
3	Puskesmas Klaten Tengah	0,00	0,00	15.914.526,00	15.914.526,00
4	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	0,00	18.399.302,00	18.399.302,00
5	Puskesmas Kalikotes	0,00	0,00	6.080.024,00	6.080.024,00
6	Puskesmas Ngawen	0,00	0,00	10.231.742,44	10.231.742,44
7	Puskesmas Kebonarum	0,00	0,00	5.506.969,72	5.506.969,72
8	Puskesmas Wedi	0,00	0,00	2.470.850,37	2.470.850,37
9	Puskesmas Jogonalan I	0,00	0,00	16.620.547,93	16.620.547,93
10	Puskesmas Jogonalan II	0,00	0,00	16.789.487,23	16.789.487,23
11	Puskesmas Gantiwarno	0,00	0,00	7.994.265,00	7.994.265,00
12	Puskesmas Prambanan	0,00	0,00	3.357.125,00	3.357.125,00
13	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	0,00	8.174.475,00	8.174.475,00
14	Puskesmas Manisrenggo	0,00	0,00	8.930.705,00	8.930.705,00
15	Puskesmas Kemalang	0,00	0,00	26.527.884,50	26.527.884,50
16	Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	21.408.285,04	21.408.285,04
17	Puskesmas Jatinom	0,00	0,00	4.560.367,00	4.560.367,00
18	Puskesmas Kayumas	0,00	0,00	8.960.151,00	8.960.151,00
19	Puskesmas Karanganom	0,00	0,00	23.629.936,20	23.629.936,20
20	Puskesmas Tulung	0,00	0,00	6.739.610,00	6.739.610,00
21	Puskesmas Majegan	0,00	0,00	30.737.940,50	30.737.940,50
22	Puskesmas Polanharjo	0,00	0,00	4.429.528,00	4.429.528,00
23	Puskesmas Delanggu	0,00	0,00	29.332.993,20	29.332.993,20
24	Puskesmas Juwiring	0,00	0,00	20.723.819,56	20.723.819,56
25	Puskesmas Wonosari I	0,00	0,00	14.374.768,00	14.374.768,00
26	Puskesmas Wonosari II	0,00	0,00	3.517.043,00	3.517.043,00
27	Puskesmas Ceper	0,00	0,00	27.176.417,40	27.176.417,40
28	Puskesmas Jambu Kulon	0,00	0,00	41.417.491,48	41.417.491,48
29	Puskesmas Pedan	165.000,00	0,00	17.864.021,00	18.029.021,00
30	Puskesmas Karangdowo	0,00	0,00	17.453.191,80	17.453.191,80
31	Puskesmas Cawas I	0,00	0,00	10.203.950,00	10.203.950,00
32	Puskesmas Cawas II	0,00	0,00	6.999.281,00	6.999.281,00
33	Puskesmas Trucuk I	0,00	0,00	52.396.786,40	52.396.786,40
34	Puskesmas Trucuk II	0,00	0,00	14.209.901,81	14.209.901,81
35	Puskesmas Bayat	0,00	0,00	1.256.640,00	1.256.640,00
36	RSUD Bagas Waras	0,00	0,00	1.380.587.077,64	1.380.587.077,64
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.372.112,00	0,00	2.372.112,00
Grand Total		165.000,00	2.372.112,00	2.730.091.557,64	2.732.628.669,64

Rincian saldo persediaan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 4.**

C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Invetasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung,

BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.932.571.934,81 mengalami kenaikan sebesar Rp23.601.475.131,86 atau 11,78% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95.

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2023 nihil.

C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya (PRPP/Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.932.571.934,81 terdiri dari investasi permanen sebesar Rp220.911.479.273,81 dan investasi permanen lainnya (properti investasi) pada Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 pada Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 jadi total properti investasi Rp3.262.661.400,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp241.568.739,00) naik sebesar Rp23.601.475.131,86 dibanding dengan TA 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95.

C.6.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp220.911.479.273,81 naik sebesar Rp20.580.382.470,86 dibandingkan dengan TA 2022 Sebesar Rp200.331.096.802,95. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.18 Investasi Permanen TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	PDAM Tirta Merapi	58.665.147.017,95	18.183.360.200,51	4.283.635.392,30	72.564.871.826,16	13.899.724.808,21	23,69
2	PT. BPR Bank Klaten	51.052.287.177,00	5.397.669.371,00	0,00	56.449.956.548,00	5.397.669.371,00	10,57
3	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00	0,00	4.768.397.867,75	(948.397.867,75)	(4.768.397.867,75)	(124,83)
4	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00	0,00	0,00
5	PT. Bank Jateng	57.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	63.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10,53
6	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	26.533.662.608,00	441.835.445,00	390.449.285,60	26.585.048.767,40	51.386.159,40	0,19
7	Perusahaan Swasta / Pihak III (PRPP)	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**200.331.096.802,95**	**30.022.865.016,51**	**9.442.482.545,65**	**220.911.479.273,81**	**20.580.382.470,86**	**10,27**

Terdapat koreksi Saldo investasi Jangka Panjang Permanen pada PDAM Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten, dan PT Aneka Usaha sebesar Rp5.722.865.016,15 dan penyertaan Modal baru di Tahun 2023 sebesar Rp24.300.000.000,00. Perhitungan Investasi Permanen sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5**.

C.6.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi

Properti investasi tersebut adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.P5/2021 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, pengakuan properti investasi adalah Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal. Tidak mensyaratkan adanya Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Klaten nomor 59 tahun 2023 tentang perubahan keempat lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten, kondisi aset tersebut telah memenuhi kriteria sebagai properti investasi, namun Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah belum tersedia.

Properti Investasi Kabupaten Klaten TA 2023 sebesar Rp3.021.092.661,00 dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 6C.19 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	918.884.400,00
2	Tanah Pertanian	1.905.891.000,00
3	Gedung Bangunan	437.886.000,00
4	Akumulasi Penyusutan (Properti Investasi)	(241.568.739,00)
Jumlah		**3.021.092.661,00**

Properti investasi senilai Rp3.021.092.661,00 yang terdiri dari investasi permanen lainnya (properti investasi) pada Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 denan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp241.568.739,00) dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**.

.

C.6.1.3 Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
5. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal..

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan

bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
   a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
   b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
   c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
   d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

   Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

   Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

   a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
      1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
      2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
   b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
   c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
   d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

Aset tetap tahun 2023 pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp5.251.294.833.688,99 mengalami penambahan sebesar Rp302.444.447.388,00 atau 6,11% dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp4.948.850.386.300,99. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

Tabel 6C.20 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Tanah	876.430.381.056,00	25.062.698.852,00	17.528.627.802,00	883.964.452.106,00	(7.534.071.050,00)	(0,01)
2	Peralatan dan Mesin	930.401.453.124,30	197.179.731.358,30	97.541.884.940,30	1.030.039.299.542,30	(99.637.846.418,00)	(0,10)
3	Gedung dan Bangunan	1.081.341.113.090,00	178.168.394.075,40	112.471.024.983,20	1.147.038.482.182,20	(65.697.369.092,20)	(0,06)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.741.846.607.536,87	145.674.669.611,80	43.650.897.649,80	1.843.870.379.498,87	(102.023.771.962,00)	(0,06)
5	Aset Tetap Lainnya	296.112.363.856,62	39.894.794.037,70	17.851.844.825,70	318.155.313.068,62	(22.042.949.212,00)	(0,07)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	156.463.551.539,00	150.955.111.885,20	28.226.907.291,00	(5.508.439.653,80)	(0,20)
Total		**4.948.850.386.300,99**	**742.443.839.474,20**	**439.999.392.086,20**	**5.251.294.833.688,99**	**(302.444.447.388,00)**	**(0,06)**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap dipengaruhi oleh penambhan dan pengurangan asset yang berasal dari Belanja Modal, Mutasi, Kapitalisasi, Hibah Koreksi Reklas Seperti terinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 6C.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2023

URAIAN		Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
SALDO AWAL		**876.430.381.056,00**	**930.401.453.124,30**	**1.081.341.113.090,00**	**1.741.846.607.536,87**	**296.112.363.856,62**	**22.718.467.637,20**	**4.948.850.386.300,99**
Penambahan								
1	Belanja Modal	5.009.187.370,00	103.690.199.242,00	81.821.621.133,00	93.344.039.187,00	11.729.829.587,00	0,00	295.594.876.519,00
2	Mutasi Masuk	9.116.985.032,00	47.846.481.481,30	57.301.928.932,20	25.365.506.646,80	2.720.661.015,70	0,00	142.351.563.108,00
3	Kapitalisasi	0,00	544.303.459,00	7.128.837.345,00	2.931.523.831,00	6.627.500,00	1.263.483.406,00	11.874.775.541,00
4	Hibah	350.000.000,00	1.888.405.375,00	12.441.151.300,00	243.956.145,00	114.018.775,00	0,00	15.037.531.595,00
5	Koreksi	1.111.892.000,00	588.723.950,00	326.441.040,00	0,00	0,00	0,00	2.027.056.990,00
6	Reklas Masuk	3.887.767.080,00	7.583.708.009,00	8.391.558.407,20	20.582.694.655,00	12.252.800.105,00	15.509.916.799,00	68.208.445.055,20
Jumlah		**19.475.831.482,00**	**162.141.821.516,30**	**167.411.538.157,40**	**142.467.720.464,80**	**26.823.936.982,70**	**16.773.400.205,00**	**535.094.248.808,20**
Pengurangan								
1	Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ekstrakom	0,00	1.331.329.346,00	2.270.291.072,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.604.770.418,00
3	Mutasi Keluar	9.116.985.032,00	47.846.481.481,30	57.301.928.932,20	25.365.506.646,80	2.720.661.015,70	0,00	142.351.563.108,00
4	Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Non Aset	0,00	3.362.590.928,00	2.429.037.526,00	109.874.000,00	200.775.498,00	0,00	6.102.277.952,00
6	Reklas Keluar	2.824.775.400,00	9.963.573.343,00	39.712.911.535,00	14.968.567.856,00	1.856.401.257,00	11.264.960.551,20	80.591.189.942,20
Jumlah		**11.941.760.432,00**	**62.503.975.098,30**	**101.714.169.065,20**	**40.443.948.502,80**	**4.780.987.770,70**	**11.264.960.551,20**	**232.649.801.420,20**
SALDO AKHIR		**883.964.452.106,00**	**1.030.039.299.542,30**	**1.147.038.482.182,20**	**1.843.870.379.498,87**	**318.155.313.068,62**	**28.226.907.291,00**	**5.251.294.833.688,99**

C.6.1.3.1 Tanah

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp883.964.452.106,00 atau naik sebesar Rp7.534.071.050,00 atau 0,86% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp876.430.381.056,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp883.964.452.106,00. Karena adanya penambahan Tanah pada TPA troketon, Temuan Aset Baru atas proses Inventarisasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum dicatat dalam daftar inventaris barang. Seperti terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 6C.22 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.808.994.907,00	0,00	234.920.000,00	6.574.074.907,00	- 234.920.000,00	- 3,45
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.100.785.677,00	0,00	28.691.000,00	47.072.094.677,00	- 28.691.000,00	- 0,06
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	89.712.957.281,00	2.609.329.000,00	1.225.030.400,00	91.097.255.881,00	1.384.298.600,00	1,54
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	0,00	0,00	24.031.768.380,00	-	-
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	0,00	0,00	8.287.680.000,00	-	-
6	Tanah Persil Lainnya	577.680.000,00	5.009.187.370,00	5.586.867.370,00	-	- 577.680.000,00	- 100,00
7	Tanah Basah	11.154.345.685,00	0,00	25.060.000,00	11.129.285.685,00	- 25.060.000,00	- 0,22
8	Tanah Kering	1.725.414.949,00	0,00	0,00	1.725.414.949,00	-	-
9	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	0,00	0,00	534.271.000,00	-	-
10	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	0,00	0,00	2.003.096.000,00	-	-
11	Tanah Pertanian	4.961.518.554,00	3.022.830.032,00	3.971.161.032,00	4.013.187.554,00	- 948.331.000,00	- 19,11
12	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	0,0	0,0	7.379.358.000,00	-	-
13	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.486.647.670,00	5.148.325.370,00	139.138.000,00	6.495.835.040,00	5.009.187.370,00	336,95
14	Tanah untuk Jalan	615.584.854.977,00	0,00	0,00	615.584.854.977,00	-	-
15	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	0,00	0,00	33.258.079.805,00	-	-
16	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	0,00	0,00	9.802.444.750,00	-	-
17	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	0,00	0,00	792.818.421,00	-	-
18	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	0,00	0,00	4.909.905.000,00	-	-
19	Tanah Kampung	6.317.760.000,00	9.273.027.080,00	6.317.760.000,00	9.273.027.080,00	2.955.267.080,00	46,78
TOTAL		876.430.381.056,00	25.062.698.852,00	17.528.627.802,00	883.964.452.106,00	7.534.071.050,00	0,86

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Tanah terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Tanah
SALDO AWAL		**876.430.381.056,00**
Penambahan		
1	Belanja Modal	5.009.187.370,00
2	Mutasi Masuk	9.116.985.032,00
3	Kapitalisasi	0,00
4	Hibah	350.000.000,00
5	Koreksi	1.111.892.000,00
6	Reklas Masuk	3.887.767.080,00
Jumlah		**19.475.831.482,00**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	9.116.985.032,00
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	0,00
6	Reklas Keluar	2.824.775.400,00
Jumlah		**11.941.760.432,00**
SALDO AKHIR		**883.964.452.106,00**

Penambahan Tanah diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal pengadaan Tanah TPA troketon dan biaya pembuatan atau Pelepasan hak atas tanah troketon, mutasi masuk sebesar Rp9.116.985.032,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD. Koreksi Masuk tersebut terdapat koreksi masuk atas Tanah merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp1.111.892.000,00 berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja. Reklas masuk Tanah mempengaruhi jumlah Aset Tanah yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp3.887.767.080,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah dipengaruhi oleh Mutasi Keluar sebesar Rp9.116.985.032,00 seimbang dengan Mutasi Masuk pada aset Tanah.

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.030.039.299.542,30 mengalami kenaikan sebesar Rp99.637.846.418,00 atau 10,71% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp930.401.453.124,30. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:

Tabel 6C.23 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Alat Besar Darat	27.120.942.679,00	7.898.671.330,00	2.327.565.333,00	32.692.048.676,00	5.571.105.997,00	20,54
2	Alat Besar Apung	4.714.600,00	0,00	0,00	4.714.600,00	0,00	0,00
3	Alat Bantu	6.169.386.141,00	2.466.975.633,00	1.981.498.094,00	6.654.863.680,00	485.477.539,00	7,87
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	155.142.539.767,00	17.402.806.871,00	11.644.935.612,00	160.900.411.026,00	5.757.871.259,00	3,71
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.141.005.082,00	288.301.027,00	151.867.999,00	2.277.438.110,00	136.433.028,00	6,37
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	241.320.000,00	0,00	20.000.000,00	221.320.000,00	-20.000.000,00	-8,29
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	0,00	0,00	131.100.000,00	0,00	0,00
8	Alat Bengkel Bermesin	3.356.263.299,00	226.320.900,00	26.654.400,00	3.555.929.799,00	199.666.500,00	5,95
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	899.560.241,00	96.671.000,00	29.977.200,00	966.254.041,00	66.693.800,00	7,41
10	Alat Ukur	3.980.996.689,00	327.298.595,00	241.783.595,00	4.066.511.689,00	85.515.000,00	2,15
11	Alat Pengolahan	3.313.308.658,00	1.384.367.846,00	983.988.652,00	3.713.687.852,00	400.379.194,00	12,08
12	Alat Kantor	104.011.627.932,00	10.295.386.265,00	3.793.819.449,00	110.513.194.748,00	6.501.566.816,00	6,25
13	Alat Rumah Tangga	198.804.860.959,30	23.109.048.856,30	8.345.028.444,30	213.568.881.371,30	14.764.020.412,00	7,43
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.219.397.476,00	69.683.000,00	34.603.000,00	1.254.477.476,00	35.080.000,00	2,88
15	Alat Studio	13.671.062.348,00	1.519.727.723,00	114.461.503,00	15.076.328.568,00	1.405.266.220,00	10,28
16	Alat Komunikasi	10.866.474.454,00	472.070.267,00	83.726.267,00	11.254.818.454,00	388.344.000,00	3,57
17	Peralatan Pemancar	9.020.441.056,00	1.126.997.627,00	294.022.227,00	9.853.416.456,00	832.975.400,00	9,23
18	Alat Kedokteran	145.393.616.455,00	72.047.140.280,00	43.442.766.999,00	173.997.989.736,00	28.604.373.281,00	19,67
19	Alat Kesehatan Umum	678.015.475,00	8.832.441.000,00	4.408.108.000,00	5.102.348.475,00	4.424.333.000,00	652,54
20	Unit Alat Laboratorium	51.024.484.815,00	11.151.205.417,00	4.752.857.993,00	57.422.832.239,00	6.398.347.424,00	12,54
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	175.704.064,00	168.900.600,00	140.537.800,00	204.066.864,00	28.362.800,00	16,14
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	16.357.787.003,00	2.651.810.500,00	1.255.474.500,00	17.754.123.003,00	1.396.336.000,00	8,54
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	212.588.500,00	366.799.262,00	51.326.281,00	528.061.481,00	315.472.981,00	148,40
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	158.228.154,00	17.370.000,00	0,00	175.598.154,00	17.370.000,00	10,98
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	92.680.000,00	0,00	0,00	92.680.000,00	0,00	0,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.284.389.612,00	3.184.200.000,00	2.035.500.000,00	4.433.089.612,00	1.148.700.000,00	34,97
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.221.401,00	64.900.000,00	64.900.000,00	4.221.401,00	0,00	0,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.251.352.069,00	135.647.857,00	33.415.857,00	1.353.584.069,00	102.232.000,00	8,17
29	Komputer Unit	128.395.140.708,00	25.661.410.610,00	10.508.010.407,00	143.548.540.911,00	15.153.400.203,00	11,80
30	Peralatan Komputer	26.963.719.655,00	3.853.725.946,00	479.605.509,00	30.337.840.092,00	3.374.120.437,00	12,51
31	Alat Eksplorasi Topografi	88.193.895,00	0,00	0,00	88.193.895,00	0,00	0,00
32	Alat Pelindung	91.514.641,00	0,00	0,00	91.514.641,00	0,00	0,00
33	Alat SAR	523.601.900,00	34.240.000,00	6.690.000,00	551.151.900,00	27.550.000,00	5,26
34	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00
35	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00
36	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.774.600,00	52.986.000,00	3.100.000,00	59.660.600,00	49.886.000,00	510,36
37	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	11.318.589.614,00	2.238.674.800,00	281.402.819,00	13.275.861.595,00	1.957.271.981,00	17,29
38	Peralatan Olahraga	4.259.738.182,00	30.452.146,00	757000	4.289.433.328,00	29.695.146,00	0,70
TOTAL		**930.401.453.124,30**	**197.179.731.358,30**	**97.541.884.940,30**	**1.030.039.299.542,30**	**99.637.846.418,00**	**10,71**

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Peralatan Mesin terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini :

URAIAN		Peralatan Dan Mesin
SALDO AWAL		**930.401.453.124,30**
Penambahan		
1	Belanja Modal	103.690.199.242,00
2	Mutasi Masuk	47.846.481.481,30
3	Kapitalisasi	544.303.459,00
4	Hibah	1.888.405.375,00
5	Koreksi	588.723.950,00
6	Reklas Masuk	7.583.708.009,00
Jumlah		**162.141.821.516,30**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	1.331.329.346,00
3	Mutasi Keluar	47.846.481.481,30
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	3.362.590.928,00
6	Reklas Keluar	9.963.573.343,00
Jumlah		**62.503.975.098,30**
SALDO AKHIR		**1.030.039.299.542,30**

Penambahan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Peralatan Mesin di beberapa OPD diantaranya Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp7.077.823.640,00 Belanja Modal Alat Angkut sebesar Rp10.614.893.670,00 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp15.575.769.257,00 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp34.797.111.762,00 Belanja Modal Komputer sebesar Rp22.840.402.995,00 dsb. merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD. Mutasi masuk sebesar Rp47.846.481,30,00 merupakan perpindahan aset antar OPD. Sehingga nilai antara mutasi masuk dan mutasi keluar seimbang. Kapitalisasi sebesar Rp544.303.459,00 merupakan penambahan aset tetap yang penganggarannya bukan dari belanja modal. Hibah sebesar Rp1.888.405.375,00 merupakan penambahan aset tetap karena perolehannya dari luar pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berupa alat USG, tabung O2, diagnostic set, laptop, pullseoxymetri, timbangan badan, rak sepatu, dan meja makan kayu dari Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Kesehatan. Koreksi Masuk Peralatan Mesin sebesar Rp588.723.950,00.

Pengurangan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp1.331.329.346,00 merupakan Peralatan Mesin dibawah kapitalisasi. Non Aset sebesar Rp3.362.590.928,00 merupakan barang-barang yang secara khaidah tidak bisa dikelompokan dalam Aset Tetap Peralatan Mesin. Reklas Keluar sebesar Rp9.963.573.343,00 merupakan Aset Peralatan Mesin karena perubahan kebijakan atau status di Tahun berjalan dipindahkan ke jenis yang lain.

C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.147.038.482.182,20 mengalami kenaikan senilai Rp65.697.369.092,20 atau 6,08% dari Tahun 2022 senilai Rp1.081.341.113.090,00, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.24 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	985.234.136.624,00	164.168.260.298,40	105.452.226.154,20	1.043.950.170.768,20	58.716.034.144,20	5,96
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.376.834.201,00	1.893.122.442,00	1.303.997.317,00	51.965.959.326,00	589.125.125,00	1,15
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.641.917.208,00	188.639.900,00	188.639.900,00	7.641.917.208,00	0,00	0,00
4	Tugu/Tanda Batas	37.088.225.057,00	11918371435	5.526.161.612,00	43.480.434.880,00	6.392.209.823,00	17,24
TOTAL		**1.081.341.113.090,00**	**178.168.394.075,40**	**112.471.024.983,20**	**1.147.038.482.182,20**	**65.697.369.092,20**	**6,08**

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Gedung Bangunan terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Gedung dan Bangunan
SALDO AWAL		**1.081.341.113.090,00**
Penambahan		
1	Belanja Modal	81.821.621.133,00
2	Mutasi Masuk	57.301.928.932,20
3	Kapitalisasi	7.128.837.345,00
4	Hibah	12.441.151.300,00
5	Koreksi	326.441.040,00
6	Reklas Masuk	8.391.558.407,20
Jumlah		**167.411.538.157,40**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	2.270.291.072,00
3	Mutasi Keluar	57.301.928.932,20
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	2.429.037.526,00
6	Reklas Keluar	39.712.911.535,00
Jumlah		**101.714.169.065,20**
SALDO AKHIR		**1.147.038.482.182,20**

Penambahan Gedung Bangunan diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Gedung Bangunan di beberapa OPD sebesar Rp81.821.621.133,00 merupakan Belanja Modal Bengunan Gedung sebesar Rp80.974.470.233,00, Belanja Modal Monumen sebesar Rp188.639.900,00, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp658.511.000,00
Mutasi masuk merupakan perpindahan aset antar OPD sehingga nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi Masuk sebesar Rp7.128.837.345,00 merupakan penambah nilai pada aset karena penambahan biaya perolehan dan pemeliharaan. Hibah masuk sebesar Rp12.441.151.300,00 merupakan penambahan aset yang perolehannya bukan dari sumber pengadaan di Kabupaten Klaten. Bangunan Gedung Disbudporapar dan bangunan yang ada di Taman Nyi Ageng Rakit. Pengurangan Gedung Bangunan dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp2.270.291.072,00 Non Aset dan Reklas Keluar.

C.6.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada 31 Desember 2023 senilai Rp1.843.870.379.499,87 mengalami kenaikan sebesar Rp102.023.771.963,00 atau 5,86% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp1.741.846.607.536,87 Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.25 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Jalan	1.408.996.246.394,87	96.407.533.991,80	12.267.021.047,80	1.493.136.759.338,87	84.140.512.944,00	5,97
2	Jembatan	182.246.565.754,00	549.820.322,00	281.177.430,00	182.515.208.646,00	268.642.892,00	0,15
3	Bangunan Air Irigasi	4.847.605.453,00	12.551.819.192,00	12.180.634.500,00	5.218.790.145,00	371.184.692,00	7,66
4	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	0	0	5.305.461.024,00	0,00	0,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.508.773.074,00	4.533.932.271,00	4.004.626.787,00	14.038.078.558,00	529.305.484,00	3,92
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	964.169.417,00	352.049.500,00	328.299.500,00	987.919.417,00	23.750.000,00	2,46
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.154.775.485,00	12.365.383.250,00	5.183.693.049,00	18.336.465.686,00	7.181.690.201,00	64,38
8	Bangunan Air Kotor	8.307.759.421,00	4.559.734.902,00	1.923.256.210,00	10.944.238.113,00	2.636.478.692,00	31,74
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.449.638.470,00	0	0	1.449.638.470,00	0,00	0,00
10	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	0	0	1.558.050.487,00	0,00	0,00
11	Instalasi Pengolahan Sampah	13.558.076.640,00	5.937.534.059,00	5.748.332.059,00	13.747.278.640,00	189.202.000,00	1,40
12	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	0	0	100.199.373,00	0,00	0,00
13	Jaringan Air Minum	11.265.980.746,00	0	0	11.265.980.746,00	0,00	0,00
14	Jaringan Listrik	78.583.305.798,00	8416862124	1733857067	85.266.310.855,00	6.683.005.057,00	8,50
TOTAL		**1.741.846.607.536,87**	**145.674.669.611,80**	**43.650.897.649,80**	**1.843.870.379.498,87**	**102.023.771.962,00**	**5,86**

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini :

URAIAN		Jalan, Jaringan dan Irigasi
SALDO AWAL		**1.741.846.607.536,87**
Penambahan		
1	Belanja Modal	93.344.039.187,00
2	Mutasi Masuk	25.365.506.646,80
3	Kapitalisasi	2.931.523.831,00
4	Hibah	243.956.145,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	20.582.694.655,00
Jumlah		**142.467.720.464,80**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	25.365.506.646,80
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	109.874.000,00
6	Reklas Keluar	14.968.567.856,00
Jumlah		**40.443.948.502,80**
SALDO AKHIR		**1.843.870.379.498,87**

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di beberapa OPD sebesar Rp93.344.039.187,00 merupakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp73.042.096.724,00, Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.189.522.063,00, Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.865.000,00 dan Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.100.555.400,00. Mutasi Masuk sebesar Rp25.365.506.626,80 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga Nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi sebesar Rp2.931.523.831,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa. Hibah sebesar Rp243.956.145,00 merupakan hibah saluran irigasi di Taman Nyi Ageng Rakit dari Provinsi. Reklas masuk dan keluar merupakan perpindahan pencatatan aset antar jenis sehingga pengurangan aset pada Jalan Jaringan Irigasi dipengaruhi dari non aset dan reklas keluar.

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2023 senilai Rp318.155.313.068,62 mengalami kenaikan sebesar Rp22.042.949.212,00 atau 7,44% dari Tahun 2022 senilai Rp296.112.363.856,62 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku Perpustakaan Tercetak di Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6C.26 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	148.058.854.130,94	24.377.635.334,00	15.499.887.910,00	156.936.601.554,94	8.877.747.424,00	6,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	-	-	83.503.319,00	-	0,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.229.921.896,00	3.575.000,00	2.000.000,00	1.231.496.896,00	1.575.000,00	0,13
4	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	-	-	13.595.000,00	-	0,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	-	-	27.893.500,00	-	0,00
6	Barang Bercorak Kesenian	5.765.760.501,98	3.287.288.915,70	2.347.456.915,70	6.705.592.501,98	939.832.000,00	16,30
7	Alat Bercorak Kebudayaan	926.437.015,70	-	-	926.437.015,70	-	0,00
8	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	-	-	91.413.200,00	-	0,00
9	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	331.790.000,00	2.500.000,00	-	334.290.000,00	2.500.000,00	0,75
10	Tanaman	1.970.417.318,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.970.417.318,00	-	0,00
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	137.612.777.975,00	12.221.294.788,00	-	149.834.072.763,00	12.221.294.788,00	8,88
TOTAL		**296.112.363.856,62**	**39.894.794.037,70**	**17.851.844.825,70**	**318.155.313.068,62**	**22.042.949.212,00**	**7,44**

Penambahan dan Pengurangan pada Aset Tetap Lainnya terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Aset Tetap Lainnya
SALDO AWAL		**296.112.363.856,62**
Penambahan		
1	Belanja Modal	11.729.829.587,00
2	Mutasi Masuk	2.720.661.015,70
3	Kapitalisasi	6.627.500,00
4	Hibah	114.018.775,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	12.252.800.105,00
Jumlah		**26.823.936.982,70**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	3.150.000,00
3	Mutasi Keluar	2.720.661.015,70
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	200.775.498,00
6	Reklas Keluar	1.856.401.257,00
Jumlah		**4.780.987.770,70**
SALDO AKHIR		**318.155.313.068,62**

Penambahan Aset Tetap Lainnya diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di beberapa OPD sebesar Rp11.729.829.587,00 terdiri atas Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp58.018.502,00, Belanja Modal Buku Agama sebesar Rp5.249.675.010,00, Belanja Modal Buku Ilmu Sosial sebesar Rp1.721.231.500,00, Belanja Modal Lukisan dan Ukiran sebesar Rp2.000.000,00, Belanja Modal Alat Musik sebesar Rp 2.218.752.500,00, Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp 18.700.000,00, Belanja Modal Ikan Budidaya sebesar Rp2.500.000,00, Belanja Modal Tanaman sebesar Rp152.502.500,00, Belanja Modal Software sebesar Rp104.775.000,00, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.201.674.575,00. Mutasi Masuk sebesar Rp2.720.661.015,70 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi sebesar Rp6.627.500,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa. Hibah sebesar Rp114.018.775,00 merupakan hibah buku dari Kemendikbudristek berupa Buku Pelajaran dan Ensiklopedia.

C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp28.226.907.291,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.508.439.653,80 atau 24,25% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp22.718.467.637,20. Diantaranya dipengaruhi oleh Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan, Gedung Kantor, Bangunan Gedung Olahraga serta tempat Kerja Bangunan Gedung Pertokoan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6C.27 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Konstruksi Dalam Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	495.083.800,00	415.891.200,00	140.437.751,00	770.537.249,00	275.453.449,00	55,64
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	21.784.448.032,20	72.360.311.975,00	66.969.567.395,20	27.175.192.612,00	5.390.744.579,80	24,75
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.935.805,00	83.687.348.364,00	83.845.106.739,00	281.177.430,00	-157.758.375,00	-35,94
TOTAL		**22.718.467.637,20**	**156.463.551.539,00**	**150.955.111.885,20**	**28.226.907.291,00**	**5.508.439.653,80**	24,25

Penambahan dan Pengurangan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan terpengaruh oleh Aktifitas Penambahan seperti terinci pada Bagan dibawah ini:

URAIAN		Konstruksi Dalam Pengerjaan
SALDO AWAL		**22.718.467.637,20**
Penambahan		
1	Belanja Modal	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00
3	Kapitalisasi	1.263.483.406,00
4	Hibah	0,00
5	Koreksi	0,00
6	Reklas Masuk	15.509.916.799,00
Jumlah		**16.773.400.205,00**
Pengurangan		
1	Penghapusan	0,00
2	Ekstrakom	0,00
3	Mutasi Keluar	0,00
4	Koreksi	0,00
5	Non Aset	0,00
6	Reklas Keluar	11.264.960.551,20
Jumlah		**11.264.960.551,20**
SALDO AKHIR		**28.226.907.291,00**

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada kapitalisasi sebesar Rp1.263.483.406,00 merupakan penambahan nilai aset tetap dari belanja yang bersumber dari barang dan jasa dan reklas masuk sebesar Rp15.509.916.799,00 diantaranya dipengaruhi oleh pengerjaan Gedung bangunan Poli RSUD Bagas Waras Klaten, Perencanaan dan Pengawasannya. Sedangkan pengurangan nilai pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.264.960.551,20 merupakan pemindahan aset yang sudah selesai pengerjaan dan sudah bisa digunakan ke jenis aset induknya.
Rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini :

Tabel 6C.28 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

No	Uraian	Saldo awal 01-01-23	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo Akhir 31-12-23	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	SEKRETARIAT DEWAN	140.402.000,00	0,00	0,00	140.402.000,00	0,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.168.824.280,20	5.371.252.312	0,00	17.540.076.592,00	5.371.252.311,80	0,44
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.571.352.175,00	0,00	0,00	8.571.352.175,00	0,00	0,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	0,00	0,00	73.393.240,00	0,00	0,00
5	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	0,00	0,00	197.451.500,00	0,00	0,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	572.812.500,00	0,00	0,00	572.812.500,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	540.304.642,00	137.187.342	0,00	677.491.984,00	137.187.342,00	0,25
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	0,00	234.624.000,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	128.019.300,00	0,00	0,00	128.019.300,00	0,00	0,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	0,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	0,00	0,00	42.294.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		**22.718.467.637,20**	**5.508.439.653,80**	0,00	**28.226.907.291,00**	**5.508.439.653,80**	0,24

C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.563.801.367.925,37) mengalami kenaikan sebesar Rp168.553.470.240,83 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.395.247.897.684,54). Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6C.29 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	886.789.227.506,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.030.039.299.542,30	71.751.196.560,88	774.193.885.987,00	255.845.413.555,30
3	Gedung dan Bangunan	1.147.476.368.182,20	20.668.906.629,44	248.556.967.806,23	898.677.831.636,97
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.843.870.379.498,87	62.348.653.378,46	1.442.775.351.961,81	401.095.027.537,06
5	Aset Tetap Lainnya	318.155.313.068,62	13.118.523.793,10	98.275.162.170,33	219.880.150.898,29
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	0,00	0,00	22.718.467.637,20
Jumlah		**5.249.049.055.435,19**	**167.887.280.361,88**	**2.563.801.367.925,37**	**1.798.216.891.264,82**

C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Dana Cadangan sebesar Rp45.877.805.225,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.542.851.039,00 atau 51,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.334.954.186,00. Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelengaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp45.000.000.000,00 dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jateng dengan nomor Bilyet A358407 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Giro Nomor 1009011435 sebesar

Rp30.000.000.000,00 dengan terdapat bunga sebesar Rp877.805.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.30 Dana Cadangan TA 2023

NO	JENIS	NOMINAL POKOK	BUNGA PER 31 Des 2023
1	DEPOSITO	15.000.000.000,00	641.042.337,00
2	GIRO	30.000.000.000,00	236.762.888,00
JUMLAH		**45.000.000.000,00**	**877.805.225,00**

C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2023. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Tabel 6C.31 Aset Lainnya TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	0,00	0,00	9.532.430.760,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak berwujud	13.107.021.728,00	2.679.293.754,00	2.504.750.775,00	13.281.564.707,00	174.542.979,00	1,33
3	Aset Lain-Lain	265.892.865.204,38	9.133.892.886,00	120.425.383.357,95	154.601.374.732,43	(111.291.490.471,95)	(41,86)
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.974.225.581,62)	843.051.001,19	1.728.717.457,46	(10.859.892.037,89)	(885.666.456,27)	8,88
5	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	3.460.083.000,00	0,00	3.460.083.000,00	3.460.083.000,00	100,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(148.431.504.364,94)	41.969.988.124,61	916.765.713,68	(107.378.281.954,01)	41.053.222.410,93	(27,66)
TOTAL		**130.126.587.745,82**	**58.086.308.765,80**	**125.575.617.304,09**	**62.637.279.207,53**	**(67.489.308.538,29)**	**(51,86)**

Saldo Akhir atas Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2023 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya TA 2023 sebesar Rp62.637.279.207,53 mengalami penurunan senilai Rp67.489.308.538,29 atau (51,86%) dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp130.126.587.745,82.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6C.32 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2023

URAIAN		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	Akumulasi Penyusutan Aset	Jumlah
	SALDO AWAL	**9.532.430.760,00**	**13.107.021.728,00**	**265.892.865.204,38**	**-9.974.225.581,62**	**0,00**	**-148.431.504.364,94**	**130.126.587.745,82**
Penambahan								
1	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Mutasi Masuk	0,00	0,00	70.360.000,00	0,00	0,00	0,00	70.360.000,00
3	Kapitalisasi	0,00	96.329.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.329.879,00
4	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reklas Masuk	0,00	381.289.300,00	9.071.470.386,00	0,00	0,00	0,00	9.452.759.686,00
	Jumlah	**0,00**	**477.619.179,00**	**9.141.830.386,00**	**843.051.001,19**	**3.460.083.000,00**	**41.969.988.124,61**	**55.892.571.690,80**
Pengurangan								
1	Penghapusan	0,00	0,00	120.333.360.858,95	0,00	0,00	0,00	120.333.360.858,95
2	Ekstrakom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mutasi Keluar	0,00	0,00	70.360.000,00	0,00	0,00	0,00	70.360.000,00
4	Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reklas Keluar	0,00	303.076.200,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	332.676.200,00
	Jumlah	**0,00**	**303.076.200,00**	**120.433.320.858,95**	**1.728.717.457,46**	**0,00**	**916.765.713,68**	**123.381.880.230,09**
	SALDO AKHIR	**9.532.430.760,00**	**13.281.564.707,00**	**154.601.374.731,43**	**-10.859.892.037,89**	**3.460.083.000,00**	**-107.378.281.954,01**	**62.637.279.206,53**

C.6.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memiliki Tagihan Jangka Panjang.

C.6.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp9.532.430.760,00.

Tabel 6C.33 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2023

No	Uraian barang	Rincian Nilai aset	Alamat	Akumulasi Penyusutan
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	2.676.650.000,00	Keden,Pedan, Pedan Timur;	-
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	541.440.000,00	Keden,Pedan, Pedan Barat;	-
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	2.812.175.000,00	Sabrang,Delanggu	-
4	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	746.630.000,00	Sabrang,Delanggu	-
5	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	2.501.600.760,00	Delanggu Barat	850.544.258,00
6	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	253.935.000,00	Delanggu Timur	86.337.900,00
	JUMLAH	**9.532.430.760,00**		**936.882.158,00**

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m2 dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m2 keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m2 (4.230 m2 + 7.990 m2). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m2 dan 785 los seluas 2.622,91 m2. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan berupa tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m2 di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m2 di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m2. Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama sebesar Rp6.314.340.760,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp3.558.805.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp2.755.535.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu atas Gedung dan Bangunan terdapat penyusutan sebesar Rp936.882.158,00 dikarenakan pada tahun 2019 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar

Delanggu tercatat di Aset Tetap sedangkan sejak tahun anggaran 2020 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Lainnya sehingga tidak dilakukan penyusutan.

C.6.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2023 senilai Rp13.281.564.707,00 mengalami kenaikan sebesar Rp174.542.979,00 atau (1,33%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp13.107.021.728,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal software dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor. Rincian saldo akhir aset tidak berwujud pada tahun anggaran 2023 terdiri dari lisence dan franchaise sebesar Rp192.000.000,00, hak paten sebesar Rp3.300.000,00, software sebesar Rp2.336.392.422,00, kajian sebesar Rp9.749.247.285,00 dan aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp1.000.625.000,00.

Tabel 6C.34 Aset Tidak Berwujud TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Lisensi dan Franchise	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00	0,00
2	Hak Paten	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
3	Software	2.231.617.422,00	104.775.000,00	0,00	2.336.392.422,00	104.775.000,00	4,70
4	Kajian	9.679.479.306,00	372.844.179,00	303.076.200,00	9.749.247.285,00	69.767.979,00	0,72
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	2.201.674.575,00	2.201.674.575,00	1.000.625.000,00	0,00	0,00
6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-9.974.225.581,62	843.051.001,19	1.728.717.457,46	-10.859.892.037,89	-885.666.456,27	8,88
	Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)	**13.107.021.728,00**	**2.679.293.754,00**	**2.504.750.775,00**	**13.281.564.707,00**	**174.542.979,00**	**1,33**
	Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)	**3.132.796.146,38**	**3.522.344.755,19**	**4.233.468.232,46**	**2.421.672.669,11**	**-711.123.477,27**	**-22,70**

Rincian atas masing-masing Aset Tidak Berwujud diuraikan sebagai berikut:

a. Lisensi dan Franchise

Lisensi dan Franchise per 31 Desember 2023 senilai Rp192.000.000,00. Lisensi dan Franchise TA 2023 berupa Belanja Modal Software (Lisensi IMM Medsos) Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Hak Paten

Hak Paten per 31 Desember 2023 senilai Rp3.300.000,00 dengan rincian Hak Paten untuk produksi Sindu Melati sebesar Rp1.800.000,00, Hak Paten untuk beras Rojolele Srinar sebesar Rp750.000,00 dan beras Rojolele Srinuk sebesar Rp750.000,00.

c. Software

Software per 31 Desember 2023 senilai Rp2.336.392.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.775.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 Rp2.231.617.422,00. Software yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya Software Aplikasi E-Ticketing dan Aplikasi Nusa.

d. Kajian

Kajian per 31 Desember 2023 senilai Rp9.749.247.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.767.979,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 Rp9.679.479.306,00. Kajian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantara berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur jasa Nasihat, dan desain arsitektur.

e. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.000.625.000,00. Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di website Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta berupa Master Plan

Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan software pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

C.6.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain saldo 31 Desember 2023 senilai Rp154.601.374.732,43 mengalami penurunan sebesar Rp111.291.490.472,95 atau (41,86%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai Rp265.892.865.204,38. Aset lainnya terdiri atas aset Rusak Berat atau Usang sebesar Rp47.438.617.109,00 dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp107.162.757.623,43 penurunan yang terjadi diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2023.

Tabel 6C.35 Aset Lain-lain TA 2023

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	158.495.800.232,95	3.931.191.530,00	114.988.374.653,95	47.438.617.109,00	-111.057.183.123,95	-70,07
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.397.064.971,43	5.202.701.356,00	5.437.008.704,00	107.162.757.623,43	-234.307.348,00	-0,22
TOTAL		265.892.865.204,38	9.133.892.886,00	120.425.383.357,95	154.601.374.732,43	-111.291.490.471,95	-41,86

Saldo aset lain-lain netto dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp154.601.374.732,43. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain:

Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut:

a. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp47.438.617.109,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang telah diusulkan penghapuskan (bukan barang rusak berat) namun sampai dengan tahun 2022 SK penghapusan belum jadi, missal Gedung kantor yang akan dilakukan pembangunan maka gedung lama termasuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, buku yang sudah tidak relevan dengan kurikulum yang digunakan. Pada tahun 2023 per 31 Desember 2023 senilai Rp107.162.757.623,43.

C.6.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2023 senilai (Rp10.859.892.037,89) mengalami kenaikan sebesar Rp885.666.456,27 atau (8,88%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai (Rp9.974.225.581,62).

C.6.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada 31 Desember 2023 senilai (Rp107.378.281.954,01) mengalami penurunan sebesar Rp41.053.222.410,93 atau (27,66%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2022 yang senilai (Rp148.431.504.364,94).

C.6.1.5.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada 31 Desember 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan

uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di bank Indonesia saldo TDF di Tahun 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00. Terdiri dari kurang bayar atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6C.36 Treasury Deposit Facility (TDF)TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	TDF KURANG BAYAR DBH PPH 25/29 2022	33.378.000,00
2	TDF KURANG BAYAR DBH MINYAK BUMI 2021	32.515.000,00
3	TDF KURANG BAYAR DBH minerba iuran tetap 2022	835.000,00
4	TDF DBH PPH 21	3.035.471.000,00
5	TDF DBH PPH 25/29	54.001.000,00
6	TDF DBH PBB	299.086.000,00
7	TDF DBH MINYAK BUMI	1.315.000,00
8	TDF DBH minerba iuran tetap	112.000,00
9	TDF DBH PANAS BUMI	3.370.000,00
Jumlah		**3.460.083.000,00**

C.6.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri atas dua klasifikasi yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.045.774.843,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.37 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	Saldo 01 Januari 2023	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3,00	4	5	6	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.243.506.508,00	520.804.928,00	0,00	1.764.311.436,00	520.804.928,00	41,88
5	Utang Belanja	10.275.310.270,00	2.006.153.137,00	0,00	12.281.463.407,00	2.006.153.137,00	19,52
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**11.570.216.778,00**	**2.526.958.065,00**	-	**14.045.774.843,00**	**2.526.958.065,00**	21,84

C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 tidak memiliki Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

C.6.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka tahun 2023 sebesar Rp1.764.311.436,00 atau naik sebesar Rp520.804.928,00 (41,88%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.243.506.508,00. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame Kain sebesar Rp899.168.957,00, Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Papan Rp200.885.803,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar

Rp664.256.676,00 yang terdiri dari Sewa Tanah Persil sebesar Rp660.837.599,00 dan Sewa Bangunan Gedung sebesar Rp3.419.077,00.

Tabel 6C.38 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	Jumlah
1	Pendapatan Pajak Reklame Kain	899.168.957,00
2	Pajak Reklame Papan	200.885.803,00
3	Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
4	Sewa tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja	660.837.599,00
5	Sewa bangunan gedung-bangunan tempat kerja-Bangunan gudang	3.419.077,00
Jumlah		**1.764.311.436,00**

C.6.2.1.3 Utang Belanja

Utang belanja tahun 2023 sebesar Rp12.281.463.407,00 atau naik sebesar Rp2.006.153.137,00 (19,52%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10.275.310.270,00. Utang Belanja TA 2023 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan Jasa dan utang belanja bagi hasil sebesar Rp12.281.463.407,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6C.39 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	341.407.015,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.200.767.299,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	4.739.289.093,00
Jumlah		**12.281.463.407,00**

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.40 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2023

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2023
1	Dinas Pendidikan	6.678.422,00
2	Dinas Kesehatan	79.188.924,00
3	Puskesmas Klaten Utara	3.575.995,00
4	Puskesmas Gantiwarno	3.342.764,00
5	Puskesmas Prambanan	2.354.151,00
6	Puskesmas Manisrenggo	3.230.291,00
7	Puskesmas Jatinom	2.754.825,00
8	Puskesmas Karanganom	2.964.478,00
9	Puskesmas Ceper	2.398.412,00
10	Puskesmas Jambu Kulon	3.926.304,00
11	Puskesmas Cawas I	5.283.530,00
12	Puskesmas Cawas II	6.883.911,00
13	Puskesmas Trucuk II	2.770.887,00
14	Rsud Bagas Waras	72.678.521,00
15	Puskesmas Wedi	3.434.666,00
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	109.117,00
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.502.291,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	2.890.652,00
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88.532.212,00
20	Dinas Perhubungan	1.093.862,00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1.062.102,00
22	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Dan Pariwisata	457.600,00
23	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.125.238,00
24	Sekretariat Daerah	9.783.948,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.387.172,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.295.118,00
27	Inspektorat	12.811.464,00
28	Kecamatan Wonosari	986.376,00
29	Kecamatan Jatinom	2.094.520,00
30	Kecamatan Wedi	367.134,00
31	Kecamatan Pedan	1.442.128,00
Jumlah		**341.407.015,00**

Adapun Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.41 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2023

No	Nama SKPD / Bagian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	12.573.710,00
2	DINAS KESEHATAN	46.425.628,00
3	Puskesmas Klaten Utara	114.882.173,00
4	Puskesmas Gantiw arno	281.471.632,00
5	Puskesmas Prambanan	77.482.991,00
6	Puskesmas Kebondalem Lor	45.057.230,00
7	Puskesmas Manisrenggo	149.920.054,00
8	Puskesmas Kemalang	58.366.463,00
9	Puskesmas Karangnongko	15.021.526,00
10	Puskesmas Jatinom	110.955.206,00
11	Puskesmas Kayumas	8.659.412,00
12	Puskesmas Karanganom	109.362.049,00
13	Puskesmas Tulung	2.040.986,00
14	Puskesmas Klaten Tengah	36.434.050,00
15	Puskesmas Majegan	6.754.698,00
16	Puskesmas Polanharjo	57.621.942,00
17	Puskesmas Delanggu	15.311.225,00
18	Puskesmas Juw iring	4.026.171,00
19	Puskesmas Wonosari I	46.226.816,00
20	Puskesmas Wonosari II	23.431.563,00
21	Puskesmas Ceper	99.880.630,00
22	Puskesmas Jambu Kulon	106.169.713,00
23	Puskesmas Pedan	21.236.774,00
24	Puskesmas Karangdow o	75.031.802,00
25	Puskesmas Klaten Selatan	10.225.898,00
26	Puskesmas Caw as I	68.808.806,00
27	Puskesmas Caw as II	211.836.777,00
28	Puskesmas Trucuk I	54.283.606,00
29	Puskesmas Trucuk II	7.512.237,00
30	Puskesmas Bayat	5.716.998,00
31	RSUD Bagas Waras	2.471.563.143,00
32	Puskesmas Kalikotes	21.715.007,00
33	Puskesmas Ngaw en	26.852.265,00
34	Puskesmas Kebonarum	1.468.311,00
35	Puskesmas Wedi	2.970.141,00
36	Puskesmas Jogonalan 1	17.737.660,00
37	Puskesmas Jogonalan 2	3.332.010,00
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.373.544,00
39	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83.432.113,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.001.540,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.590.832,00
42	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AI	10.245.732,00
43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.487.967,00
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.797.458,00
45	DINAS PERHUBUNGAN	2.190.708.968,00
46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.971.552,00
47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	36.382.264,00
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.781.889,00
49	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARWISA	16.566.792,00
50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.744.809,00
51	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.270.259,00
52	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.199.116,00
53	BAGIAN UMUM	197.747.005,00
54	SEKRETARIAT DPRD	1.301.750,00
55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	68.714,00
56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAI	11.594.000,00
57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUS	888.000,00
58	INSPEKTORAT DAERAH	17.102.470,00
59	KECAMATAN PRAMBANAN	2.011.793,00
60	KECAMATAN KARANGNONGKO	2.525.518,00
61	KECAMATAN CEPER	974.500,00
62	KECAMATAN PEDAN	1.741.006,00
63	KECAMATAN JUWIRING	428.000,00
64	KECAMATAN WONOSARI	2.170.983,00
65	KECAMATAN DELANGGU	1.768.297,00
66	KECAMATAN POLANHARJO	2.628.543,00
67	KECAMATAN KARANGANOM	1.717.842,00
68	KECAMATAN TULUNG	1.563.568,00
69	KECAMATAN GANTIWARNO	3.370.014,00
70	KECAMATAN JATINOM	1.892.958,00
71	KECAMATAN KEMALANG	135.088,00
72	KECAMATAN NGAWEN	623.513,00
73	KECAMATAN KALIKOTES	1.411.880,00
74	KECAMATAN KLATEN UTARA	178.500,00
75	KECAMATAN KLATEN TENGAH	6.933.933,00
76	Kelurahan Bareng	86.997,00
77	Kelurahan Kabupaten	899.186,00
78	Kelurahan Klaten	686.151,00
79	Kelurahan Tonggalan	218.135,00
80	Kelurahan Buntalan	393.957,00
81	Kelurahan Mojayan	1.184.126,00
82	KECAMATAN KLATEN SELATAN	1.175.355,00
83	KELURAHAN GAYAMPRIT	736.761,00
84	KECAMATAN WEDI	1.661.221,00
85	KECAMATAN BAYAT	2.791.744,00
86	KECAMATAN CAWAS	168.500,00
87	KECAMATAN TRUCUK	2.889.896,00
88	KECAMATAN KEBONARUM	3.031.486,00
89	KECAMATAN JOGONALAN	950.713,00
90	KECAMATAN MANISRENGGO	1.350.292,00
91	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.842.766,00
	Jumlah	**7.200.767.299,00**

Adapun Rincian Utang Belanja Bagi Hasil terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.42 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil TA 2023

NO	URAIAN	2023
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.199.211.417,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	540.077.676,00
Jumlah		**4.739.289.093,00**

Utang Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.030.000,00. Utang belanja pemeliharaan TA 2023 berupa Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang pada RSUD Bagas Waras.

C.6.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat utang jangka pendek lainnya sedangkan pada tahun 2022 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp51.400.000,00.

C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesainnya dilakukan setelah 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 sebesar Rp0,00.

C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.436.938.180.155,21 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6C.43 Ekuitas TA 2023

No	Uraian	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	3.524.401.938.130,28	3.506.874.599.618,72
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(87.463.757.975,07)	22.143.605.302,95
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(4.616.266.791,39)
4	EKUITAS AKHIR	3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,27

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2023 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Klaten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diperoleh dari perhitungan Pendapatan-LRA tahun 2023 ditambah tambahan Piutang Pendapatan pada tahun 2023 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dikurangi pelunasan Piutang 2022 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023. Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2023 sebesar Rp2.340.677.515.718,92 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	363.149.639.433,92	339.095.872.692,00	24.053.766.741,92
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.947.990.344.690,00	2.319.295.962.583,00	(371.305.617.893,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	29.537.531.595,00	14.500.000.000,00	15.037.531.595,00
Jumlah		**2.340.677.515.718,92**	**2.672.891.835.275,00**	**(332.214.319.556,08)**

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan LRA dengan nilai pendapatan LO, perbedaan tersebut disebabkan diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah LO lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah LRA dikarenakan antara lain adanya pengakuan piutang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, pelunasan Piutang Pendapatan asli Daerah TA 2022, penghapusan piutang Pendapatan Asli Daerah, pengakuan pendapatan diterima dimuka.
2. Pendapatan Transfer LO lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer LRA antara lain disebabkan adanya Dana Bagi Hasil Pusat yang berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF), Pendapatan Transfer Dana Desa yang langsung diterima oleh masing-masing rekening desa, serta pengakuan dan pelunasan piutang transfer daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO lebih besar disbandingkan LRA dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diterima langsung oleh OPD penerima.

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang berupa Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp363.149.639.433,92 lebih besar dari Pendapatan LRA selisih sebesar Rp24.053.776.741,92 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	**363.149.639.433,92**	**339.095.872.692,00**	**24.053.766.741,92**
1	Pajak Daerah - LO	174.795.384.628,00	165.852.621.120,00	8.942.763.508,00
2	Retribusi Daerah – LO	19.380.192.527,00	18.784.804.890,00	595.387.637,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	32.960.510.844,51	21.741.480.548,00	11.219.030.296,51
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	136.013.551.434,41	132.716.966.134,00	3.296.585.300,41

1. Nilai pendapatan pajak daerah LO lebih besar dibandingkan pendapatan pajak pada LRA, disebabkan oleh adanya penambahan piutang baru atas pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp46.730.213.291,00 serta pelunasan piutang pajak TA 2022 sebesar Rp50.345.896.886,00. Selish ini juga dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak di terima dimuka TA 2023 yang berasal dari pajak Reklame sebesar Rp1.100.054.760,00 dan atas Pendapatan diterima dimuka TA 2022 sebesar Rp31.574.400,00 yang diakui sebagai pendapatan tahun ini. Sedangkan pada Pajak PBBP2 terdapat penghapusan piutang sebesar Rp13.658.501.863,00.
2. Pendapatan retribusi LO lebih besar dari pendapatan retribusi pada LRA karena terdapat pelunasan piutang retribusi TA 2022 sebesar Rp421.904.760,00 dan pengakuan piutang retribusi TA 2023 sebesar Rp438.042.566,00. Selain piutang selisih juga disebabkan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp664.256.676,00 dan atas pendapatan diterima dimuka TA 2022 sebesar Rp1.243.506.508,00 yang diakui sebagai pendapatan tahun ini.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO TA 2023 sebesar Rp32.960.510.844,51 lebih besar daripada LRA karena adanya pelunasan piutang pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp8.725.989.464,00 dan pengakuan atas piutang pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp17.547.350.389,51 serta penyesuaian pencatatan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp2.397.669.371,00
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang ada di LRA karena adanya pengakuan jasa giro dan pendapatan bunga dana cadangan sebesar Rp542.851.039,00. Selisih Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO juga disebabkan adanya penyesuaian piutang denda pbb atas persentase pengenaan denda dan perhitungan denda pbb p2 tahun 2023 sebesar Rp2.925.247.363,00 dan penyesuaian kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,41. Penyebab perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO juga dikarenakan adanya pelunasan piutang pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp368.309.365,00 dan pengakuan piutang pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp196.696.236,00 dan koreksi nilai piutang pendapatan BLUD sebesar Rp100.000,00.
   Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO, dan Dana Insentif Fiskal-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.947.990.344.690,00. Nilai Pendapatan Transfer Pusat-LO lebih besar dibandingkan dengan nilai LRA yang dikarenakan pembentukan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah pusat atas pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3.460.083.000,00. Sedangkan untuk pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO lebih besar dibandingkan dengan nilai pada LRA karena adanya pengakuan atas piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 serta penerimaan pelunasan atas piutang transfer bagi hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00.

Tabel 6D.3 Realisasi PendapatanTransfer – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	**1.947.990.344.690,00**	**2.319.295.962.583,00**	**- 371.305.617.893**
1	**Transfer Pemerintah Pusat-LO**	**1.696.736.093.174,00**	**1.693.276.010.174,00**	**3.460.083.000**
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	56.041.134.641,00	52.581.051.641,00	3.460.083.000
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.209.400.877.465,00	1.209.400.877.465,00	-
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	63.086.397.870,00	63.086.397.870,00	-
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	368.207.683.198,00	368.207.683.198,00	-
2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**	**11.882.483.000,00**	**392.184.329.000,00**	**- 380.301.846.000**
	1. Dana Insentif Fiskal-LO	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	-
	2. Dana Desa	0,00	380.301.846.000,00	- 380.301.846.000
3	**Transfer Pemerintah Provinsi-LO**	**239.371.768.516,00**	**233.835.623.409,00**	**5.536.145.107**
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	228.444.340.273,00	222.908.195.166,00	5.536.145.107
	2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	10.927.428.243,00	10.927.428.243,00	-

D.6.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.696.736.093.174,00 lebih besar dibanding Pendapatan LRA sebesar Rp1.693.276.010.174,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 sebesar Rp56.041.134.641,00 lebih besar dibanding Pendapatan LRA dengan selisih nilai sebesar (Rp3.460.083.000,00) yang merupakan transfer DBH dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6D.4 Realisasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023
1	TDF KURANG BAYAR DBH PPH 25/29 2022	33.378.000,00	**0,00**
2	TDF KURANG BAYAR DBH MINYAK BUMI 2021	32.515.000,00	0,00
3	TDF KURANG BAYAR DBH minerba iuran tetap 2022	835.000,00	0,00
4	TDF DBH PPH 21	3.035.471.000,00	0,00
5	TDF DBH PPH 25/29	54.001.000,00	0,00
6	TDF DBH PBB	299.086.000,00	0,00
7	TDF DBH MINYAK BUMI	1.315.000,00	0,00
8	TDF DBH minerba iuran tetap	112.000,00	0,00
9	TDF DBH PANAS BUMI	3.370.000,00	0,00
10	TDF TAHUN ANGGARAN 2022	5.769.109.041,00	5.769.109.041,00
	JUMLAH	**9.229.192.041,00**	**5.769.109.041,00**

b. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik TA 2023 penerimaan pendapatan LRA maupun LO sama jumlahnya, tidak terdapat selisih.

D.6.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya TA. 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal tahun 2023 yang diberikan berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

D.6.1.2.3. Pendapatan Transfer Daerah TA 2023 sebesar Rp239.371.768.516,00 lebih besar dibandingkan nilai pendapatan transfer antar daerah LRA. Dengan selisih sebesar Rp5.536.145.107,00. Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp3.066.129.116,00 dan pengakuan piutang pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00.

Tabel 6D.5 Realisasi PendapatanTransfer Antar Daerah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**	**239.371.768.516,00**	**233.835.623.409,00**	**5.536.145.107,00**
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	228.444.340.273,00	222.908.195.166,00	5.536.145.107,00
	b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.927.428.243,00	10.927.428.243,00	0,00

D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00.

D.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.261.576.419,00
Dengan rincian sebagai berikut ini :

Tabel 6D.6 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	**29.537.531.595,00**	**14.500.000.000,00**	**15.037.531.595,00**
1	Pendapatan Hibah – LO	29.537.531.595,00	14.500.000.000,00	15.037.531.595,00
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.518.818.775,00	1.200.000.000,00	1.318.818.775,00
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	13.540.418.670,00	0,00	13.540.418.670,00
	3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri	158.651.000,00	0,00	158.651.000,00
	4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	5. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	13.312.643.150,00	13.300.000.000,00	12.643.150,00
	6. Penerimaan Hibah penanganan Covid dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Hibah-LO TA 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00 berupa barang senilai Rp15.037.531.595,00 berupa uang sebesar Rp14.500.000.000,00. Perbedaan pendapatan hibah LO dan LRA sebesar Rp15.037.531.595,00 dikarenakan pendapatan tersebut langsung diterima oleh OPD penerima dalam bentuk barang dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2023 sebesar Rp1.318.818.775,00 dengan rincian SMP Negeri sebesar Rp111.907.175,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp1.206.911.600,00.
b. Pada tahun 2023 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 sebesar Rp13.540.418.670,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp5.445.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp475.514.225,00; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp13.059.459.445,00.
c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO TA 2023 sebesar Rp158.651.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar R45.384.000,00 dan SD Negeri sebesar Rp113.267.000,00
d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO TA 2023 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan hibah yang diterima oleh SD Negeri.
e. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya – LO TA 2023 sebesar Rp12.643.150,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp300.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp12.343.150,00

D.6.2 Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.426.888.360.975,11 dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.7 Realisasi Beban Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Pegawai	974.016.906.811,00	974.218.788.878,00	- 201.882.067,00
2	Beban Persediaan	262.272.864.903,88	133.518.769.345,00	128.754.095.558,88
3	Beban Jasa	335.783.193.329,18	456.962.877.679,00	- 121.179.684.349,82
4	Beban Pemeliharaan	75.000.244.712,00	76.253.100.847,00	- 1.252.856.135,00
5	Beban Perjalanan Dinas	67.837.193.471,00	68.008.204.871,00	- 171.011.400,00
6	Beban Subsidi	1.907.074.332,00	1.907.074.332,00	-
7	Beban Hibah	89.978.195.464,00	89.978.195.464,00	-
8	Beban Bantuan Sosial	13.071.300.000,00	13.071.300.000,00	-
9	Beban Penyusutan	225.195.441.262,24	-	225.195.441.262,24
10	Beban Penyisihan Piutang	27.837.375.213,81	-	27.837.375.213,81
11	Beban Transfer	353.988.571.476,00	733.585.177.063,00	- 379.596.605.587,00
Jumlah		**2.426.888.360.975,11**	**2.547.503.488.479,00**	- 120.615.127.503,89

D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp974.016.906.811,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp974.218.788.878,00 sehingga Belanja Pegawai LRA lebih besar Rp201.882.067,00 dibandingkan dengan beban pegawai LO. Penjelasan selisih sebesar Rp201.882.067,00 yaitu pelunasan utang pegawai tahun 2022 sebesar Rp537.489.082,00 dan utang pegawai tahun 2023 sebesar Rp335.607.015,00.

D.6.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah Penggunaan/Pemakaian atas aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp262.272.864.903,88 lebih besar Rp128.754.095.558,88 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp133.518.769.345,00 yaitu beban persediaan yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD dan belanja barang jasa BOS.

D.6.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset akibat transaksi pengadaan jasa. Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp335.783.193.329,18 lebih besar Rp95.228.814.366,18 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp240.554.378.963,00 yaitu adanya koreksi belanja, asuransi dibayar dimuka, kapitalisasi dan jurnal balik atas jasa konsultasi.

D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan atau biaya perawatan adalah sejumlah anggaran dana yang ditujukan untuk menjaga aset agar tetap kondisi optimal selama pemakaian. Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp75.000.244.712,00 lebih kecil (Rp1.252.856.135,00) dibandingkan dengan LRA sebesar Rp76.253.100.847,00 yaitu adanya koreksi belanja, asuransi dibayar dimuka.

D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Kompensasi yang diberikan terhadap pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, dan perjalanan dinas luar negeri. Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.837.193.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.8 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.823.115.556,00	34.845.432.056,00	-22.316.500,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	104.064.898,00	104.064.898,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.243.929.623,00	22.288.929.623,00	-45.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.880.637.805,00	3.880.637.805,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.828.126.389,00	5.931.821.289,00	-103.694.900,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	957.319.200,00	957.319.200,00	0,00
Jumlah		**67.837.193.471,00**	**68.008.204.871,00**	**-171.011.400,00**

Beban Perjalanan Dinas LO lebih kecil (Rp171.011.400,00) dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp68.008.204.871,00 dikarenakan terdapat beban perjalanan dinas yang dikapitalisasikan ke belanja modal gedung kantor.

D.6.2.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.907.074.332,00. Beban Subsidi Bunga kepada UMKM Tahun 2023 sama dengan dengan nilai Belanja Subsidi pada LRA sebesar Rp1.907.074.332,00 yang terbagi dalam pada PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) sebanyak 222 debitur dan PT. BPR BANK Klaten (Perseroda) sebanyak 654 debitur.

D.6.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00 sama dengan realisasi Belanja Hibah LRA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.9 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.502.382.900,00	28.502.382.900,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	32.902.733.200,00	32.902.733.200,00	0,00
4	Beban Hibah Dana BOS	27.476.559.864,00	27.476.559.864,00	0,00
Jumlah		**89.978.195.464,00**	**89.978.195.464,00**	**0,00**

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2023 masuk dalam Rekening Beban Persediaan.

1. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023 Rp1.096.519.500,00 tetap atau sama dibanding LRA 2023 Rp1.096.519.500,00.

Tabel 6D.10 Realisasi Beban Transfer Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023

Uraian		TA 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8	Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah		**1.096.519.500,00**	**1.096.519.500,00**	**100,00**

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp28.502.382.900,00 yang berupa hibah barang.
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp32.902.733.200,00
4. Beban Hibah Dana BOS TA 2023 sebesar Rp27.476.559.864,00

D.6.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.071.300.000,00 sedangkan Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 sebesar Rp10.729.800.000,00. Nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sama dengan dengan nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA sebesar Rp13.071.300.000,00.

D.6.2.9 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp225.195.441.262,24 naik sebesar Rp49.059.364.510,64 dari tahun 2022 sebesar Rp176.136.076.751,60.

Tabel 6D.11 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

No.	Uraian	2023	2022	Selisih
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.164.604.839,01	73.418.632.950,24	1.745.971.888,77
2	Gedung dan Bangunan	20.941.019.163,76	19.086.256.519,18	1.854.762.644,58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.041.836.020,67	66.565.094.523,88	-3.523.258.503,21
4	Aset Tetap Lainnya	13.448.101.791,40	13.618.591.359,20	-170.489.567,80
5	Aset Tak Berwujud	1.213.634.182,99	876.087.587,05	337.546.595,94
6	Beban Lain-lain	51.377.487.544,41	2.571.413.812,05	48.806.073.732,36
7	Penyusutan Properti Investasi	8.757.720,00	0,00	8.757.720,00
Jumlah		**225.195.441.262,24**	**176.136.076.751,60**	**49.059.364.510,64**

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp75.048.575.404,56 naik sebesar Rp1.629.942.454,32 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp73.418.632.950,24.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp20.949.920.008,76 naik sebesar Rp1.863.663.489,58 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp19.086.256.519,18.
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp63.041.836.020,67 turun sebesar (Rp3.523.258.503,21) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp66.565.094.523,88.

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp13.137.108.908,54 turun sebesar (Rp481.482.450,66) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp13.618.591.359,20.
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 sebesar Rp1.058.423.804,64 naik sebesar Rp182.336.217,59 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp876.087.587,05.
6. Beban Lain-lain TA 2023 sebesar Rp 51.391.009.627,41 naik sebesar Rp48.819.595.815,36 dibandingkan TA 2022 sebesar Rp2.571.413.812,05.
7. Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2023 sebesar Rp8.757.720,00 sedangkan di TA 2022 tidak terdapat Beban Penyusutan Properti Investasi.

D.6.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.837.375.213,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.12 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

No	Uraian	2023	2022	Selisih
1	Penyisihan Piutang Pajak	22.367.602.608,81	8.955.697.001,00	13.411.905.607,81
2	Penyisihan Piutang Retribusi	181.726.237,00	128.994.492,00	52.731.745,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.288.046.368,00	4.105.885.783,00	1.182.160.585,00
Jumlah		**27.837.375.213,81**	**13.190.577.276,00**	**14.646.797.937,81**

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.367.602.608,81,00 selisih sebesar Rp13.411.905.607,81,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.955.697.001,00.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp181.726.237,00 selisih sebesar Rp52.731.745,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.994.492,00.
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.288.046.368,00 selisih sebesar Rp1.182.160.585,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.105.885.783,00.

D.6.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp353.988.571.476,00 selisih sebesar (Rp379.596.605.587,00) bila dibandingkan dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp733.585.177.063,00, hal ini disebabkan karena Dana Transfer Dana Desa langsung diterimakan di rekening masing-masing desa sebesar Rp380.301.846.000,00. Sedangkan transfer bagi hasil pajak daerah selisih sebesar Rp705.446.082,00 dikarenakan adanya pelunasan utang transfer tahun 2022 sebesar Rp3.493.765.335 dan terdapat utang transfer tahun 2023 sebesar Rp. 4.199.211.417,00. Transfer bagi hasil retribusi selisih sebesar (Rp205.669,00) karena adanya pelunasan utang transfer tahun 2022 sebesar Rp532.885.130,00. dan utang transfer tahun 2023 sebesar Rp 532.679.461,00. Rincian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.13 Realisasi Beban Transfer Tahun 2023

No	Uraian	LO 2023	LRA 2023	Selisih
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	16.585.262.112,00	15.879.816.030,00	705.446.082,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.177.114.764,00	2.177.320.433,00	-205.669,00
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	128.230.194.600,00	508.532.040.600,00	-380.301.846.000,00
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	206.996.000.000,00	206.996.000.000,00	-
Jumlah		**353.988.571.476,00**	**733.585.177.063,00**	**(379.596.605.587,00)**

Dengan uraian sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.585.262.112,00.
b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.177.114.764,00.
c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (DBH) periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp128.230.194.600,00. Jika dibandingkan dengan LRA sebesar Rp508.532.040.600,00 terdapat selisih sebesar Rp380.301.846.000,00 yang merupakan Dana Desa yang diterima langsung oleh masing-masing desa.
d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bantuan keuangan Khusus periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp206.996.000.000,00.

D.6.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp473.126,00 yaitu surplus atas penjualan asset non lancer, sedangkan Defisit Kegiatan Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp309.611.044,88) dari penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp1.418.340,00 dan Usulan Aset Rusak Berat sebesar Rp308.192.704,88. Dengan demikian deficit atas kegiatan non operasional sebesar Rp(Rp309.137.918,88) dengan rincian sebagai berikut.

D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar –LO

Pada tahun anggaran 2023 terdapat Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp 473.126,00.

D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang –LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Surplus Penyesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

D.6.3.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar-LO.

D.6.3.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO

Pada tahun anggaran 2023 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp309.611.044,88, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6D.14 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2023

NO	OPD	NILAI
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	308.192.704,88
2	KECAMATAN JUWIRING	1.418.340,00
JUMLAH		**309.611.044,88**

Dinas Lingkungan Hidup Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp308.192.704,88 merupakan Usulan Aset Rusak Berat dan Di Kecamatan Juwiring

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.418.340,00 merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat.

D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2023 maupun TA 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa TA 2023 sebesar Rp0,00.

D.6.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp943.774.800,00 merupakan beban tak terduga yang antara lain digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, dan retitusi pajak BPHTB tahun 2022. Beban Tak Terduga-LO lebih besar daripada Belanja Tak Terduga-LRA dengan selisih sebesar Rp286.644.000,00 disebabkan karena adanya pengakuan penyesuaian persediaan obat yang berasal dari BTT.

D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Saldo Defisit–LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,07) tersebut merupakan saldo dari defisit realisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 turun sebesar Rp109.607.363.278,02 dibandingkan dengan Surplus/Defisit–LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95.

Pendapatan - LO	:	2.340.677.515.718,92
Beban	:	2.426.888.360.975,11
Defisit Kegiatan Operasional	:	(86.210.845.256,19)
Defisit Kegiatan Non Operasional	:	(309.137.918,88)
Defisit Pos Luar Biasa	:	(943.774.800,00)
Defisit LO	:	(87.463.757.975,07)

E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp124.181.580.234,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.672.342.199.513,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.672.891.835.275,00 setelah dikurangi bagian dari Lain-lain PAD Yang Sah yaitu hasil penjualan aset lainnya dan hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp549.635.762,00 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.548.160.619.279,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.813.918.311.416,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp657.130.800,00 dan Transfer sebesar Rp733.585.177.063,00.

E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2023 defisit sebesar (Rp334.345.240.757,00) Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp549.635.762,00, merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp132.716.966.134,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp334.894.876.519,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Rp 295.594.876.519,00
  - Pembentukan Dana Cadangan Rp 15.000.000.000,00
  - Penyertaan Modal Rp 24.300.000.000,00

  Jumlah Rp 334.894.876.519,00

  pada Laporan Realisasi Anggaran.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2023.

E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp152.888.804.540,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp152.940.204.540,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib PNSD	6.692.268.175,00	6.692.268.175,00	-
2	IWP (8%) Iuran Wajib PNSD	29.581.290.259,00	29.581.290.259,00	-
3	IW (8%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	12.054.714,00	12.054.714,00	-
4	BPJS Kesehatan (4%) IW Pemberi Kerja PNSD	26.769.057.312,00	26.769.057.312,00	-
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.013.235.292,00	1.013.235.292,00	-
6	Jaminan Kematian (JKM)	3.039.669.201,00	3.039.669.201,00	-
7	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	3.825.000,00	3.825.000,00	-
8	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	24.387.610.273,00	24.387.610.273,00	-
9	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.737.836.886,00	1.737.836.886,00	-
10	PPh Pasal 23 Jasa	798.619.651,00	798.619.651,00	-
11	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	3.968.118.310,00	3.968.118.310,00	-
12	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	39.505.675.727,00	39.505.675.727,00	-
13	Jasa Boga/Katering PAD	568.049.276,00	568.049.276,00	-
14	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	1.340.640,00	1.340.640,00	-
15	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib PPPK	997.480.504,00	997.480.504,00	-
16	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Pemberi Kerja PPPK	3.989.910.261,00	3.989.910.261,00	-
17	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib DPRD	24.556.101,00	24.556.101,00	-
18	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Pemberi Kerja DPRD	98.223.300,00	98.223.300,00	-
19	BPJS Kesehatan (4%) Iuran Wajib Bupati/Wakil Bupati	5.362.560,00	5.362.560,00	-
20	PPh Pasal 21 Gaji&Tunjangan ASN	1.265.245.523,00	1.265.245.523,00	-
21	IWP (3,25%) Iuran Wajib PPPK	2.886.055.063,00	2.886.055.063,00	-
22	PPh Pasal 21 Anggota DPRD	4.066.100.242,00	4.066.100.242,00	-
23	PPh Pasal 21 Pihak Ketiga	602.526.961,00	602.526.961,00	-
24	BPJS Kesehatan (1%) Iuran Wajib Non PNS	874.693.309,00	874.693.309,00	-
25	PFK Lainnya	-	51.400.000,00	-51.400.000,00
Jumlah		**152.888.804.540,00**	**152.940.204.540,00**	**-51.400.000,00**

Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar (Rp51.400.000,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar (Rp51.400.000,00).

Penjumlahan Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi saldo kas akhir LAK sebesar Rp319.430.015.779,00.

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp319.430.015.779,00. Terdiri dari Penurunan Kas sebesar (Rp210.215.060.523,00) dan Saldo Awal Kas di BUD Rp529.645.076.302. Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp319.430.015.779,00.

F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.01 Ekuitas TA 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Ekuitas Awal	**3.524.401.938.130,28**	**3.506.874.599.618,72**
2	Surplus Defisit – LO	- 87.463.757.975,07	22.143.605.302,95
3	Koreksi ekuitas lainnya	-	- 4.616.266.791,39
4	Ekuitas Akhir	**3.436.938.180.155,21**	**3.524.401.938.130,28**

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 senilai Rp3.524.401.938.130,28 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2022.
2. Surplus/defisit – LO senilai (Rp87.463.757.975,06) merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2023 Sebesar Rp3.524.401.938.130,28, terdapat kenaikan Ekuitas Awal sebesar Rp17.527.338.511,56 atau (0,50%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp3.506.874.599.618,72.

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,06) turun sebesar (Rp109.607.363.278,02) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dibandingkan dengan surplus defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp22.143.605.302,95 (494,98%).

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

F.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun Anggaran 2023.

F.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada Tahun Anggaran 2023.

F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sesuai klasifikasi Akun Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diantaranya terdiri dari pencatatan Kas Dana BOS, Piutang PBBP2, Piutang Pendapatan Denda (PBBP2), Piutang Pendapatan BLUD, Penyisihan Piutang Pendapatan, Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Namun pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi ekuitas lainnya.

F.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar Rp3.436.938.180.155,21 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp3.524.401.938.130,28 sehingga terdapat Penurunan sebesar Rp87.463.757.975,06 (2,48%).

BAB VII
PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontijensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

1. Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum "Subosukawonosraten" yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. Keanggotaan dalam APKASI/BKKSI dan ADKASI

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKKSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKKSI dan ADKASI.

VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SKPD	Jenis Piutang	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR TAHUN
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Daerah	50.345.896.886,00	135.616.013.567,00	139.231.697.162,00	46.730.213.291,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Retribusi Daerah	13.906.149,00	0,00	0,00	13.906.149,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Piutang Retribusi Daerah	18.465.000,00	742744398,00	756794398,00	4.415.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi Daerah	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Piutang Retribusi Daerah	403.439.738,00	4.619.337.614,00	4589149809,00	433.627.543,00
6	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	Piutang Retribusi Daerah	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.725.989.436,59	23.664.637.289,65	8.725.989.436,59	23.664.637.289,65
8	PUSKESMAS	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	94.725.126,00	116.489.878,00	94.725.126,00	116.489.878,00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	273.584.239,00	80.206.358,00	273.584.239,00	80.206.358,00
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	10.520.972.258,00	2.925.247.363,00	4.992.924.619,00	8.453.295.002,00
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Transfer Antar Daerah	3.066.129.116,00	8.602.274.223,00	3.066.129.116,00	8.602.274.223,00
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Piutang Lainnya	3.241.514.114,00	0,00	0,00	3.241.514.114,00
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Lainnya	323.607.225,00	0,00	3.004.858,00	320.602.367,00
JUMLAH			**77.201.427.287,59**	**176.366.950.690,65**	**161.733.998.763,59**	**91.834.379.214,65**

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN					JUMLAH PIUTANG BERSIH
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	
1	Piutang Pajak Daerah	46.730.213.291,00	3.804.282.263,91	7.279.514.249,50	11.279.406.095,40	4.400.000,00	22.367.602.608,81	24.362.610.682,19
2	Piutang Retribusi	625.146.692,00	265.348,00	6.365.789,30	146.219.950,00	215.979.299,00	368.830.386,00	256.316.306,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.649.991.238,00	181.875.811,38	1.956.141.443,00	3.150.430.145,62	-	5.288.447.400,00	3.361.543.838,00
4	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.241.514.114,00	-	-	-	3.241.514.114,00	3.241.514.114,00	-
5	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	320.602.367,00	-	-	-	320.602.367,00	320.602.367,00	-
	TOTAL	**59.567.467.702,00**	**3.986.423.423,29**	**9.242.021.481,80**	**14.576.056.191,02**	**3.782.495.780,00**	**31.586.996.875,81**	**27.980.470.826,19**

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH DANA BERGULIR		**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (2022)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2023)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2023)	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI (2023)	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI (2023)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10	12	13	14 = 10 - 13
1.	1951	PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)	Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 4 th 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah	Saham	40.000.000.000	21.442.682.816	3.000.000.000	24.442.682.816 - - - -	15.557.317.184	4.312.099.650,00	-	24.442.682.816
2.	1979	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi		Saham	75.000.000.000	45.067.797.682	15.000.000.000	60.067.797.682 - - - - -	14.932.202.318	3.844.624.046,00	-	60.067.797.682
3.	1997	PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) PD BKK Klaten		Saham Saham	18.130.000.000 9.969.775.000	2.960.000.000 3.820.000.000	- -	2.960.000.000 3.820.000.000 - -	15.170.000.000 6.149.775.000	220.424.239,00		2.960.000.000 3.820.000.000
4.	1975/1976	Bank Jateng	Perda no 12 Tahun 2021	Saham	63.000.000.000	57.000.000.000	6.000.000.000	63.000.000.000 -	-	13.015.491.084,00	-	63.000.000.000
5.		PT. Aneka Usaha (Perseroda)	Perda No 4 Tahun 2019	Saham	40.000.000.000	24.251.707.694	300.000.000	24.551.707.694 -	15.448.292.306	348.841.529,00	-	24.551.707.694 -
6.	2006	PT. Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP)			-	300.000.000	-	300.000.000 - - -	-	-	-	
	J U M L A H				**246.099.775.000**	**154.842.188.192**	**24.300.000.000**	**179.142.188.192**	**67.257.586.808**	**21.741.480.548,00**	**-**	**178.842.188.192**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN	14.863.987.342,95		424.326.764,98	14.439.660.577,97
2	TK Negeri Pembina	146.532.308,78	38.192.764,69		184.725.073,47
3	SD Negeri	245.644.146.826,93	4.927.034.068,20		250.571.180.895,13
4	SMP Negeri	144.116.378.244,06	13.567.013.563,11		157.683.391.807,17
5	SPNF SKB Cawas	952.745.014,71	283.561.798,26		1.236.306.812,97
6	DINAS KESEHATAN	17.323.083.185,38	5.727.790.360,28		23.050.873.545,66
7	Puskesmas Klaten Utara	1.288.026.772,63	774.302.967,10		2.062.329.739,73
8	Puskesmas Gantiwarno	2.924.561.864,03	538.431.646,72		3.462.993.510,75
9	Puskesmas Prambanan	2.711.213.663,93	418.883.453,43		3.130.097.117,36
10	Puskesmas Kebondalem Lor	1.670.521.430,58	645.607.693,22		2.316.129.123,80
11	Puskesmas Manisrenggo	3.874.723.532,38	677.794.466,97		4.552.517.999,35
12	Puskesmas Kemalang	4.277.422.549,26	704.790.485,25		4.982.213.034,51
13	Puskesmas Karangnongko	1.267.632.622,11	845.345.948,67		2.112.978.570,78
14	Puskesmas Jatinom	2.694.399.842,19	992.497.649,15		3.686.897.491,34
15	Puskesmas Kayumas	2.082.813.172,47	321.856.614,26		2.404.669.786,73
16	Puskesmas Karanganom	3.578.538.540,48	553.027.861,17		4.131.566.401,65
17	Puskesmas Tulung	2.412.203.166,93	517.302.869,37		2.929.506.036,30
18	Puskesmas Klaten Tengah	1.916.897.938,68	888.197.374,39		2.805.095.313,07
19	Puskesmas Majegan	3.188.903.704,27	410.207.761,03		3.599.111.465,30
20	Puskesmas Polanharjo	1.757.172.086,91	797.987.213,59		2.555.159.300,50
21	Puskesmas Delanggu	6.728.161.739,45	332.696.407,03		7.060.858.146,48
22	Puskesmas Juwiring	3.203.586.831,16	565.857.116,91		3.769.443.948,07
23	Puskesmas Wonosari I	2.942.732.289,03	572.600.758,19		3.515.333.047,22
24	Puskesmas Wonosari II	1.275.932.375,84	540.934.595,23		1.816.866.971,07
25	Puskesmas Ceper	2.692.733.926,52	735.799.472,83		3.428.533.399,35
26	Puskesmas Jambu Kulon	3.750.071.740,32	767.085.463,87		4.517.157.204,19
27	Puskesmas Pedan	4.274.064.153,61	476.387.519,86		4.750.451.673,47
28	Puskesmas Karangdowo	5.037.141.851,00	768.836.067,17		5.805.977.918,17
29	Puskesmas Klaten Selatan	2.055.382.983,52	1.102.661.457,68		3.158.044.441,20
30	Puskesmas Cawas I	2.341.721.963,15	581.542.771,52		2.923.264.734,67
31	Puskesmas Cawas II	4.299.034.234,97	374.837.579,46		4.673.871.814,43
32	Puskesmas Trucuk I	2.023.461.145,73	3.389.214.448,89		5.412.675.594,62
33	Puskesmas Trucuk II	2.042.284.078,43	463.335.936,30		2.505.620.014,73
34	Puskesmas Bayat	6.804.460.153,53	562.807.663,84		7.367.267.817,37
35	RSUD Bagas Waras	124.712.247.625,05		3.810.548.665,19	120.901.698.959,86
36	Puskesmas Kalikotes	4.652.385.388,50	558.660.401,65		5.211.045.790,15
37	Puskesmas Ngawen	2.470.389.447,08	538.602.692,99		3.008.992.140,07
38	Puskesmas Kebonarum	1.924.861.573,23	713.912.926,87		2.638.774.500,10
39	Puskesmas Wedi	2.553.803.222,00	710.891.340,11		3.264.694.562,11
40	Puskesmas Jogonalan 1	2.690.998.781,25	750.830.865,16		3.441.829.646,41
41	Puskesmas Jogonalan 2	1.437.020.239,83	340.647.856,09		1.777.668.095,92
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	945.822.186.163,72	5.852.597.589,30		951.674.783.753,02
43	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	158.253.000.748,36	11.472.151.777,63		169.725.152.525,99
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.221.554.896,40	1.321.246.149,53		6.542.801.045,93
45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.876.022.818,62	3.905.282.746,49		13.781.305.565,11
46	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.871.923.739,07	310.661.618,59		11.182.585.357,66
47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	83.836.810.608,69	10.531.125.139,52		94.367.935.748,21
48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.614.086.778,55	192.763.021,25		8.806.849.799,80
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.253.046.624,95		26.203.892,74	1.226.842.732,21
50	DINAS PERHUBUNGAN	111.826.517.003,35		1.826.536.350,20	109.999.980.653,15
51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.933.986.863,55		1.562.399.139,04	14.371.587.724,51
52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	123.676.719.205,67	9.654.455.384,55		133.331.174.590,22
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.189.599.449,20	8.786.456.930,57		11.976.056.379,77
54	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	45.621.349.834,07	31.916.690.367,99		77.538.040.202,06
55	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.743.937.709,53		60.358.226,21	10.683.579.483,32
56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	29.285.645.914,15	101.211.466,49		29.386.857.380,64
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.540.720.564,51	515.682.528,23		2.056.403.092,74
58	BAGIAN PEMERINTAHAN	167.977.861,98		45.465.120,78	122.512.741,20
59	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	73.615.103,81		8.004.414,20	65.610.689,61
60	BAGIAN HUKUM	588.746.313,40	27.167.337,17		615.913.650,57
61	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	132.260.677,64		50.590.497,01	81.670.180,63
62	BAGIAN ORGANISASI	236.499.411,97		50.236.219,58	186.263.192,39
63	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	104.883.778.177,43		1.241.368.140,23	103.642.410.037,20
64	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	890.793.362,78		152.124.519,42	738.668.843,36
65	BAGIAN UMUM	27.181.382.898,82		1.956.801.236,53	25.224.581.662,29
66	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	326.196.964,78		32.149.343,34	294.047.621,44
67	SEKRETARIAT DPRD	15.607.383.850,11		357.287.372,24	15.250.096.477,87
68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	2.304.866.405,47		252.377.359,22	2.052.489.046,25
69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.534.734.476,14	2.915.588.175,98		6.450.322.652,12
70	PPKD	33.049.664.548,15		1.283.420.835,03	31.766.243.713,12
71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	431.055.117,01		84.033.899,43	347.021.217,58
72	INSPEKTORAT DAERAH	8.560.813.747,64		570.152.646,05	7.990.661.101,59
73	KECAMATAN PRAMBANAN	2.793.212.870,11		48.250.046,37	2.744.962.823,74
74	KECAMATAN KARANGNONGKO	4.512.597.856,87		174.737.495,29	4.337.860.361,58
75	KECAMATAN CEPER	566.429.372,57	7.934.321.815,38		8.500.751.187,95
76	KECAMATAN PEDAN	960.358.921,71	43.402.119,37		1.003.761.041,08
77	KECAMATAN KARANGDOWO	1.255.705.332,44		47.520.641,87	1.208.184.690,57
78	KECAMATAN JUWIRING	1.366.554.431,65		122.592.840,95	1.243.961.590,70
79	KECAMATAN WONOSARI	892.827.750,58		111.967.989,81	780.859.760,77
80	KECAMATAN DELANGGU	1.707.505.352,53		39.796.259,24	1.667.709.093,29
81	KECAMATAN POLANHARJO	4.930.585.747,65		129.160.660,61	4.801.425.087,04
82	KECAMATAN KARANGANOM	1.172.008.460,21		42.429.439,58	1.129.579.020,63
83	KECAMATAN TULUNG	667.748.591,34	5.753.581.393,45		6.421.329.984,79
84	KECAMATAN GANTIWARNO	1.273.508.975,97		115.670.074,45	1.157.838.901,52
85	KECAMATAN JATINOM	1.199.048.737,61		87.475.744,50	1.111.572.993,11
86	KELURAHAN JATINOM	4.019.800.511,41		42.925.498,96	3.976.875.012,45
87	KECAMATAN KEMALANG	4.606.150.414,53		143.958.354,21	4.462.192.060,32
88	KECAMATAN NGAWEN	1.305.686.172,34		81.339.647,90	1.224.346.524,44
89	KECAMATAN KALIKOTES	838.808.472,16		38.323.387,24	800.485.084,92
90	KECAMATAN KLATEN UTARA	4.068.962.890,22		57.820.164,73	4.011.142.725,49
91	KELURAHAN BARENGLOR	15.242.990.685,17	7.492.090,22		15.250.482.775,39
92	KELURAHAN GERGUNUNG	14.894.913.707,73	476.877.157,80		15.371.790.865,53
93	KECAMATAN KLATEN TENGAH	4.728.501.484,07		170.408.284,93	4.558.093.199,14
94	Kelurahan Bareng	4.823.328.901,04	120.914.019,51		4.944.242.920,55
95	Kelurahan Kabupaten	3.927.832.452,14	251.156.057,89		4.178.988.510,03
96	Kelurahan Klaten	4.099.124.240,08	151.621.199,03		4.250.745.439,11
97	Kelurahan Tonggalan	11.007.626.766,94	115.740.395,50		11.123.367.162,44
98	Kelurahan Buntalan	6.723.948.967,08	243.698.304,09		6.967.647.271,17
99	Kelurahan Mojayan	12.776.346.419,14		2.078.223.716,78	10.698.122.702,36
100	KECAMATAN KLATEN SELATAN	516.834.287,37		21.696.231,21	495.138.056,16
101	KELURAHAN GAYAMPRIT	8.247.198.020,42	520.750.875,11		8.767.948.895,53
102	KECAMATAN WEDI	1.453.244.330,48		57.952.377,37	1.395.291.953,11
103	KECAMATAN BAYAT	1.030.118.355,24	6.004.351,88		1.036.122.707,12
104	KECAMATAN CAWAS	6.554.066.478,15		214.650.578,11	6.339.415.900,04
105	KECAMATAN TRUCUK	2.171.668.308,25	114.608.129,80		2.286.276.438,05

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
106	KECAMATAN KEBONARUM	1.166.615.885,10	57.784.978,71		1.224.400.863,81
107	KECAMATAN JOGONALAN	1.717.277.084,68		126.397.830,81	1.590.879.253,87
108	KECAMATAN MANISRENGGO	1.955.192.561,74		84.522.064,67	1.870.670.497,07
109	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	286.901.427,35		55.821.903,36	231.079.523,99
JUMLAH		**2.553.602.488.616,45**	**151.779.003.021,54**	**17.888.025.874,37**	**2.687.493.465.763,62**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	MUTASI		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	876.430.381.056,00	19.475.831.482,00	9.116.985.032,00	886.789.227.506,00
2	Peralatan Dan Mesin	930.401.453.124,30	162.141.821.516,30	62.503.975.098,30	1.030.039.299.542,30
3	Gedung dan Bangunan	1.081.341.113.090,00	167.411.538.157,40	101.276.283.065,20	1.147.476.368.182,20
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.741.846.607.536,87	142.467.720.464,80	40.443.948.502,80	1.843.870.379.498,87
5	Aset Tetap Lainnya	296.112.363.856,62	26.823.936.982,70	4.780.987.770,70	318.155.313.068,62
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.718.467.637,20	16.773.400.205,00	11.264.960.551,20	28.226.907.291,00
TOTAL		4.948.850.386.300,99	535.094.248.808,20	229.387.140.020,20	5.254.557.495.088,99

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	SALDO AWAL	M U T A S I								SALDO AKHIR
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	
1	SEKRETARIAT DEWAN	140.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.402.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.168.824.280,20	0,00	5.371.252.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540.076.592,00
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.571.352.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571.352.175,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.393.240,00
5	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.451.500,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	572.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.812.500,00
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	540.304.642,00	0,00	137.187.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.491.984,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624.000,00
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	128.019.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.019.300,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990.000,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.294.000,00
	TOTAL	22.718.467.637,20	-	5.508.439.653,80	-	-	-	-	-	-	28.226.907.291,00

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	1.103.228.483,00	287.030.439,00	-	1.390.258.922,00
2	TK Negeri Pembina	292.623,00	-	-	292.623,00
3	SD Negeri	84.420.013.320,38	-	70.690.009.281,95	13.730.004.038,43
4	SMP Negeri	9.592.975.280,00	-	4.234.502.911,00	5.358.472.369,00
5	SPNF SKB Cawas	72.500,00	-	-	72.500,00
6	DINAS KESEHATAN	38.132.014,54	58.879.619,96	-	97.011.634,50
7	Puskesmas Klaten Utara	5.078.285,00	-	-	5.078.285,00
8	Puskesmas Gantiwarno	5.934.000,00	-	-	5.934.000,00
9	Puskesmas Prambanan	3.790.593,00	-	-	3.790.593,00
10	Puskesmas Kebondalem Lor	1.034.704,00	-	-	1.034.704,00
11	Puskesmas Manisrenggo	11.531.239,00	-	-	11.531.239,00
12	Puskesmas Kemalang	21.512.682,00	19.861.043,16	-	41.373.725,16
13	Puskesmas Karangnongko	807.570,00	-	-	807.570,00
14	Puskesmas Jatinom	127.086,00	-	-	127.086,00
15	Puskesmas Kayumas	23.475.781,00	-	-	23.475.781,00
16	Puskesmas Karanganom	13.044.054,00	-	-	13.044.054,00
17	Puskesmas Tulung	119.393,00	-	-	119.393,00
18	Puskesmas Klaten Tengah	939.510,00	-	-	939.510,00
19	Puskesmas Majegan	48.613.933,00	-	-	48.613.933,00
20	Puskesmas Polanharjo	17.136.219,00	-	-	17.136.219,00
21	Puskesmas Delanggu	119.069.496,00	-	28.952.667,00	90.116.829,00
22	Puskesmas Juwiring	16.506.998,00	-	-	16.506.998,00
23	Puskesmas Wonosari I	22.168.116,00	-	-	22.168.116,00
24	Puskesmas Wonosari II	2.635.553,00	-	-	2.635.553,00
25	Puskesmas Ceper	36.117.643,00	-	-	36.117.643,00
26	Puskesmas Jambu Kulon	7.136.897,00	-	-	7.136.897,00
27	Puskesmas Pedan	232.150.410,00	-	-	232.150.410,00
28	Puskesmas Karangdowo	21.135.113,00	70.000.000,00	-	91.135.113,00
29	Puskesmas Klaten Selatan	127.509,00	-	-	127.509,00
30	Puskesmas Cawas I	1.127.892,00	-	-	1.127.892,00
31	Puskesmas Cawas II	1.493.083,00	-	-	1.493.083,00
32	Puskesmas Trucuk I	22.269.750,00	19.861.043,16	-	42.130.793,16
33	Puskesmas Trucuk II	10.012.128,00	-	-	10.012.128,00
34	Puskesmas Bayat	80.800.355,00	-	-	80.800.355,00
35	RSUD Bagas Waras	192.289.873,00	9.931.751,69	-	202.221.624,69
36	Puskesmas Kalikotes	919.481,00	-	-	919.481,00
37	Puskesmas Ngawen	4.358.351,00	-	-	4.358.351,00
38	Puskesmas Kebonarum	3.098.504,00	-	-	3.098.504,00
39	Puskesmas Wedi	10.286.684,00	-	-	10.286.684,00
40	Puskesmas Jogonalan 1	2.922.250,00	-	-	2.922.250,00
41	Puskesmas Jogonalan 2	2.273.136,00	-	-	2.273.136,00
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.919.184.339,41	186.687.681,75	-	4.105.872.021,16
43	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.149.984.032,75	327.837.529,18	-	3.477.821.561,93
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	314.397.123,00	-	-	314.397.123,00
45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(69.661.710,00)	25.905.000,00	-	- 43.756.710,00
46	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,	60.927.278,00	708.558.000,00	-	769.485.278,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.190.549.137,26	490.428.234,96	-	1.680.977.372,22
48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.429.583,21	18.638.749,96	-	57.068.333,17
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		6.340.000,00	-	6.340.000,00
50	DINAS PERHUBUNGAN	301.476.778,23	106.830.791,10	-	408.307.569,33
51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.029.181.267,42	-	313.770.765,63	715.410.501,79
52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	8.875.716.519,68	-	78.916.599,92	8.796.799.919,76
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	310.347.215,65	-	87.631.798,47	222.715.417,18
54	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	198.513.971,50	63.055.340,02	-	261.569.311,52
55	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	131.686.644,58	-	10.072.981,58	121.613.663,00
56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.141.633.801,00	158.502.000,00	-	2.300.135.801,00
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9.360.308,00	24.800.000,00	-	34.160.308,00
58	BAGIAN PEMERINTAHAN	72.500,00	-	-	72.500,00
59	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.552.083,00	-	-	1.552.083,00
60	BAGIAN HUKUM	72.500,00	-	-	72.500,00
61	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	72.500,00	-	-	72.500,00
62	BAGIAN ORGANISASI	72.500,00	15.750.000,00	-	15.822.500,00
63	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	38.239.563,00	-	-	38.239.563,00
64	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.470.435,00	-	-	4.470.435,00
65	BAGIAN UMUM	118.491.419,00	-	-	118.491.419,00
66	SEKRETARIAT DPRD	9.013.627,00	-	-	9.013.627,00
67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	56.477.412,50	-	15.180.000,00	41.297.412,50
68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	124.192.496,71	3.484.085.000,04	-	3.608.277.496,75
69	PPKD	11.643.326.483,00	1.786.019.379,28	-	13.429.345.862,28
70	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.169.558,00	-	-	1.169.558,00
71	INSPEKTORAT DAERAH	72.500,00	-	-	72.500,00
72	KECAMATAN PRAMBANAN	72.500,00	6.000.000,00	-	6.072.500,00
73	KECAMATAN KARANGNONGKO	14.415.950,00	1.000.000,00	-	15.415.950,00
74	KECAMATAN CEPER	72.500,00	8.340.000,00	-	8.412.500,00
75	KECAMATAN PEDAN	13.784.977,00	1.500.000,00	-	15.284.977,00
76	KECAMATAN KARANGDOWO	5.809.880,00	-	-	5.809.880,00
77	KECAMATAN JUWIRING	1.490.840,00	3.581.660,00	-	5.072.500,00
78	KECAMATAN WONOSARI	66.858.121,00	3.000.000,00	-	69.858.121,00
79	KECAMATAN DELANGGU	24.909.433,00	-	-	24.909.433,00
80	KECAMATAN POLANHARJO	15.647.386,00	-	-	15.647.386,00
81	KECAMATAN KARANGANOM	222.980,00	27.628.651,00	-	27.851.631,00
82	KECAMATAN TULUNG	2.229.976,00	-	-	2.229.976,00
83	KECAMATAN GANTIWARNO	72.500,00	29.740.000,00	-	29.812.500,00
84	KECAMATAN JATINOM	255.833,00	14.946.553,00	-	15.202.386,00
85	KECAMATAN KEMALANG	72.500,00	-	-	72.500,00
86	KECAMATAN NGAWEN	29.854.628,00	-	-	29.854.628,00
87	KECAMATAN KALIKOTES	475.714,00	26.850.000,00	-	27.325.714,00
88	KECAMATAN KLATEN UTARA	72.500,00	-	-	72.500,00
89	KELURAHAN BARENGLOR	1.851.323,00	-	-	1.851.323,00
90	KELURAHAN GERGUNUNG	83.510.450,00	-	-	83.510.450,00
91	KECAMATAN KLATEN TENGAH	283.125,00	-	-	283.125,00
92	Kelurahan Bareng	72.500,00	-	-	72.500,00
93	Kelurahan Kabupaten	36.250,00	-	-	36.250,00
94	Kelurahan Tonggalan	72.500,00	-	-	72.500,00
95	Kelurahan Buntalan	152.656.880,00	-	-	152.656.880,00
96	Kelurahan Mojayan	2.941.190,00	-	-	2.941.190,00
97	KECAMATAN KLATEN SELATAN	3.125.150,00	-	-	3.125.150,00
98	KELURAHAN GAYAMPRIT	72.500,00	-	-	72.500,00
99	KECAMATAN WEDI	427.500,00	11.000.000,00	-	11.427.500,00
100	KECAMATAN BAYAT	4.076.050,00	-	-	4.076.050,00
101	KECAMATAN TRUCUK		-	38.860.000,00	- 38.860.000,00
102	KECAMATAN KEBONARUM	513.750,00	6.000.000,00		6.513.750,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
103	KECAMATAN JOGONALAN	72.500,00	-	-	72.500,00
104	KECAMATAN MANISRENGGO	2.855.214,00	-	-	2.855.214,00
105	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.922.287,00	-	-	1.922.287,00
Jumlah		**130.126.587.745,82**	**8.008.588.467,26**	**75.497.897.005,55**	**62.637.279.207,53**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Untuk Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2020 - 2025	Dana Cadangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024	Rp 15.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000.000,00	Rp -
	J U M L A H		**Rp 15.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 15.000.000.000,00**	**Rp -**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 1.243.506.508,00	Rp 520.804.928,00		Rp 1.764.311.436,00
2	Utang Belanja	Rp 10.275.310.270,00	Rp 2.006.153.137,00		Rp 12.281.463.407,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 51.400.000,00	Rp -		Rp 51.400.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**Rp 11.570.216.778,00**	**Rp 2.526.958.065,00**	**Rp -**	**Rp 14.097.174.843,00**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XVlll
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	32.900.000.000,00	15.192.881.769,00	17.707.118.231,00	46,18	45.200.000.000,00	Nota Kesepakatan Antara Bupati Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 910/493/30 - 170/4880/10 tanggal 11 Agustus 2022
	Jumlah		32.900.000.000	15.192.881.769	17.707.118.231	46,18	45.200.000.000	

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN XX.I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KLATEN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	%Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10	11	12 =10+11	13	14	15	16	17	18	19	20=18x19
1	Bidang																		
	Perbankan																		
	1. PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)			133.418.404.124,00	2.199.923.073,00	353.123.516.637,00	911.476.257,00	489.653.320.091,00	433.203.363.543,00	0,00	433.203.363.543,00	21.442.682.816,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.112.733.552,00	100%	45.112.733.552,00
	2. PT BPR BKK TULUNG			120.647.715.400,00	2.667.647.747,00	939.758.457,00	0,00	124.255.121.604,00	107.968.247.631,00	0,00	107.968.247.631,00	12.870.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	16.286.873.973,00	29%	4.723.193.452,17
	3. PD. BKK KLATEN			34.206.502.302,00	3.231.456.985,00	4.207.706.180,00	0,00	41.645.665.467,00	75.647.934.154,00	0,00	75.647.934.154,00	10.730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645.665.467,00	49%	20.406.376.078,83
	Sub Total (1)			**288.272.621.826,00**	**8.099.027.805,00**	**358.270.981.274,00**	**911.476.257,00**	**655.554.107.162,00**	**616.819.545.328,00**	**0,00**	**616.819.545.328,00**	**45.042.682.816,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.045.272.992,00**		**70.242.303.083,00**
2	Bidang Aneka Usaha																		
	1. PT. Aneka Usaha (Perseroda)			7.577.403.070,00	0,00	20.197.472.648,00	0,00	27.774.875.718,00	799.377.666,00	0,00	799.377.666,00	24.251.707.694,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.975.498.053,00	100%	26.975.498.053,00
	Sub Total (2)			**7.577.403.070,00**	**0,00**	**20.197.472.648,00**	**0,00**	**27.774.875.718,00**	**799.377.666,00**	**0,00**	**799.377.666,00**	**24.251.707.694,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.975.498.053,00**		**26.975.498.053,00**
3	Bidang Air Minum																		
	1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi			48.651.416.200,00	0,00	61.894.706.964,00	0,00	110.546.123.164,00	2.153.809.093,00	0,00	2.153.809.093,00	45.067.797.682,00	15.000.000.000,00				103.456.680.211,00	100%	103.456.680.211,00
	Sub Total (3)			**48.651.416.200,00**	**0,00**	**61.894.706.964,00**	**0,00**	**110.546.123.164,00**	**2.153.809.093,00**	**0,00**	**2.153.809.093,00**	**45.067.797.682,00**	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.456.680.211,00**		**103.456.680.211,00**
	Total Seluruh Bidang Industri			**344.501.441.096,00**	**8.099.027.805,00**	**440.363.160.886,00**	**911.476.257,00**	**793.875.106.044,00**	**619.772.732.087,00**	**0,00**	**619.772.732.087,00**	**114.362.188.192,00**	**18.300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.477.451.256,00**		**200.674.481.347,00**

BUPATI KLATEN
cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7 =5-6	8	9	10 =7+8-9
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)			58.324.907.940,00	45.680.066.890,00	12.644.841.050,00	35.625.877,00	942.114.401,00	11.738.352.526,00
	2. PT BPR BKK TULUNG			14.789.826.664,00	14.197.974.306,00	591.852.358,00	50.186.425,00	117.884.283,00	524.154.500,00
	3. PD. BKK KLATEN			5.003.237.844,00	7.512.908.675,00	(2.509.670.831,00)	100.241,00	27.105.510,00	(2.536.676.100,00)
	Sub Total (1)			**78.117.972.448,00**	**67.390.949.871,00**	**10.727.022.577,00**	**85.912.543,00**	**1.087.104.194,00**	**9.725.830.926,00**
2	Bidang Aneka Usaha								
	1. PT. Aneka Usaha (Perseroda)			27.694.673.860,00	26.908.347.904,00	786.325.956,00	59.738.306,00	11.874.672,00	834.189.590,00
	Sub Total (2)			**27.694.673.860,00**	**26.908.347.904,00**	**786.325.956,00**	**59.738.306,00**	**11.874.672,00**	**834.189.590,00**
3	Bidang Air Minum								
	1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi			55.214.122.248,00	46.103.283.283,00	9.110.838.965,00	875.965.121,00	1.639.800,00	9.985.164.286,00
	Sub Total (3)			**55.214.122.248,00**	**46.103.283.283,00**	**9.110.838.965,00**	**875.965.121,00**	**1.639.800,00**	**9.985.164.286,00**
	Total Seluruh Bidang Industri			**161.026.768.556,00**	**140.402.581.058,00**	**20.624.187.498,00**	**1.021.615.970,00**	**1.100.618.666,00**	**20.545.184.802,00**

BUPATI KLATEN
cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN B.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
01	**PELAYANAN UMUM**	351.241.453.327,00	13.310.370.915,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		310.571.813.896,00	12.256.729.979,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00
01.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.483.513.816,00	1.300.750.020,00	0,00	0,00
		8.267.284.658,00	1.169.459.950,00	0,00	0,00
01.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.436.953.826,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		10.492.623.096,00	104.708.000,00	0,00	0,00
01.2.20	STATISTIK	152.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.389.322,00	0,00	0,00	0,00
01.2.24	KEARSIPAN	353.624.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		341.953.438,00	6.000.000,00	0,00	0,00
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	63.666.213.286,00	2.152.310.720,00	0,00	0,00
		54.161.748.455,00	1.872.785.529,00	0,00	0,00
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	67.446.376.044,00	1.285.678.000,00	0,00	0,00
		62.181.859.642,00	1.138.737.460,00	0,00	0,00
01.5.01	PERENCANAAN	9.324.201.696,00	48.035.000,00	0,00	0,00
		7.830.913.829,00	40.924.800,00	0,00	0,00
01.5.02	KEUANGAN	37.348.270.147,00	3.468.095.450,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
		32.945.682.693,00	3.234.519.405,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00
01.5.03	KEPEGAWAIAN	8.386.178.050,00	98.800.000,00	0,00	0,00
		7.493.657.262,00	91.790.000,00	0,00	0,00
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.094.671.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.994.352.650,00	0,00	0,00	0,00
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.395.300.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
		1.276.154.751,00	0,00	0,00	0,00
01.6.01	INSPEKTORAT	15.353.323.518,00	520.478.308,00	0,00	0,00
		12.316.338.825,00	428.790.000,00	0,00	0,00
01.7.01	KECAMATAN	86.821.408.718,00	4.305.523.417,00	0,00	0,00
		74.187.541.483,00	4.169.014.835,00	0,00	0,00
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.979.314.126,00	0,00	0,00	0,00
		34.951.313.792,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA-NG | 1

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	33.597.858.718,00	2.544.448.889,00	0,00	0,00
		28.103.910.886,00	2.393.455.250,00	0,00	0,00
03.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.269.722.417,00	2.236.414.389,00	0,00	0,00
		22.115.330.317,00	2.110.223.250,00	0,00	0,00
03.1.06	SOSIAL	7.328.136.301,00	308.034.500,00	0,00	0,00
		5.988.580.569,00	283.232.000,00	0,00	0,00
04	**EKONOMI**	258.069.513.681,00	171.367.823.340,00	0,00	0,00
		231.069.634.400,00	147.657.599.682,00	0,00	0,00
04.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.175.100.584,00	155.756.375.471,00	0,00	0,00
		73.880.708.064,00	132.926.708.343,00	0,00	0,00
04.2.07	TENAGA KERJA	14.215.336.270,00	0,00	0,00	0,00
		10.168.086.953,00	0,00	0,00	0,00
04.2.09	PANGAN	2.049.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.974.642.214,00	101.530.000,00	0,00	0,00
04.2.15	PERHUBUNGAN	45.826.556.231,00	8.968.688.850,00	0,00	0,00
		44.397.178.720,00	8.483.283.649,00	0,00	0,00
04.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	20.230.261.841,00	927.367.414,00	0,00	0,00
		18.757.124.714,00	909.150.000,00	0,00	0,00
04.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.426.836.799,00	488.076.250,00	0,00	0,00
		17.753.961.013,00	380.937.000,00	0,00	0,00
04.2.18	PENANAMAN MODAL	6.242.214.953,00	551.633.105,00	0,00	0,00
		5.203.019.484,00	515.390.940,00	0,00	0,00
04.2.21	PERSANDIAN	388.642.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.003.216,00	0,00	0,00	0,00
04.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.307.900.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		1.207.870.900,00	2.500.000,00	0,00	0,00
04.3.27	PERTANIAN	46.557.005.138,00	1.098.457.500,00	0,00	0,00
		13.773.501.628,00	940.253.000,00	0,00	0,00
04.3.30	PERDAGANGAN	3.201.953.250,00	2.606.646.750,00	0,00	0,00
		3.058.489.089,00	2.606.446.750,00	0,00	0,00
04.3.31	PERINDUSTRIAN	16.448.706.615,00	968.078.000,00	0,00	0,00
		12.527.048.405,00	791.400.000,00	0,00	0,00
05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	42.360.284.437,00	17.507.115.025,00	0,00	0,00
		39.433.427.308,00	15.282.270.325,00	0,00	0,00
05.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.863.981.600,00	1.054.000.000,00	0,00	0,00
		10.356.605.273,00	883.220.000,00	0,00	0,00
05.2.10	PERTANAHAN	365.000.000,00	5.562.000.000,00	0,00	0,00
		221.864.125,00	5.009.187.370,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
05.2.11	LINGKUNGAN HIDUP		31.131.302.837,00	10.891.115.025,00	0,00	0,00
			28.854.957.910,00	9.389.862.955,00	0,00	0,00
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		26.465.724.336,00	3.724.058.850,00	0,00	0,00
			22.280.236.028,00	3.492.694.253,00	0,00	0,00
06.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		3.544.149.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.147.150.680,00	0,00	0,00	0,00
06.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		22.921.575.336,00	3.724.058.850,00	0,00	0,00
			19.133.085.348,00	3.492.694.253,00	0,00	0,00
07	**KESEHATAN**		416.768.858.594,00	63.071.266.019,00	0,00	0,00
			353.519.053.406,00	56.385.758.306,00	0,00	0,00
07.1.02	KESEHATAN		402.343.843.594,00	62.050.466.019,00	0,00	0,00
			340.947.858.599,00	55.431.519.556,00	0,00	0,00
07.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		14.425.015.000,00	1.020.800.000,00	0,00	0,00
			12.571.194.807,00	954.238.750,00	0,00	0,00
08	**PARIWISATA**		6.734.035.883,00	6.577.106.000,00	0,00	0,00
			6.469.776.229,00	5.918.600.182,00	0,00	0,00
08.3.26	PARIWISATA		6.734.035.883,00	6.577.106.000,00	0,00	0,00
			6.469.776.229,00	5.918.600.182,00	0,00	0,00
10	**PENDIDIKAN**		897.567.105.529,00	54.523.037.893,00	0,00	0,00
			808.339.502.899,00	52.087.503.542,00	0,00	0,00
10.1.01	PENDIDIKAN		866.397.059.198,00	47.424.191.888,00	0,00	0,00
			779.975.522.751,00	45.272.862.040,00	0,00	0,00
10.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		13.773.928.249,00	6.281.995.780,00	0,00	0,00
			13.203.124.240,00	6.039.153.000,00	0,00	0,00
10.2.22	KEBUDAYAAN		12.493.099.458,00	400.353.925,00	0,00	0,00
			10.883.256.366,00	385.107.500,00	0,00	0,00
10.2.23	PERPUSTAKAAN		4.903.018.624,00	416.496.300,00	0,00	0,00
			4.277.599.542,00	390.381.002,00	0,00	0,00
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		15.563.905.804,00	121.860.000,00	0,00	0,00
			14.130.956.364,00	120.265.000,00	0,00	0,00
11.1.06	SOSIAL		13.938.655.804,00	121.860.000,00	0,00	0,00
			12.581.341.644,00	120.265.000,00	0,00	0,00
11.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.569.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.517.539.870,00	0,00	0,00	0,00
11.3.32	TRANSMIGRASI		56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.074.850,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH		2.048.368.740.309,00	332.747.086.931,00	21.382.536.680,00	739.334.054.579,00
			1.813.918.311.416,00	295.594.876.519,00	657.130.800,00	733.585.177.063,00

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	**a. Belanja pada Dinas Pendidikan:**	Rp 986.826.330.265,00	Rp 825.248.384.791,00	84%
	1) Belanja Operasi :	Rp 944.161.961.165,00	Rp 782.584.015.691,00	83%
	a. Belanja Pegawai;	Rp 791.131.203.265,00	Rp 628.922.473.187,00	79%
	b. Belanja Barang dan Jasa;	Rp 103.792.063.900,00	Rp 103.792.063.900,00	100%
	c. Belanja Hibah;	Rp 49.238.694.000,00		
	d. Belanja Bantuan Sosial.	Rp -		
	2) Belanja Modal;	Rp 42.664.369.100,00	Rp 42.664.369.100,00	100%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan :	Rp 2.437.978.880,00	Rp 2.437.978.880,00	100%
	1) Belanja Operasi :	Rp 2.408.933.880,00	Rp 2.408.933.880,00	100%
	a. Belanja Pegawai;	Rp 9.580.000,00	Rp 9.580.000,00	100%
	b. Belanja Barang dan Jasa;	Rp 2.149.353.880,00	Rp 2.149.353.880,00	100%
	c. Belanja Hibah;	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	100%
	d. Belanja Bantuan Sosial.	Rp -		
	2) Belanja Modal;	Rp 29.045.000,00	Rp 29.045.000,00	100%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan :	Rp 202.199.000,00	Rp 202.199.000,00	100%
	1) Belanja Operasi:	Rp 190.950.800,00	Rp 190.950.800,00	100%
	a. Belanja Pegawai;	Rp 4.040.000,00	Rp 4.040.000,00	100%
	b. Belanja Barang dan Jasa;	Rp 186.910.800,00	Rp 186.910.800,00	100%
	c. Belanja Hibah;	Rp -		
	d. Belanja Bantuan Sosial.	Rp -		
	2) Belanja Modal;	Rp 11.248.200,00	Rp 11.248.200,00	100%
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	Rp 3.973.595.029,00	Rp 3.973.595.029,00	100%
	1) Belanja Operasi:	Rp 3.973.595.029,00	Rp 3.973.595.029,00	100%
	a. Belanja Pegawai;	Rp 16.540.000,00	Rp 16.540.000,00	100%
	b. Belanja Barang dan Jasa;	Rp 1.332.055.029,00	Rp 1.332.055.029,00	100%
	c. Belanja Hibah;	Rp 2.625.000.000,00	Rp 2.625.000.000,00	100%
	d. Belanja Bantuan Sosial.	Rp -		
	2) Belanja Modal;	Rp -		
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain :			
	1) Belanja Transfer:			
	Belanja bantuan keuangan			
	2) Sub Kegiatan pada SKPD			
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	Rp 993.440.103.174,00	Rp 831.862.157.700,00	
3.	Total Belanja Daerah	Rp 2.817.015.906.018,00	Rp 2.110.170.318.735,00	
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	35,27	39,42	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	a. Urusan Bidang Kesehatan	**269.129.340.485,00**	**245.012.768.203,00**	91,04
	Belanja pada Dinas Kesehatan	**94.130.892.736,00**	**91.610.358.161,00**	97,32
	1) Belanja Operasi	60.759.066.636,00	56.698.873.148,00	93,32
	a. Belanja Pegawai;	2.420.000,00	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa;	60.056.646.636,00	55.998.873.148,00	93,24
	c. Belanja Hibah;	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Keuangan.			
	2) Belanja Modal;	33.371.826.100,00	25.199.066.658,00	75,51
	Belanja pada RSD Bagas Waras	**74.100.000.630,00**	**68.256.869.882,00**	92,11
	1) Belanja Operasi	68.159.914.000,00	63.613.008.154,00	93,33
	a. Belanja Pegawai;	135.640.000,00	124.180.000,00	91,55
	b. Belanja Barang dan Jasa;	68.024.274.000,00	63.488.828.154,00	93,33
	c. Belanja Hibah;			
	d. Belanja Bantuan Keuangan.			
	2) Belanja Modal;	5.940.086.630,00	4.643.861.728,00	78,18
	Belanja pada Puskesmas	**100.898.447.119,00**	**85.145.540.160,00**	84,39
	1) Belanja Operasi	91.460.397.318,00	76.982.637.987,00	84,17
	a. Belanja Pegawai;	1.446.871.165,00	1.129.660.268,00	78,08
	b. Belanja Barang dan Jasa;	90.013.526.153,00	75.852.977.719,00	84,27
	c. Belanja Hibah;			
	d. Belanja Bantuan Keuangan.			
	2) Belanja Modal;	9.438.049.801,00	8.162.902.173,00	86,49
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:			
	1) Belanja Transfer:			
1	Belanja Bantuan keuangan			
	2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**8.045.376.000,00**	**5.196.387.614,00**	64,59
	a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilisatas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan	48.150.000,00	34.926.000,00	72,54
	b. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.206.455.000,00	1.147.213.750,00	95,09
	c. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.000.000,00	18.127.084,00	90,64
	d. Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.924.800.000,00	787.091.300,00	40,89
	e. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.855.571.000,00	1.649.876.300,00	57,78
	f. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Pengunaan MKJP	10.000.000,00	2.800.000,00	28,00
	g. Pengeloaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	850.500.000,00	521.840.180,00	61,36
	h. Pembinaan Pelayanaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	35.400.000,00	34.926.000,00	98,66
	i. Promosi dan Konseling Kesehatan Reprosuksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	25.000.000,00	24.995.000,00	99,98
	j. Pelaksanaan dan Pengeloaan Program KKBPK di Kampung KB	1.069.500.000,00	974.592.000,00	91,13
2	Anggaran Kesehatan(a+b)	**277.174.716.485,00**	**250.209.155.817,00**	90,27
3	Total Belanja Daerah	2.817.015.906.018,00	2.110.170.318.735,00	74,91
4	Gaji ASN	728.300.579.010,00	638.798.353.448,00	87,71
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN-3-4)	**2.088.715.327.008,00**	**1.471.371.965.287,00**	70,44
	Rasio Anggaran Sekesahatan (2:5) x 100%	**13,27**	**17,01**	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -INSFRATRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

PER 31 DESEMBER 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	Total Belanja Daerah	**2.817.015.906.018,00**	**2.110.170.318.735,00**	74,91
	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. Belanja bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64
	b. bantuan keuangan	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66
	Jumlah (a+b)	**739.334.054.579,00**	**733.585.177.063,00**	99,22
2.	Selisih(1-2)	**2.077.681.851.439,00**	**1.376.585.141.672,00**	66,26
3.	Minimal Belanja Insfatruksur Pelayanan Publik (40%x Selisih)	**831.072.740.575,60**	**550.634.056.668,80**	66,26

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	a) Belanja Modal	**332.747.086.931,00**	**295.594.876.519,00**	88,83
	a. tanah;	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	90,06
	b. peralatan mesin;	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	89,97
	c. bangungan dan gedung;	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76
	d. jalan, jaringan dan irigasi;	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84
	e. aset tetap lainnya;	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	96,17
	f. aset lainnya.			
	b) Belanja Pemeliharaan	80.467.843.171,00	76.292.176.152,00	94,81
2.	a) Belanja Hibah;	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	97,64
	b) Belanja Bantuan Sosial;	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66
3.	Jumlah Belanja Insfrastruktur Daerah	**1.237.682.911.162,00**	**1.190.464.588.735,00**	96,18

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
	1. Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesehatan	15.000.000,00	-
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.419.230.000,00	1.232.462.492,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	590.000.000,00	501.699.900,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.094.635.591,00	3.686.169.350,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	900.000.000,00	878.732.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.493.800.000,00	3.216.469.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	98.200.000,00	77.767.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.932.000.000,00	5.517.918.593,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	166.500.000,00	148.489.900,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.493.800.000,00	3.216.469.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	146.635.000,00	64.906.300,00
		Total	**44.873.765.591,00**	**38.125.399.035,00**
	2. Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru	182.599.000,00	175.578.600,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	278.000.000,00	211.920.900,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	325.000.000,00	320.235.800,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	769.952.000,00	489.199.200,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	99.655.000,00	97.746.900,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	99.755.000,00	97.243.900,00
		Total	**1.754.961.000,00**	**1.391.925.300,00**
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan	**46.628.726.591,00**	**39.517.324.335,00**
B	SPM Bidang Kesehatan			
	1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000,00	34.020.000,00
		Total	**35.000.000,00**	**34.020.000,00**
	2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	123.890.000,00	115.967.600,00
		Total	**123.890.000,00**	**115.967.600,00**
	3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41.384.000,00	39.981.550,00
		Total	**41.384.000,00**	**39.981.550,00**
	4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	407.718.750,00	377.220.000,00
		Total	**407.718.750,00**	**377.220.000,00**
	5. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.234.827.000,00	1.014.565.800,00
		Total	**1.234.827.000,00**	**1.014.565.800,00**
	6. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34.000.000,00	31.449.800,00
		Total	**34.000.000,00**	**31.449.800,00**
	7. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	150.000.000,00	146.137.500,00
		Total	**150.000.000,00**	**146.137.500,00**
	8. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	961.980.000,00	930.305.200,00
		Total	**961.980.000,00**	**930.305.200,00**
	9. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.623.000,00	119.733.800,00
		Total	**120.623.000,00**	**119.733.800,00**
	10. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98.346.000,00	91.042.000,00
		Total	**98.346.000,00**	**91.042.000,00**
	11. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	133.000.000,00	132.076.200,00
		Total	**133.000.000,00**	**132.076.200,00**
	12. Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.032.000,00	46.750.750,00
		Total	**49.032.000,00**	**46.750.750,00**
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	**3.389.800.750,00**	**3.079.250.200,00**
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	200.000.000,00	181.049.550,00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	52.644.992,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	83.941.825,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	944.149.000,00	899.242.000,00
		Total	**1.344.149.000,00**	**1.216.878.367,00**
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	401.489.600,00	390.238.200,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.801.990.000,00	1.800.000.000,00
		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	700.000.000,00	626.109.230,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	946.000.000,00	794.130.650,00
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	550.000.000,00	486.320.953,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	180.957.615,00
		Total	**4.599.479.600,00**	**4.277.756.648,00**
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**5.943.628.600,00**	**5.494.635.015,00**
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	1. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-

		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	113.418.000,00	105.007.200,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	112.121.000,00	104.156.580,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00	87.470.500,00
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	22.478.400,00	21.087.000,00
		Total	**353.017.400,00**	**317.721.280,00**
	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.000.000,00	-
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	170.000.000,00	-
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000,00	58.550.100,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	12.754.000,00	-
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	6.538.000,00	-
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	8.366.500,00	-
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	3.709.500,00	-
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	64.240.500,00	55.186.200,00
		Total	**471.608.500,00**	**113.736.300,00**
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**824.625.900,00**	**431.457.580,00**
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.792.855.393,00	3.650.561.416,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	749.500.000,00	722.434.750,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.500.000,00	6.384.000,00
		Total	**4.550.855.393,00**	**4.379.380.166,00**
	2. Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	146.134.000,00	104.237.270,00
		Total	**146.134.000,00**	**104.237.270,00**
	3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000,00	40.355.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	175.000.000,00	118.172.228,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	192.312.500,00	188.846.100,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi	97.000.000,00	83.877.500,00
		Total	**514.312.500,00**	**431.250.828,00**
	4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	65.872.000,00	49.641.300,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	947.394.000,00	834.920.293,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	499.863.550,00	472.525.216,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	389.569.100,00	345.956.506,00
		Total	**1.902.698.650,00**	**1.703.043.315,00**
	5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	31.425.000,00	31.425.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	21.635.000,00	21.635.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.230.184.027,00	3.208.854.946,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	13.653.000,00	13.653.000,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.011.000,00	68.678.500,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	34.508.000,00	33.607.000,00
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	13.653.000,00	13.653.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	525.478.656,00	518.228.050,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	15.600.000,00	14.681.000,00
		Total	**4.025.147.683,00**	**3.924.415.496,00**
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	**11.139.148.226,00**	**10.542.327.075,00**
F	SPM Bidang Sosial			
	1. Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000,00	520.709.428,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	875.204.000,00	764.069.009,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	10.937.250,00
		Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00
		Total	**1.688.511.000,00**	**1.301.635.687,00**
	2. Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000,00	520.709.428,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	875.204.000,00	764.069.009,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	10.937.250,00
		Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00

		Total	**1.688.511.000,00**	**1.301.635.687,00**
	3. Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000,00	520.709.428,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	875.204.000,00	764.069.009,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	10.937.250,00
		Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00
		Total	**1.688.511.000,00**	**1.301.635.687,00**
	4. Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000,00	520.709.428,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	875.204.000,00	764.069.009,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000,00	10.937.250,00
		Pemberian Layanan Rujukan	1.480.000,00	1.480.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.480.000,00	1.480.000,00
		Total	**1.688.511.000,00**	**1.301.635.687,00**
	5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.000.000,00	7.180.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	67.000.000,00	13.307.000,00
		Penyediaan Makanan	30.000.000,00	1.480.000,00
		Penyediaan Sandang	30.000.000,00	-
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000.000,00	23.364.500,00
		Total	**177.000.000,00**	**45.331.500,00**
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	**6.931.044.000,00**	**5.251.874.248,00**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.651.538.742.197,00	2.672.891.835.275,00	21.353.093.078,00	100,81
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	12.648.474.370,00	103,87
4.1.01	**Pajak Daerah**	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	10.852.621.120,00	107,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.250.000.000,00	1.360.479.499,00	110.479.499,00	108,84
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.177.765.048,00	177.765.048,00	117,78
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.177.765.048,00	177.765.048,00	117,78
4.1.01.06.02	Pajak Motel	250.000.000,00	182.714.451,00	(67.285.549,00)	73,09
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	250.000.000,00	182.714.451,00	(67.285.549,00)	73,09
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	14.510.909.854,00	4.010.909.854,00	138,20
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	7.091.155.252,00	4.591.155.252,00	283,65
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	7.091.155.252,00	4.591.155.252,00	283,65
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	7.419.754.602,00	(580.245.398,00)	92,75
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	7.419.754.602,00	(580.245.398,00)	92,75
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.150.000.000,00	1.079.516.039,00	(70.483.961,00)	93,87
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	505.000.000,00	279.572.356,00	(225.427.644,00)	55,36
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	505.000.000,00	279.572.356,00	(225.427.644,00)	55,36
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	310.000.000,00	253.111.183,00	(56.888.817,00)	81,65
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	310.000.000,00	253.111.183,00	(56.888.817,00)	81,65
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	115.000.000,00	54.482.500,00	(60.517.500,00)	47,38
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	115.000.000,00	54.482.500,00	(60.517.500,00)	47,38
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	220.000.000,00	492.350.000,00	272.350.000,00	223,80
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	220.000.000,00	492.350.000,00	272.350.000,00	223,80
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.200.000.000,00	4.394.210.917,00	194.210.917,00	104,62
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.400.000.000,00	1.733.827.753,00	(666.172.247,00)	72,24
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.400.000.000,00	1.733.827.753,00	(666.172.247,00)	72,24
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.800.000.000,00	2.660.383.164,00	860.383.164,00	147,80
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.800.000.000,00	2.660.383.164,00	860.383.164,00	147,80
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	54.000.000.000,00	57.596.454.790,00	3.596.454.790,00	106,66
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	54.000.000.000,00	57.596.454.790,00	3.596.454.790,00	106,66
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	54.000.000.000,00	57.596.454.790,00	3.596.454.790,00	106,66
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.565.885.426,00	265.885.426,00	120,45
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.565.885.426,00	265.885.426,00	120,45
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.565.885.426,00	265.885.426,00	120,45

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.141.007.300,00	41.007.300,00	101,32
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.141.007.300,00	41.007.300,00	101,32
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	3.100.000.000,00	3.141.007.300,00	41.007.300,00	101,32
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	913.434.000,00	(86.566.000,00)	91,34
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	0,00	970.000,00	970.000,00	0
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	0,00	970.000,00	970.000,00	0
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	912.464.000,00	(87.536.000,00)	91,25
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	912.464.000,00	(87.536.000,00)	91,25
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	1.011.297.474,00	102,53
4.1.01.15.01	PBBP2	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	1.011.297.474,00	102,53
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	40.000.000.000,00	41.011.297.474,00	1.011.297.474,00	102,53
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	40.279.425.821,00	1.779.425.821,00	104,62
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	38.500.000.000,00	40.279.425.821,00	1.779.425.821,00	104,62
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	38.500.000.000,00	40.279.425.821,00	1.779.425.821,00	104,62
4.1.02	**Retribusi Daerah**	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	2.730.288.069,00	117,01
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.652.267.650,00	9.457.790.299,00	805.522.649,00	109,31
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	242.080.000,00	393.676.500,00	151.596.500,00	162,62
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	242.080.000,00	393.676.500,00	151.596.500,00	162,62
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	590.574.400,00	1.025.084.398,00	434.509.998,00	173,57
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	590.574.400,00	1.025.084.398,00	434.509.998,00	173,57
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	9.100.001,00	3.315.001,00	157,30
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	5.785.000,00	9.100.001,00	3.315.001,00	157,30
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.768.478.000,00	1.907.212.000,00	138.734.000,00	107,84
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.768.478.000,00	1.907.212.000,00	138.734.000,00	107,84
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.772.741.250,00	3.764.697.900,00	(8.043.350,00)	99,79
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	393.733.000,00	409.184.000,00	15.451.000,00	103,92
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.295.896.250,00	3.270.401.900,00	(25.494.350,00)	99,23
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	83.112.000,00	85.112.000,00	2.000.000,00	102,41
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.112.769.000,00	1.002.783.500,00	(109.985.500,00)	90,12
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.112.769.000,00	1.002.783.500,00	(109.985.500,00)	90,12
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.600.000,00	84.600.000,00	36.000.000,00	174,07
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.600.000,00	84.600.000,00	36.000.000,00	174,07
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	132.564.500,00	32.564.500,00	132,56
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	132.564.500,00	32.564.500,00	132,56
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.011.240.000,00	1.138.071.500,00	126.831.500,00	112,54
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.011.240.000,00	1.138.071.500,00	126.831.500,00	112,54
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.152.249.171,00	7.867.424.109,00	1.715.174.938,00	127,88
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	991.143.750,00	1.863.904.065,00	872.760.315,00	188,06
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	813.863.750,00	1.482.096.965,00	668.233.215,00	182,11

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	6.294.100,00	6.294.100,00	0
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	94.380.000,00	125.413.000,00	31.033.000,00	132,88
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	82.900.000,00	250.100.000,00	167.200.000,00	301,69
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.784.139.214,00	3.631.633.544,00	847.494.330,00	130,44
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.784.139.214,00	3.631.633.544,00	847.494.330,00	130,44
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	33.045.000,00	50.254.000,00	17.209.000,00	152,08
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	33.045.000,00	50.254.000,00	17.209.000,00	152,08
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	16.800.000,00	10.175.000,00	(6.625.000,00)	60,57
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	16.800.000,00	10.175.000,00	(6.625.000,00)	60,57
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.756.000,00	44.968.000,00	3.212.000,00	107,69
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.756.000,00	44.968.000,00	3.212.000,00	107,69
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.141.365.207,00	2.108.299.000,00	(33.066.207,00)	98,46
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.141.365.207,00	2.108.299.000,00	(33.066.207,00)	98,46
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	144.000.000,00	158.190.500,00	14.190.500,00	109,85
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	84.000.000,00	98.163.000,00	14.163.000,00	116,86
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000,00	60.027.500,00	27.500,00	100,05
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000,00	1.459.590.482,00	209.590.482,00	116,77
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	1.459.590.482,00	209.590.482,00	116,77
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	1.459.590.482,00	209.590.482,00	116,77
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	(346,00)	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	(346,00)	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.548.015.324,00	17.548.014.973,00	(351,00)	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.548.015.324,00	17.548.014.973,00	(351,00)	100,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	348.841.525,00	348.841.529,00	4,00	100,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	348.841.525,00	348.841.529,00	4,00	100,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.844.624.045,00	3.844.624.046,00	1,00	100,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	3.844.624.045,00	3.844.624.046,00	1,00	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	(934.434.473,00)	99,30
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.500.000,00	549.635.762,00	419.135.762,00	421,18
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	35.726.763,00	25.726.763,00	357,27
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	10.000.000,00	35.726.763,00	25.726.763,00	357,27
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	120.500.000,00	513.908.999,00	393.408.999,00	426,48
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	120.500.000,00	513.908.999,00	393.408.999,00	426,48
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	310.000.000,00	474.055.920,00	164.055.920,00	152,92

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	275.550.000,00	175.550.000,00	275,55
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	275.550.000,00	175.550.000,00	275,55
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	210.000.000,00	198.505.920,00	(11.494.080,00)	94,53
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	210.000.000,00	198.505.920,00	(11.494.080,00)	94,53
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	195.993.278,00	195.993.278,00	0
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	195.993.278,00	195.993.278,00	0
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	195.993.278,00	195.993.278,00	0
4.1.04.05	Jasa Giro	6.000.000.000,00	8.291.014.118,00	2.291.014.118,00	138,18
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000,00	8.098.394.103,00	2.098.394.103,00	134,97
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000,00	8.098.394.103,00	2.098.394.103,00	134,97
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	192.620.015,00	192.620.015,00	0
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	192.620.015,00	192.620.015,00	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	116.651.197,00	116.651.197,00	0
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	116.651.197,00	116.651.197,00	0
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	116.651.197,00	116.651.197,00	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.004.858,00	3.004.858,00	0
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	3.004.858,00	3.004.858,00	0
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	3.004.858,00	3.004.858,00	0
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	201.162.740,00	201.162.740,00	0
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	201.162.740,00	201.162.740,00	0
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	201.162.740,00	201.162.740,00	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	356.908.901,00	356.908.901,00	0
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	356.908.901,00	356.908.901,00	0
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	356.908.901,00	356.908.901,00	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.822.601.626,00	1.822.601.626,00	0
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	1.822.601.626,00	1.822.601.626,00	0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	1.822.601.626,00	1.822.601.626,00	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	127.210.900.607,00	120.705.937.734,00	(6.504.962.873,00)	94,89
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	127.210.900.607,00	120.705.937.734,00	(6.504.962.873,00)	94,89
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	127.210.900.607,00	120.705.937.734,00	(6.504.962.873,00)	94,89
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.310.851.343.875,00	2.319.295.962.583,00	8.444.618.708,00	100,37
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.064.148.165.567,00	2.085.460.339.174,00	21.312.173.607,00	101,03
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.671.963.836.567,00	1.693.276.010.174,00	21.312.173.607,00	101,27
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	46.821.062.000,00	52.581.051.641,00	5.759.989.641,00	112,30
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.803.909.000,00	2.872.194.123,00	1.068.285.123,00	159,22
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.487.973.000,00	17.473.326.138,00	1.985.353.138,00	112,82
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.919.983.000,00	2.174.717.623,00	254.734.623,00	113,27
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.999.898.000,00	28.167.993.893,00	2.168.095.893,00	108,34
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	21.649.000,00	23.720.996,00	2.071.996,00	109,57
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	133.601.000,00	155.597.345,00	21.996.345,00	116,46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.570.000,00	14.571.460,00	6.001.460,00	170,03
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	337.000,00	553.491,00	216.491,00	164,24
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	532.653,00	532.653,00	0
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	212.008.000,00	252.956.708,00	40.948.708,00	119,31
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	211.753.211,00	117,17
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.189.650.925.000,00	1.209.400.877.465,00	19.749.952.465,00	101,66
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.189.650.925.000,00	1.209.400.877.465,00	19.749.952.465,00	101,66
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.510.623.000,00	63.086.397.870,00	(2.424.225.130,00)	96,30
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	300.913.000,00	290.302.600,00	(10.610.400,00)	96,47
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.845.152.000,00	4.775.953.100,00	(69.198.900,00)	98,57
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.732.626.000,00	9.124.663.920,00	(607.962.080,00)	93,75
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	20.173.256.000,00	19.953.920.000,00	(219.336.000,00)	98,91
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.010.525.000,00	958.000.000,00	(52.525.000,00)	94,80
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.215.923.000,00	1.147.213.750,00	(68.709.250,00)	94,35
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.095.178.000,00	1.085.500.000,00	(9.678.000,00)	99,12
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.027.041.000,00	5.391.027.000,00	(636.014.000,00)	89,45
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.259.749.000,00	8.853.524.000,00	(406.225.000,00)	95,61
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	944.149.000,00	899.242.000,00	(44.907.000,00)	95,24
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.201.990.000,00	4.196.377.000,00	(5.613.000,00)	99,87
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.108.434.000,00	1.092.822.000,00	(15.612.000,00)	98,59
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.595.687.000,00	5.317.852.500,00	(277.834.500,00)	95,03
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	369.981.226.567,00	368.207.683.198,00	(1.773.543.369,00)	99,52
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.930.676.766,00	125.680.565.649,00	(250.111.117,00)	99,80
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.481.528.858,00	5.507.500.000,00	(974.028.858,00)	84,97
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	169.302.221.000,00	169.302.220.000,00	(1.000,00)	100,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.953.750.000,00	6.676.800.000,00	(1.276.950.000,00)	83,95
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.787.000.000,00	17.811.312.000,00	24.312.000,00	100,14
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.756.500.000,00	1.756.500.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.477.611.394,00	27.943.252.000,00	465.640.606,00	101,69
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	(524.596.000,00)	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.229.339.135,00	8.229.339.135,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	299.991.100,00	299.991.100,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.399.180.650,00	1.399.180.650,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	245.153.500,00	245.153.500,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	762.191.000,00	762.191.000,00	0
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	931.401.664,00	931.401.664,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.662.276.500,00	1.662.276.500,00	0,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.2.01.05.01	Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	380.301.846.000,00	380.301.846.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11.882.483.000,00	11.882.483.000,00	0,00	100,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	(12.867.554.899,00)	94,78
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	(12.282.983.142,00)	94,78
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	235.191.178.308,00	222.908.195.166,00	(12.282.983.142,00)	94,78
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.518.082.892,00	61.961.787.975,00	5.443.705.083,00	109,63
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.132.659.103,00	30.384.672.653,00	252.013.550,00	100,84
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	68.734.230.999,00	65.070.543.496,00	(3.663.687.503,00)	94,67
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	279.029.343,00	277.252.286,00	(1.777.057,00)	99,36
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	79.527.175.971,00	65.213.938.756,00	(14.313.237.215,00)	82,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	(584.571.757,00)	94,92
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	(584.571.757,00)	94,92
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.512.000.000,00	10.927.428.243,00	(584.571.757,00)	94,92
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	260.000.000,00	101,83
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	260.000.000,00	101,83
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	13.300.000.000,00	260.000.000,00	101,99
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	13.300.000.000,00	260.000.000,00	101,99
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	13.300.000.000,00	260.000.000,00	101,99
5	**BELANJA DAERAH**	3.141.832.418.499,00	2.843.755.495.798,00	(298.076.922.701,00)	90,51
5.1	**BELANJA OPERASI**	2.048.368.740.309,00	1.813.918.311.416,00	(234.450.428.893,00)	88,55
5.1.01	**Belanja Pegawai**	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	(130.129.911.709,00)	88,22
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	728.300.579.010,00	638.798.353.448,00	(89.502.225.562,00)	87,71
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	541.213.730.241,00	491.653.536.770,00	(49.560.193.471,00)	90,84
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	407.743.026.898,00	398.381.918.670,00	(9.361.108.228,00)	97,70
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.470.703.343,00	93.271.618.100,00	(40.199.085.243,00)	69,88
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.712.009.195,00	43.746.381.762,00	(6.965.627.433,00)	86,26
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.858.612.012,00	34.856.362.656,00	(1.002.249.356,00)	97,20
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.853.397.183,00	8.890.019.106,00	(5.963.378.077,00)	59,85
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.307.743.638,00	4.813.779.057,00	(493.964.581,00)	90,69
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.307.743.638,00	4.813.779.057,00	(493.964.581,00)	90,69
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.342.199.750,00	29.048.550.000,00	(1.293.649.750,00)	95,74
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.339.199.525,00	29.048.550.000,00	(1.290.649.525,00)	95,75
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.000.225,00	0,00	(3.000.225,00)	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.887.207.750,00	6.344.935.000,00	(542.272.750,00)	92,13

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.887.207.750,00	6.344.935.000,00	(542.272.750,00)	92,13
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.809.157.426,00	27.123.245.340,00	(4.685.912.086,00)	85,27
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.176.929.496,00	20.602.247.352,00	(574.682.144,00)	97,29
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.632.227.930,00	6.520.997.988,00	(4.111.229.942,00)	61,33
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.289.241.462,00	1.260.030.992,00	(29.210.470,00)	97,73
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.289.241.462,00	1.260.030.992,00	(29.210.470,00)	97,73
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.631.407,00	7.207.273,00	(2.424.134,00)	74,83
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.959.431,00	5.547.906,00	(1.411.525,00)	79,72
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.671.976,00	1.659.367,00	(1.012.609,00)	62,10
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.527.254.822,00	30.755.376.752,00	(4.771.878.070,00)	86,57
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.047.653.148,00	26.770.839.154,00	(3.276.813.994,00)	89,09
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.479.601.674,00	3.984.537.598,00	(1.495.064.076,00)	72,72
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.132.685.481,00	1.010.262.190,00	(122.423.291,00)	89,19
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	841.579.344,00	811.697.589,00	(29.881.755,00)	96,45
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	291.106.137,00	198.564.601,00	(92.541.536,00)	68,21
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.398.132.054,00	3.032.629.592,00	(365.502.462,00)	89,24
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.524.725.690,00	2.438.975.467,00	(85.750.223,00)	96,60
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	873.406.364,00	593.654.125,00	(279.752.239,00)	67,97
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.669.167.064,00	0,00	(20.669.167.064,00)	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.669.167.064,00	0,00	(20.669.167.064,00)	0
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	2.418.720,00	2.418.720,00	0,00	100,00
5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	2.418.720,00	2.418.720,00	0,00	100,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	149.999.976.100,00	118.818.943.328,00	(31.181.032.772,00)	79,21
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	110.144.874.200,00	84.920.281.911,00	(25.224.592.289,00)	77,10
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	102.321.275.300,00	82.665.705.014,00	(19.655.570.286,00)	80,79
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.823.598.900,00	2.254.576.897,00	(5.569.022.003,00)	28,82
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	39.771.194.700,00	33.814.755.179,00	(5.956.439.521,00)	85,02
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	37.910.667.900,00	33.713.289.914,00	(4.197.377.986,00)	88,93
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.860.526.800,00	101.465.265,00	(1.759.061.535,00)	5,45
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	83.907.200,00	83.906.238,00	(962,00)	100,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	83.907.200,00	83.906.238,00	(962,00)	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.411.748.789,00	182.934.823.585,00	(8.476.925.204,00)	95,57
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.011.447.266,00	5.988.805.079,00	(22.642.187,00)	99,62
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	49.200.684,00	49.200.684,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	413.285.742,00	413.285.742,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	45.264.629,00	33.153.692,00	(12.110.937,00)	73,24
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	165.314.297,00	165.314.297,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.125.469.531,00	2.125.469.531,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	51.168.711,00	51.168.711,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	122.017.695,00	122.017.695,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.360.547,00	28.829.297,00	(10.531.250,00)	73,24
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.574.421.875,00	1.574.421.875,00	0,00	100,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.425.943.555,00	1.425.943.555,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	974.652.143,00	894.462.656,00	(80.189.487,00)	91,77
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.900.687,00	13.900.687,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.455.040,00	30.563.007,00	(2.892.033,00)	91,36
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	316.367,00	316.367,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	90.495.912,00	90.495.912,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	223.341.908,00	182.077.550,00	(41.264.358,00)	81,52
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	60.274.987,00	48.104.078,00	(12.170.909,00)	79,81
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.019.843,00	3.019.842,00	(1,00)	100,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	55.726.125,00	55.726.125,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	61.678.197,00	61.678.192,00	(5,00)	100,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	197.714.147,00	197.714.147,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.807.149,00	1.807.149,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	735.000,00	294.000,00	(441.000,00)	40,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.273.906,00	2.273.906,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	116.392.125,00	92.970.944,00	(23.421.181,00)	79,88
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.833.250,00	9.833.250,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	98.437.500,00	98.437.500,00	0,00	100,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.304.400.380,00	165.805.741.184,00	(5.498.659.196,00)	96,79
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	171.304.400.380,00	165.805.741.184,00	(5.498.659.196,00)	96,79
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.639.240.000,00	6.897.950.000,00	(1.741.290.000,00)	79,84
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	8.639.240.000,00	6.897.950.000,00	(1.741.290.000,00)	79,84
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.919.465.000,00	972.699.666,00	(946.765.334,00)	50,68
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.919.465.000,00	972.699.666,00	(946.765.334,00)	50,68
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.737.444.000,00	1.557.465.000,00	(179.979.000,00)	89,64
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.475.074.000,00	1.336.585.000,00	(138.489.000,00)	90,61
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	262.370.000,00	220.880.000,00	(41.490.000,00)	84,19
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	825.100.000,00	817.700.000,00	(7.400.000,00)	99,10
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	825.100.000,00	817.700.000,00	(7.400.000,00)	99,10
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.801.310.000,00	30.472.726.750,00	(328.583.250,00)	98,93
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.997.000,00	134.893.500,00	(21.103.500,00)	86,47
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.997.000,00	134.893.500,00	(21.103.500,00)	86,47
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.000.000,00	149.692.140,00	(66.307.860,00)	69,30

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	216.000.000,00	149.692.140,00	(66.307.860,00)	69,30
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	135.989.700,00	(18.212.300,00)	88,19
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	135.989.700,00	(18.212.300,00)	88,19
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	12.362.700,00	(53.409.300,00)	18,80
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	12.362.700,00	(53.409.300,00)	18,80
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	67.642,00	(19.932.358,00)	0,34
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	67.642,00	(19.932.358,00)	0,34
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.571.450.000,00	8.475.592.068,00	(95.857.932,00)	98,88
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.000.000,00	98.223.300,00	(9.776.700,00)	90,95
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.000.000,00	2.292.192,00	(5.707.808,00)	28,65
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	6.876.576,00	(3.123.424,00)	68,77
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.445.450.000,00	8.368.200.000,00	(77.250.000,00)	99,09
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.713.684.000,00	7.713.684.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.713.684.000,00	7.713.684.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.760.000,00	0,00	(53.760.000,00)	0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.760.000,00	0,00	(53.760.000,00)	0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.491.545.523,00	1.075.997.099,00	(415.548.424,00)	72,14
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	(1.365.000,00)	97,56
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	(1.365.000,00)	97,56
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	(89.000,00)	97,54
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	(89.000,00)	97,54
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)	97,56
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)	97,56
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	5.069.400,00	(127.600,00)	97,54
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	5.069.400,00	(127.600,00)	97,54
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.475.000,00	1.112.204,00	(362.796,00)	75,40
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.475.000,00	1.112.204,00	(362.796,00)	75,40
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	1.160,00	(803.840,00)	0,14
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	1.160,00	(803.840,00)	0,14
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.413.000,00	5.362.560,00	(1.050.440,00)	83,62
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.413.000,00	5.362.560,00	(1.050.440,00)	83,62
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	(22.680,00)	83,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	(22.680,00)	83,20
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	(66.040,00)	83,61
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	(66.040,00)	83,61
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.177.562.500,00	802.016.501,00	(375.545.999,00)	68,11
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	9.843.750,00	7.735.551,00	(2.108.199,00)	78,58
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	82.687.500,00	53.226.097,00	(29.461.403,00)	64,37
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.056.250,00	4.731.179,00	(4.325.071,00)	52,24
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	33.075.000,00	26.473.958,00	(6.601.042,00)	80,04
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	425.250.000,00	255.084.482,00	(170.165.518,00)	59,98
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	10.237.500,00	8.260.640,00	(1.976.860,00)	80,69
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.412.500,00	19.253.095,00	(5.159.405,00)	78,87
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.875.000,00	4.069.688,00	(3.805.312,00)	51,68
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	315.000.000,00	229.700.561,00	(85.299.439,00)	72,92
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	260.125.000,00	193.481.250,00	(66.643.750,00)	74,38
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	139.236.023,00	105.577.994,00	(33.658.029,00)	75,83
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.985.812,00	1.617.018,00	(368.794,00)	81,43
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.779.292,00	3.516.683,00	(1.262.609,00)	73,58
5.1.01.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	45.196,00	35.980,00	(9.216,00)	79,61
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.927.988,00	10.109.477,00	(2.818.511,00)	78,20
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	31.905.987,00	21.598.093,00	(10.307.894,00)	67,69
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.610.713,00	5.620.146,00	(2.990.567,00)	65,27
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	431.407,00	353.952,00	(77.455,00)	82,05
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	750.000,00	585.000,00	(165.000,00)	78,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.960.875,00	6.064.800,00	(1.896.075,00)	76,18
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.811.171,00	7.234.261,00	(1.576.910,00)	82,10
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	28.244.878,00	23.613.276,00	(4.631.602,00)	83,60
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	258.164,00	205.500,00	(52.664,00)	79,60
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	105.000,00	29.400,00	(75.600,00)	28,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	324.844,00	258.296,00	(66.548,00)	79,51
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.627.446,00	11.240.236,00	(5.387.210,00)	67,60
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.404.750,00	1.175.250,00	(229.500,00)	83,66
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung	14.062.500,00	12.320.626,00	(1.741.874,00)	87,61
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	988.284.400,00	(4.835.600,00)	99,51
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	595.164.400,00	(4.835.600,00)	99,19
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	595.164.400,00	(4.835.600,00)	99,19
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	(220.760.897,00)	83,65
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	(220.760.897,00)	83,65
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.350.421.165,00	1.129.660.268,00	(220.760.897,00)	83,65
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	835.553.082.222,00	734.742.952.742,00	(100.810.129.480,00)	87,93
5.1.02.01	Belanja Barang	152.071.982.308,00	133.081.095.436,00	(18.990.886.872,00)	87,51
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	151.336.720.538,00	132.418.045.156,00	(18.918.675.382,00)	87,50
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.724.619.609,00	1.996.068.709,00	(728.550.900,00)	73,26
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.120.938.182,00	4.060.485.383,00	(1.060.452.799,00)	79,29
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.097.384.142,00	1.733.193.735,00	(364.190.407,00)	82,64
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	409.496.019,00	269.108.312,00	(140.387.707,00)	65,72
5.1.02.01.01.0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	42.350.000,00	42.300.000,00	(50.000,00)	99,88
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	515.386.250,00	505.275.000,00	(10.111.250,00)	98,04
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	62.511.658,00	61.533.000,00	(978.658,00)	98,43
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	49.866.000,00	44.661.000,00	(5.205.000,00)	89,56
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	417.400.000,00	413.030.000,00	(4.370.000,00)	98,95
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	183.344.972,00	172.844.600,00	(10.500.372,00)	94,27
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	158.000,00	158.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	134.303.155,00	130.113.930,00	(4.189.225,00)	96,88
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.367.855,00	4.872.855,00	(495.000,00)	90,78
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.072.674.967,00	13.367.780.472,00	(1.704.894.495,00)	88,69
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.768.729.655,00	2.496.487.535,00	(272.242.120,00)	90,17
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	258.155.500,00	209.522.700,00	(48.632.800,00)	81,16
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.447.705.416,00	3.827.965.051,00	(619.740.365,00)	86,07
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.702.884.297,00	2.360.957.125,00	(341.927.172,00)	87,35
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.718.670.307,00	3.458.777.210,00	(259.893.097,00)	93,01
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.349.961.899,00	10.408.085.677,00	(941.876.222,00)	91,70
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.130.000,00	33.430.000,00	(700.000,00)	97,95
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	650.505.000,00	591.450.000,00	(59.055.000,00)	90,92
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.435.000,00	8.295.000,00	(140.000,00)	98,34
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.875.461.024,00	7.432.490.809,00	(2.442.970.215,00)	75,26
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.845.319.838,00	22.951.648.550,00	(893.671.288,00)	96,25
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.737.408.680,00	1.710.793.000,00	(26.615.680,00)	98,47
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.904.051.960,00	11.428.576.063,00	(1.475.475.897,00)	88,57
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	154.728.894,00	153.569.200,00	(1.159.694,00)	99,25
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.847.563.259,00	42.356.652.240,00	(7.490.911.019,00)	84,97
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000,00	0,00	(9.000,00)	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000,00	18.400.000,00	(100.000,00)	99,46
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	83.700.000,00	76.720.000,00	(6.980.000,00)	91,66
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	735.261.770,00	663.050.280,00	(72.211.490,00)	90,18
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	719.177.280,00	650.012.280,00	(69.165.000,00)	90,38
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,67
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.084.490,00	10.048.000,00	(3.036.490,00)	76,79
5.1.02.02	Belanja Jasa	270.347.041.922,00	240.944.517.567,00	(29.402.524.355,00)	89,12
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	181.404.308.217,00	160.908.362.745,00	(20.495.945.472,00)	88,70
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.482.505.100,00	11.319.876.005,00	(5.162.629.095,00)	68,68
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.594.050.000,00	5.332.175.000,00	(261.875.000,00)	95,32
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	278.800.000,00	270.500.000,00	(8.300.000,00)	97,02
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	698.920.152,00	698.920.152,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	34.000.000,00	11.600.000,00	(22.400.000,00)	34,12
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	7.400.000,00	3.100.000,00	(4.300.000,00)	41,89
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.098.650.000,00	2.060.200.000,00	(1.038.450.000,00)	66,49
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	898.700.000,00	(75.700.000,00)	92,23
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.507.590.000,00	19.926.440.000,00	(4.581.150.000,00)	81,31
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.261.913.480,00	656.693.854,00	(605.219.626,00)	52,04
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.924.716.560,00	3.622.046.710,00	(302.669.850,00)	92,29
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	747.936.320,00	747.636.320,00	(300.000,00)	99,96
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	996.869.280,00	996.869.280,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	435.550.000,00	418.180.000,00	(17.370.000,00)	96,01
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	241.500.000,00	229.800.000,00	(11.700.000,00)	95,16
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	447.000.000,00	408.350.000,00	(38.650.000,00)	91,35
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	933.800.000,00	777.575.640,00	(156.224.360,00)	83,27
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.410.816.569,00	28.155.621.271,00	(1.255.195.298,00)	95,73
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.685.722.720,00	1.578.344.880,00	(107.377.840,00)	93,63
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.443.406.222,00	6.017.858.918,00	(425.547.304,00)	93,40
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.913.594.664,00	4.401.016.066,00	(512.578.598,00)	89,57
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	673.327.436,00	570.852.183,00	(102.475.253,00)	84,78
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.820.000,00	55.845.000,00	(27.975.000,00)	66,62
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	541.200.000,00	448.150.000,00	(93.050.000,00)	82,81
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	194.350.000,00	183.850.000,00	(10.500.000,00)	94,60
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.065.200.000,00	1.008.199.148,00	(57.000.852,00)	94,65
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	7.959.900,00	7.859.000,00	(100.900,00)	98,73
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	129.260.000,00	107.676.640,00	(21.583.360,00)	83,30
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.751.735.321,00	16.993.143.957,00	(758.591.364,00)	95,73

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00	77.000.000,00	(10.000.000,00)	88,51
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	37.770.000,00	36.176.600,00	(1.593.400,00)	95,78
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	44.485.950,00	35.985.100,00	(8.500.850,00)	80,89
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	110.400.000,00	62.900.000,00	(47.500.000,00)	56,97
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	11.940.000,00	11.417.478,00	(522.522,00)	95,62
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	6.024.293.125,00	5.648.070.000,00	(376.223.125,00)	93,75
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	533.198.474,00	325.341.074,00	(207.857.400,00)	61,02
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.761.875.000,00	1.048.710.844,00	(713.164.156,00)	59,52
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	32.342.241.780,00	30.674.015.749,00	(1.668.226.031,00)	94,84
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	313.947.500,00	279.053.445,00	(34.894.055,00)	88,89
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.570.924.778,00	9.116.506.129,00	(454.418.649,00)	95,25
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	78.960.709,00	34.378.500,00	(44.582.209,00)	43,54
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.178.025.577,00	681.701.369,00	(496.324.208,00)	57,87
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.880.600,00	3.837.600,00	(2.043.000,00)	65,26
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.492.091.000,00	4.773.000.000,00	(719.091.000,00)	86,91
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	225.000.000,00	187.908.833,00	(37.091.167,00)	83,52
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.223.394.568,00	38.293.575.383,00	(1.929.819.185,00)	95,20
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.045.636.000,00	33.759.486.700,00	(1.286.149.300,00)	96,33
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.721.300.000,00	3.701.471.200,00	(19.828.800,00)	99,47
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.177.928.034,00	598.572.363,00	(579.355.671,00)	50,82
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126.907.256,00	106.564.146,00	(20.343.110,00)	83,97
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.623.278,00	127.480.974,00	(24.142.304,00)	84,08
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.935.554.844,00	6.986.650.879,00	(1.948.903.965,00)	78,19
5.1.02.02.04.0005	Belanja Sewa Hauler	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0009	Belanja Sewa Loader	631.400,00	0,00	(631.400,00)	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	287.850.000,00	257.500.000,00	(30.350.000,00)	89,46
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.922.458.194,00	1.463.559.198,00	(458.898.996,00)	76,13
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	40.169.375,00	40.126.750,00	(42.625,00)	99,89
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	0
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	187.500,00	0,00	(187.500,00)	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	123.093.000,00	93.520.500,00	(29.572.500,00)	75,98
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.507.192.750,00	1.239.953.000,00	(267.239.750,00)	82,27
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	255.185.000,00	247.490.000,00	(7.695.000,00)	96,98
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	34.625.000,00	33.012.500,00	(1.612.500,00)	95,34
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.290.542.625,00	3.152.948.931,00	(1.137.593.694,00)	73,49

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	435.100.000,00	422.000.000,00	(13.100.000,00)	96,99
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.427.550.000,00	1.002.520.000,00	(425.030.000,00)	70,23
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.382.750.000,00	962.720.000,00	(420.030.000,00)	69,62
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	28,57
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	471.235.000,00	413.030.900,00	(58.204.100,00)	87,65
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	109.950.000,00	99.700.000,00	(10.250.000,00)	90,68
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	292.210.000,00	261.250.000,00	(30.960.000,00)	89,40
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	69.075.000,00	52.080.900,00	(16.994.100,00)	75,40
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.102.872.400,00	8.610.045.993,00	(1.492.826.407,00)	85,22
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.282.215.000,00	4.766.469.283,00	(515.745.717,00)	90,24
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	74.264.400,00	63.153.500,00	(11.110.900,00)	85,04
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.364.000,00	34.521.000,00	(843.000,00)	97,62
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.272.380.000,00	1.769.190.003,00	(503.189.997,00)	77,86
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	378.649.000,00	354.882.811,00	(23.766.189,00)	93,72
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.490.000.000,00	1.066.639.536,00	(423.360.464,00)	71,59
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	570.000.000,00	555.189.860,00	(14.810.140,00)	97,40
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.036.274.578,00	16.442.384.682,00	(2.593.889.896,00)	86,37
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	113.100.000,00	112.058.400,00	(1.041.600,00)	99,08
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	3.985.013.328,00	3.944.228.468,00	(40.784.860,00)	98,98
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	2.164.196.000,00	1.699.715.000,00	(464.481.000,00)	78,54
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	5.826.147.250,00	4.161.705.190,00	(1.664.442.060,00)	71,43
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.155.143.000,00	2.979.781.688,00	(175.361.312,00)	94,44
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	369.300.000,00	369.250.000,00	(50.000,00)	99,99
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.271.375.000,00	3.024.004.990,00	(247.370.010,00)	92,44
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan	80.000.000,00	79.640.946,00	(359.054,00)	99,55
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.059.862.081,00	7.601.956.751,00	(457.905.330,00)	94,32
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.103.304.645,00	3.072.183.806,00	(31.120.839,00)	99,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.414.125.436,00	1.115.793.945,00	(298.331.491,00)	78,90
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.542.432.000,00	3.413.979.000,00	(128.453.000,00)	96,37
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	560.990.234,00	560.990.234,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.455.566,00	3.455.566,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.026.758,00	29.026.758,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.179.121,00	3.179.121,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.610.703,00	11.610.703,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	149.280.469,00	149.280.469,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.593.789,00	3.593.789,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.569.805,00	8.569.805,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.764.453,00	2.764.453,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	110.578.125,00	110.578.125,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	238.931.445,00	238.931.445,00	0,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	80.467.843.171,00	76.292.176.152,00	(4.175.667.019,00)	94,81
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.343.602.227,00	14.714.013.307,00	(1.629.588.920,00)	90,03
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	13.250.000,00	9.389.000,00	(3.861.000,00)	70,86
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	134.859.204,00	130.211.240,00	(4.647.964,00)	96,55
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	14.275.000,00	7.399.130,00	(6.875.870,00)	51,83
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	377.100.000,00	359.916.558,00	(17.183.442,00)	95,44
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.707.091.325,00	9.992.377.044,00	(714.714.281,00)	93,32
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.593.373.847,00	1.163.547.137,00	(429.826.710,00)	73,02
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	25.000.000,00	23.832.000,00	(1.168.000,00)	95,33
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	164.587.500,00	158.502.450,00	(6.085.050,00)	96,30
5.1.02.03.02.0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.000.000,00	26.850.000,00	(150.000,00)	99,44
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.739.361,00	1.610.000,00	(1.129.361,00)	58,77
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	207.880.000,00	194.820.000,00	(13.060.000,00)	93,72
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	409.454.000,00	356.093.305,00	(53.360.695,00)	86,97
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.875.000,00	17.705.000,00	(4.170.000,00)	80,94
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	558.870.000,00	465.260.200,00	(93.609.800,00)	83,25
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.145.000,00	10.687.000,00	(5.458.000,00)	66,19
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	107.500.000,00	79.253.000,00	(28.247.000,00)	73,72
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	144.375.000,00	130.665.000,00	(13.710.000,00)	90,50
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	26.700.000,00	26.535.000,00	(165.000,00)	99,38
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	131.780.000,00	99.330.760,00	(32.449.240,00)	75,38
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	102.750.000,00	81.143.000,00	(21.607.000,00)	78,97
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	791.260.890,00	701.263.933,00	(89.996.957,00)	88,63
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	563.556.000,00	497.867.550,00	(65.688.450,00)	88,34
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.400.000,00	825.000,00	(10.575.000,00)	7,24
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	58.757.600,00	58.510.000,00	(247.600,00)	99,58
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	105.572.500,00	104.870.000,00	(702.500,00)	99,33
5.1.02.03.02.0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	5.330.000,00	5.300.000,00	(30.000,00)	99,44

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.788.415.280,00	41.168.162.139,00	(1.620.253.141,00)	96,21
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.239.735.460,00	26.983.566.900,00	(1.256.168.560,00)	95,55
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.020.000.000,00	1.984.210.000,00	(35.790.000,00)	98,23
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.145.027.800,00	11.075.877.000,00	(69.150.800,00)	99,38
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	481.681.620,00	449.189.900,00	(32.491.720,00)	93,25
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	507.199.000,00	329.603.570,00	(177.595.430,00)	64,99
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	224.600.400,00	217.786.000,00	(6.814.400,00)	96,97
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	130.571.000,00	92.717.269,00	(37.853.731,00)	71,01
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	35.211.500,00	(4.388.500,00)	88,92
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	21.077.455.664,00	20.157.782.006,00	(919.673.658,00)	95,64
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	16.330.000.000,00	15.709.925.470,00	(620.074.530,00)	96,20
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	1.580.000.000,00	1.526.554.508,00	(53.445.492,00)	96,62
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	49.589.000,00	49.589.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	6.000.000,00	5.700.000,00	(300.000,00)	95,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.080.000.000,00	2.024.540.000,00	(55.460.000,00)	97,33
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	150.000.000,00	146.669.992,00	(3.330.008,00)	97,78
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	190.000.000,00	187.380.000,00	(2.620.000,00)	98,62
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	691.866.664,00	507.423.036,00	(184.443.628,00)	73,34
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.250.000,00	(250.000,00)	98,65
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	18.500.000,00	18.250.000,00	(250.000,00)	98,65
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	239.870.000,00	233.968.700,00	(5.901.300,00)	97,54
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	239.870.000,00	233.968.700,00	(5.901.300,00)	97,54
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.621.173.384,00	68.016.664.871,00	(11.604.508.513,00)	85,43
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.663.853.384,00	67.059.345.671,00	(11.604.507.713,00)	85,25
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.173.940.011,00	34.845.432.056,00	(5.328.507.955,00)	86,74
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	105.750.000,00	104.064.898,00	(1.685.102,00)	98,41
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.505.102.472,00	22.297.389.623,00	(5.207.712.849,00)	81,07
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.322.530.901,00	3.880.637.805,00	(441.893.096,00)	89,78
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	6.556.530.000,00	5.931.821.289,00	(624.708.711,00)	90,47
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	957.320.000,00	957.319.200,00	(800,00)	100,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	957.320.000,00	957.319.200,00	(800,00)	100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.241.905.698,00	15.102.848.800,00	(1.139.056.898,00)	92,99
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.234.345.698,00	15.098.348.800,00	(1.135.996.898,00)	93,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.298.345.698,00	1.046.400.000,00	(251.945.698,00)	80,59

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.942.500.000,00	5.614.348.800,00	(328.151.200,00)	94,48
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.993.500.000,00	8.437.600.000,00	(555.900.000,00)	93,82
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.560.000,00	4.500.000,00	(3.060.000,00)	59,52
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.560.000,00	4.500.000,00	(3.060.000,00)	59,52
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	(1.974.330.775,00)	97,73
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	(1.974.330.775,00)	97,73
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.891.872.351,00	84.917.541.576,00	(1.974.330.775,00)	97,73
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	(33.523.155.048,00)	77,64
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	(33.523.155.048,00)	77,64
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.911.263.388,00	116.388.108.340,00	(33.523.155.048,00)	77,64
5.1.04	**Belanja Subsidi**	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	(92.925.668,00)	95,35
5.1.05	**Belanja Hibah**	92.154.157.500,00	89.978.195.464,00	(2.175.962.036,00)	97,64
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.571.852.500,00	28.502.382.900,00	(69.469.600,00)	99,76
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	27.200.000.000,00	27.200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	27.200.000.000,00	27.200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.371.852.500,00	1.302.382.900,00	(69.469.600,00)	94,94
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.371.852.500,00	1.302.382.900,00	(69.469.600,00)	94,94
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.767.785.500,00	32.902.733.200,00	(1.865.052.300,00)	94,64
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.203.685.500,00	32.338.633.200,00	(1.865.052.300,00)	94,55
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.953.285.500,00	31.241.923.500,00	(1.711.362.000,00)	94,81
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.400.000,00	1.096.709.700,00	(153.690.300,00)	87,71
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	564.100.000,00	564.100.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	564.100.000,00	564.100.000,00	0,00	100,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	27.718.000.000,00	27.476.559.864,00	(241.440.136,00)	99,13
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.892.800.000,00	18.755.549.258,00	(137.250.742,00)	99,27
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.892.800.000,00	18.755.549.258,00	(137.250.742,00)	99,27
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	8.825.200.000,00	8.721.010.606,00	(104.189.394,00)	98,82
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	8.825.200.000,00	8.721.010.606,00	(104.189.394,00)	98,82
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	(1.241.500.000,00)	91,33

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	(1.241.500.000,00)	91,33
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	(1.241.500.000,00)	91,33
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	(1.241.500.000,00)	91,33
5.2	**BELANJA MODAL**	332.747.086.931,00	295.594.876.519,00	(37.152.210.412,00)	88,83
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	(552.812.630,00)	90,06
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	115.245.784.370,00	103.690.199.242,00	(11.555.585.128,00)	89,97
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	8.648.057.590,00	7.077.823.640,00	(1.570.233.950,00)	81,84
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	7.955.586.550,00	6.410.306.640,00	(1.545.279.910,00)	80,58
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	3.627.200.000,00	2.450.000.000,00	(1.177.200.000,00)	67,55
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.978.586.550,00	2.659.808.640,00	(318.777.910,00)	89,30
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	1.219.800.000,00	1.172.298.000,00	(47.502.000,00)	96,11
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	105.000.000,00	103.500.000,00	(1.500.000,00)	98,57
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	25.000.000,00	24.700.000,00	(300.000,00)	98,80
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	692.471.040,00	667.517.000,00	(24.954.040,00)	96,40
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	97.683.000,00	76.107.000,00	(21.576.000,00)	77,91
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	594.788.040,00	591.410.000,00	(3.378.040,00)	99,43
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.679.237.215,00	10.614.893.670,00	(1.064.343.545,00)	90,89
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.385.319.110,00	10.365.890.442,00	(1.019.428.668,00)	91,05
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.691.352.250,00	2.526.500.000,00	(164.852.250,00)	93,87
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.796.588.000,00	2.606.400.000,00	(190.188.000,00)	93,20
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.249.872.000,00	981.100.000,00	(268.772.000,00)	78,50
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.501.351.610,00	1.340.758.942,00	(160.592.668,00)	89,30
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.729.481.250,00	1.624.840.500,00	(104.640.750,00)	93,95
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.416.674.000,00	1.286.291.000,00	(130.383.000,00)	90,80
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	293.918.105,00	249.003.228,00	(44.914.877,00)	84,72
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	226.849.355,00	198.253.228,00	(28.596.127,00)	87,39
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	67.068.750,00	50.750.000,00	(16.318.750,00)	75,67
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	592.813.861,00	492.596.645,00	(100.217.216,00)	83,09
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	197.792.272,00	191.226.300,00	(6.565.972,00)	96,68
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.850.000,00	3.695.900,00	(154.100,00)	96,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.849.000,00	6.720.600,00	(128.400,00)	98,13
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	6.042.772,00	4.124.800,00	(1.917.972,00)	68,26
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	181.050.500,00	176.685.000,00	(4.365.500,00)	97,59
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	60.078.704,00	51.356.750,00	(8.721.954,00)	85,48
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	27.716.000,00	26.157.000,00	(1.559.000,00)	94,38
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.620.000,00	1.589.800,00	(30.200,00)	98,14
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	17.356.748,00	12.706.550,00	(4.650.198,00)	73,21

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.750,00	0,00	(1.750,00)	0
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	949.000,00	946.000,00	(3.000,00)	99,68
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	4.767.206,00	3.930.600,00	(836.606,00)	82,45
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.668.000,00	6.026.800,00	(1.641.200,00)	78,60
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	334.942.885,00	250.013.595,00	(84.929.290,00)	74,64
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	11.440.700,00	9.566.200,00	(1.874.500,00)	83,62
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.037.185,00	1.415.395,00	(3.621.790,00)	28,10
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.600.000,00	1.750.000,00	(1.850.000,00)	48,61
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	218.115.000,00	199.647.000,00	(18.468.000,00)	91,53
5.2.02.03.03.0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	96.750.000,00	37.635.000,00	(59.115.000,00)	38,90
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.367.281.922,00	1.316.537.100,00	(50.744.822,00)	96,29
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.367.281.922,00	1.316.537.100,00	(50.744.822,00)	96,29
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20.656.652,00	17.630.000,00	(3.026.652,00)	85,35
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	92.794.145,00	81.202.100,00	(11.592.045,00)	87,51
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	899.680.500,00	874.640.000,00	(25.040.500,00)	97,22
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	353.485.625,00	343.000.000,00	(10.485.625,00)	97,03
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.043.103.652,00	15.575.769.257,00	532.665.605,00	103,54
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.205.164.645,00	5.285.870.043,00	2.080.705.398,00	164,92
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	2.503.352.783,00	2.503.352.783,00	0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.551.323.045,00	1.276.681.320,00	(274.641.725,00)	82,30
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.653.841.600,00	1.505.835.940,00	(148.005.660,00)	91,05
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.759.939.007,00	10.255.296.214,00	(1.504.642.793,00)	87,21
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.679.351.150,00	3.420.957.539,00	(258.393.611,00)	92,98
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	12.728.000,00	6.732.000,00	(5.996.000,00)	52,89
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	227.971.250,00	209.610.000,00	(18.361.250,00)	91,95
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	909.525.000,00	781.684.875,00	(127.840.125,00)	85,94
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	75.654.902,00	74.421.000,00	(1.233.902,00)	98,37
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.036.368.805,00	4.965.252.000,00	(1.071.116.805,00)	82,26
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	818.339.900,00	796.638.800,00	(21.701.100,00)	97,35
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	78.000.000,00	34.603.000,00	(43.397.000,00)	44,36
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	78.000.000,00	34.603.000,00	(43.397.000,00)	44,36
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.540.652.513,00	2.300.672.500,00	(239.980.013,00)	90,55
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.240.733.905,00	1.030.631.100,00	(210.102.805,00)	83,07
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	269.405.600,00	223.582.000,00	(45.823.600,00)	82,99
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	911.053.305,00	748.709.100,00	(162.344.205,00)	82,18
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	60.275.000,00	58.340.000,00	(1.935.000,00)	96,79
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	300.380.028,00	280.038.000,00	(20.342.028,00)	93,23
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	297.780.028,00	277.438.000,00	(20.342.028,00)	93,17

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	999.538.580,00	990.003.400,00	(9.535.180,00)	99,05
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	33.450.000,00	33.000.000,00	(450.000,00)	98,65
5.2.02.06.03.0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	5.000.000,00	4.970.000,00	(30.000,00)	99,40
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher /Menara Antena	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.03.0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	215.800.000,00	213.500.000,00	(2.300.000,00)	98,93
5.2.02.06.03.0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	40.535.000,00	40.000.000,00	(535.000,00)	98,68
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	649.003.580,00	642.783.400,00	(6.220.180,00)	99,04
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.987.362.847,00	34.797.111.762,00	(3.190.251.085,00)	91,60
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	37.830.506.847,00	34.790.236.762,00	(3.040.270.085,00)	91,96
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.379.928.333,00	1.748.230.176,00	(631.698.157,00)	73,46
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.057.047.398,00	1.672.195.618,00	(384.851.780,00)	81,29
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	198.590.000,00	176.382.940,00	(22.207.060,00)	88,82
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.375.602.888,00	1.354.387.590,00	(21.215.298,00)	98,46
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.787.687,00	2.988.307.680,00	(512.480.007,00)	85,36
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	335.530.200,00	80.473.920,00	(255.056.280,00)	23,98
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	110.222.750,00	14.875.000,00	(95.347.750,00)	13,50
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	338.245.784,00	321.189.500,00	(17.056.284,00)	94,96
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	20.138.245.556,00	20.035.783.000,00	(102.462.556,00)	99,49
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.662.568.000,00	1.270.659.000,00	(391.909.000,00)	76,43
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	765.059.400,00	619.500.000,00	(145.559.400,00)	80,97
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.916.184.513,00	2.847.112.818,00	(69.071.695,00)	97,63
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	424.907.088,00	412.789.000,00	(12.118.088,00)	97,15
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	509.600.000,00	464.206.000,00	(45.394.000,00)	91,09
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	603.978.350,00	450.376.425,00	(153.601.925,00)	74,57
5.2.02.07.01.0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	508.008.900,00	333.768.095,00	(174.240.805,00)	65,70
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	156.856.000,00	6.875.000,00	(149.981.000,00)	4,38
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	156.856.000,00	6.875.000,00	(149.981.000,00)	4,38
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.694.747.360,00	6.644.208.673,00	(1.050.538.687,00)	86,35
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6.157.351.024,00	5.364.697.673,00	(792.653.351,00)	87,13
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	588.300.000,00	582.000.000,00	(6.300.000,00)	98,93
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.566.239.000,00	1.384.654.749,00	(181.584.251,00)	88,41
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.953.506.000,00	1.779.900.000,00	(173.606.000,00)	91,11
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	190.000.000,00	189.074.324,00	(925.676,00)	99,51
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	0
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	721.737.000,00	618.077.000,00	(103.660.000,00)	85,64
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.000.000,00	960.000,00	(40.000,00)	96,00
5.2.02.08.01.0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.08.01.0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	24.335.000,00	14.381.600,00	(9.953.400,00)	59,10
5.2.02.08.01.0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	656.562.500,00	584.000.000,00	(72.562.500,00)	88,95
5.2.02.08.01.0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	10.260.000,00	8.700.000,00	(1.560.000,00)	84,80
5.2.02.08.01.0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	6.470.000,00	0,00	(6.470.000,00)	0
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	360.166.524,00	151.950.000,00	(208.216.524,00)	42,19
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	180.239.250,00	120.025.000,00	(60.214.250,00)	66,59
5.2.02.08.02.0003	Belanja Modal General Laborato y Tool	239.250,00	225.000,00	(14.250,00)	94,04
5.2.02.08.02.0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	180.000.000,00	119.800.000,00	(60.200.000,00)	66,56
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.788.040,00	7.224.000,00	(564.040,00)	92,76
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5.517.000,00	5.181.000,00	(336.000,00)	93,91
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	546.040,00	350.000,00	(196.040,00)	64,10
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	1.625.000,00	1.593.000,00	(32.000,00)	98,03
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	107.250.000,00	36.000.000,00	(71.250.000,00)	33,57
5.2.02.08.04.0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device	107.250.000,00	36.000.000,00	(71.250.000,00)	33,57
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	25.010.646,00	17.370.000,00	(7.640.646,00)	69,45
5.2.02.08.05.0001	Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	18.679.200,00	17.370.000,00	(1.309.200,00)	92,99
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	6.331.446,00	0,00	(6.331.446,00)	0
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.046.841.900,00	935.300.000,00	(111.541.900,00)	89,34
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	44.654.900,00	24.100.000,00	(20.554.900,00)	53,97
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	1.002.187.000,00	911.200.000,00	(90.987.000,00)	90,92
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	66.000.000,00	64.900.000,00	(1.100.000,00)	98,33
5.2.02.08.08.0004	Belanja Modal Cavitation Tunnel	66.000.000,00	64.900.000,00	(1.100.000,00)	98,33
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	104.266.500,00	98.692.000,00	(5.574.500,00)	94,65
5.2.02.08.09.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	103.966.500,00	98.432.000,00	(5.534.500,00)	94,68
5.2.02.08.09.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	300.000,00	260.000,00	(40.000,00)	86,67
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.342.614.930,00	22.840.402.995,00	(4.502.211.935,00)	83,53
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.393.267.734,00	20.287.132.838,00	(4.106.134.896,00)	83,17
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	186.500.000,00	170.300.000,00	(16.200.000,00)	91,31
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.206.767.734,00	20.116.832.838,00	(4.089.934.896,00)	83,10
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.949.347.196,00	2.553.270.157,00	(396.077.039,00)	86,57
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	14.231.250,00	0,00	(14.231.250,00)	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.509.034.646,00	2.199.195.850,00	(309.838.796,00)	87,65
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	426.081.300,00	354.074.307,00	(72.006.993,00)	83,10
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	17.890.000,00	17.140.000,00	(750.000,00)	95,81
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	17.890.000,00	17.140.000,00	(750.000,00)	95,81
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	4.300.000,00	4.250.000,00	(50.000,00)	98,84
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	11.900.000,00	11.200.000,00	(700.000,00)	94,12

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	54.170.000,00	52.986.000,00	(1.184.000,00)	97,81
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	54.170.000,00	52.986.000,00	(1.184.000,00)	97,81
5.2.02.17.01.0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	54.170.000,00	52.986.000,00	(1.184.000,00)	97,81
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.272.002.480,00	1.955.800.000,00	(316.202.480,00)	86,08
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.272.002.480,00	1.955.800.000,00	(316.202.480,00)	86,08
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.351.888.230,00	1.295.920.000,00	(55.968.230,00)	95,86
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	920.114.250,00	659.880.000,00	(260.234.250,00)	71,72
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.250.000,00	757.000,00	(1.493.000,00)	33,64
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.250.000,00	757.000,00	(1.493.000,00)	33,64
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	2.250.000,00	757.000,00	(1.493.000,00)	33,64
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	(19.494.898.675,00)	80,76
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.456.110.008,00	80.974.470.233,00	(19.481.639.775,00)	80,61
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.456.110.008,00	80.974.470.233,00	(19.481.639.775,00)	80,61
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	54.829.956.200,00	37.235.545.969,00	(17.594.410.231,00)	67,91
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	4.700.000.000,00	4.551.731.000,00	(148.269.000,00)	96,85
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.500.000.000,00	11.489.963.000,00	(10.037.000,00)	99,91
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.776.974.900,00	13.946.210.599,00	(830.764.301,00)	94,38
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.161.823.908,00	3.105.133.908,00	(56.690.000,00)	98,21
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	989.080.000,00	932.500.000,00	(56.580.000,00)	94,28
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	8.350.000,00	8.300.000,00	(50.000,00)	99,40
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	9.285.589.000,00	8.539.968.357,00	(745.620.643,00)	91,97
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.204.336.000,00	1.165.117.400,00	(39.218.600,00)	96,74
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	190.000.200,00	188.639.900,00	(1.360.300,00)	99,28
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	670.409.600,00	658.511.000,00	(11.898.600,00)	98,23
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	670.409.600,00	658.511.000,00	(11.898.600,00)	98,23
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	670.409.600,00	658.511.000,00	(11.898.600,00)	98,23
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	(5.081.696.075,00)	94,84
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.259.549.000,00	73.042.096.724,00	(4.217.452.276,00)	94,54
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	76.959.549.000,00	72.760.919.294,00	(4.198.629.706,00)	94,54
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	75.346.749.000,00	71.220.300.096,00	(4.126.448.904,00)	94,52
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.004.800.000,00	979.821.198,00	(24.978.802,00)	97,51
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	608.000.000,00	560.798.000,00	(47.202.000,00)	92,24
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	300.000.000,00	281.177.430,00	(18.822.570,00)	93,73
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	300.000.000,00	281.177.430,00	(18.822.570,00)	93,73

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.994.446.000,00	16.189.522.063,00	(804.923.937,00)	95,26
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.906.046.000,00	12.180.634.500,00	(725.411.500,00)	94,38
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	375.000.000,00	352.346.000,00	(22.654.000,00)	93,96
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.850.000.000,00	1.773.413.200,00	(76.586.800,00)	95,86
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.681.046.000,00	10.054.875.300,00	(626.170.700,00)	94,14
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.938.400.000,00	3.863.372.863,00	(75.027.137,00)	98,09
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.938.400.000,00	3.863.372.863,00	(75.027.137,00)	98,09
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	150.000.000,00	145.514.700,00	(4.485.300,00)	97,01
5.2.04.02.05.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	150.000.000,00	145.514.700,00	(4.485.300,00)	97,01
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	12.000.000,00	11.865.000,00	(135.000,00)	98,88
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	12.000.000,00	11.865.000,00	(135.000,00)	98,88
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	12.000.000,00	11.865.000,00	(135.000,00)	98,88
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.159.740.262,00	4.100.555.400,00	(59.184.862,00)	98,58
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.159.740.262,00	4.100.555.400,00	(59.184.862,00)	98,58
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	4.159.740.262,00	4.100.555.400,00	(59.184.862,00)	98,58
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	12.197.047.491,00	11.729.829.587,00	(467.217.904,00)	96,17
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.624.027.786,00	7.030.925.012,00	(2.593.102.774,00)	73,06
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.622.027.786,00	7.028.925.012,00	(2.593.102.774,00)	73,05
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	59.665.200,00	58.018.502,00	(1.646.698,00)	97,24
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	7.381.763.586,00	5.249.675.010,00	(2.132.088.576,00)	71,12
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.180.599.000,00	1.721.231.500,00	(459.367.500,00)	78,93
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi Naskah, dan Lukisan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.296.089.705,00	2.237.452.500,00	(58.637.205,00)	97,45
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	2.271.689.705,00	2.218.752.500,00	(52.937.205,00)	97,67
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	2.271.689.705,00	2.218.752.500,00	(52.937.205,00)	97,67
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	24.400.000,00	18.700.000,00	(5.700.000,00)	76,64
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	24.400.000,00	18.700.000,00	(5.700.000,00)	76,64
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	154.730.000,00	152.502.500,00	(2.227.500,00)	98,56
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	154.730.000,00	152.502.500,00	(2.227.500,00)	98,56
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	154.730.000,00	152.502.500,00	(2.227.500,00)	98,56
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	119.700.000,00	2.306.449.575,00	2.186.749.575,00	1.926,86
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	119.700.000,00	2.306.449.575,00	2.186.749.575,00	1.926,86
5.2.05.08.01.0004	Belanja Modal Hak Paten	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	0
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	105.000.000,00	104.775.000,00	(225.000,00)	99,79
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	2.201.674.575,00	2.201.674.575,00	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	(20.725.405.880,00)	3,07
5.4	**BELANJA TRANSFER**	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	(5.748.877.516,00)	99,22
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	(3.275.894.556,00)	84,64
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.993.765.335,00	15.879.816.030,00	(3.113.949.305,00)	83,61
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.993.765.335,00	15.879.816.030,00	(3.113.949.305,00)	83,61
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.993.765.335,00	15.879.816.030,00	(3.113.949.305,00)	83,61
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.339.265.684,00	2.177.320.433,00	(161.945.251,00)	93,08
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.339.265.684,00	2.177.320.433,00	(161.945.251,00)	93,08
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.339.265.684,00	2.177.320.433,00	(161.945.251,00)	93,08
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	(2.472.982.960,00)	99,66
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	(2.472.982.960,00)	99,66
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	508.532.040.600,00	508.532.040.600,00	0,00	100,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	508.532.040.600,00	508.532.040.600,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	209.468.982.960,00	206.996.000.000,00	(2.472.982.960,00)	98,82
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	209.468.982.960,00	206.996.000.000,00	(2.472.982.960,00)	98,82
	SURPLUS / DEFISIT	(490.293.676.302,00)	(170.863.660.523,00)	319.430.015.779,00	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	0,00	100,00
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	0,00	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	28.918.726.303,00	28.918.726.303,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	12.179.152.569,00	12.179.152.569,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	102.383.278,00	102.383.278,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	2.315.290.963,00	2.315.290.963,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	266.670.723,00	266.670.723,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	6.239.571.235,00	6.239.571.235,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	86.985.100,00	86.985.100,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.754.750,00	4.754.750,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	416.750.099,00	416.750.099,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.746.746.421,00	2.746.746.421,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.837.910.932,00	1.837.910.932,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	911.780.270,00	911.780.270,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	537.173.550,00	537.173.550,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	388.957.112,00	388.957.112,00	0,00	100,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.341.620.349,00	4.341.620.349,00	0,00	100,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.341.620.349,00	4.341.620.349,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	10.560.042.453,00	10.560.042.453,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.624.989.786,00	1.624.989.786,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	55.420.244,00	55.420.244,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	221.176.180,00	221.176.180,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	1.068.746.262,00	1.068.746.262,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.303.684,00	3.303.684,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.101.605.046,00	1.101.605.046,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	249.363.915,00	249.363.915,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	515.502.908,00	515.502.908,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.719.934.428,00	5.719.934.428,00	0,00	100,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	6.233.397.782,00	6.233.397.782,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	6.233.397.782,00	6.233.397.782,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	875.485.825,00	875.485.825,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	416.547.137,00	416.547.137,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.259.115.797,00	1.259.115.797,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.329.407.859,00	1.329.407.859,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	49.718.379,00	49.718.379,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	191.192.382,00	191.192.382,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	142.622.609,00	142.622.609,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	77.494.884,00	77.494.884,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	1.891.812.910,00	1.891.812.910,00	0,00	100,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.029.000.000,00	2.029.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	2.029.000.000,00	2.029.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	794.000.000,00	794.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.01.0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.235.000.000,00	1.235.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	420.490.038.760,00	420.490.038.760,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	361.030.705.989,00	361.030.705.989,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	298.349.844.346,00	298.349.844.346,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	57.343.821.572,00	57.343.821.572,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	204.250.000,00	204.250.000,00	0,00	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.352.590.071,00	1.352.590.071,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	3.780.200.000,00	3.780.200.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	38.044.986.711,00	38.044.986.711,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	413.619.300,00	413.619.300,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.358.748.712,00	4.358.748.712,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	11.767.876.765,00	11.767.876.765,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	21.504.741.934,00	21.504.741.934,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	18.151.642.519,00	18.151.642.519,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	18.151.642.519,00	18.151.642.519,00	0,00	100,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	3.262.703.541,00	3.262.703.541,00	0,00	100,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.262.703.541,00	3.262.703.541,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	39.022.513.457,00	39.022.513.457,00	0,00	100,00
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.900.000.000,00	32.900.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.900.000.000,00	32.900.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.900.000.000,00	32.900.000.000,00	0,00	100,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	0,00	100,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**319.430.015.779,00**	**319.430.015.779,00**	**0**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	**BELANJA OPERASI**	**488.093.045.927,12**	**400.097.245.798,92**	**343.207.623.324,10**	**85,78**	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	459.832.458.567,94	376.931.615.267,16	323.335.901.933,63		
I.2	Belanja Hibah Barang /Jasa	24.209.415.077,99	19.844.823.391,63	17.023.098.116,88		
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	4.051.172.281,20	3.320.807.140,13	2.848.623.273,59		
II	**BELANJA MODAL**	**95.052.767.605,88**	**77.916.190.042,08**	**66.837.326.883,90**	**81,97**	
	Belanja Modal Tanah	1.587.381.219,02	1.301.200.373,70	1.263.225.478,11		
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.916.773.421,92	26.982.376.611,57	23.312.859.617,11		
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.943.567.735,99	23.725.479.867,81	18.500.572.081,46		
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.116.608.657,82	23.047.609.014,45	21.107.227.829,94		
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.488.436.571,14	2.859.524.174,54	2.653.441.877,29		
TOTAL (1 + 2)		**583.145.813.533,00**	**478.013.435.841,00**	**410.044.950.208,00**	**85,78**	

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

No	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.064.859.550,00	5.559.214.623,00	91,66
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.420.118.500,00	2.026.232.639,00	83,72
3		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.094.671.100,00	3.994.352.650,00	97,55
4		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.752.156.626,00	3.242.031.893,00	86,40
5		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	196.400.000,00	141.715.100,00	72,16
6		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.697.779.500,00	28.463.386.200,00	99,18
7		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.282.225.500,00	1.278.636.750,00	99,72
8		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.956.002.500,00	1.751.358.599,00	89,54
9		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.760.455.920,00	4.544.561.205,00	78,89
10		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.612.074.950,00	3.128.920.952,00	86,62
11		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	27.032.339.504,00	23.672.567.491,00	87,57
12		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	765.714.530.507,00	524.650.124.263,00	68,52
13		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.450.656.645,00	3.075.552.741,00	89,13
14		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.335.430.200,00	4.901.685.866,00	91,87
15		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.655.044.065,00	1.423.393.266,00	86,00
16		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.410.000.000,00	1.276.154.751,00	90,51
17		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.412.500.000,00	1.338.300.416,00	94,75
18		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.410.000.000,00	1.276.154.751,00	90,51
19		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.412.500.000,00	1.338.300.416,00	94,75
20		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.304.692.631,00	5.110.144.947,00	81,05

21		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.655.044.065,00	1.423.393.266,00	86,00
22		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	8.449.540.883,00	7.712.881.737,00	91,28
23		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.354.742.000,00	2.261.185.120,00	96,03
24		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	29.746.000,00	29.246.000,00	98,32
25		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.477.113.000,00	2.385.063.554,00	96,28
26		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	697.710.036,00	681.909.285,00	97,74
27		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	19.358.213.993,00	18.560.367.955,00	95,88
28		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	5.462.851.722,00	4.838.121.257,00	88,56
29		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	500.980.200,00	408.398.480,00	81,52
30		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	106.096.200,00	103.336.160,00	97,40
31		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	208.050.758,00	167.240.740,00	80,38
32		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	6.615.474.503,00	5.751.267.229,00	86,94
33		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.543.452.836,00	8.245.004.410,00	86,39
34		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	647.910.000,00	628.310.068,00	96,97
35		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	432.810.000,00	412.120.230,00	95,22
36		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	106.209.000,00	99.782.900,00	93,95
37		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	53.882.000,00	51.527.000,00	95,63
38		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	140.373.451.320,00	126.035.699.316,00	89,79
39		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	109.404.387.647,00	100.251.554.971,00	91,63
40		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1.565.021.000,00	1.426.533.285,00	91,15
41		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	664.146.000,00	566.962.850,00	85,37
42		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	998.984.000,00	972.071.450,00	97,31
43		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	140.373.451.320,00	126.035.699.316,00	89,79
44		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	109.404.387.647,00	100.251.554.971,00	91,63
45		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	98,04

46		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	314.000.000,00	296.447.395,00	94,41
47		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	50.000.000,00	41.690.600,00	83,38
48		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	35.000.000,00	33.599.900,00	96,00
49		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.000.000,00	22.520.180,00	90,08
50		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.185.400.000,00	1.100.052.220,00	92,80
51		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30.000.000,00	27.600.000,00	92,00
52		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	70.000.000,00	60.198.500,00	86,00
53		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	31.629.287.038,00	28.086.751.569,00	88,80
54		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.181.575.600,00	6.139.399.621,00	85,49
55		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.898.100.000,00	5.807.823.278,00	98,47
56		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.453.300.000,00	1.359.268.072,00	93,53
57		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	546.700.000,00	531.389.377,00	97,20
58		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	946.500.000,00	875.874.280,00	92,54
59		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.144.369.180,00	6.115.059.099,00	85,59
60		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.291.116.075,00	5.979.964.264,00	95,05
61		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.722.144.000,00	7.571.251.351,00	98,05
62		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	152.105.000,00	130.389.322,00	85,72
63		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	388.642.000,00	368.003.216,00	94,69
64		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	19.352.743.049,00	16.638.799.343,00	85,98
65		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	70.000.000,00	66.765.055,00	95,38
66		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	200.000.000,00	194.788.260,00	97,39
67		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.242.170.000,00	1.191.900.475,00	95,95
68		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	50.000.000,00	42.644.880,00	85,29
69		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4.475.000.000,00	4.392.016.692,00	98,15
70		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.002.000.000,00	989.735.100,00	98,78
71		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	50.000.000,00	43.686.125,00	87,37

72		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	36.600.000,00	35.466.513,00	96,90
73		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	245.000.000,00	204.031.409,00	83,28
74		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.189.245.698,00	12.055.892.515,00	91,41
75		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	724.322.000,00	648.895.779,00	89,59
76		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920,00	269.425.197,00	83,71
77		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.747.040.080,00	6.417.737.229,00	95,12
78		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60.000.000,00	32.363.200,00	53,94
79		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	89.152.000,00	71.856.883,00	80,60
80		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	178.897.000,00	105.011.000,00	58,70
81		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	590.000.000,00	526.500.300,00	89,24
82		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39.661.000,00	21.833.975,00	55,05
83		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.082.256.164,00	18.095.304.787,00	90,11
84		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000,00	924.396.310,00	77,12
85		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.783.424.407,00	26.064.272.758,00	87,51
86		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.873.000.000,00	19.172.559.613,00	91,85
87		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.544.149.000,00	3.147.150.680,00	88,80
88		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.703.820.000,00	2.662.249.715,00	98,46
89		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.015.479.600,00	7.653.179.248,00	95,48
90		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.893.894.000,00	2.798.093.280,00	96,69
91		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.321.690.648,00	64.891.785.537,00	77,88
92		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.910.000.000,00	1.727.745.625,00	90,46
93		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.799.467.000,00	91.950.379.894,00	94,02
94		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000,00	202.579.700,00	57,88
95		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.386.987.801,00	3.701.713.131,00	84,38
96		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.529.300,00	36.175.556,00	99,03
97		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.523.371.125,00	5.299.850.041,00	95,95

98		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.600.065.600,00	1.559.592.368,00	97,47
99		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.289.754.038,00	4.285.244.719,00	81,01
100		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	288.990.450,00	277.769.685,00	96,12
101		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	156.599.070,00	153.299.820,00	97,89
102		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	222.367.000,00	208.705.500,00	93,86
103		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	574.650.000,00	538.264.500,00	93,67
104		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	261.487.500,00	255.126.200,00	97,57
105		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN	1.198.682.000,00	255.126.200,00	21,28
106		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	73.929.867.191,00	68.675.836.011,00	92,89
107		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN	4.074.464.000,00	3.488.374.300,00	85,62
108		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	79,86
109		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN	85.000.000,00	81.974.650,00	96,44
110		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN	37.026.543.081,00	36.070.897.377,00	97,42
111		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	17.768.702.000,00	16.809.564.992,00	94,60
112		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	50.000.000,00	25.434.000,00	50,87
113		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	56.000.000,00	32.074.850,00	57,28
114		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5.000.000,00	2.743.200,00	54,86
115		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.367.336.270,00	6.659.207.673,00	64,23
116		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.520.000.000,00	3.309.251.730,00	94,01
117		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	323.000.000,00	196.884.350,00	60,95
118		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.648.678.000,00	7.755.603.900,00	72,83
119		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.718.106.615,00	5.537.410.505,00	82,43
120		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	365.863.000,00	334.314.959,00	91,38
121		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.953.651.924,00	4.333.665.585,00	87,48
122		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	212.209.000,00	203.843.696,00	96,06
123		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	147.415.000,00	144.109.742,00	97,76
124		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.130.398.286,00	8.337.589.838,00	82,30
125		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.171.175.900,00	724.607.978,00	61,87
126		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.485.000.000,00	1.232.740.552,00	83,01
127		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.659.000.000,00	10.434.398.406,00	89,50
128		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.150.060.000,00	1.896.442.827,00	88,20

129		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	0	0,00
130		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.000.000,00	1.856.500,00	4,64
131		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.782.000.000,00	5.193.541.020,00	89,82
132		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	20.636.800,00	41,27
133		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	55.000.000,00	15.017.175,00	27,30
134		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.238.350.000,00	2.145.432.592,00	95,85
135		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.024.517.000,00	1.618.649.789,00	79,95
136		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.628.648.804,00	8.798.912.684,00	91,38
137		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	169.000.000,00	115.111.579,00	68,11
138		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	77.450.000,00	73.107.817,00	94,39
139		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.000.000,00	3.720.000,00	37,20
140		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.061.000.000,00	1.042.421.056,00	98,25
141		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.000.000,00	9.995.100,00	99,95
142		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	395.800.000,00	373.299.497,00	94,32
143		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.000.000,00	14.996.400,00	99,98
144		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.022.470.000,00	963.479.616,00	94,23
145		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.708.145.000,00	6.272.314.113,00	81,37

146		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.715.200.000,00	6.289.639.828,00	93,66
147		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200.275.000,00	66.414.300,00	33,16
148		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.435.895.801,00	6.205.398.269,00	83,45
149		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	11.801.873.820,00	9.620.939.513,00	81,52
150		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	931.606.972,00	653.632.850,00	70,16
151		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	3.140.321.034,00	2.470.556.462,00	78,67
152		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	11.801.873.820,00	9.620.939.513,00	81,52
153		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BAYAT	2.394.362.847,00	1.897.790.202,00	79,26
154		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BAYAT	4.000.000,00	3.695.300,00	92,38
155		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BAYAT	60.076.000,00	40.929.600,00	68,13
156		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BAYAT	256.969.000,00	220.239.000,00	85,71
157		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BAYAT	9.162.000,00	6.863.500,00	74,91
158		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN BAYAT	107.444.000,00	53.616.800,00	49,90
159		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN CAWAS	2.422.393.203,00	1.950.906.547,00	80,54
160		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN CAWAS	3.119.000,00	3.086.000,00	98,94
161		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN CAWAS	78.099.134,00	75.449.200,00	96,61
162		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN CAWAS	109.705.000,00	109.670.800,00	99,97
163		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN CAWAS	170.000.000,00	153.739.800,00	90,44
164		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN CAWAS	98.986.500,00	80.490.050,00	81,31
165		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN CEPER	2.913.506.768,00	2.413.161.606,00	82,83
166		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN CEPER	2.000.000,00	1.983.500,00	99,18
167		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN CEPER	166.885.500,00	164.670.140,00	98,67
168		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN CEPER	120.000.000,00	116.448.900,00	97,04
169		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN CEPER	6.000.000,00	2.824.000,00	47,07
170		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN CEPER	279.280.010,00	257.646.000,00	92,25
171		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN DELANGGU	2.573.604.302,00	2.202.869.008,00	85,59
172		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN DELANGGU	6.817.000,00	6.795.400,00	99,68
173		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN DELANGGU	154.010.900,00	147.752.250,00	95,94
174		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN DELANGGU	273.646.000,00	272.919.250,00	99,73
175		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN DELANGGU	7.584.500,00	7.550.200,00	99,55
176		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN DELANGGU	60.995.000,00	60.794.550,00	99,67

177		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN GANTIWARNO	2.296.137.763,00	1.864.101.688,00	81,18
178		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN GANTIWARNO	5.000.000,00	4.909.900,00	98,20
179		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN GANTIWARNO	72.965.648,00	72.360.900,00	99,17
180		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN GANTIWARNO	109.500.000,00	109.389.700,00	99,90
181		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN GANTIWARNO	171.500.000,00	166.238.725,00	96,93
182		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN GANTIWARNO	94.200.000,00	93.037.750,00	98,77
183		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JATINOM	140.000.000,00	137.392.730,00	98,14
184		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN JATINOM	219.000.000,00	213.807.260,00	97,63
185		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JATINOM	2.679.238.905,00	2.091.430.842,00	78,06
186		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JATINOM	322.891.000,00	304.573.299,00	94,33
187		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JATINOM	2.679.238.905,00	2.091.430.842,00	78,06
188		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN JATINOM	20.000.000,00	19.572.000,00	97,86
189		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JATINOM	2.679.238.905,00	2.091.430.842,00	78,06
190		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JATINOM	322.891.000,00	304.573.299,00	94,33
191		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JOGONALAN	2.336.794.818,00	1.926.340.532,00	82,44
192		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN JOGONALAN	3.000.000,00	2.987.300,00	99,58
193		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JOGONALAN	119.621.580,00	112.229.500,00	93,82
194		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JOGONALAN	119.026.750,00	103.604.700,00	87,04
195		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN JOGONALAN	168.226.000,00	160.058.700,00	95,15
196		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN JOGONALAN	104.262.300,00	94.738.200,00	90,87
197		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN JUWIRING	2.507.530.641,00	1.857.343.065,00	74,07
198		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN JUWIRING	4.296.500,00	2.836.500,00	66,02
199		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN JUWIRING	136.874.000,00	102.638.000,00	74,99
200		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JUWIRING	96.360.000,00	90.870.000,00	94,30
201		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN JUWIRING	2.875.000,00	750.000,00	26,09
202		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN JUWIRING	58.758.000,00	51.766.800,00	88,10
203		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KALIKOTES	2.665.696.808,00	2.218.013.213,00	83,21
204		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KALIKOTES	65.000.000,00	64.898.100,00	99,84
205		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KALIKOTES	92.400.000,00	85.552.050,00	92,59
206		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KALIKOTES	168.000.000,00	150.771.900,00	89,75
207		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KALIKOTES	63.000.000,00	58.247.820,00	92,46
208		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGANOM	2.156.465.226,00	1.608.246.488,00	74,58
209		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGANOM	54.805.000,00	48.959.400,00	89,33
210		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGANOM	242.206.347,00	239.570.750,00	98,91
211		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGANOM	148.550.000,00	134.841.900,00	90,77
212		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGANOM	39.540.000,00	35.639.600,00	90,14

213		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KARANGANOM	137.092.000,00	127.721.700,00	93,16
214		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGDOWO	2.650.332.934,00	2.278.371.057,00	85,97
215		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGDOWO	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00
216		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGDOWO	359.000.000,00	348.876.300,00	97,18
217		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGDOWO	126.000.000,00	120.567.500,00	95,69
218		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGDOWO	10.000.000,00	9.499.000,00	94,99
219		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KARANGDOWO	68.500.000,00	56.884.500,00	83,04
220		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGNONGKO	2.476.937.886,00	2.036.849.109,00	82,23
221		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGNONGKO	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14
222		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGNONGKO	80.000.000,00	73.842.000,00	92,30
223		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGNONGKO	180.000.000,00	175.330.000,00	97,41
224		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGNONGKO	176.000.000,00	171.664.850,00	97,54
225		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KARANGNONGKO	75.500.000,00	69.155.000,00	91,60
226		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEBONARUM	2.562.573.720,00	2.261.039.612,00	88,23
227		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KEBONARUM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
228		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEBONARUM	105.800.000,00	105.797.000,00	100,00
229		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KEBONARUM	89.400.000,00	89.400.000,00	100,00
230		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KEBONARUM	198.100.000,00	181.900.000,00	91,82
231		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KEBONARUM	32.750.000,00	32.663.200,00	99,73
232		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMALANG	2.265.107.515,00	1.788.245.289,00	78,95
233		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KEMALANG	5.950.000,00	5.850.000,00	98,32
234		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEMALANG	80.658.200,00	79.771.500,00	98,90
235		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KEMALANG	134.175.000,00	130.165.000,00	97,01
236		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KEMALANG	175.500.000,00	171.766.425,00	97,87
237		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KEMALANG	72.726.874,00	72.549.000,00	99,76
238		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KLATEN SELATAN	84.200.000,00	83.969.200,00	99,73
239		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KLATEN SELATAN	2.692.325.473,00	2.332.807.582,00	86,65
240		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KLATEN SELATAN	1.590.000,00	1.587.400,00	99,84
241		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KLATEN SELATAN	84.200.000,00	83.969.200,00	99,73
242		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KLATEN SELATAN	102.403.000,00	102.353.000,00	99,95
243		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KLATEN SELATAN	171.899.000,00	170.138.900,00	98,98
244		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KLATEN SELATAN	91.000.000,00	90.909.900,00	99,90
245		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KLATEN TENGAH	129.300.000,00	128.730.300,00	99,56
246		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KLATEN TENGAH	5.993.520.058,00	5.074.221.290,00	84,66
247		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KLATEN TENGAH	2.500.000,00	2.455.200,00	98,21
248		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KLATEN TENGAH	129.300.000,00	128.730.300,00	99,56
249		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KLATEN TENGAH	92.500.000,00	92.484.500,00	99,98

250		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KLATEN TENGAH	36.677.500,00	36.479.500,00	99,46
251		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KLATEN TENGAH	132.755.000,00	129.697.250,00	97,70
252		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KLATEN UTARA	3.629.019.727,00	3.141.107.954,00	86,56
253		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KLATEN UTARA	10.000.000,00	9.787.200,00	97,87
254		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KLATEN UTARA	116.576.000,00	116.210.400,00	99,69
255		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KLATEN UTARA	120.000.000,00	117.498.000,00	97,92
256		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KLATEN UTARA	165.000.000,00	156.541.800,00	94,87
257		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KLATEN UTARA	26.000.000,00	25.894.600,00	99,59
258		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MANISRENGGO	2.746.945.896,00	2.291.685.962,00	83,43
259		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN MANISRENGGO	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
260		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN MANISRENGGO	67.540.000,00	66.965.600,00	99,15
261		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN MANISRENGGO	147.000.000,00	146.102.700,00	99,39
262		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN MANISRENGGO	7.000.000,00	6.942.400,00	99,18
263		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN MANISRENGGO	198.730.000,00	174.154.850,00	87,63
264		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN NGAWEN	2.328.626.601,00	1.997.047.342,00	85,76
265		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN NGAWEN	9.916.000,00	9.378.500,00	94,58
266		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN NGAWEN	95.000.000,00	93.680.000,00	98,61
267		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN NGAWEN	374.388.000,00	371.168.650,00	99,14
268		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN NGAWEN	2.975.000,00	2.950.000,00	99,16
269		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN NGAWEN	106.372.500,00	95.280.200,00	89,57
270		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PEDAN	2.111.354.019,00	1.797.155.660,00	85,12
271		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PEDAN	5.000.000,00	4.979.900,00	99,60
272		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PEDAN	186.999.000,00	179.740.300,00	96,12
273		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PEDAN	314.000.000,00	309.736.800,00	98,64
274		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PEDAN	88.000.000,00	85.785.350,00	97,48
275		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN POLANHARJO	2.429.449.821,00	2.068.956.316,00	85,16
276		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN POLANHARJO	15.458.000,00	15.423.000,00	99,77
277		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN POLANHARJO	213.123.161,00	212.909.600,00	99,90
278		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN POLANHARJO	101.400.000,00	101.399.900,00	100,00
279		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN POLANHARJO	175.177.000,00	171.417.800,00	97,85
280		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN POLANHARJO	94.040.000,00	93.874.000,00	99,82
281		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PRAMBANAN	2.919.029.227,00	2.516.643.378,00	86,22
282		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PRAMBANAN	4.000.000,00	3.738.000,00	93,45
283		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PRAMBANAN	70.000.000,00	63.287.500,00	90,41
284		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PRAMBANAN	106.000.000,00	104.756.200,00	98,83
285		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PRAMBANAN	183.000.000,00	177.718.500,00	97,11
286		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PRAMBANAN	115.528.000,00	107.966.700,00	93,46

287		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TRUCUK	2.382.533.293,00	1.997.445.504,00	83,84
288		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TRUCUK	4.180.000,00	3.819.300,00	91,37
289		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TRUCUK	269.581.000,00	252.032.900,00	93,49
290		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TULUNG	2.519.064.202,00	1.983.390.392,00	78,74
291		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TULUNG	103.102.070,00	95.148.570,00	92,29
292		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TULUNG	85.375.500,00	80.915.000,00	94,78
293		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TULUNG	208.236.200,00	198.792.339,00	95,46
294		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN TULUNG	109.137.015,00	105.551.350,00	96,71
295		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WEDI	2.823.761.390,00	2.513.543.719,00	89,01
296		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WEDI	3.000.000,00	2.999.500,00	99,98
297		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WEDI	107.400.000,00	107.398.700,00	100,00
298		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WEDI	157.715.000,00	157.682.650,00	99,98
299		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN WEDI	20.500.000,00	20.489.500,00	99,95
300		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN WEDI	238.597.000,00	229.728.000,00	96,28
301		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WONOSARI	2.892.533.088,00	2.404.631.410,00	83,13
302		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WONOSARI	5.000.000,00	4.766.750,00	95,34
303		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WONOSARI	351.510.280,00	332.675.005,00	94,64
304		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WONOSARI	109.400.000,00	105.630.000,00	96,55
305		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN WONOSARI	10.000.000,00	9.405.000,00	94,05
306		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN WONOSARI	71.500.000,00	63.340.000,00	88,59
307		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.211.516.760,00	6.057.961.448,00	73,77
308		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.933.655.393,00	5.630.776.466,00	94,90
309		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.988.433.783,00	4.863.333.496,00	97,49
310		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	42.674.809.023,00	40.190.710.365,00	94,18
311		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	26.057.245.021,00	23.129.886.737,00	88,77
312		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	49.808.433.456,00	42.979.572.903,00	86,29
313		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	11.455.097.000,00	9.397.999.479,00	82,04
314		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	4.554.993.550,00	3.656.961.602,00	80,28

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN KLATEN
PER 31 DESEMBER 2023

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	314.000.000,00	296.447.395,00	94,41
2	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.242.170.000,00	1.191.900.475,00	95,95
3	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	1.650.000.000,00	1.617.682.750,00	98,04
4	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	1.185.400.000,00	1.100.052.220,00	92,80
5	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	200.000.000,00	194.788.260,00	97,39
6	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	288.990.450,00	277.769.685,00	96,12
7	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	156.599.070,00	153.299.820,00	97,89
8	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	222.367.000,00	208.705.500,00	93,86
9	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	8.449.540.883,00	7.712.881.737,00	91,28
10	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	2.354.742.000,00	2.261.185.120,00	96,03
11	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	2.477.113.000,00	2.385.063.554,00	96,28
12	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	7.181.575.600,00	6.139.399.621,00	85,49
13	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	5.898.100.000,00	5.807.823.278,00	98,47
14	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	1.453.300.000,00	1.359.268.072,00	93,53
15	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN	946.500.000,00	875.874.280,00	92,54
16	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.648.678.000,00	7.755.603.900,00	72,83
17	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	50.000.000,00	25.434.000,00	50,87
18	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	36.600.000,00	35.466.513,00	96,90
19	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	245.000.000,00	204.031.409,00	83,28
20	PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	4.475.000.000,00	4.392.016.692,00	98,15
21	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.799.467.000,00	91.950.379.894,00	94,02
22	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.893.894.000,00	2.798.093.280,00	96,69
23	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.873.000.000,00	19.172.559.613,00	91,85
24	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000,00	202.579.700,00	57,88
25	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	0,00
26	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000,00	924.396.310,00	77,12
27	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.544.149.000,00	3.147.150.680,00	88,80

28	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.015.479.600,00	7.653.179.248,00	95,48
29	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.321.315.648,00	64.891.785.537,00	77,88
30	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.910.000.000,00	1.727.745.625,00	90,46
31	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.703.820.000,00	2.662.249.715,00	98,46
32	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.171.175.900,00	724.607.978,00	61,87
33	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.485.000.000,00	1.232.740.552,00	83,01
34	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.659.000.000,00	10.434.398.406,00	89,50
35	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.150.060.000,00	1.896.442.827,00	88,20
36	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	-	0,00
37	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.782.000.000,00	5.193.541.020,00	89,82
38	PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	17.768.702.000,00	16.809.564.992,00	94,60
39	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	210.314.531.595,00	202.211.622.417,00	96,15
40	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	109.404.387.647,00	100.251.554.971,00	91,63
41	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.367.336.270,00	6.659.207.673,00	64,23
42	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.520.000.000,00	3.309.251.730,00	94,01
43	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.238.350.000,00	2.071.645.092,00	92,55
44	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.024.517.000,00	1.618.649.789,00	79,95
45	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.628.648.804,00	8.822.412.684,00	91,63
46	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.708.145.000,00	6.272.314.113,00	81,37
47	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.659.000.000,00	10.434.398.406,00	89,50
48	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.150.060.000,00	1.896.442.827,00	88,20
49	PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.600.065.600,00	1.559.592.368,00	97,47
50	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	210.314.531.595,00	202.211.622.417,00	96,15
51	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN	4.074.464.000,00	3.488.374.300,00	85,62
52	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	24.523.965.000,00	19.584.315.500,00	79,86
53	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN	85.000.000,00	81.974.650,00	96,44
54	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	109.404.387.647,00	100.251.554.971,00	91,63
55	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1.565.021.000,00	1.426.533.285,00	91,15

56	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	664.146.000,00	566.962.850,00	85,37
57	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	998.984.000,00	972.071.450,00	97,31
58	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.082.256.164,00	18.095.304.787,00	90,11
59	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920,00	269.425.197,00	83,71
60	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	724.322.000,00	648.895.779,00	89,59
61	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	177.547.000,00	105.011.000,00	59,15
62	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	590.000.000,00	526.500.300,00	89,24
63	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200.275.000,00	66.414.300,00	33,16
64	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / KEWILAYAHAN	186.468.900,00	176.046.850,00	94,41
65	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / KEWILAYAHAN	9.154.182.499,00	8.807.027.744,00	96,21
66	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / KEWILAYAHAN	3.975.494.250,00	3.838.151.830,00	96,55
67	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / KEWILAYAHAN	2.510.827.200,00	2.392.679.999,00	95,29
68	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / KEWILAYAHAN	2.704.985.699,00	2.469.712.800,00	91,30
69	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	931.606.972,00	653.632.850,00	70,16
70	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.655.044.065,00	1.423.393.266,00	86,00
71	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	765.714.530.507,00	524.650.124.263,00	68,52
72	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.291.116.075,00	5.979.964.264,00	95,05

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				
	1	**Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**	**206.368.000,00**	**190.576.499,00**	**92,35**
		Belanja Operasi	**206.368.000,00**	**190.576.499,00**	**92,35**
		Barang dan Jasa	206.368.000,00	190.576.499,00	92,35
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	**Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**	**338.000.000,00**	**337.995.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**338.000.000,00**	**337.995.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	338.000.000,00	337.995.000,00	100,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	**Pengendalian Program KKBPK**	**80.000.000,00**	**78.800.000,00**	**98,50**
		Belanja Operasi	**80.000.000,00**	**78.800.000,00**	**98,50**
		Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.800.000,00	98,50
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	**Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK**	**557.550.000,00**	**521.840.180,00**	**93,60**
		Belanja Operasi	**557.550.000,00**	**521.840.180,00**	**93,60**
		Barang dan Jasa	557.550.000,00	521.840.180,00	93,60
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				
	1	**Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	**360.000.000,00**	**232.820.000,00**	**64,67**
		Belanja Operasi	**360.000.000,00**	**232.820.000,00**	**64,67**
		Barang dan Jasa	360.000.000,00	232.820.000,00	64,67
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	**6.117.300.000,00**	**5.825.015.400,00**	**95,22**
		Belanja Operasi	**6.117.300.000,00**	**5.825.015.400,00**	**95,22**
		Barang dan Jasa	6.117.300.000,00	5.825.015.400,00	95,22
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	**Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	**189.400.000,00**	**183.976.800,00**	**97,14**
		Belanja Operasi	**189.400.000,00**	**183.976.800,00**	**97,14**
		Barang dan Jasa	189.400.000,00	183.976.800,00	97,14
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA STUNTING			**7.848.618.000,00**	**7.371.023.879,00**	**93,91**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI RELAISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKIRAN EKSTREM
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			
1	**Pengadaan Perlengkapan Siswa**	**900.000.000,00**	**878.732.000,00**	**97,64**
	Belanja Operasi	**900.000.000,00**	**878.732.000,00**	**97,64**
	Barang dan Jasa	900.000.000,00	878.732.000,00	97,64
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**	**98.200.000,00**	**77.767.000,00**	**79,19**
	Belanja Operasi	**98.200.000,00**	**77.767.000,00**	**79,19**
	Barang dan Jasa	98.200.000,00	77.767.000,00	79,19
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	**80.142.451.810,00**	**78.375.495.043,00**	**97,80**
	Belanja Operasi	**67.612.238.572,00**	**66.033.091.175,00**	**97,66**
	Barang dan Jasa	48.719.438.572,00	47.277.541.917,00	97,04
	Belanja Hibah	18.892.800.000,00	18.755.549.258,00	99,27
	Belanja Modal	**12.530.213.238,00**	**12.342.403.868,00**	**98,50**
	Belanja Peralatan dan Mesin	9.175.843.395,00	8.859.286.207,00	96,55
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.354.369.843,00	3.483.117.661,00	103,84
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			
1	**Pengadaan Perlengkapan Siswa**	**1.671.157.000,00**	**1.648.003.150,00**	**98,61**
	Belanja Operasi	**1.671.157.000,00**	**1.648.003.150,00**	**98,61**
	Barang dan Jasa	1.671.157.000,00	1.648.003.150,00	98,61
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**	**146.635.000,00**	**64.906.300,00**	**44,26**
	Belanja Operasi	**146.635.000,00**	**64.906.300,00**	**44,26**
	Barang dan Jasa	146.635.000,00	64.906.300,00	44,26
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**	**55.320.591.594,00**	**54.521.154.103,00**	**98,55**
	Belanja Operasi	**46.997.633.779,00**	**46.361.010.265,00**	**98,65**
	Barang dan Jasa	38.172.433.779,00	37.639.999.659,00	98,61
	Belanja Hibah	8.825.200.000,00	8.721.010.606,00	98,82
	Belanja Modal	**8.322.957.815,00**	**8.160.143.838,00**	**98,04**
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.295.564.072,00	4.191.911.914,00	97,59
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.027.393.743,00	3.968.231.924,00	98,53
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			
1	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	**19.111.200.000,00**	**17.744.112.000,00**	**92,85**
	Belanja Operasi	**19.111.200.000,00**	**17.744.112.000,00**	**92,85**
	Barang dan Jasa	19.111.200.000,00	17.744.112.000,00	92,85
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			
1	**Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan**	**50.000.000,00**	**49.465.650,00**	**98,93**
	Belanja Operasi	**50.000.000,00**	**49.465.650,00**	**98,93**
	Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.465.650,00	98,93
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			
1	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan**	**1.442.300.000,00**	**1.440.313.800,00**	**99,86**
	Belanja Operasi	**1.442.300.000,00**	**1.440.313.800,00**	**99,86**
	Barang dan Jasa	19.800.000,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	1.422.500.000,00	1.440.313.800,00	101,25
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			
1	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**120.623.000,00**	**119.733.800,00**	**99,26**

		Belanja Operasi	**120.623.000,00**	**119.733.800,00**	**99,26**
		Barang dan Jasa	120.623.000,00	119.733.800,00	99,26
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**98.346.000,00**	**91.042.000,00**	**92,57**
		Belanja Operasi	**98.346.000,00**	**91.042.000,00**	**92,57**
		Barang dan Jasa	98.346.000,00	91.042.000,00	92,57
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**133.000.000,00**	**132.076.200,00**	**99,31**
		Belanja Operasi	**133.000.000,00**	**132.076.200,00**	**99,31**
		Barang dan Jasa	133.000.000,00	132.076.200,00	99,31
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**	**49.032.000,00**	**46.750.750,00**	**95,35**
		Belanja Operasi	**49.032.000,00**	**46.750.750,00**	**95,35**
		Barang dan Jasa	49.032.000,00	46.750.750,00	95,35
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**35.000.000,00**	**34.020.000,00**	**97,20**
		Belanja Operasi	**35.000.000,00**	**34.020.000,00**	**97,20**
		Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.020.000,00	97,20
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**123.890.000,00**	**115.967.600,00**	**93,61**
		Belanja Operasi	**119.090.000,00**	**112.072.600,00**	**94,11**
		Barang dan Jasa	119.090.000,00	112.072.600,00	94,11
		Belanja Modal	**4.800.000,00**	**3.895.000,00**	**81,15**
		Belanja Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	3.895.000,00	81,15
	7	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**41.384.000,00**	**39.981.550,00**	**96,61**
		Belanja Operasi	**41.384.000,00**	**39.981.550,00**	**96,61**
		Barang dan Jasa	41.384.000,00	39.981.550,00	96,61
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	8	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**407.718.750,00**	**377.220.000,00**	**92,52**
		Belanja Operasi	**407.718.750,00**	**377.220.000,00**	**92,52**
		Barang dan Jasa	407.718.750,00	377.220.000,00	92,52
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	9	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**1.234.827.000,00**	**1.014.565.800,00**	**82,16**
		Belanja Operasi	**1.226.227.000,00**	**1.009.525.800,00**	**82,33**
		Barang dan Jasa	1.226.227.000,00	1.009.525.800,00	82,33
		Belanja Modal	**8.600.000,00**	**5.040.000,00**	
		Belanja Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	5.040.000,00	
	10	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**	**34.000.000,00**	**31.449.800,00**	**92,50**
		Belanja Operasi	**34.000.000,00**	**31.449.800,00**	**92,50**
		Barang dan Jasa	34.000.000,00	31.449.800,00	92,50
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	11	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**150.000.000,00**	**146.137.500,00**	**97,43**
		Belanja Operasi	**150.000.000,00**	**146.137.500,00**	**97,43**
		Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.137.500,00	97,43
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	12	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**961.980.000,00**	**930.305.200,00**	**96,71**
		Belanja Operasi	**961.980.000,00**	**930.305.200,00**	**96,71**
		Barang dan Jasa	461.980.000,00	431.133.000,00	93,32
		Belanja Hibah	500.000.000,00	499.172.200,00	99,83
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	**621.970.000,00**	**587.953.700,00**	**94,53**
		Belanja Operasi	**621.970.000,00**	**587.953.700,00**	**94,53**
		Barang dan Jasa	621.970.000,00	587.953.700,00	94,53
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**	**18.630.000,00**	**15.230.000,00**	**81,75**
		Belanja Operasi	**18.630.000,00**	**15.230.000,00**	**81,75**

		Barang dan Jasa	18.630.000,00	15.230.000,00	81,75
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**762.179.900,00**	**634.331.386,00**	**83,23**
		Belanja Operasi	**762.179.900,00**	**634.331.386,00**	**83,23**
		Barang dan Jasa	762.179.900,00	634.331.386,00	83,23
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	16	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**39.610.729.200,00**	**37.990.569.600,00**	**95,91**
		Belanja Operasi	**39.610.729.200,00**	**37.990.569.600,00**	**95,91**
		Barang dan Jasa	39.610.729.200,00	37.990.569.600,00	95,91
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
7	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				
	1	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)**	**146.134.000,00**	**104.237.270,00**	**71,33**
		Belanja Operasi	**146.134.000,00**	**104.237.270,00**	**71,33**
		Barang dan Jasa	146.134.000,00	104.237.270,00	71,33
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				
	1	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**	**175.000.000,00**	**118.172.228,00**	**67,53**
		Belanja Operasi	**175.000.000,00**	**118.172.228,00**	**67,53**
		Barang dan Jasa	175.000.000,00	118.172.228,00	67,53
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana**	**50.000.000,00**	**40.355.000,00**	**80,71**
		Belanja Operasi	**50.000.000,00**	**40.355.000,00**	**80,71**
		Barang dan Jasa	**50.000.000,00**	**40.355.000,00**	80,71
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				
	1	**Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**947.394.000,00**	**834.920.293,00**	**88,13**
		Belanja Operasi	**947.394.000,00**	**834.920.293,00**	**88,13**
		Barang dan Jasa	147.244.000,00	122.270.293,00	83,04
		Belanja Hibah	800.150.000,00	712.650.000,00	89,06
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**499.863.550,00**	**472.525.216,00**	**94,53**
		Belanja Operasi	**453.063.550,00**	**426.125.216,00**	**94,05**
		Barang dan Jasa	453.063.550,00	426.125.216,00	94,05
		Belanja Modal	**46.800.000,00**	**46.400.000,00**	**99,15**
		Belanja Peralatan dan Mesin	46.800.000,00	46.400.000,00	99,15
10	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**647.000.000,00**	**641.340.852,00**	**99,13**
		Belanja Operasi	647.000.000,00	641.340.852,00	99,13
		Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat**	**1.570.350.000,00**	**1.487.044.840,00**	**94,70**
		Belanja Operasi	**1.570.350.000,00**	**1.487.044.840,00**	**94,70**
		Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
		Barang dan Jasa	818.740.000,00	735.434.840,00	89,83
		Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				
	1	**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,**	**792.387.000,00**	**520.709.428,00**	**65,71**
		Belanja Operasi	**792.387.000,00**	**520.709.428,00**	**65,71**
		Barang dan Jasa	55.587.000,00	48.909.428,00	87,99
		Belanja Bantuan Sosial	736.800.000,00	471.800.000,00	64,03
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	2	**Pemberian Layanan Data dan Pengaduan**	**875.204.000,00**	**764.069.009,00**	**87,30**
		Belanja Operasi	**776.844.000,00**	**667.304.009,00**	**85,90**
		Barang dan Jasa	476.844.000,00	371.804.009,00	77,97
		Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	195.500.000,00	97,75
		Belanja Modal	**98.360.000,00**	**96.765.000,00**	**98,38**
		Belanja Peralatan dan Mesin	98.360.000,00	96.765.000,00	98,38
	3	**Pemberian Layanan Kedaruratan**	**15.000.000,00**	**10.937.250,00**	**72,92**
		Belanja Operasi	**15.000.000,00**	**10.937.250,00**	**72,92**
		Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.937.250,00	72,92
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				
	1	**Penyediaan Permakanan**	**17.500.000,00**	**15.648.100,00**	**89,42**
		Belanja Operasi	**17.500.000,00**	**15.648.100,00**	**89,42**
		Barang dan Jasa	17.500.000,00	15.648.100,00	89,42
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	**312.586.000,00**	**295.446.002,00**	**94,52**
		Belanja Operasi	**312.586.000,00**	**295.446.002,00**	**94,52**
		Barang dan Jasa	312.586.000,00	295.446.002,00	94,52
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Pemberian Layanan Rujukan**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**75.749.184,00**	**94,69**
		Belanja Operasi	**80.000.000,00**	**75.749.184,00**	**94,69**
		Barang dan Jasa	80.000.000,00	75.749.184,00	94,69
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**95.750.000,00**	**87.364.000,00**	**91,24**
		Belanja Operasi	**72.250.000,00**	**63.864.000,00**	**88,39**
		Belanja Pegawai	1.610.000,00	0,00	0,00
		Barang dan Jasa	70.640.000,00	63.864.000,00	90,41
		Belanja Modal	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**100,00**
		Belanja Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00
	3	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**	**9.427.898.804,00**	**8.639.942.500,00**	**91,64**
		Belanja Operasi	**9.427.898.804,00**	**8.639.942.500,00**	**91,64**
		Belanja Pegawai	15.820.000,00	5.040.000,00	31,86
		Barang dan Jasa	9.412.078.804,00	8.634.902.500,00	91,74
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				

	1	**Penyediaan Makanan**	**30.000.000,00**	**1.480.000,00**	**4,93**
		Belanja Operasi	**30.000.000,00**	**1.480.000,00**	**4,93**
		Barang dan Jasa	30.000.000,00	1.480.000,00	4,93
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Penyediaan Sandang**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Operasi	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	0,00
		Barang dan Jasa	28.990.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**	**30.000.000,00**	**23.364.500,00**	**77,88**
		Belanja Operasi	**30.000.000,00**	**23.364.500,00**	**77,88**
		Belanja Pegawai	1.610.000,00	0,00	0,00
		Barang dan Jasa	28.390.000,00	23.364.500,00	82,30
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**	**67.000.000,00**	**13.307.000,00**	**19,86**
		Belanja Operasi	**67.000.000,00**	**13.307.000,00**	**19,86**
		Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00
		Barang dan Jasa	65.590.000,00	11.897.000,00	18,14
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Pelayanan Dukungan Psikososial**	**20.000.000,00**	**7.180.000,00**	**35,90**
		Belanja Operasi	**20.000.000,00**	**7.180.000,00**	**35,90**
		Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.180.000,00	35,90
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				
	1	**Job Fair/Bursa Kerja**	**400.000.000,00**	**370.239.500,00**	**92,56**
		Belanja Operasi	**400.000.000,00**	**370.239.500,00**	**92,56**
		Barang dan Jasa	400.000.000,00	370.239.500,00	92,56
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan**	**100.000.000,00**	**89.741.740,00**	**89,74**
		Belanja Operasi	**100.000.000,00**	**89.741.740,00**	**89,74**
		Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	0,00
		Barang dan Jasa	98.990.000,00	89.741.740,00	90,66
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**	**25.000.000,00**	**17.120.000,00**	**68,48**
		Belanja Operasi	**25.000.000,00**	**17.120.000,00**	**68,48**
		Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	0,00
		Barang dan Jasa	23.990.000,00	17.120.000,00	71,36
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**	**70.000.000,00**	**31.492.250,00**	**44,99**
		Belanja Operasi	**70.000.000,00**	**31.492.250,00**	**44,99**
		Barang dan Jasa	70.000.000,00	31.492.250,00	44,99
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				
	1	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**223.000.000,00**	**207.359.597,00**	**92,99**
		Belanja Operasi	**223.000.000,00**	**207.359.597,00**	**92,99**

		Barang dan Jasa	210.000.000,00	194.359.597,00	92,55
		Belanja Hibah	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				
	1	**Fasilitasi Pendaftaran Penduduk**	**6.000.000,00**	**5.270.000,00**	**87,83**
		Belanja Operasi	**6.000.000,00**	**5.270.000,00**	**87,83**
		Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.270.000,00	87,83
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				
	1	**Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil**	**4.950.000,00**	**4.140.000,00**	**83,64**
		Belanja Operasi	**4.950.000,00**	**4.140.000,00**	**83,64**
		Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.140.000,00	83,64
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				
	1	**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**	**9.619.000,00**	**7.982.500,00**	**82,99**
		Belanja Operasi	**9.619.000,00**	**7.982.500,00**	**82,99**
		Barang dan Jasa	9.619.000,00	7.982.500,00	82,99
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Penyusunan Profil Kependudukan**				
	1	**Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota**	**53.882.000,00**	**51.527.000,00**	**95,63**
		Belanja Operasi	**53.882.000,00**	**51.527.000,00**	**95,63**
		Barang dan Jasa	53.882.000,00	51.527.000,00	95,63
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Perumusan Parameter Kependudukan**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
		Belanja Operasi	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
		Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				
	1	**Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan**	**25.000.000,00**	**24.995.000,00**	**99,98**
		Belanja Operasi	**25.000.000,00**	**24.995.000,00**	**99,98**
		Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.995.000,00	99,98
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH		**220.040.783.608,00**	**212.079.364.191,00**	**96,38**

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.10
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E - PURCHASING 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan**)
1	DINAS PENDIDIKAN	136.277.292.689,00	9.189.726.425,00	6,74	
2	DINAS KESEHATAN	204.279.378.267,00	26.562.312.418,00	13,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67.321.451.899,00	11.692.543.075,00	17,37	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.678.807.243,00	1.223.306.140,00	18,32	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.628.299.599,00	3.214.899.057,00	30,25	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.974.332.022,00	1.204.875.556,00	30,32	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.882.222.567,00	4.550.176.073,00	16,93	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.016.083.135,00	4.522.911.669,00	23,78	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.818.254.300,00	2.085.989.500,00	54,63	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.420.235.310,00	1.440.453.850,00	19,41	
11	DINAS PERHUBUNGAN	39.589.890.636,00	5.318.245.220,00	13,43	
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.051.139.723,00	1.247.706.920,00	7,77	
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10.455.016.885,00	846.951.643,00	8,10	
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.085.756.111,00	732.905.724,00	23,75	
15	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	20.076.965.533,00	3.206.080.080,00	15,97	
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.409.508.203,00	291.427.255,00	20,68	
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	17.363.250.707,00	12.968.691.690,00	74,69	
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	19.035.503.855,00	9.915.104.000,00	52,09	
19	SEKRETARIAT DAERAH	33.262.984.819,00	10.775.398.658,00	32,39	
20	SEKRETARIAT DPRD	28.005.226.931,00	6.142.652.331,00	21,93	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	5.228.339.951,00	955.601.910,00	18,28	
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	15.210.848.716,00	2.607.190.750,00	17,14	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.605.592.803,00	1.136.780.020,00	17,21	
24	INSPEKTORAT DAERAH	4.710.080.129,00	728.875.848,00	15,47	
25	KECAMATAN	26.765.986.133,00	10.156.397.309,00	37,95	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.590.504.576,00	363.892.315,00	22,88	
TOTAL		**734.742.952.742,00**	**133.081.095.436,00**	**18,11**	

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN B.11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TA 2023

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD(%)	
1								
2								
3								
4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5								
6								
7								
	TOTAL							

BUPATI KLATEN

cap

ttd

SRI MULYANI